

Didorong AI dan Ekspor, Ekonomi Malaysia Q2-2026 Tumbuh 6%

Jumat, 14 Augustus 2026 15:10 WIB

Netty Ismail dan Kok Leong Chan

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/118362/didorong-ai-dan-ekspor-ekonomi-malaysia-q2-2026-tumbuh-6/2>

Bloomberg, Perekonomian Malaysia tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal II 2026, didorong ekspor yang lebih kuat dari ekspektasi terkait booming kecerdasan buatan (AI) serta permintaan domestik yang tetap stabil. Pertumbuhan tersebut mampu meredam dampak perang di Timur Tengah.

Produk domestik bruto (PDB) Malaysia tumbuh 6% pada periode April-Juni 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut bank sentral Malaysia dan departemen statistik. Angka tersebut lebih tinggi dari estimasi awal sebesar 5,8%, yang juga menjadi median proyeksi dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom.

Perekonomian Malaysia diperkirakan tumbuh sekitar 5% pada 2026, kata Gubernur Bank Negara Malaysia Abdul Rasheed Ghaffour dalam konferensi pers di Kuala Lumpur. Ia tetap mempertahankan kisaran proyeksi bank sentral sebesar 4%-5%. Menurut bank sentral, kekuatan sektor-sektor ekspor utama, terutama semikonduktor, diperkirakan menopang pertumbuhan ekspor meski ketidakpastian eksternal meningkat.

Ketika ditanya apakah pertumbuhan ekonomi dapat melampaui 5%, Rasheed mengatakan, “Sekitar 5%, bisa di atas 5%, atau di bawah 5%.”

United Overseas Bank Ltd menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Malaysia sepanjang tahun setelah data tersebut dirilis. Ringgit, yang tetap stabil sepanjang tahun ini meski rupiah dan peso Filipina menyentuh level terendah sepanjang masa, tidak banyak berubah di level 4,09 per dolar AS setelah data tersebut diumumkan pada Jumat (14/8).

Permintaan domestik yang kuat dan lonjakan ekspor semikonduktor membantu melindungi ekonomi Malaysia dari gangguan akibat perang AS terhadap Iran. Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa Malaysia akan tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara tahun ini. Investasi asing yang berkelanjutan dan proyek-proyek baru juga membantu menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. China, mitra dagang terbesar Malaysia, mencatat pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan pada kuartal terakhir.

Pengiriman produk elektronik dan listrik serta peningkatan ekspor minyak dan gas membantu mendorong perekonomian, menurut Bank Negara Malaysia (BNM) dan departemen statistik. Sebagian besar pelaku usaha masih mampu memperoleh bahan baku dan belum menghadapi gangguan produksi akibat konflik di Timur Tengah, meski terdapat sejumlah indikasi percepatan pembelian dan penimbunan untuk menambah persediaan.

Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian kembali berada di zona positif, mencerminkan peningkatan produksi gas alam, menurut BNM.

Sektor pertanian berkontraksi 3,7% pada kuartal II karena produksi kelapa sawit kembali “normal” setelah mencatat hasil panen yang kuat tahun lalu, menurut BNM dan departemen statistik. Dampak siklus El Niño, yakni perubahan suhu di Samudra Pasifik, terhadap sektor pertanian Malaysia kemungkinan baru terasa tahun depan. Namun, dampaknya pada masa lalu relatif terbatas, kata Rasheed.

Dalam mempertahankan proyeksinya, BNM menyebut permintaan domestik yang tangguh, didukung peningkatan pendapatan yang stabil dan kebijakan yang terus berjalan, serta pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi. Pada paruh pertama tahun ini, ekonomi Malaysia tumbuh 5,7%.

Angka pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan mendorong UOB menaikkan proyeksi PDB Malaysia 2026 menjadi 5,1% dari sebelumnya 4,5%, kata ekonom bank tersebut, Julia Goh.

“Ini mengindikasikan perlambatan pertumbuhan menjadi sekitar 4,5% pada paruh kedua 2026 di tengah risiko penurunan yang masih berlangsung, termasuk potensi kembali meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, gangguan berkepanjangan pada jalur pelayaran utama, perkembangan kondisi El Niño, meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, serta efek basis yang kurang menguntungkan,” ujarnya.

Bank sentral memperkirakan inflasi tetap moderat di kisaran 1,5%-2,5% tahun ini meski harga komoditas global berada pada level tinggi.

Ketahanan ekonomi Malaysia mendorong sejumlah analis memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga. Di pasar swap, pelaku pasar memperkirakan peluang sekitar 80% BNM menaikkan suku bunga dalam 12 bulan ke depan, berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg setelah laporan PDB dirilis.

Rasheed mengatakan BNM tidak terburu-buru mengambil keputusan.

“Prioritas utama kami adalah stabilitas harga, kemudian prospek pertumbuhan,” kata Rasheed. “Kami akan melihat data yang ada saat itu dan kemudian melakukan apa yang diperlukan.”

Bessent: AS Siapkan Sanksi Ekonomi Terbesar ke Iran Pekan Depan

Jumat, 14 Agustus 2026 13:10 WIB

Jon Herskovitz

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118348/bessent-as-siapkan-sanksi-ekonomi-terbesar-ke-iran-pekan-depan/2>

Bloomberg, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyatakan bahwa AS akan segera mengumumkan langkah-langkah ekonomi luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya terhadap Iran. Langkah ini makin mempertegas upaya pemerintahan Trump untuk memaksa Teheran menyerah melalui tekanan finansial.

"Nantikan pengumuman lebih lanjut pekan depan karena kami akan menerapkan langkah-langkah yang belum pernah terlihat dalam sejarah isolasi ekonomi terhadap suatu negara," ujar Bessent pada Kamis (13/8) dalam sebuah wawancara dengan Newsmax.

Bessent mengatakan langkah tersebut akan menjadi bagian dari "pukulan ganda" yang mencakup kelanjutan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Perekonomian Iran telah mengalami pukulan signifikan akibat perang, dengan sebagian besar kapasitas industrinya hancur dan ekspor minyak mentah anjlok akibat blokade AS. Namun, Iran telah bertahan menghadapi gelombang sanksi yang sebelumnya gagal memaksa Teheran mengubah program nuklirnya ataupun melepaskan kendali atas Selat Hormuz.

Dalam beberapa hari terakhir, Donald Trump kembali memperkuat dorongan tekanan ekonomi terhadap Iran. AS kini menghadapi kekurangan amunisi yang dibutuhkan dan tampaknya berhati-hati untuk memperluas kampanye militernya.

Trump menyampaikan kepada Axios pada akhir pekan lalu bahwa ia memilih untuk "menahan diri" terhadap Iran. "Kami hanya memantau Iran dengan inflasi besarnya dan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki uang," ungkapnya.

Di sisi lain, Iran telah merestrukturisasi militernya menjadi lebih agresif di luar negeri saat pembicaraan untuk mengakhiri perang dengan AS masih menemui jalan buntu. Hal ini menjadi sinyal bahwa Teheran tengah bersiap menghadapi era konflik regional yang berkepanjangan.

Hingga kini, hanya ada sedikit tanda-tanda terobosan antara Iran dan AS terkait Selat Hormuz. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim kendali atas jalur perairan vital—tempat satu per lima pasokan minyak dan gas dunia dikirimkan—dan saling menuntut konsesi yang sulit untuk dipenuhi.

Sementara itu, harga minyak mentah tertahan dari kenaikan, dengan Brent diperdagangkan di dekat level US\$87 per barel setelah merosot 2,2% pada sesi sebelumnya.

Pada akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa kesepakatan dengan Oman untuk membuka jalur pelayaran melalui selat tersebut sudah "sangat dekat," tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Namun, kedua belah pihak belum resmi mengumumkan kesepakatan tersebut. Mohsen Rezaee, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran yang baru diangkat, menegaskan bahwa kesepakatan apa pun dengan Oman akan tetap terpisah dari pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh.

Hammack The Fed Ragukan Tren Inflasi, Dorong Kenaikan Suku Bunga

Jumat, 14 Agustus 2026 11:30 WIB

Jonnelle Marte

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118326/hammack-the-fed-ragukan-tren-inflasi-dorong-kenaikan-suku-bunga/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Bank of Cleveland Beth Hammack mempertanyakan apakah tanda-tanda perlambatan inflasi baru-baru ini akan berlanjut. Dia juga kembali menyerukan kenaikan suku bunga saat ini.

"Saya senang melihat angka-angka tersebut turun—itu hal yang baik—tetapi saya tidak yakin tren itu akan berlanjut, atau angkanya akan cukup rendah sehingga bisa membawa kita kembali ke angka 2%," kata Hammack, Kamis (13/8).

Berbicara dalam sebuah acara bersama Dayton Area Chamber of Commerce di Kettering, Ohio, dia juga mengatakan, "Saya pikir kita perlu bertindak sekarang" terkait suku bunga.

Hammack menjadi salah satu pejabat yang berbeda pendapat dalam keputusan bulan lalu untuk mempertahankan suku bunga. Dia mengatakan lebih memilih The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Kepada Yahoo Finance pada Senin, Hammack mengatakan suku bunga saat ini belum "cukup membatasi" perekonomian dan diperlukan "sejumlah" penyesuaian suku bunga untuk

mengembalikan inflasi ke target. Namun, dia tidak ingin terlebih dahulu menentukan di level mana suku bunga harus berhenti.

Data resmi yang dirilis Rabu menunjukkan inflasi inti, yang tidak memperhitungkan kategori pangan dan energi yang cenderung bergejolak, naik 0,2% dibandingkan bulan sebelumnya. Ekonom menilai kenaikan tersebut masih tergolong rendah sehingga mengurangi tekanan bagi para pembuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga.

Pasar Tenaga Kerja AS Berfluktuasi, Klaim Pengangguran Naik

Jumat, 14 Agustus 2026 06:40 WIB

Julia Fanzeres

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118280/pasar-tenaga-kerja-as-berfluktuasi-klaim-pengangguran-naik/2>

Bloomberg, Klaim tunjangan pengangguran di AS meningkat pada pekan lalu setelah sebelumnya bertahan di dekat level terendah dalam sejarah.

Jumlah klaim awal naik 9.000 menjadi 209.000 pada pekan yang berakhir 8 Agustus, menurut data Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis Kamis (13/8). Angka ini berada di atas estimasi rata-rata dalam survei ekonom Bloomberg yang memproyeksikan angka 202.000.

Sementara itu, klaim berkelanjutan, yang menjadi indikator jumlah orang yang menerima tunjangan pengangguran, turun menjadi 1,78 juta pada pekan sebelumnya.

Peningkatan pengajuan tunjangan tersebut dapat mencerminkan volatilitas yang lazim terjadi pada musim panas, ketika pola pekerjaan musiman dan waktu libur sering memengaruhi data. Para ekonom akan menunggu data lebih dari satu pekan sebelum menilai kembali stabilitas pasar tenaga kerja yang belakangan ini terjadi.

Rata-rata bergerak empat pekan untuk klaim baru, indikator yang membantu meredam volatilitas, tidak berubah di level 199.000 pada pekan lalu.

Harga Pangan dan Energi Turun, Inflasi IHP AS Melandai

Jumat, 14 Agustus 2026 06:20 WIB

Augusta Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118277/harga-pangan-dan-energi-turun-inflasi-ihp-as-melandai/2>

Bloomberg, Inflasi tingkat grosir AS melambat lebih dari perkiraan pada Juli 2026 seiring penurunan biaya energi dan pangan. Kondisi ini kemungkinan memberi waktu lebih bagi Federal Reserve (The Fed) untuk menilai tekanan harga dalam beberapa pertemuan mendatang.

Indeks harga produsen (producer price index/IHP) naik 4,7% dibandingkan Juli 2025, melambat dari kenaikan tahunan 5,5% pada Juni, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dirilis Kamis (13/8). Secara bulanan, IHP tidak berubah.

Tidak termasuk pangan dan energi, indeks harga produsen naik 4,2% secara tahunan dan 0,2% dibandingkan Juni.

Laporan IHP tersebut menyusul data indeks harga konsumen (IHK) yang menunjukkan inflasi melandai, menambah bukti bahwa guncangan harga energi akibat perang mulai mereda. Hasil ini memberikan ruang lebih luas bagi para pejabat The Fed untuk menimbang tekanan inflasi yang masih tersisa terhadap perlambatan dalam penyerapan tenaga kerja baru-baru ini.

Imbal hasil Treasury turun dan indeks S&P 500 dibuka menguat setelah investor mengurangi taruhan terhadap kenaikan suku bunga pada September. The Fed akan memperoleh tambahan data harga konsumen dan produsen sebelum mengambil keputusan kebijakan berikutnya.

“Laporan IHP tidak mengubah gambaran besar inflasi: angkanya masih terlalu tinggi, tetapi inflasi inti lebih rendah dibandingkan inflasi utama, dan keduanya membaik pada Juli,” kata Bill Adams, kepala ekonom AS di Fifth Third Commercial Bank, dalam sebuah catatan. “Laporan IHK dan IHP Juli membuat peluang sempit bagi The Fed untuk menahan suku bunga tetap stabil pada keputusan September.”

Data Kamis menunjukkan harga energi turun 3,1% dari Juni, menjadi penurunan untuk bulan kedua berturut-turut. Sementara itu, harga pangan mencatat penurunan terbesar sejak awal tahun.

Biaya transportasi dan pergudangan turun 1,8% pada Juli, penurunan terbesar sejak April 2023. Data tersebut menambah bukti bahwa dampak tingginya biaya bahan bakar mulai berkurang.

Sejumlah komponen IHP juga menjadi perhatian khusus The Fed karena digunakan dalam penghitungan indikator inflasi yang menjadi acuannya, yakni indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (personal consumption expenditures/PCE).

Kategori-kategori tersebut memberikan sinyal beragam. Biaya jasa pengelolaan portofolio melonjak paling tinggi dalam lebih dari setahun, sementara biaya layanan rawat jalan rumah sakit juga meningkat tajam. Harga jasa dokter dan perawatan rawat inap rumah sakit relatif stabil, sedangkan indikator tarif penerbangan turun paling besar sejak awal tahun lalu.

Biro Analisis Ekonomi AS dijadwalkan merilis data harga PCE Juli, beserta angka pendapatan dan belanja, pada 26 Agustus. Setelah data IHP dirilis, ekonom di Citigroup Inc, Morgan Stanley, dan Jefferies memperkirakan indeks harga PCE inti Juli naik 0,2%.

Pada saat yang sama, laporan tersebut juga menunjukkan tekanan harga yang terus berasal dari sumber lain tahun ini, yakni pusat data. Harga komponen dan aksesoris elektronik naik hampir mencapai rekor sebesar 28% pada Juli dibandingkan setahun sebelumnya. Harga komputer dan peralatan komputer melonjak dengan rekor kenaikan 9,8% secara tahunan.

Indikator tekanan inflasi pada tahap awal produksi—yakni harga barang olahan untuk permintaan antara, tidak termasuk pangan dan energi—naik pada laju paling rendah sejak November.

Rincian laporan IHP mengenai margin jasa perdagangan grosir dan ritel juga terus dicermati untuk melihat sejauh mana perusahaan menyerap biaya terkait tarif atau meneruskannya kepada konsumen. Pada Juli, margin sedikit menurun setelah melonjak pada bulan sebelumnya.

Meskipun Mahkamah Agung AS pada awal tahun ini membatalkan banyak tarif, pemerintahan Trump mencari jalur lain untuk mengenakan tarif terhadap impor. Gedung Putih baru-baru ini mengumumkan tarif setidaknya 10% terhadap impor dari sebagian besar mitra dagang utama.

Laporan pemerintah terpisah yang dirilis Kamis menunjukkan jumlah permohonan tunjangan pengangguran meningkat pada pekan lalu, tetapi masih berada pada level rendah. Data yang dirilis pekan lalu menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja sebenarnya lebih lemah dari perkiraan sebelumnya.

Inflasi Final Prancis di Juli Meningkat Jadi 2,1% Secara Tahunan

Jumat, 14 Agustus 2026 19:57 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-final-prancis-di-juli-meningkat-jadi-21-secara-tahunan>

KONTAN.CO.ID - PARIS. Tingkat inflasi Prancis kembali menunjukkan tren kenaikan. Lonjakan harga di sektor energi akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah jadi salah satu penyebab kenaikan inflasi negeri menara Eiffel ini.

Berdasarkan data final yang dirilis lembaga statistik resmi Prancis Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), Jumat (14/8), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 tercatat naik sebesar 2,1% secara tahunan. Realisasi tersebut lebih kencang dibandingkan laju inflasi pada bulan sebelumnya yang berada di level 1,8%.

Akselerasi inflasi tahunan ini utamanya dipicu oleh lonjakan harga di sektor energi dan jasa. Laporan INSEE mencatat, harga energi melambung hingga 12,6% secara tahunan pada Juli 2026.

Rilis INSEE mencatat, kenaikan tersebut lebih tinggi dari kenaikan 11,0% pada Juni. Sementara itu, inflasi di sektor jasa juga terkerek naik menjadi 2,2% dari sebelumnya 1,9%.

Di sisi lain, harga bahan pangan mencatatkan sedikit percepatan dengan kenaikan 1,0%, berbanding 0,9% pada bulan sebelumnya. Harga produk tembakau terpantau stabil dengan pertumbuhan 3,3% secara tahunan.

Adapun harga produk manufaktur masih mencatatkan deflasi sebesar 0,7%. Kendati begitu, laju penurunannya melandai dari kontraksi 1,1% yang tercatat pada Juni lalu.

Bila ditelisik secara bulanan, inflasi Prancis pada Juli 2026 naik sebesar 0,6%, sejalan dengan konsensus proyeksi ekonom. Realisasi tersebut berbalik arah dari deflasi 0,3% yang terjadi pada Juni.

INSEE menyoroti bahwa kenaikan harga bulanan ini sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, yakni masuknya periode liburan musim panas.

Tingginya aktivitas liburan membuat harga layanan jasa melesat 1,6% secara bulanan. Kenaikan ini didominasi oleh meroketnya tarif jasa transportasi sebesar 10,9% dan jasa akomodasi penginapan sebesar 12,7% secara bulanan.

Selain sektor jasa, harga energi juga berbalik naik 2,3% secara bulanan. Kenaikan ini didorong oleh menguatnya harga produk minyak bumi, yang naik 2,3% secara bulanan, serta gas yang naik 6,6% secara bulanan.

Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih luas pada Juli berhasil diredam oleh periode diskon musim panas. Momentum diskon ini menekan harga produk manufaktur turun 2,0% dibandingkan bulan Juni. Penurunan tertajam terjadi pada produk pakaian dan alas kaki yang harganya anjlok hingga 9,8% secara bulanan.

Sejalan dengan inflasi umum, inflasi inti, yakni inflasi yang tidak memperhitungkan komponen harga energi dan pangan yang bergejolak, ikut merangkak naik menjadi 1,3% secara tahunan, dibandingkan 1,0% pada Juni.

Sementara itu, Indeks Harga Konsumen Harmonisasi (IPCH) yang menjadi standar pengukuran laju inflasi oleh European Central Bank (ECB) juga tercatat menguat menjadi 2,4% secara tahunan, dari sebelumnya 2,0% pada bulan Juni.

Data Awal, Ekonomi Uni Eropa Melesat 0,5% Secara Kuartalan di Kuartal II-2026

Jumat, 14 Agustus 2026 16:37 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/data-awal-ekonomi-uni-eropa-melesat-05-secara-kuartalan-di-kuartal-ii-2026>

KONTAN.CO.ID - LUKSEMBURG. Kinerja makroekonomi Eropa mulai menunjukkan akselerasi dan daya tahan pada paruh pertama tahun ini. Ini terlihat dari data pertumbuhan ekonomi awal untuk kawasan pengguna mata uang euro tersebut.

Berdasarkan rilis pes badan statistik Uni Eropa Eurostat, Jumat (14/8), data awal produk domestik bruto (PDB) kawasan pengguna euro pada kuartal II-2026 tercatat tumbuh sebesar 0,4% secara kuartalan. Realisasi tersebut sesuai konsensus proyeksi analis, dan tidak berubah dibanding pertumbuhan di kuartal sebelumnya.

Tren positif ini juga dibukukan oleh kawasan Uni Eropa (UE) secara keseluruhan, di mana PDB-nya berekspansi sedikit lebih tinggi, yakni mencapai 0,5% secara kuartalan. Sekadar info, Uni Eropa terdiri dari 27 negara, sementara kawasan pengguna euro terdiri dari 21 negara.

Capaian pada periode April hingga Juni 2026 ini menandai pemulihan mesin ekonomi yang lebih solid dibandingkan awal tahun. Sebagai catatan, pada kuartal I-2026 lalu, laju PDB kawasan euro hanya mampu jalan di tempat alias stagnan di level 0,0%. Sementara PDB UE saat itu hanya merangkak tipis sebesar 0,1%.

Sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi, struktur pasar tenaga kerja di Benua Biru juga menunjukkan stabilitas yang positif. Laporan Eurostat mencatat, tingkat penyerapan tenaga kerja di kawasan euro maupun di Uni Eropa sama-sama tumbuh tipis sebesar 0,1% pada kuartal II-2026 dibandingkan kuartal sebelumnya.

Realisasi tersebut tidak berubah dibanding catatan pada kuartal sebelumnya. Realisasi tersebut juga sesuai dengan konsensus proyeksi ekonom, yang memprediksi penyerapan tenaga kerja tumbuh 0,1%.

Angka ini mengindikasikan, kebangkitan aktivitas bisnis dan dunia usaha mulai memberikan limpahan efek langsung terhadap penambahan serapan lapangan kerja formal, kendati lajunya masih moderat.

Data awal kuartal kedua ini memberikan sinyal optimisme bagi prospek makroekonomi kawasan, sekaligus menjadi indikator krusial bagi European Central Bank (ECB) dalam menakar efektivitas arah kebijakan moneter.

Dengan laju inflasi yang secara bertahap terus disesuaikan, momentum pertumbuhan PDB yang dipadu dengan daya tahan serapan tenaga kerja menjadi modal penting bagi perekonomian Eropa untuk lepas dari bayang-bayang perlambatan.

Pihak Eurostat menegaskan, data awal pertumbuhan PDB dan tenaga kerja yang dirilis pada pertengahan Agustus ini masih merupakan estimasi per hari ke-45 pasca-kuartal berakhir. Data utama masih terbuka untuk direvisi pada saat rilis estimasi reguler yang dijadwalkan terbit pada September dan Oktober mendatang.

Poin Lengkap RAPBN 2027: Asumsi Makro-Fiskal, Sasaran Pembangunan

Jumat, 14 Agustus 2026 20:16 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118452/poin-lengkap-rapbn-2027-asumsi-makro-fiskal-sasaran-pembangunan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, mulai dari target asumsi ekonomi makro, indikator pembangunan, hingga asumsi komponen fiskal nasional.

Dalam perencanaannya, ekonomi Indonesia pada 2027 diyakini bisa mencapai 6%. Target pertumbuhan ekonomi pada 2027 tersebut lebih tinggi dari target dalam APBN 2026 yakni sebesar 5,4%.

Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).

“Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari APBN 2026 5,4%,” tutur Prabowo.

Kemudian inflasi ditargetkan tetap terjaga di 2,5% atau sama seperti dalam APBN 2026. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditargetkan 6,9%, atau tetap sama dan terjaga seperti dalam APBN 2026.

Selanjutnya nilai tukar rupiah ditargetkan Rp17.500/US\$, atau lebih tinggi dari target dalam APBN 2026 sebesar Rp16.500/US\$. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US\$75 ribu per barel per hari, meningkat dari APBN 2026 sebesar US\$70 ribu per barel per hari.

Lifting minyak mentah ditargetkan US\$610.000 per barel per hari, atau masih sama seperti dalam APBN 2026. Kemudian lifting gas bumi ditargetkan sebesar US\$964.000 barel setara minyak per hari, atau turun dari APBN 2026 sebesar US\$984.000 barel setara minyak per hari.

Berikut daftar lengkap asumsi makro RAPBN 2027:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2027

- Pertumbuhan ekonomi: 6%
- Inflasi: 2,5%
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9%
- Nilai tukar: Rp17.500/US\$
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US\$75/barel
- Lifting minyak mentah (RBPH): 610
- Lifting gas bumi (RBSMPH): 954

Postur Fiskal

- Pendapatan negara: Rp3.426 triliun
- Belanja negara: Rp4.097 triliun
- Defisit: Rp671,2 triliun atau 2,40% PDB

Indikator Pembangunan

- Kemiskinan turun ke 6-6,5%

- Pengangguran terbuka: 4,30-4,87%
- Rasio Gini: 0,362-0,367
- Indeks modal manusia: 0,575
- Indeks kesejahteraan petani: 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81%

Purbaya Targetkan Penerimaan Pajak 2027 Rp2.591 T, Melonjak 12%

Jumat, 14 Agustus 2026 20:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118449/purbaya-targetkan-penerimaan-pajak-2027-rp2-591-t-melonjak-12>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun pada 2027. Angka ini melonjak 12,1% dibanding proyeksi penerimaan pajak pada tahun ini, dan tercatat memiliki rasio 9,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya meyakini pemerintah optimis kinerja ekonomi nasional akan tetap solid dan terjaga, seiring dengan stabilitas makroekonomi yang membaik, ditambah dengan dukungan kebijakan pemerintah.

"Sampai data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% Agustus (2026). Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio (rasio pajak) secara signifikan," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam data Kementerian Keuangan, dipaparkan bahwa target pendapatan bea dan cukai tercatat Rp316,6 triliun atau menyusut 1,2%. Angka ini memiliki rasio 1,1% terhadap PDB.

Dari akumulasi penerimaan pajak, bea, dan cukai, diperoleh angka target penerimaan perpajakan pada 2027 yang sebesar Rp2.908 triliun atau meningkat 10,5% dibanding target raihan perpajakan pada 2026. Angka ini tercatat 10,4% terhadap PDB.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak atau biasa disebut dengan istilah PNBP dipatok sebesar Rp517,4 triliun atau merosot 10% dibanding tahun ini. Kemudian, penerimaan hibah ditarget Rp700 miliar atau merosot tajam 56%.

Akumulasi penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah menghasilkan target pendapatan negara yang mencapai Rp3.426 triliun pada tahun depan, atau meningkat 6,8% dibanding target tahun ini. Angka ini tercatat 12,2% terhadap PDB.

"Target pendapatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fisik secara bertahap dan berkelanjutan. Komponen yang kencang adalah penerimaan perpajakan," katanya.

Prabowo: Defisit Juli Naik tipis 0,91% PDB, Pendapatan Tumbuh 21%

Jumat, 14 Agustus 2026 16:21 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118411/prabowo-defisit-juli-naik-tipis-0-91-pdb-pendapatan-tumbuh-21/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Juli 2026 tercatat sebesar 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini meningkat dari defisit hingga semester I-2026 yakni Rp196,5 triliun atau 0,76% terhadap PDB.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).

"Defisit APBN terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB). APBN kita bekerja optimal," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga memaparkan hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Kemudian belanja negara tumbuh kuat atau 18,2% yoy.

"Belanja kita arahkan menjaga beli rakyat, memperkuat pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi," ujarnya.

Prabowo menegaskan, postur tersebut merupakan keberpihakan kepada rakyat. Dia juga akan menjaga disiplin fiskal. Menurutnya, negara tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian fiskal lantaran akan menjalankan keduanya secara bersamaan.

"Kita memilih kedua-duanya, kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara hingga Semester I-2026 sebesar Rp1.459,4 triliun, atau setara 46,3% dari target tahun ini yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi pendapatan negara ini mengalami pertumbuhan sebesar 21,4% year on year (yoy).

"Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola pajak bea dan cukai, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga dan BLU," kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau setara 43,1% dari target pagu APBN. Realisasi ini juga naik 17,8% yoy.

Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp85,1 triliun. Sementara dari sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp452 triliun atau sudah 65,6% dari target APBN 2026.

Rupiah Ditutup Menguat, Kian Dekat ke Rp17.800/US\$

Jumat, 14 Agustus 2026 16:06

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118369/rupiah-ditutup-menguat-kian-dekat-ke-rp17-800-us>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan dengan menguat 0,25% ke Rp17.825/US\$, meski harga minyak Brent kembali terkerek 1,61% ke US\$88,47/barel.

Stabilnya nilai tukar rupiah ditopang oleh ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dengan pembacaan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Lewat pidato hari ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Prabowo juga mencoba kembali memulihkan kepercayaan investor, dengan mengatakan, “kami tidak anti-pasar. Kami tidak bisa seperti itu. Perekonomian didasarkan pada kekuatan pasar.”

Pernyataan tersebut setidaknya menunjukkan pengakuan Prabowo terhadap pentingnya investasi swasta, meski secara pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026 masih lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah.

Dari pasar Asia, rupiah memang belum jadi mata uang dengan penguatan terbesar. Namun setidaknya berhasil mempertahankan momentum positif.

Won Korea Selatan memimpin dengan penguatan 0,52%. Disusul dolar Taiwan 0,4%, yen Jepang 0,2%, dan dolar Singapura juga terapresiasi 0,11%.

Sebaliknya, ringgit Malaysia melemah 0,04%, peso Filipina terpankas 0,15%, dan baht Thailand menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam, 0,16%.

Penguatan rupiah hari ini juga mendapat dukungan risk-on di kawasan, bersamaan dengan meningkatkan perhatian investor pada arah kebijakan ekonomi pemerintah lewat RAPBN 2027.

Selain itu, sinyal dari pasar obligasi juga cukup konstruktif dengan turunnya yield pada hampir semua tenor.

Yield enor 2 tahun turun 10,7 basis poin menjadi 6,83% dan tenor 5 tahun turun 9,5 basis poin menjadi 7,04%. Bahkan yield SUN tenor 10 tahun turun 1,7 basis poin menjadi sekitar 7,20%.

Sebelum penyampaian Nota Keuangan, pemerintah dan DPR telah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%, defisit fiskal 1,8%-2,4% terhadap PDB, serta asumsi rupiah Rp16.800-Rp17.500/US\$.

Pasar kini lebih membutuhkan direction mengenai bagaimana seluruh kebijakan tersebut akan diorkestrasi daripada sekadar angka-angka makro.

RAPBN 2027: Kemiskinan 6,5% dan Pengangguran Terbuka 4,30%

Jumat, 14 Agustus 2026 15:51 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118403/rapbn-2027-kemiskinan-6-5-dan-pengangguran-terbuka-4-30>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menetapkan target kemiskinan pada RUU APBN 2027 turun ke rentang 6,0-6,5%, dibandingkan target APBN 2026 yang dipasang pada 6,5-7,5%.

"Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0-6,5%," ujar Prabowo dalam penyampaian RUU APBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR ke-1, Jumat (14/8/2026).

Selain kemiskinan, Prabowo juga menetapkan target tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2027 turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%.

"Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026," ujar Prabowo.

"Rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575," kata Prabowo menegaskan.

Angka-angka tersebut, kata Presiden Prabowo, akan dijaga dan dilakukan dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten.

"Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan," ujarnya.

"Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan," tegas Prabowo.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menetapkan postur yang lebih hati-hati dengan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2027 di level 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini berada di rentang atas kisaran yang ditetapkan 1,8%-2,4% saat awal penyusunan rencana anggaran negara 2027. Kendati demikian, lebih rendah dibanding target yang dipatok pada 2026 yakni 2,68%, bahkan diproyeksi bisa mencapai 2,94% jika harga minyak dunia terus melonjak sepanjang tahun ini.

RAPBN 2027: Belanja Tembus Rp4.097 Triliun, Defisit 2,4% dari PDB

Jumat, 14 Agustus 2026 15:43 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118365/rapbn-2027-belanja-tembus-rp4-097-triliun-defisit-2-4-dari-pdb/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menargetkan anggaran belanja negara mencapai Rp4.097 triliun pada 2027. Kendati demikian, eksekutif menetapkan postur yang lebih hati-hati dengan target

defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2027 di level 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini berada di rentang atas kisaran yang ditetapkan 1,8%-2,4% saat awal penyusunan rencana anggaran negara 2027. Kendati demikian, lebih rendah dibanding target yang dipatok pada 2026 yakni 2,68%, bahkan diproyeksi bisa mencapai 2,94% jika harga minyak dunia terus melonjak sepanjang tahun ini.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Pemerintah menetapkan target pendapatan negara mencapai Rp3.426 triliun, meningkat dari target pada 2026 yang hanya Rp3.153 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp4.097 triliun lebih tinggi dari APBN 2026 Rp3.842 triliun

“Defisit 2,4% terhadap PDB atau Rp671,2 triliun. Ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Target Ekonomi 6% Prabowo, Ekonom: Dibayangi Tantangan Korupsi dan Lapangan Kerja

Jumat, 14 Agustus 2026 19:28 WIB

Reporter: Prayogi Ikhrwinata, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/target-ekonomi-6-prabowo-ekonom-dibayangi-tantangan-korupsi-dan-lapangan-kerja>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto optimistis perekonomian Indonesia mampu mencatat pertumbuhan hingga 6% pada akhir 2026, melampaui target pemerintah sebesar 5,4%. Optimisme tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Ia menilai kinerja ekonomi Indonesia sepanjang paruh pertama tahun ini menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat.

Menurut Dosen Program Doktor Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina Prima Naomi, penguatan tata kelola pemerintahan dan penciptaan lapangan kerja menjadi tantangan ekonomi Indonesia pada 2027. Dia menilai, pemerintah perlu memperkuat pemberantasan korupsi dan good governance untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, persoalan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan korupsi anggaran. Konflik kepentingan dan penerapan sistem merit yang lemah juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Pemberantasan korupsi dan good governance merupakan pilar utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan,” ujar Prima dalam seminar Universitas Paramadina, Jumat (14/8/2026).

Selain tata kelola, penciptaan lapangan kerja menjadi faktor penting untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. Prima menilai tekanan biaya hidup dan pemutusan hubungan kerja dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam berbelanja.

Dari sisi investasi, pemerintah juga perlu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Menurut Prima, ketidakpastian kebijakan dapat membuat pelaku usaha dan investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

Di sisi lain, realisasi investasi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan.

Menkeu Purbaya Ungkap Tantangan Ekonomi di 2027, Ketidakpastian Global Masih Tinggi

Jumat, 14 Agustus 2026 18:30 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-purbaya-ungkap-tantangan-ekonomi-di-2027-ketidakpastian-global-masih-tinggi>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memperkirakan perekonomian global pada 2027 masih menghadapi dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah memiliki pengalaman dalam merespons berbagai tekanan eksternal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi ketidakpastian global pada 2027.

“Jadi, perekonomian dunia di tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada kondisi yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup,” tutur purbaya dalam konferensi pers, Jumat (14/8/2026).

Purbaya menyebut hingga Agustus 2026 ini pemerintah telah menghadapi berbagai guncangan global, dan dapat meresponsnya dengan berbagai kebijakan yang cukup baik, yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut dia, pengalaman pemerintah dalam menjaga perekonomian selama tiga triwulan terakhir menjadi bekal untuk menjalankan desain kebijakan ekonomi di 2027.

“Jadi, apa yang didesain oleh Bapak Presiden yang dipresentasikan tadi di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini,” kata Purbaya.

Adapun dalam bahan paparannya, perekonomian dunia pada 2027 masih akan menghadapi berbagai risiko struktural dan siklikal yang berpotensi menekan kinerja ekonomi global. Meski pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan membaik, tingkat ketidakpastian masih menjadi perhatian pemerintah.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% secara tahunan yang ditopang oleh konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Ketahanan ekonomi tersebut menjadi basis pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal dan APBN 2027. Pemerintah menempatkan strategi kebijakan fiskal dan APBN sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Strategi tersebut akan difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Namun, pemerintah tetap menaruh perhatian pada kualitas dan keberlanjutan APBN. Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, RAPBN 2027 akan dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara, peningkatan kualitas dan efisiensi belanja, serta pembiayaan anggaran yang inovatif dan prudent.

Prabowo Klaim Sudah Hemat Rp 50 Triliun dari Penutupan BUMN, Target Rp 70 Triliun

Jumat, 14 Agustus 2026 11:29 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-klaim-sudah-hemat-rp-50-triliun-dari-penutupan-bumn-target-rp-70-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintah telah menghemat biaya hingga Rp 50 triliun dari langkah perampangan dan penutupan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan, penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp 70 triliun hingga akhir 2026.

Prabowo mengatakan, penghematan tersebut berasal dari berbagai biaya overhead yang dapat ditekan setelah pemerintah melakukan restrukturisasi BUMN, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan hingga perjalanan dinas.

“Dengan perampangan BUMN, hari ini saja kita telah hemat biaya overhead Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas,” ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, efisiensi tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran terhadap perusahaan negara. Pemerintah sebelumnya menemukan jumlah entitas BUMN yang mencapai 1.074 perusahaan, termasuk anak, cucu hingga cicit perusahaan.

Prabowo mengatakan, pemerintah menilai jumlah tersebut terlalu besar sehingga perlu dilakukan perampangan. Ia pun menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 290 BUMN yang ditutup.

“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” kata Prabowo.

Pemerintah menargetkan, jumlah BUMN yang tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026. Dengan target tersebut, lebih dari 750 BUMN akan ditutup atau dilebur dalam proses restrukturisasi.

“Pada Desember 31 2026, kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, tidak seluruh perusahaan negara akan dipertahankan. Menurutnya, pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang produktif dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Hanya yang produktif dan menciptakan nilai tambah pada rakyat akan dipertahankan,” tegasnya.

Ia mengatakan, perampangan BUMN tersebut dilakukan untuk menghilangkan berbagai biaya yang dinilai tidak produktif sekaligus memperbaiki tata kelola perusahaan negara.

Prabowo bilang, penghematan Rp 50 triliun tersebut memiliki nilai yang besar apabila dialihkan untuk kepentingan masyarakat.

“Kita bisa bayangkan Rp 50 triliun berapa puskesmas yang diperbaiki, berapa sekolah bisa renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa berikan,” katanya.

Karena itu, Prabowo menargetkan efisiensi dari restrukturisasi BUMN dapat terus meningkat hingga akhir tahun.

“Target kita Desember kita harus hemat Rp 70 triliun lebih,” ujar Prabowo.

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Lampau Target 5,4% Tahun Ini

Jumat, 14 Agustus 2026 10:44 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-yakin-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-bisa-lampau-target-54-tahun-ini>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melebihi target 5,4% pada tahun ini.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tumbuh 5,61% dan pada semester I 2026 tumbuh 5,45%.

Prabowo menyebut, pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini.

“Ini adalah pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini,” tutur Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%.

Keyakinan tersebut juga sejalan capaian realisasi investasi, yang pada semester I 2026, mencapai Rp 1.010 triliun dan telah menciptakan 1,4 juta lapangan kerja.

“Tetapi, saya tegaskan, dihadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” jelasnya.

Ia menekankan, pertumbuhan tinggi, tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah, investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat yang paling bawah.

“Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya, kita tidak boleh meninggalkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia anggota G20, tidak pantas ada rakyat kita yang lapar. Bangsa yang kuat, adalah bangsa yang mampu memberikan makan rakyat sendiri,” tandasnya.

Usai Pidato Presiden, Gubernur Ahmd Luthfi Tegaskan Satu Tujuan: Sejahterakan Rakyat

Jumat, 14 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/usai-pidato-presiden-gubernur-ahmd-luthfi-tegaskan-satu-tujuan-sejahterakan-rakyat/>

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh program dan capaian pembangunan di wilayahnya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pihaknya terus mendengarkan dan merespons persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Artinya, kita harus selalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita,” kata Luthfi didampingi Wagub Taj Yasin, se usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 RI, di Gedung Berlian, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden memaparkan sejumlah capaian dan arah pembangunan nasional. Di antaranya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jalan dan jembatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta penguatan swasembada pangan.

Presiden juga menekankan pentingnya kemandirian pangan, agar Indonesia tidak bergantung pada pasokan dari luar, terutama di tengah ketidakpastian global. Saat ini, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Menurut Luthfi, berbagai capaian yang disampaikan Presiden tersebut, harus diikuti langkah nyata oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan hanya capaian angka, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam konteks Jawa Tengah, momentum HUT ke-81 RI yang beriringan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, menjadi pengingat untuk terus meningkatkan hasil pembangunan.

Luthfi menyebut, angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada Maret 2026 angkanya menjadi 9,21 persen. Jumlah itu turun dibanding Maret 2025 yang masih pada angka 9,48 persen. Dengan kondisi tersebut, pihaknya memberikan perhatian penuh kepada sekitar 3,9 juta warga, yang berada dalam kelompok desil 1 sampai dengan 4.

Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,71 persen (year on year) pada triwulan II tahun 2026, atau 5,80% (c-to-c) secara kumulatif pada Semester I-2026. Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut membuat pemerintah provinsi tetap optimistis, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dan ketidakpastian geopolitik.

Senyampang dengan itu, geliat investasi di Jateng juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp110 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 257 ribu orang. Sementara, hingga triwulan II atau semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp48,54 triliun, dengan serapan tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang.

Menurut Luthfi, berbagai capaian di bidang penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja, harus terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan keselarasan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD. (Humas Jateng)*ul

Nawal Yasin Dorong Kader PKK Jateng Kembangkan Usaha Berbasis Potensi Lokal

Jumat, 14 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/nawal-yasin-dorong-kader-pkk-jateng-kembangkan-usaha-berbasis-potensi-lokal/>

SRAGEN – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong kader PKK di 35 kabupaten/ kota untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal di daerah masing-masing.

Menurutnya, potensi yang dimiliki setiap daerah dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga. Upaya itu diperkuat melalui program Kelompok Usaha Berbasis Keluarga (Kapulaga), yang merupakan pengembangan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Hal itu disampaikan Nawal Arafah, saat membuka kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan (SIKK), Desa Karangtengah, Kabupaten Sragen, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, pengembangan kearifan lokal terus didorong, agar program UP2K di Jateng terus berkelanjutan.

“Kita menyusun program UP2K ini yang berkelanjutan, sesuai dengan kearifan lokal di Jawa Tengah, sesuai dengan potensi yang ada, sehingga kita meramu menjadi inovasi program kita sebut sebagai Kapulaga,” kata istri Wakil Gubernur Jateng tersebut.

Nawal menegaskan, pengembangan usaha melalui Kapulaga tidak boleh berhenti pada pelatihan. Kader dan kelompok usaha perlu mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan, mulai dari mengenali potensi, hingga memastikan produk mampu dipasarkan.

Kekuatan kader PKK juga menjadi salah satu modal penting dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Berdasarkan data SIM PKK 2025, terdapat 212.823 unit PKK di tingkat RT, 452.426 dasa wisma, serta sekitar 2,3 juta kader PKK yang tersebar di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

Untuk memastikan pengembangan usaha berjalan berkelanjutan, Kapulaga dilaksanakan melalui empat tahapan.

“Pertama asesmen dulu, kemudian pembentukan kelompok usaha, fasilitasi pelatihan dan dukungan bantuan usaha, keempat pendampingan usaha,” ungkapnya.

Selain penguatan kapasitas usaha, Nawal menyoroti pentingnya memperluas pemasaran produk. Menurutnya, kualitas produk UMKM di Jawa Tengah tidak kalah dengan daerah lain, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

Karena itu, kader yang telah memiliki usaha juga didorong untuk menguasai pemasaran digital. Menurut Nawal, pemanfaatan platform digital dapat menjadi salah satu cara memperluas pasar produk lokal.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jateng ini mencontohkan pengalaman pendampingan Dekranasda Kota Salatiga, yang berhasil meraih omzet Rp13 juta hanya dalam satu jam melalui live shopping.

Nawal optimistis Kabupaten Sragen dapat menjadi salah satu lokasi praktik baik, dalam pengembangan program Kapulaga. Menurutnya, daerah tersebut memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi, salah satunya batik.

“Saya berharap Sragen ini dapat menjadi lokasi praktik baik program Kapulaga. Potensinya sangat banyak, batiknya juga laris manis. Ibu Dekranasda ini selalu aktif pameran di Kriyanusa, Inacraft selalu ikut,” ucapnya.

Melalui penguatan kelompok, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran, Nawal berharap potensi lokal di masing-masing daerah tidak hanya berhenti sebagai produk unggulan, tetapi dapat berkembang menjadi usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat. (At/UI, Diskomdigi Jateng)

Peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah, Dimeriahkan Gerakan Pangan Murah Hingga Job Fair

Jumat, 14 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/peringatan-hari-jadi-ke-81-jawa-tengah-dimeriahkan-gerakan-pangan-murah-hingga-job-fair/>

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Mengusung konsep kolaborasi, peringatan tahun ini membawa tema “Gumregut Nyawiji”, sebagai simbol semangat bersama membangun daerah.

Banyak kegiatan yang disuguhkan untuk masyarakat, mulai gerakan pangan murah, job fair, makan soto dan nasi tumpeng gratis, Jateng Sholawat, Jateng Run, berbagai hiburan gratis, dan lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, tema “Gumregut Nyawiji” diangkat dari filosofi bahasa Jawa, yang bermakna kolaborasi dan gotong royong.

“Semangatnya adalah bareng-bareng membangun Jawa Tengah. Ini selaras dengan arahan Pak Gubernur, bahwa kita harus berkolaborasi dengan semua pihak,” kata Sumarno, di Semarang, Kamis (13/8/2026).

Sumarno menjelaskan, rangkaian peringatan tahun ini dirancang tersebar di beberapa titik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, mulai dari Kota Semarang hingga Kabupaten Boyolali.

Rencananya, Pemprov Jateng akan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Jadi yang diselenggarakan di Kabupaten Boyolali, pada 19 Agustus 2026.

Untuk kegiatan di Boyolali, panitia menyajikan kuliner khas berupa 2.500 porsi soto Boyolali, dan 2.000 porsi nasi tumpeng secara gratis.

“Boyolali dikenal sebagai Kota Soto dan Kota Sambal Tumpang. Nanti setelah lari, masyarakat dan peserta bisa menikmati sekitar 4.500 porsi soto dan nasi tumpeng gratis,” kata Sumarno.

Selain upacara, Pemprov Jateng juga menggelar Pameran UMKM di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada 20–22 Agustus. Pameran itu melibatkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dari berbagai wilayah.

“Volume kegiatan ini sangat besar, hampir semua halaman kantor gubernur penuh tenda. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan momen ini, untuk hadir dan membela produk lokal,” ujar Sumarno.

Tidak hanya di kompleks Gubernuran, pusat kegiatan hiburan dan budaya juga difokuskan di kawasan PRPP Semarang. Berbagai perlombaan, atraksi seni budaya, hingga pertunjukan musik gratis untuk menghibur warga. Di lokasi yang sama, Pemprov Jateng menyelenggarakan kegiatan Fun Run, dengan rute melintasi kawasan wisata Puri Maerokoco.

Untuk melengkapi aspek spiritual, Pemprov Jateng menjadwalkan acara Jawa Tengah Bersholawat, di halaman Kantor Gubernur, sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sumarno menegaskan, seluruh rangkaian acara ini disajikan dari dan untuk masyarakat. Selain memberikan hiburan, kegiatan ini diharapkan memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah.

“Kami sangat berharap masyarakat hadir dan berpartisipasi. Event ini bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi kami ingin ada dampak ekonomi nyata, khususnya bagi pelaku UMKM di Jawa Tengah,” pungkasnya. (Humas Jateng)*ul

Ekonomi Jateng Tumbuh 5,71 Persen, BI Dorong Pertumbuhan Makin Inklusif

Jumat, 14 Agustus 2026

Penulis M. Nurrozikan

<https://zonapasar.com/ekonomi-jateng-tumbuh-571-persen-bi-dorong-pertumbuhan-makin-inklusif-63166>

SEMARANG – Perekonomian Jawa Tengah menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 5,65 persen dan nasional 5,29 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang permintaan domestik yang tetap kuat, investasi yang terus berlanjut, serta kinerja sejumlah sektor utama daerah yang masih terjaga.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan capaian tersebut menunjukkan perekonomian Jawa Tengah masih memiliki daya tahan di tengah berbagai tantangan eksternal.

“Perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen,” kata M. Noor Nugroho dalam Media Briefing Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa Tengah.

Menurut dia, pertumbuhan tersebut perlu terus dijaga melalui penguatan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2026 tumbuh 4,31 persen (yoy). Pertumbuhan itu antara lain ditopang meningkatnya mobilitas masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan periode libur panjang.

Investasi juga mencatat pertumbuhan kuat sebesar 8,84 persen (yoy), seiring berlanjutnya pembangunan kawasan industri dan Proyek Strategis Nasional. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh 15,69 persen (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang industri pengolahan yang tumbuh 5,03 persen (yoy), perdagangan 7,52 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,80 persen.

Inflasi Jateng Tetap Terkendali

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, stabilitas harga Jawa Tengah juga tetap terjaga. Inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,60 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1$ persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88 persen.

M. Noor mengatakan pengendalian inflasi terus dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah melalui TPID baik di tingkat provinsi maupun seluruh 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah terus berkoordinasi dan bersinergi memperkuat pengendalian inflasi secara end-to-end, terutama pada komoditas pangan strategis,” ujarnya.

Strategi pengendalian inflasi dilakukan melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Langkah tersebut tidak hanya diarahkan untuk merespons gejolak harga dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur pasokan dan distribusi. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan produktivitas pangan strategis, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit, penguatan outlet pangan dan BUMD sebagai offtaker, serta penguatan dan digitalisasi data sebagai sistem peringatan dini.

Risiko Ekonomi Masih Diwaspadai

Meski prospek ekonomi masih positif, sejumlah risiko tetap perlu menjadi perhatian. Hasil liaison Bank Indonesia dengan pelaku usaha pada triwulan II 2026 menunjukkan dunia usaha masih optimistis terhadap prospek ekonomi ke depan.

Namun, kenaikan biaya produksi dan pembiayaan, keandalan energi, serta dinamika perdagangan global masih menjadi tantangan.

“Penguatan permintaan domestik, keberlanjutan investasi, serta penciptaan iklim usaha dan pembiayaan yang kondusif menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” kata M. Noor.

Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, KPwBI se-Jawa Tengah terus melakukan asesmen, riset, serta menyediakan data dan informasi sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

Riset yang dilakukan antara lain terkait daya saing kawasan industri, ketahanan pasokan telur dan daging ayam, sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta quick survey untuk memperdalam isu terkini seperti antisipasi dampak El Nino terhadap inflasi pangan dan pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) di Jawa Tengah.

Bank Indonesia juga melakukan survei pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan (KPJU) se-Jawa Tengah.

QRIS Dorong Digitalisasi Ekonomi

Penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Digitalisasi dinilai mampu membuat transaksi pembayaran semakin efisien dan efektif, baik dari sisi waktu maupun biaya.

Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta atau terbanyak ketiga secara nasional. Adapun jumlah merchant mencapai 4,52 juta, menempatkan Jawa Tengah di posisi keempat secara nasional.

Bank Indonesia terus memperluas akseptasi pembayaran digital melalui Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 yang berlangsung 11–17 Agustus 2026 dan dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Di Jawa Tengah, kegiatan PQN diisi dengan berbagai aktivitas untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat menggunakan pembayaran digital.

“Melalui digitalisasi, transaksi pembayaran menjadi sangat efisien dan efektif, tidak hanya dari sisi waktu namun juga biaya,” ujarnya.

Selain digitalisasi, pengembangan UMKM juga terus dilakukan melalui program onboarding, UMKM ekspor, kluster ketahanan pangan, kemandirian pesantren, sertifikasi halal, hingga UMKM hijau.

Literasi Rupiah Diperluas

Bank Indonesia juga terus memperkuat edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai Rupiah. Pada paruh pertama 2026, sebanyak 49 kegiatan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP Rupiah) telah digelar dengan menjangkau 29.909 peserta di Jawa Tengah.

Bank Indonesia juga menyalurkan Rp3,62 miliar uang layak edar ke empat pulau melalui kegiatan yang sekaligus menghadirkan layanan kas keliling dan edukasi CBP Rupiah.

Perluasan literasi Rupiah dilakukan secara kolaboratif melalui berbagai kegiatan pendidikan, keagamaan, budaya, dan sport tourism di Semarang, Solo Raya, Eks-Karesidenan Pekalongan, serta Banyumas Raya.

Kegiatan tersebut antara lain Rupiah Borobudur Playon, Adipati QRIS Run di Solo, Tegal City Run di Tegal, dan QRIS Purwokerto Run di Purwokerto.

Sementara untuk menjaga kualitas pengelolaan uang Rupiah hingga wilayah terluar, Bank Indonesia melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Kepulauan Karimunjawa.

Ekonomi Syariah Terus Diperkuat

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

KPwBI se-Jawa Tengah bersama pemerintah daerah dan mitra strategis memperkuat literasi serta ekosistem halal atau halal value chain (HVC), sekaligus mendorong pengembangan usaha syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu langkahnya dilakukan melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES), termasuk zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di lingkungan sekolah.

Pendampingan sertifikasi halal juga diberikan kepada penyelia, auditor, juru sembelih, pelaku usaha, serta rumah potong hewan dan rumah potong unggas (RPH/RPU).

Berbagai aktivasi ekonomi syariah juga digelar untuk pelaku usaha, pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif, pesantren, dan masyarakat melalui Olimpiade Aksi dan Syiar Ekonomi Syariah (OASE) 2026, rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah Jawa (FESYAR Jawa), serta Festival Jateng Syariah (FAJAR) 2026.

FAJAR menjadi ruang kolaboratif untuk mendorong literasi ekonomi syariah, memperkuat halal value chain, menyediakan layanan sertifikasi halal satu pintu, memperluas akses keuangan syariah, mendorong digitalisasi wakaf, serta memperkuat aspek keberlanjutan.

Program serupa juga dilakukan di wilayah kerja KPwBI Solo melalui Syiar Ekonomi Syariah dan Pesantren Solo Raya (SYEKATEN), KPwBI Purwokerto melalui Semarak Festival Ekonomi Syariah (SELARAS), serta KPwBI Tegal melalui Syariah Festival Ekonomi Tegal (SYAFAAT).

M. Noor menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif terus diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Sementara kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital,” katanya.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dan program lintas wilayah bersama pemerintah daerah serta seluruh mitra strategis.

Fokusnya meliputi menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan literasi Rupiah, serta mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sinergi tersebut menjadi penting agar kinerja tinggi ekonomi Jawa Tengah dapat terus dijaga sekaligus diterjemahkan menjadi pertumbuhan yang semakin inklusif, berdaya tahan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Porprov Jateng 2026 Siap Digelar, Gubernur Ahmad Luthfi Bidik Efek Ekonomi

Jumat, 14 Agustus 2026 09:17 WIB

Penulis: Franciskus Ariel Setiাপutra, Editor: M Syofri Kurniawan

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1263135/porprov-jateng-2026-siap-digelar-gubernur-ahmad-luthfi-bidik-efek-ekonomi>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong dunia usaha ikut memiliki dan menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII tahun 2026 yang akan digelar di Semarang Raya pada Oktober mendatang.

Ajang empat tahunan tersebut dinilai Ahmad Luthfi sangat penting untuk memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.

"Kami ingin dunia usaha ikut serta memiliki kegiatan ini, yakni Porprov Jateng yang akan digelar pada tahun ini. Ajang ini sangat bermanfaat bagi para atlet Jateng untuk meraih prestasi tertinggi," ujar Ahmad Luthfi dalam rilis yang diterima tribunjateng.com, Jumat (14/8/2026) pagi.

Lebih lanjut Gubernur mengemukakan, sinergi antara KONI Jateng, Dispora, pemerintah kabupaten/kota serta dukungan dunia usaha menjadi kunci sukses pesta olahraga multievent terbesar tingkat provinsi tersebut.

"Bersama-sama kita pasti bisa menyukseskan Porprov 2026 ini," tegas Gubernur.

Dalam pertemuan dengan pimpinan perusahaan milik pemerintah dan swasta di Rumah Dinas Gubernur Jateng baru-baru ini, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng, Sujarwanto Dwiarmoko, juga berkesempatan memaparkan persiapan Porprov Jateng.

"Porprov bukan hanya sarana untuk ukur prestasi atlet, tetapi juga katalisator penting penggerak ekonomi daerah. Ajang multievent ini mendorong sektor pariwisata, okupansi hotel, kuliner, hingga

omzet UMKM lokal melalui kedatangan ribuan atlet, ofisial, dan penonton dari berbagai wilayah. Karena itu kami akan terus mematangkan pelaksanaan Porprov ini," terang Sujarwanto Dwiarmoko.

Selain pimpinan perusahaan milik pemerintah dan swasta, lima kepala daerah tuan rumah Porprov Jateng 2026 juga hadir.

Mereka juga mendukung penuh pelaksanaan dan kesuksesan Porprov 2026 ini.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menyatakan bahwa sebagai salah satu tuan rumah pihaknya sudah siap menggelar dan menyukseskan Porprov Jateng.

Venue-venue yang akan digunakan untuk pertandingan atau perlombaan sudah siap.

"Venue-venue yang akan digunakan di Kendal sudah diverifikasi oleh TD (Technical Delegate). Semuanya tidak ada masalah. Bukan itu saja, kami juga sudah menyiapkan diri sebagai tempat penutupan Porprov," kata Dyah Kartika Permanasari.

Adapun Head of Public Policy and Government Relation Central West Java Gojek, Saiful Bakhtiar, menegaskan Gojek siap mendukung Porprov Jateng 2026.

Sekitar 15 ribu mitra disiapkan untuk memperlancar mobilitas atlet, ofisial, dan penonton selama ajang ini digelar.

"Ajang ini sangat bermanfaat bagi mitra kami. Karena akan ada mobilitas tinggi dari venue ke venue di lima kabupaten/kota yang jadi tuan rumah. Karena itu, kami sangat mendukung dan siap berpartisipasi dalam Porprov ini," tandas Saiful Bakhri. (*)

Kanada-AS Masih Jauh dari Kesepakatan Dagang, Tarif 50% Mengintai

Sabtu, 15 Agustus 2026 07:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/kanada-as-masih-jauh-dari-kesepakatan-dagang-tarif-50-mengintai>

KONTAN.CO.ID - OTTAWA. Kanada dan Amerika Serikat (AS) masih belum mencapai titik temu dalam perundingan perdagangan menjelang batas waktu pemberlakuan tarif baru AS sebesar 50% pada 19 Agustus 2026.

Menteri Kanada yang bertanggung jawab atas hubungan perdagangan dengan AS, Dominic LeBlanc, menyebut kedua negara masih jauh dari kesepakatan yang dapat disetujui oleh Perdana Menteri Kanada.

Pernyataan tersebut disampaikan LeBlanc dalam pengarahannya kepada Advisory Committee on Canada-U.S. Economic Relations pada Jumat (14/8/2026), menurut sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut.

LeBlanc saat ini berada di Washington bersama kepala negosiator perdagangan Kanada dan sejumlah pejabat untuk melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah AS. Intensitas negosiasi juga meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

LeBlanc telah bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer sebanyak empat kali dalam tiga pekan. Kantor LeBlanc menyatakan sang menteri akan tetap berada di Washington sepanjang akhir pekan untuk melanjutkan perundingan.

Tarif baru sebesar 50% tersebut akan mencakup barang-barang Kanada senilai hampir US\$20 miliar atau sekitar 5,2% dari total ekspor Kanada ke AS.

Berbeda dengan sejumlah tarif yang sebelumnya diberlakukan Presiden AS Donald Trump, tarif baru ini akan dikenakan terhadap produk yang memenuhi syarat untuk memperoleh perlakuan tarif khusus berdasarkan United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

Kondisi tersebut dinilai menambah risiko terhadap perekonomian Kanada karena produk yang sebelumnya mendapatkan manfaat dari perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara berpotensi ikut terkena tarif tinggi.

Kanada-AS Intensifkan Negosiasi

Menurut sumber tersebut, LeBlanc mengatakan kepada komite penasihat bahwa pertemuan dengan mitra AS berlangsung setiap hari.

"Jarak mereka masih cukup jauh dari kesepakatan yang dapat ditandatangani oleh Perdana Menteri," kata sumber tersebut.

Dalam perundingan seperti ini, lanjut sumber itu, "tidak ada yang disepakati sampai semuanya disepakati."

Kedua negara memang terus melakukan pembahasan pada tingkat teknis. Namun, sejumlah persoalan utama masih belum menemukan kesepakatan.

Gabriel Brunet, juru bicara LeBlanc, menolak memberikan komentar mengenai perkembangan perundingan tersebut.

Sementara itu, CEO Canadian Chamber of Commerce Candace Laing, yang juga merupakan anggota komite penasihat yang menerima pengarahan dari LeBlanc, mengatakan kedua negara tengah mengupayakan kesepakatan sementara.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah tarif AS yang sebelumnya telah diberlakukan sekaligus mengatasi ancaman tarif 50% yang akan mulai berlaku.

Laing mengatakan sejumlah pertemuan antara kedua pihak telah dijadwalkan sepanjang akhir pekan.

LeBlanc juga memberikan pengarahan kepada para menteri perdagangan dari provinsi dan teritori Kanada pada Jumat mengenai perkembangan terbaru negosiasi dengan AS.

Sejumlah Isu Masih Jadi Hambatan

Beberapa isu utama masih menjadi penghambat kesepakatan perdagangan Kanada-AS.

Dari sisi AS, salah satu persoalan utama adalah tarif yang diberlakukan Kanada terhadap kendaraan bermotor AS. Washington juga mempermasalahkan mekanisme pembagian kuota produk susu serta keputusan sejumlah provinsi Kanada yang menolak menyimpan produk minuman beralkohol asal AS.

Sementara itu, Kanada menginginkan AS menurunkan tarif terhadap produk baja dan aluminium asal Kanada.

Perbedaan kepentingan tersebut membuat perundingan berlangsung alot meskipun komunikasi antara kedua negara terus dilakukan secara intensif.

Dengan tenggat 19 Agustus yang semakin dekat, Kanada dan AS menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan sebelum tarif 50% mulai diberlakukan. Jika tidak tercapai titik temu, kebijakan tarif tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap perdagangan bilateral dan perekonomian Kanada.

RI Resmi Ekspor 200.000 Ton Beras ke Malaysia, Mentan: Kebutuhan Dalam Negeri Aman

Sabtu, 15 Agustus 2026 15:24 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/ri-resmi-ekspor-200000-ton-beras-ke-malaysia-mentan-kebutuhan-dalam-negeri-aman>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia resmi melakukan ekspor beras ke Malaysia sebanyak 200.000 ton. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ekspor tersebut tidak akan mengganggu kebutuhan beras dalam negeri.

Amran mengatakan, pemerintah telah menghitung kondisi produksi dan ketersediaan beras secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor. Menurutnya, data produksi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras sampai dengan Oktober mencapai 30 juta ton.

“Sesuai BPS, produksi sampai hari ini diperkirakan sampai Oktober karena estimasi karena ada standing crop, itu kurang lebih 30 juta ton,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Jum'at (14/8/2026).

Ia menjelaskan, produksi beras tahun ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan produksi pada 2025. Perhitungan tersebut juga mempertimbangkan adanya tanaman padi yang saat ini sudah berada di lahan dan akan memasuki masa panen.

Menurut Amran, pemerintah juga memperhitungkan sejumlah sumber ketersediaan beras, mulai dari produksi yang akan dipanen, stok di Bulog, hingga beras yang berada di masyarakat dan sektor hotel, restoran, serta kafe (Horeka) yang diprediksi akan mencapai 26 juta ton.

Di sisi lain, kebutuhan beras masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 2,5 juta hingga 2,6 juta ton per bulan. Dengan ketersediaan hingga 26 juta ton, Amran menyebut pasokan tersebut secara matematis dapat memenuhi kebutuhan sekitar 10 bulan.

“Kalau 25 juta atau 26 juta ton berarti 10 bulan kan. Clear. Clear kan? 10 bulan berarti cukup beras kita untuk ke depan ya, belum dihitung yang ditanam hari ini,” jelas Amran.

Perhitungan tersebut juga belum memasukkan produksi dari tanaman yang masih akan ditanam hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah memperkirakan terdapat masa panen besar yang akan kembali berlangsung mulai Februari.

Dengan kondisi tersebut, Amran memastikan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan ekspor tanpa mengorbankan kebutuhan domestik.

“Sedangkan sekarang kita ekspor bukan impor, ekspor,” tegasnya.

Senada dengan Mentan, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan ekspor beras ke Malaysia tetap dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Ia memastikan Bulog telah menghitung kemampuan stok yang dimiliki, termasuk dengan adanya rencana ekspor hingga 200.000 ton.

“Ya tadi seiring dengan arahan dari Pak Menteri Pertanian tetap memprioritaskan, memprioritaskan adalah untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu,” ujar Ahmad.

Menurutnya, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini masih berada di level yang cukup tinggi. Stok Bulog disebut mencapai sekitar 5,25 juta ton.

“Namun kita sudah menghitung dengan potensi kalau hanya 1.000 pendahuluan ini bahkan sampai dengan 200.000 stok kita masih banyak karena stok Bulog bisa mencapai saat ini adalah 5,25 juta ton bahkan 5,26 juta ton sampai dengan hari ini jadi tidak ada masalah,” katanya.

Ahmad menambahkan, prinsip yang sama juga akan diterapkan apabila Indonesia nantinya melakukan ekspor beras ke negara lain. Salah satu negara yang saat ini disebut tengah dalam tahap penjajakan adalah Singapura.

Menurut Ahmad, Bulog belum melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Singapura terkait permintaan beras tersebut. Bulog baru berencana melanjutkan komunikasi dengan Kamar Dagang Singapura dalam waktu dekat.

“Kami baru akan berkomunikasi dengan Kamar Dagang Singapura. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawaban,” ujarnya.

Ahmad mengatakan, komunikasi dengan pihak Singapura sebelumnya telah dilakukan melalui Kedutaan Besar Singapura di Indonesia. Pembahasan lebih lanjut akan ditindaklanjuti setelah rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia memastikan, apabila nantinya terdapat kesepakatan ekspor dengan Singapura, Bulog akan tetap melihat kondisi kebutuhan beras nasional sebagai prioritas utama.

“Insyaallah kita bisa dukung sepanjang tidak mengganggu kebutuhan nasional dalam rangka menghadapi El Nino maupun bantuan pangan dan lain sebagainya,” pungkas Ahmad.

IKN Makin Dilirik Investor, Komitmen Swasta Tembus Rp74,54 Triliun

Sabtu, 15 Agustus 2026 09:44 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/ikn-makin-dilirik-investor-komitmen-swasta-tembus-rp7454-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aktivitas investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus menunjukkan perkembangan. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat komitmen realisasi investasi swasta telah mencapai Rp74,54 triliun hingga 7 Agustus 2026, yang berasal dari 67 investor dalam dan luar negeri.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan investasi swasta merupakan salah satu dari empat skema pembiayaan pembangunan IKN. Tiga skema lainnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta hibah.

"Kalau tentang keberlanjutan IKN, bagi kami sebagai Otorita tetap melaksanakan tugas sesuai yang diberikan. Untuk financing sekarang ini ada empat skema, APBN, KPBU, investasi swasta, dan hibah. Semuanya berjalan, dan investasi swasta ini yang cukup menggembirakan karena mulai banyak investor yang masuk," ujar Basuki dalam media briefing di city hall IKN, Kalimantan Timur, Jumat (14/8/2026).

Sejumlah investor baru juga mulai merealisasikan proyek di kawasan IKN. Salah satunya PT Start Bright International Investment asal China yang menyiapkan investasi sekitar Rp1,25 triliun untuk membangun empat tower apartemen.

Menurut Basuki, pembangunan proyek tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, lebih dari 100 unit apartemen yang dikembangkan Start Bright telah dipesan.

"Start Bright dari China sekitar Rp1,25 triliun untuk empat tower. Sekarang sudah mulai berjalan dan sudah lebih dari 100 apartemen yang dipesan. Ini cukup mengejutkan bagi kami," katanya.

Selain investor asal China, OIKN mencatat investor dari Korea Selatan yang menyiapkan investasi sekitar Rp2,5 triliun. Lion Group juga berencana membangun pusat pelatihan serta fasilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) di kawasan sekitar Bandara IKN.

Lion Group menyiapkan lahan sekitar 30 hektare untuk pengembangan fasilitas MRO tersebut. Basuki mengatakan rencana tersebut berkembang setelah Lion Group melihat potensi Bandara IKN dalam mendukung aktivitas penerbangan dan pemeliharaan pesawat.

"Lion Group awalnya ingin membuat training center. Setelah melihat potensinya, mereka juga ingin membangun MRO sekitar 30 hektare. Kami sudah menghubungkan dengan Badan Bank Tanah karena lahan di sekitar bandara dikuasai Bank Tanah," ujar Basuki.

Menurut Basuki, Bandara IKN memiliki landasan pacu sepanjang sekitar 3 kilometer dengan lebar 45 meter. Infrastruktur tersebut dinilai mampu mendukung operasional pesawat berbadan lebar.

OIKN juga mendorong pemanfaatan Bandara IKN untuk penerbangan komersial, termasuk sebagai embarkasi haji dan umrah. Namun, realisasi rencana tersebut masih menunggu perubahan status bandara dari bandara khusus menjadi bandara komersial melalui peraturan presiden.

Pengembangan Properti dan Ekosistem IKN

Di sektor properti, pengusaha Siswono Yudo Husodo telah menyatakan komitmen mengembangkan kawasan hunian seluas 139 hektare di belakang kawasan Istana Presiden. Pengembangan tersebut merupakan bagian dari rencana kawasan yang juga mencakup pembangunan lapangan golf.

Sejumlah investor lainnya juga mulai menyiapkan proyek untuk memperkuat ekosistem perkotaan IKN. Taman Safari tengah menyiapkan desain proyek, sedangkan Indobox yang bergerak di sektor sinema dan kuliner telah memperoleh lahan dan ditargetkan mulai beroperasi pada November 2026.

Plataran juga telah memulai land clearing untuk pembangunan restoran di sekitar Sumbu Barat IKN. Selain itu, terdapat rencana pembangunan restoran Sederhana.

Basuki mengatakan bertambahnya investor yang masuk menjadi indikasi bahwa ekosistem ekonomi IKN mulai terbentuk secara bertahap. OIKN turut memberikan dukungan untuk mempercepat pembangunan proyek investor, termasuk melalui penyediaan hunian dan ruang kantor bagi tenaga kerja.

"Investor yang sudah masuk kami bantu supaya bisa lebih cepat membangun. Ada investor dari Korea Selatan, Star Bright dari China, dan Citadel dari Malaysia. Sebagian tenaga kerja mereka sudah berada di IKN dan kami siapkan fasilitas agar proses pembangunan investasinya bisa lebih cepat," jelasnya.

Selain investasi swasta, OIKN mencatat nilai proyek melalui skema KPBU telah mencapai Rp134,22 triliun hingga 7 Agustus 2026.

Basuki menegaskan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan dengan mengandalkan kombinasi empat skema pembiayaan tersebut. Menurutnya, investasi swasta memiliki peran penting bukan hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam membentuk aktivitas ekonomi dan ekosistem perkotaan di IKN.

"Ekosistem perkotaan step by step akan terbentuk di sini. Bukan hanya gedung pemerintahan, tetapi juga hunian, pendidikan, restoran, pusat hiburan, fasilitas penerbangan dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya," pungkas Basuki.

Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Tahun 2027, HIPMI Soroti 4 Tantangan Dunia Usaha

Sabtu, 15 Agustus 2026 06:15 WIB

Reporter: Prayogi Ikhrwinata, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/target-pertumbuhan-ekonomi-6-tahun-2027-hipmi-soroti-4-tantangan-dunia-usaha>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha menilai keberlanjutan ekspansi bisnis pada 2027 akan sangat bergantung pada kondisi konsumsi masyarakat, akses pembiayaan, kepastian regulasi, serta efisiensi biaya usaha. Pemerintah dinilai perlu memperkuat keempat aspek tersebut agar dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengidentifikasi empat tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga momentum ekspansi dunia usaha pada tahun depan. Keempat tantangan tersebut mencakup daya beli, pembiayaan, kepastian regulasi, dan biaya menjalankan usaha.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPMI Anthony Leong mengatakan, keempat faktor tersebut akan menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha dalam menentukan keputusan ekspansi dan investasi pada 2027.

Menurut dia, daya beli masyarakat menjadi salah satu perhatian utama karena konsumsi merupakan penopang permintaan terhadap berbagai produk dan jasa. Pertumbuhan permintaan yang kuat akan memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus melakukan ekspansi.

“Pengusaha pada dasarnya bisa menghitung risiko bisnis, tetapi yang paling sulit dihitung adalah ketidakpastian kebijakan,” kata Anthony kepada KONTAN, Sabtu (15/8/2026).

Selain daya beli, akses pembiayaan juga menjadi faktor krusial bagi dunia usaha. Pelaku usaha membutuhkan biaya modal yang kompetitif agar rencana investasi maupun ekspansi bisnis tetap memiliki kelayakan secara ekonomi.

Anthony mengatakan, sebagian pengusaha sebenarnya telah memiliki pasar dan peluang untuk mengembangkan kapasitas bisnis. Namun, peluang tersebut dapat terhambat apabila ketersediaan modal kerja dan pembiayaan investasi belum memadai atau diperoleh dengan biaya yang terlalu tinggi.

Dari sisi regulasi, HIPMI mendorong pemerintah melakukan penyederhanaan aturan sekaligus menjaga konsistensi kebijakan. Kepastian regulasi diperlukan lantaran keputusan investasi umumnya membutuhkan perhitungan dan komitmen dalam jangka panjang.

Menurut HIPMI, perubahan kebijakan yang sulit diprediksi dapat meningkatkan risiko bisnis dan membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

Di sisi lain, biaya menjalankan usaha juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Beban logistik, energi, tenaga kerja, perizinan, hingga biaya pembiayaan dapat memengaruhi tingkat efisiensi dan daya saing produk Indonesia.

Karena itu, HIPMI meminta pemerintah memperkuat kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha, investasi, serta penciptaan lapangan kerja pada 2027.

“Semakin mudah perusahaan tumbuh, semakin besar kemampuannya menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Anthony.

Anthony menambahkan, investasi yang masuk ke Indonesia juga perlu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pelaku usaha lokal. Keterlibatan pengusaha daerah sebagai pemasok maupun vendor dinilai dapat memperluas efek berganda atau multiplier effect investasi terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, HIPMI mendorong agar pembiayaan produktif semakin mudah diakses oleh pengusaha, khususnya pelaku usaha yang tengah meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis.

Dengan dukungan terhadap daya beli, pembiayaan, regulasi, dan biaya usaha tersebut, dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan ekspansi pada 2027. Langkah ini sekaligus dapat memperkuat kontribusi sektor swasta terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 yang ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2027.

Ekonomi Global 2027 Masih Penuh Ketidakpastian, Pemerintah Siapkan Strategi Ini

Sabtu, 15 Agustus 2026 06:00 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-global-2027-masih-penuh-ketidakpastian-pemerintah-siapkan-strategi-ini>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mulai menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan ekonomi global pada 2027 yang diperkirakan masih dibayangi ketidakpastian tinggi. Pengalaman dalam merespons berbagai tekanan eksternal sepanjang 2026 menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah melewati sejumlah guncangan ekonomi global dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai kebijakan yang diterapkan dinilai mampu meredam dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

“Jadi, perekonomian dunia di tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada kondisi yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup,” tutur Purbaya dalam konferensi pers, Jumat (14/8/2026).

Purbaya menyebut hingga Agustus 2026, pemerintah telah menghadapi berbagai guncangan global dan dapat meresponnya dengan berbagai kebijakan yang cukup baik, yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut dia, pengalaman pemerintah dalam menjaga perekonomian selama tiga triwulan terakhir menjadi bekal penting dalam menjalankan desain kebijakan ekonomi pada 2027.

“Jadi, apa yang didesain oleh Bapak Presiden yang dipresentasikan tadi di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini,” kata Purbaya.

Risiko Ekonomi Global 2027

Dalam bahan paparannya, pemerintah memperkirakan perekonomian dunia pada 2027 masih menghadapi berbagai risiko struktural dan siklikal yang berpotensi menekan kinerja ekonomi global. Meskipun pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan membaik, tingkat ketidakpastian tetap menjadi salah satu perhatian utama.

Situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal tetap mampu merespons perubahan kondisi global sekaligus menjaga stabilitas perekonomian domestik.

Di tengah berbagai risiko tersebut, pemerintah menilai ekonomi Indonesia masih memiliki ketahanan yang solid. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta dukungan kebijakan pemerintah. Kinerja ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Arah Kebijakan Fiskal 2027

Ketahanan ekonomi nasional tersebut menjadi basis pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal dan APBN 2027. Pemerintah menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

Untuk merealisasikan tema tersebut, strategi pemerintah akan difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Meski mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap kualitas dan keberlanjutan APBN. Pengelolaan anggaran akan diarahkan agar tetap mampu menjadi penyangga perekonomian ketika menghadapi tekanan eksternal.

Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, RAPBN 2027 akan dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara, peningkatan kualitas dan efisiensi belanja, serta pembiayaan anggaran yang inovatif dan prudent.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap APBN 2027 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

RAPBN 2027: Prabowo Targetkan Inflasi Tetap Terjaga di Level 2,5%

Sabtu, 15 Agustus 2026 05:45 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/rapbn-2027-prabowo-targetkan-inflasi-tetap-terjaga-di-level-25>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan stabilitas harga tetap terjaga pada 2027. Presiden Prabowo Subianto menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5% dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%,” tutur Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 1 tahun Sidang 2026-2027 dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2026, Jumat (14/8/2026).

Target inflasi 2,5% tersebut sama dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2026. Dengan demikian, pemerintah masih mempertahankan target stabilitas harga pada level yang sama untuk tahun anggaran berikutnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah menyepakati kisaran indikator asumsi dasar ekonomi makro untuk inflasi dalam RAPBN 2027 berada pada rentang 1,5% hingga 3,5%. Adapun titik tengah atau proyeksi moderat tingkat inflasi ditetapkan sekitar 2,5%.

Target tersebut akan menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan kebijakan fiskal 2027, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tekanan inflasi mulai mereda pada Juli 2026. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 mencatat inflasi tahunan sebesar 2,88% year on year (yoy).

Realisasi tersebut turun dibandingkan inflasi pada Juni 2026 yang mencapai 3,34% yoy. Namun, angka inflasi Juli 2026 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 2,37% yoy.

Prabowo Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027

Sabtu, 15 Agustus 2026 05:15 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-pasang-target-pertumbuhan-ekonomi-6-pada-2027>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kuat pada 2027. Presiden Prabowo Subianto menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun tersebut, lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 sekaligus Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, Jumat (14/8/2026).

“Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari APBN 2026 5,4%,” tutur Prabowo.

Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 tersebut berada di atas sasaran pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 5,4%.

Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berpotensi melampaui target 5,4% yang telah ditetapkan pemerintah.

Optimisme tersebut didukung oleh kinerja perekonomian nasional sepanjang paruh pertama 2026. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61% pada kuartal I 2026 dan mencapai pertumbuhan 5,45% pada semester I 2026.

Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan penguatan ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan pada kuartal I dan semester I 2026 merupakan yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

“Ini adalah pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini,” tutur Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Dengan mempertahankan kebijakan yang dinilai tepat dan rasional, Prabowo meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus menguat hingga akhir 2026.

Menurutnya, kebijakan yang menggunakan akal sehat dapat menjadi faktor pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pada akhir tahun pertumbuhan ekonomi berpotensi mencapai 6%.

Keyakinan tersebut juga didukung oleh realisasi investasi yang terus mencatatkan kinerja positif. Pada semester I 2026, realisasi investasi mencapai sekitar Rp1.010 triliun.

Realisasi investasi tersebut juga disebut telah memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Sepanjang semester I 2026, investasi yang masuk disebut telah menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja.

Target Pendapatan Negara 2027 Naik, Pajak Jadi Tantangan

Sabtu, 15 Agustus 2026 09:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118475/target-pendapatan-negara-2027-naik-pajak-jadi-tantangan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun pada 2027, setara dengan 12,01%-12,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target rasio pendapatan ini naik dari rentang awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, yang sebesar 11,82%-12,4%.

Dalam komponen penerimaan itu, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun. Angka ini melonjak 12,1% dibanding proyeksi penerimaan pajak pada tahun ini, dan tercatat memiliki rasio 9,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Ekonom Bank Permata (BNLI), Josua Pardede, menilai lonjakan rasio pajak sebesar itu dalam satu tahun anggaran sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang mendasar. Sebab, basis pajak Indonesia hingga saat ini masih didominasi sektor formal dan komoditas, sementara sektor informal dan ekonomi digital belum tergarap optimal.

"Proyeksi kami tetap lebih konservatif, memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 hanya 5,22% dibanding target pemerintah 6,0%, dengan penerimaan negara yang juga tertekan oleh normalisasi harga komoditas yang akan menekan penerimaan bukan pajak (PNBP)," kata Josua.

Saat ini, pemerintah sudah mengandalkan implementasi Coretax, melakukan reformasi administrasi pajak, perluasan basis perpajakan, serta digitalisasi bea cukai demi menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing sebagai andalan utama dalam menaikkan penerimaan negara.

Upaya optimalisasi penerimaan juga ditempuh dengan membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berperan untuk mengidentifikasi tambahan devisa hingga US\$5 miliar dari sektor batu bara, sawit, dan baja, sebagai sasaran realisasi pendapatan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pemerintah optimis kinerja ekonomi nasional akan tetap solid dan terjaga, seiring dengan stabilitas makroekonomi yang membaik, ditambah dengan dukungan kebijakan pemerintah.

"Sampai data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% Agustus (2026). Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio (rasio pajak) secara signifikan," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Purbaya mengatakan, masih ada ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan rasio perpajakan lewat perbaikan cara dalam memungut pajak.

Namun, menurut Josua niat kebijakan yang sudah cukup konsisten dengan strategi ekstensifikasi basis pajak ini, tetap membutuhkan eksekusi administratif yang juga konsisten. Ia menilai target 12,01%-12,4% dari PDB lebih tepat dibaca sebagai target aspiratif, ketimbang proyeksi yang moderat dan realistis.

Josua menambahkan, agar realisasi penerimaan pajak 2027 dapat tercapai, tanpa harus menaikkan tarif pajak yang justru berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, dan investasi dunia usaha, setidaknya otoritas fiskal perlu mengupayakan beberapa hal.

Pertama, digitalisasi dan integrasi data melalui sistem Coretax serta konektivitas data lintas kementerian atau lembaga (perbankan, properti, kepabeanan) perlu dipercepat untuk menutup kebocoran penerimaan tanpa membebani pembayar pajak patuh yang sudah ada.

Kedua, penguatan basis pajak dari sektor ekonomi digital dan platform lintas batas harus terus diselaraskan dengan perkembangan sistem perpajakan global agar tidak menimbulkan distorsi kompetitif bagi pelaku usaha domestik.

Ketiga, sensus ekonomi nasional yang sedang dijalankan hingga akhir Agustus 2026 penting untuk memperbarui basis data PDB dan basis pajak riil. "Mengingat rebasing PDB belum dilakukan lebih dari sepuluh tahun sehingga potensi under-reporting aktivitas ekonomi cukup besar," kata Josua.

Keempat, optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hilirisasi sumber daya alam dan tata kelola aset BUMN melalui Danantara dapat menjadi sumber penerimaan tambahan yang tidak membebani konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dunia usaha, sehingga peningkatan rasio penerimaan dapat lebih berimbang antara pajak dan non-pajak.

Sebagai gambaran, penerimaan pajak dipatok Rp2.908 triliun, termasuk di dalamnya pendapatan bea dan cukai sebesar Rp316,6 triliun. Di sisi lain, PNBP dipatok sebesar Rp517,4 triliun, dan hibah senilai Rp700 miliar.

Target penerimaan pajak tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan proyeksi penerimaan tahun 2026. Sedangkan sebaliknya, PNBP justru turun sebesar 10%, dibandingkan proyeksi tahun ini, dan hibah turun tajam 56%.

Daya Beli, Manufaktur, dan Ujian Pertumbuhan Semester II-2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 08:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118459/daya-beli-manufaktur-dan-ujian-pertumbuhan-semester-ii-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Memasuki semester kedua 2026, dinamika perekonomian domestik kian menantang. Meski ekonomi Indonesia belum kehilangan pijakannya, tapi tanda-tanda pelemahan momentum mulai terlihat, termasuk dari sisi daya beli konsumen.

Realisasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) memang melampaui ekspektasi dan tercatat 5,29% pada kuartal II-2026. Namun begitu, angka ini termoderasi dari capaian pada kuartal sebelumnya yang mencapai 5,61%.

Di saat yang sama, Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2026 turun menjadi 116,8 dari 117,8 pada Juni. Penurunan terjadi pada kedua komponennya. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turun dari 109,2 menjadi 107,9, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turun dari 126,4 menjadi 125,7.

Penurunan tersebut memang belum menunjukkan pesimisme. IKK masih berada di atas level 100 yang menandakan konsumen secara umum masih optimistis. Namun, arah pergerakannya patut menjadi perhatian karena pelemahan terjadi baik pada persepsi terhadap kondisi saat ini maupun ekspektasi terhadap masa depan.

Artinya, rumah tangga bukan hanya merasa kondisi ekonomi sekarang belum sepenuhnya membaik, tetapi juga mulai lebih berhati-hati dalam memandang prospek beberapa bulan ke depan.

Sinyal dari survei konsumen tersebut mendapatkan konfirmasi dari indikator penjualan eceran. BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2026 berada di level 225,0 atau masih berkontraksi 3% secara tahunan. Memang, secara bulanan IPR masih tumbuh tipis 0,7%.

Namun, kenaikan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa konsumsi telah memasuki fase pemulihan yang solid. Setelah tumbuh 5,2% pada kuartal I-2026, IPR berbalik berkontraksi 3,5% pada kuartal II-2026. Terjadi perubahan sebesar 8,7 poin persentase hanya dalam satu kuartal.

Pada kuartal I, konsumsi mendapatkan dorongan kuat dari momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri. Aktivitas belanja masyarakat meningkat, mobilitas pun naik, efek musiman ini yang mendorong konsumsi rumah tangga. Namun, ketika faktor musiman tersebut menghilang, terlihat bahwa daya dorong konsumsi yang mendasarinya belum cukup kuat.

Masalah Keyakinan

Pelemahan konsumsi itu bukan tanpa sebab. Keyakinan yang melemah jadi salah satu pemicunya. Tak salah bila ekonomi bukan sekadar angka, tapi juga rasa. Maka, soal keyakinan konsumen yang disurvei oleh BI juga bukan sekadar angka, tapi jadi indikator awal tentang bagaimana rumah tangga mengambil keputusan ekonominya

Kala masyarakat yakin terhadap pekerjaan, pendapatan, dan prospek ekonomi, mereka cenderung lebih berani melakukan pembelian, termasuk barang tahan lama.

Sebaliknya, ketika ketidakpastian meningkat, rumah tangga akan cenderung menunda pembelian yang tidak mendesak dan memperbesar kehati-hatian dalam mengelola pendapatan.

Jika keyakinan ini tidak dikelola dan terus menurun, dampaknya bukan cuma terjadi pada konsumsi hari ini, tapi rumah tangga berpotensi mengubah perilaku mereka secara permanen. Misalnya, meningkatkan tabungan, menunda pembelian, mengurangi konsumsi non-primer (diskresioner), dan menahan ekspansi pengeluaran.

Namun, prospek ke depan tak sepenuhnya suram. BI dalam laporannya tetap optimis dan menyebut penjualan eceran pada Juli diperkirakan meningkat dan tumbuh, meski tipis, sebesar 0,9% secara tahunan.

"Peningkatan penjualan tersebut didorong oleh kenaikan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, disertai pertumbuhan positif pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya," sebut laporan BI.

Namun demikian, sejatinya penjurulanan secara bulanan pada Juli 2026 diperkirakan masih akan berkontraksi 0,3%. Lantaran ada normalisasi permintaan setelah musiman selesai seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan libur sekolah.

Sektor Manufaktur

Sementara, dari sektor manufaktur, aktivitas manufaktur Indonesia kembali masuk ke zona ekspansif pada bulan Juli.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia kembali di level 50,2 untuk periode Juli. Naik dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 46,9. Pertumbuhan positif ini tertopang oleh volume produksi lantaran stabilnya pemesanan baru (new orders) pada Juli.

Sejalan dengan itu, keyakinan terhadap prospek produksi dalam 12 bulan ke depan juga kembali menguat, dengan tingkat optimisme mencapai level tertinggi dalam enam bulan.

Peningkatan produksi tersebut umumnya didorong oleh membaiknya kondisi permintaan. Kendati demikian, kenaikan harga bahan baku yang terus berlanjut masih membatasi potensi ekspansi produksi yang lebih kuat.

Meski begitu, PMI sebesar 50,2 belum dapat disebut sebagai ekspansi yang kuat. Posisi tersebut masih sangat dekat dengan ambang batas 50. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya satu kali kenaikan, melainkan konsistensi selama beberapa bulan.

Jika PMI dapat bertahan di atas 50 dan kemudian bergerak menuju level 51–52 atau lebih, sinyal pemulihan akan menjadi jauh lebih kuat. Sehingga, untuk saat ini, lebih tepat mengatakan bahwa manufaktur mulai stabil daripada sudah pulih sepenuhnya.

Karena itu juga, kabar baik dari PMI harus dimanfaatkan. Pemerintah perlu memastikan pemulihan tersebut tak cuma berhenti pada angka produksi. Yang lebih penting adalah apakah pemulihan tersebut menciptakan lapangan kerja formal, meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya beli.

Bagi Indonesia, yang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh angka konsumsi rumah tangga, membutuhkan penopang yang kuat, dalam bentuk pendapatan yang berkelanjutan.

Rumah tangga akan lebih percaya diri membelanjakan uang ketika mereka memiliki kepastian pekerjaan, pendapatan yang meningkat, inflasi yang terkendali dan prospek ekonomi yang lebih jelas.

Dengan demikian, kebijakan untuk menopang pertumbuhan tidak cukup hanya berfokus pada sisi permintaan lewat serangkaian stimulus konsumsi. Paling tidak, pemerintah juga perlu memperkuat sisi penawaran dengan memastikan sektor produktif mampu menciptakan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas.

Harga Pangan Akhir Pekan Fluktuatif, Rawit Merah Tembus Rp62.000

Sabtu, 15 Agustus 2026 09:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118486/harga-pangan-akhir-pekan-fluktuatif-rawit-merah-tembus-rp62-000/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta – Harga pangan akhir pekan ini, Sabtu (15/8/2026), terpantau fluktuatif. Sebagian komoditas pangan masih ada yang naik, tetapi sebagian lainnya juga terpantau telah mengalami penurunan harga.

Menyitir data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia (BI) pukul 08.58 WIB komoditas hortikultura seperti cabai rawit merah bahkan telah tembus Rp62.650 per kilogram (kg) atau secara rata-rata nasional naik Rp3.000 (5,03%).

Kenaikan tertinggi harga pangan juga diteruskan oleh cabai rawit hijau yang secara rata-rata nasional naik Rp2.750 atau 5,23% menjadi Rp55.350 per kg.

Senada, kenaikan tertinggi terjadi pada daging ayam ras segar yang kini berada dikisaran harga Rp41.350 per kg atau naik Rp1.300 (3,25%).

Tak hanya itu, pada komoditas seperti beras kualitas medium I dan kualitas medium II juga mengalami kenaikan secara rerata nasional sebesar Rp50 menjadi Rp16.500 per kg dan Rp16.300 per kg.

Sementara itu, cabai merah keriting naik harga hingga mencapai Rp50.450 per kg atau naik tipis Rp50 (0,1%).

Gula pasir kualitas premium juga naik Rp50 atau 0,25% menjadi Rp20.350 per kg, disusul minyak goreng kemasan bermerk 2 yang juga naik Rp50 atau 0,21% menjadi Rp23.550 per kg secara nasional.

Di sisi lain harga seperti bawang merah ukuran sedang, bawang putih ukuran sedang, serta cabai merah besar justru mengalami penurunan harga.

Pada bawang merah ukuran sedang, penurunan harga terjadi sebesar Rp100 atau 0,25% menjadi Rp39.450 per kg.

Bawang putih ukuran sedang juga turun harganya secara rata-rata nasional di Rp550 atau 1,34% menjadi Rp40.500 per kg. Sedangkan cabai merah besar kini berada di harga Rp49.100 atau turun Rp800 (1,6%).

Sementara itu, komoditas protein hewani selain daging ayam ras juga diketahui mengalami penurunan harga. Seperti daging sapi kualitas 1 yang berada dikisaran harga Rp151.450 per kg turun Rp300 (0,2%) disusul daging sapi kualitas 2 yang berada di harga Rp142.900 turun Rp150 (0,1%).

Begitupun telur ayam ras yang kini turun Rp50 atau 0,17% menjadi Rp29.400 per kg.

Komoditas lainnya seperti gula pasir lokal turut mengalami penurunan harga menjadi Rp19.050 per kg atau turun Rp100 (0,52%).

Minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan bermerk 1 juga turun harga masing-masing sebesar Rp100 dan Rp150 menjadi Rp20.350 per kg serta Rp24.300 per kg.

Pada bagian lain, beras kualitas bawah I, beras kualitas bawah II, dan beras kualitas super I justru tidak mengalami perubahan harga atau tetap berada di harga rata-rata nasional sebesar Rp14.800 per kg, Rp14.600 per kg, dan Rp17.750 per kg.

Genjot Logistik Kawasan Industri, Ahmad Luthfi Targetkan Pembangunan “Dry Port” Selesai 2 Tahun

Sabtu, 15 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/genjot-logistik-kawasan-industri-ahmad-luthfi-targetkan-pembangunan-dry-port-selesai-2-tahun/>

BEKASI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat penguatan infrastruktur penunjang logistik kawasan industri di wilayahnya. Salah satunya, melalui rencana pembangunan dry port (pelabuhan darat) di sejumlah tempat.

Guna mematangkan konsep tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memboyong sejumlah pengelola kawasan industri, BUMD, hingga dinas terkait, untuk melakukan studi komparatif ke Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Sabtu (15/8/2026).

Luthfi mengatakan, kunjungannya tersebut untuk melihat gambaran secara komprehensif, bagaimana efektivitas dry port untuk mendukung pergerakan logistik di kawasan industri. Mengingat sekitar 70% kontainer di Jawa Tengah, pengirimannya masih banyak ke Jakarta dan Surabaya.

“Untuk menopang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang kurang maksimal, salah satu solusinya adalah pembangunan dry port,” katanya, se usai meninjau dan berdiskusi dengan pengelola dry port Cikarang.

Terkait pembangunan dry port di Jawa Tengah, imbuh Luthfi, sudah ada dua gambaran lokasi dengan luas masing-masing sekitar 50 hektare. Yaitu di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), dan di Weleri, Kendal.

Sejauh ini pembangunan dry port di Batang sudah ada perjanjian kesepahaman antara PT KAI, Pelindo, KITB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), dan BUMD Batang. Saat ini sudah memasuki tahap studi kelayakan dan pemilihan konsultan perencana.

“Yang sudah kita kerjakan sekarang adalah di KITB, sudah MoU, tapi juga nunggu perkembangan situasi. Prinsipnya, dua tahun ke depan dry port harus jadi,” terangnya.

Direktur Cikarang Dry Port, Noor Yusuf, mengatakan Cikarang Dry Port sudah beroperasi sejak 2010, dan melayani sekitar 500 perusahaan yang memanfaatkan ekspor-impor, mulai dari Tangerang, Cikampek, hingga Bandung.

“Konsep dry port ini memiliki fasilitas lebih luas, termasuk storage (tempat penyimpanan). Jababeka juga sedang menyiapkan rencana pembangunan dry port di Weleri, Kendal,” ucapnya. (Humas Jateng)*ul

Hari Jadi ke-81 Jateng, Ekonomi Makin Gemilang, Angka Kemiskinan Terus Berkurang

Sabtu, 15 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/hari-jadi-ke-81-jateng-ekonomi-makin-gemilang-angka-kemiskinan-terus-berkurang/>

SEMARANG – Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, dan ketidakpastian perdagangan internasional, Jawa Tengah justru menunjukkan daya tahan yang kuat.

Pada usia ke-81, Provinsi Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi 5,80% secara kumulatif (c-to-c) pada semester I-2026. Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Capaian tersebut bukan sekadar hasil kebijakan Pemprov Jateng, melainkan buah dari kerja kolaboratif yang diorkestrasi Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, dalam menggerakkan pembangunan secara bersama.

Pertumbuhan ekonomi itu bukan juga sekadar angka, tapi juga berdampak langsung pada penurunan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Buktinya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah terus menurun. Pada Maret 2026, jumlahnya tercatat 3,29 juta orang atau 9,21 persen dari total penduduk. Angka tersebut berkurang 59.390 orang dibandingkan September 2025, dan turun 81.250 orang dibandingkan Maret 2025.

Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said mengatakan, secara persentase tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan pada 2026. Pada Maret 2026 angkanya menjadi 9,21 persen. Jumlah itu turun 0,18 persen dibanding September 2025 yang tercatat 9,39 persen, dan berkurang 0,27 persen dibanding Maret 2025 yang masih pada angka 9,48 persen.

“Kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 14,50 persen, atau sebesar 8,19 persen terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian terbesar keempat secara nasional,” kata Ali, dalam jumpa pers daring, Rabu (5/8/2026) lalu.

Melesatnya pertumbuhan ekonomi itu juga berbanding lurus dengan geliat investasi dan penyerapan tenaga kerja di provinsi ini. Capaian investasi pada semester I 2026 mencapai Rp48,54 triliun. Realisasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 213.217 orang, dengan jumlah proyek mencapai 55.989 unit.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menjelaskan realisasi semester I 2026 berasal dari penanaman modal pada triwulan I (Januari–Maret) sebesar Rp23,02 triliun dan triwulan II (April–Juni) sebesar Rp25,53 triliun. Menurutnya, realisasi pada triwulan II meningkat 10,88 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

“Alhamdulillah, di tengah kondisi geopolitik yang tidak baik-baik saja, Jawa Tengah tetap bertambah dan bertumbuh 10,88 persen dari triwulan pertama,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Sakina mengatakan, kinerja investasi pada semester I 2026 didukung penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp25,92 triliun atau 53,40 persen dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp22,62 triliun atau 46,60 persen.

Guna menggalakkan investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan kawasan industri. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung ketersediaan infrastruktur, dan memberikan kemudahan bagi investor yang menanamkan modal di kawasan yang telah diperuntukkan sebagai kawasan industri.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, dalam membangun Jawa Tengah memang dia tidak bisa berkerja sendiri. Akan tetapi, dibutuhkan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Maka kita punya semangat collaborative government (pemerintahan kolaboratif), karena kita tidak bisa sendiri-sendiri,” ucapnya, beberapa waktu lalu.

Luthfi menegaskan, kolaborasi dengan seluruh pihak menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

“Gubernur bukan superman, melainkan harus menggunakan super team dalam rangka melakukan pembangunan di wilayah kita. Provinsi (Jateng) dengan 35 kabupaten/kota dan segala aspek yang ada, (maka) collaborative government (pemerintahan kolaboratif) harus kita ciptakan,” ucap Luthfi.

Karenanya, gubernur mengajak seluruh pihak, mulai dari bupati-wali kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, masyarakat, dan media untuk berkolaborasi membangun Jawa Tengah. Dengan demikian, program yang digulirkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Luthfi menekankan, semangat gotong royong, kebersamaan, dan kerja tim, merupakan nilai yang mengakar di Jawa Tengah dan terus diterapkan, termasuk dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, tema Hari Jadi ke-81 Jateng ini adalah “Gumregut Nyawiji”. Tema. itu diangkat dari filosofi bahasa Jawa yang bermakna kolaborasi dan gotong royong.

“Semangatnya adalah bareng-bareng membangun Jawa Tengah. Ini selaras dengan arahan Pak Gubernur, bahwa kita harus berkolaborasi dengan semua pihak,” kata dia. (Humas Jateng)*ul

Belanja Diperketat, Pemkot Semarang Cegah Gagal Bayar APBD 2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 11:16 WIB

Damarjati

<https://www.rmoljawatengah.id/belanja-diperketat-pemkot-semarang-cegah-gagal-bayar-apbd-2026>

Pemkot Semarang memperketat belanja dalam Perubahan APBD 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga kas daerah tetap aman hingga akhir tahun.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, Handi Priyanto, mengatakan rasionalisasi dilakukan karena realisasi pendapatan daerah belum sesuai target. Kondisi itu terjadi di tengah perlambatan ekonomi dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Jika kegiatan fisik maupun nonfisik tetap dipaksakan sementara kas tidak mencukupi, ada risiko pekerjaan selesai tetapi tidak bisa dibayar. Risiko gagal bayar ini yang ingin kami cegah sejak awal melalui rasionalisasi,” ujar Handi, Jumat (14/8).

Pendapatan Daerah Belum Sesuai Target

Handi menyebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi, hingga triwulan III 2026 belum mencapai 50 persen.

Sejumlah jenis retribusi bahkan masih berada di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Pemkot Semarang untuk menyesuaikan kembali postur belanja dalam APBD 2026.

Tekanan terhadap pendapatan juga dipengaruhi perlambatan ekonomi. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi turun dari 5,61 persen pada kuartal I menjadi 5,29 persen pada kuartal II 2026.

Sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, penerimaan pajak dan retribusi menjadi salah satu sumber utama pendapatan Kota Semarang.

Belanja Nonprioritas Dipangkas

Rasionalisasi diarahkan pada sejumlah belanja yang dinilai masih dapat ditunda. Pemkot Semarang memangkas perjalanan dinas ASN serta mengingatkan belanja ATK dan makan-minum.

Pengadaan barang nonmendesak, seperti kendaraan dinas dan perangkat elektronik, juga ditunda. Begitu pula proyek fisik yang belum masuk tahap lelang dan diperkirakan tidak selesai hingga akhir 2026.

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak menyasar pelayanan publik mendasar. Pemkot tetap memprioritaskan pemenuhan belanja pegawai serta pembangunan yang sudah berkontrak dan sedang berjalan.

“Saat penyusunan APBD pertengahan tahun lalu, optimisme terhadap target pendapatan memang tinggi karena tren ekonomi mendukung. Namun kondisi lapangan tahun ini berbeda sehingga butuh penyesuaian yang realistis,” kata Handi.

Menurutnya, rasionalisasi diperlukan agar struktur APBD tetap sehat dan seluruh kewajiban keuangan pemerintah daerah dapat diselesaikan hingga akhir tahun.

Investasi Perusahaan Jerman di AS Anjlok ke Level Terendah dalam 3 Tahun

Minggu, 16 Agustus 2026 16:58 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/investasi-perusahaan-jerman-di-as-anjlok-ke-level-terendah-dalam-3-tahun>

KONTAN.CO.ID - Perusahaan-perusahaan Jerman memangkas investasi langsung di Amerika Serikat (AS) hingga hampir dua pertiga pada paruh pertama 2026.

Ketidakpastian akibat kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu faktor yang menekan investasi perusahaan Jerman di Negeri Paman Sam.

Berdasarkan perhitungan German Economic Institute (IW) yang mengacu pada data bank sentral Jerman dan dilihat Reuters, investasi langsung perusahaan Jerman di AS hanya mencapai €4,3 miliar atau sekitar US\$5 miliar pada Januari-Juni 2026.

Nilai tersebut anjlok hampir dua pertiga dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekaligus menjadi level terendah sejak 2023.

Jika dibandingkan dengan paruh pertama 2024, investasi perusahaan Jerman di AS bahkan turun hampir 80%.

"Ini melanjutkan tren penurunan yang terlihat sejak awal masa jabatan kedua Donald Trump pada Januari 2025," ujar Samina Sultan, peneliti IW, kepada Reuters.

Kebijakan Trump Tekan Investasi

Sejak kembali menjabat sebagai presiden AS, Trump mengancam sebagian besar mitra dagang AS dengan tarif impor untuk mendorong negara-negara tersebut memberikan konsesi yang menguntungkan Washington.

Dalam upaya menghindari tarif tinggi terhadap eksportnya ke AS, Uni Eropa (UE) pada tahun lalu menyepakati kesepakatan dagang dengan Washington yang mencakup komitmen investasi senilai US\$600 miliar.

Namun, ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan AS membuat perusahaan Jerman lebih berhati-hati dalam mengalokasikan modal baru.

Data IW menunjukkan, dalam lima tahun sebelum pandemi Covid-19, investasi perusahaan Jerman di AS pada semester pertama rata-rata mencapai €15,8 miliar per tahun. Angka tersebut hampir empat kali lipat dibandingkan realisasi pada paruh pertama 2026.

Meski demikian, Sultan mengatakan periode 2020-2023 dipengaruhi kondisi luar biasa akibat pandemi. Beberapa tahun bahkan mencatat arus investasi bersih keluar.

Perusahaan Lama Masih Investasi

IW juga menganalisis komposisi arus investasi selama 2025. Hasilnya menunjukkan pinjaman investasi langsung dan laba yang diinvestasikan kembali berada pada level yang sangat tinggi.

Sementara itu, modal ekuitas dalam arti sempit yang mencakup keseimbangan antara investasi baru dan likuidasi berada di bawah rata-rata.

"Perusahaan yang sudah aktif di Amerika Serikat masih menginvestasikan kembali keuntungan yang mereka peroleh di sana," kata Sultan.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa AS masih menjadi pasar yang menarik secara keseluruhan bagi perusahaan Jerman.

Namun, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung lebih berhati-hati untuk menggelontorkan modal baru di AS.

"Perusahaan ragu untuk berkomitmen terhadap modal baru," ujar Sultan.

Negara-negara Afrika Mulai Beralih ke Yuan China, Tinggalkan Dollar AS?

Minggu, 16 Agustus 2026 21:40 WIB

Inas Rifqia Lainufar, Sumber South China Morning Post

<https://www.kompas.com/global/read/2026/08/16/214050670/negara-negara-afrika-mulai-beralih-ke-yuan-china-tinggalkan-dollar-as>

KOMPAS.com - Negara-negara di Afrika memperluas penggunaan yuan China dalam perdagangan internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS.

Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post, Minggu (16/8/2026), sejumlah negara dan lembaga keuangan di benua tersebut mulai terhubung dengan sistem pembayaran lintas batas milik China, Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), yang diposisikan sebagai alternatif jaringan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Langkah terbaru datang dari Libya. Setelah pertemuan antara Gubernur Bank Sentral Libya Naji Issa dan Gubernur Bank Sentral China Pan Gongsheng di Beijing bulan lalu, bank-bank Libya dijadwalkan bergabung dengan CIPS.

Menurut kantor berita pemerintah Libya, keikutsertaan dalam sistem tersebut akan memungkinkan pembayaran antarbank langsung dalam yuan untuk perdagangan, mempercepat transfer lintas negara, menyederhanakan transaksi komersial, serta meningkatkan arus perdagangan.

Libya juga berencana menerbitkan panda bond, yakni obligasi berdenominasi yuan yang dijual oleh entitas asing di pasar China. Dana tersebut dapat digunakan untuk membantu pembiayaan rekonstruksi negara itu setelah bertahun-tahun dilanda konflik.

Namun, Libya bukan satu-satunya. African Export-Import Bank dan Standard Bank dari Afrika Selatan, bank terbesar di Afrika, telah lebih dulu terhubung dengan CIPS.

Sementara itu, Zambia sejak Januari mulai memungut pajak dan royalti dari perusahaan tambang China dalam mata uang yuan.

Di Angola, Banco de Fomento Angola tengah mempersiapkan diri menjadi bank pertama di negara tersebut yang bergabung dengan CIPS, menyusul meningkatnya permintaan penyelesaian transaksi langsung dalam yuan.

China juga telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan sejumlah negara Afrika, termasuk Nigeria dan Afrika Selatan.

Kenya tahun lalu mengonversi utang proyek kereta apinya ke yuan, sementara Ethiopia dan Mozambik sedang membahas langkah serupa.

Dorongan penggunaan yuan ini terjadi seiring semakin eratnya hubungan ekonomi China dan Afrika.

China saat ini merupakan mitra dagang terbesar sekaligus penyandang dana utama berbagai proyek infrastruktur besar di benua tersebut.

Nilai perdagangan bilateral China-Afrika mencapai rekor 203,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.627 triliun pada paruh pertama tahun ini. Beijing memperkirakan nilai perdagangan sepanjang tahun akan kembali mencetak rekor baru.

Lauren Johnston, pakar hubungan China-Afrika dari AustChina Institute, mengatakan penggunaan yuan yang lebih luas dibanding mata uang pihak ketiga seperti dollar AS atau euro dapat mempermudah perdagangan antara kedua pihak.

Pengacara korporasi berbasis di Beijing, Kai Xue, mengatakan China berupaya membangun sistem pembayaran global berbasis yuan secara bertahap.

Menurutnya, perluasan CIPS dan transaksi dalam yuan bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS dalam perdagangan internasional sekaligus menciptakan infrastruktur pembayaran alternatif.

Meski demikian, Xue menegaskan bahwa sistem berbasis yuan belum akan menggantikan dominasi dollar dalam waktu dekat. Namun, sistem tersebut dinilai dapat menjadi alternatif bagi negara-negara Afrika dalam berdagang dengan China dan negara-negara Global South.

Ekonom Soroti Target Defisit APBN 2027, Ruang Fiskal Makin Sempit

Minggu, 16 Agustus 2026 17:00 WIB

Muhammad Fikri

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118548/ekonom-soroti-target-defisit-apbn-2027-ruang-fiskal-makin-sempit/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai target defisit APBN 2027 sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih menunjukkan kehati-hatian fiskal, namun cukup ambisius di tengah ruang fiskal pemerintah yang semakin terbatas.

Chief Economist PermataBank Josua Pardede memperkirakan, defisit APBN 2027 berada di kisaran 2,70%-2,90% PDB, lebih tinggi dari target pemerintah. Menurutnya, target 2,4% cukup menantang.

“Target penurunan defisit menjadi 2,4% PDB pada 2027 secara matematis mungkin, tetapi secara pelaksanaan tergolong menantang dan cukup optimistis,” kata Josua, Minggu (16/8/2026).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara Rp4.097,2 triliun, pendapatan Rp3.426 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun. Dibandingkan APBN 2026, pendapatan ditargetkan tumbuh sekitar 8,6%, sementara belanja meningkat sekitar 6,6%.

Josua menambahkan, pencapaian target defisit tersebut sangat bergantung pada kemampuan penerimaan tumbuh lebih cepat dibandingkan belanja. Pemerintah perlu memperbaiki administrasi perpajakan, mengurangi kebocoran, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan tanpa menekan daya beli maupun investasi.

Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 hanya mencapai 5,22%, lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 5,9%. Sementara imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 7,10%-7,30%, lebih tinggi dari asumsi pemerintah 6,9%.

“Pertumbuhan yang lebih rendah akan mengurangi penerimaan dan membuat rasio defisit lebih tinggi, sedangkan imbal hasil SBN yang lebih tinggi akan menambah beban bunga,” ujarnya.

Dengan perkiraan PDB nominal sekitar Rp28.068 triliun, defisit 2,70%-2,90% tersebut setara dengan sekitar Rp758 triliun hingga Rp814 triliun. Nilai tersebut sekitar Rp87 triliun-Rp143 triliun lebih tinggi dibandingkan rencana pemerintah.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurrahman menilai target defisit 2,4% PDB pada 2027 cukup ambisius karena pemerintah melakukan konsolidasi fiskal ketika kebutuhan belanja meningkat.

Menurut Rizal, pemerintah tidak cukup hanya menahan pengeluaran. Penerimaan negara juga perlu tumbuh lebih kuat melalui perbaikan tax ratio, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta prioritas belanja yang lebih selektif.

“Target defisit 2,4% PDB pada 2027 menurut saya cukup ambisius karena pemerintah ingin melakukan konsolidasi fiskal pada saat kebutuhan belanja justru meningkat,” kata Rizal.

Rizal mengatakan jika penerimaan tidak meningkat secara struktural, pemerintah akan memiliki pilihan yang semakin terbatas, yakni memangkas belanja produktif, menunda program, atau memperbesar pembiayaan.

Adapun outlook defisit APBN 2026 sebesar 2,85% PDB masih dinilai berada dalam batas yang dapat dikelola. Josua mengatakan angka tersebut masih di bawah batas defisit 3% PDB dan belum menunjukkan kondisi darurat fiskal.

Josua memperkirakan defisit 2026 berada di kisaran 2,75%-2,95% PDB. Namun, ruang pengaman fiskal dinilai sudah tipis karena defisit 2,85% hanya menyisakan jarak 0,15 poin persentase dari batas 3%.

Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja 18,2%. Defisit baru mencapai 0,91% PDB.

Di sisi lain, subsidi dan kompensasi pada semester I telah mencapai Rp233 triliun atau 52,1% dari pagu tahunan. Pembiayaan utang bersih hingga Juni juga mencapai Rp477,4 triliun atau 57,4% dari target APBN.

“Defisit 2,85% masih terkendali dari sisi besaran, tetapi sudah tidak menyediakan banyak ruang untuk menghadapi kejutan baru berupa pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, penurunan penerimaan, atau kenaikan biaya utang,” kata Josua.

Rizal juga menilai yang perlu diperhatikan bukan hanya besaran defisit, tetapi kualitas penggunaannya. Menurut dia, tambahan pembiayaan masih dapat dibenarkan apabila digunakan untuk belanja produktif yang mendorong pertumbuhan, memperluas basis pajak, dan menciptakan lapangan kerja.

Sebaliknya, risiko terhadap kesinambungan fiskal akan semakin besar jika defisit digunakan untuk menopang belanja rutin dan program dengan multiplier effect rendah.

Kedua ekonom juga menyoroti sejumlah program baru pemerintah, termasuk kendaraan listrik dan Pusat Finansial Indonesia Internasional (PFII). Josua menilai program baru berpotensi mempersempit ruang fiskal apabila menciptakan kewajiban belanja berulang, insentif pajak tanpa batas waktu, atau jaminan pemerintah.

Menurut dia, program kendaraan listrik lebih jelas menjadi beban fiskal dalam jangka pendek. Pemerintah merencanakan subsidi untuk 1 juta motor listrik produksi nasional sebesar Rp3 juta per unit, sehingga biaya langsung maksimal mencapai sekitar Rp3 triliun.

Namun, manfaat jangka panjangnya bergantung pada kemampuan program tersebut memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi impor BBM, menekan subsidi energi, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan ekspor dan penerimaan pajak baru.

Sementara Rizal menilai kendaraan listrik dan PFII seharusnya tidak menciptakan ketergantungan permanen terhadap insentif fiskal. Setiap program baru perlu memiliki fiscal exit strategy, target kinerja yang jelas, serta evaluasi manfaat ekonomi.

“Setiap program baru harus mempunyai fiscal exit strategy, target kinerja yang jelas, dan evaluasi manfaat ekonomi agar tidak menggerus ruang untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, secara umum RAPBN 2027 masih dapat dikatakan prudent dari sisi angka defisit. Namun, pemerintah mulai menghadapi keterbatasan ruang fiskal yang semakin nyata.

“APBN yang sehat bukan sekadar APBN dengan defisit kecil, tetapi APBN yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan basis penerimaan yang lebih besar di masa depan,” kata Rizal.

Pemerintah Targetkan Investasi 2027 Naik 13,8% Jadi Rp 2.322 Triliun, Ini Strateginya

Minggu, 16 Agustus 2026 17:11 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-targetkan-investasi-2027-naik-138-jadi-rp-2322-triliun-ini-strateginya>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan capaian investasi pada tahun 2027 sebesar Rp 2.322 triliun, atau naik 13,8% dari 2026 yang sebesar Rp 2.041 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, untuk memastikan target investasi dapat tercapai, pihaknya akan terus melakukan pembenahan iklim investasi melalui tiga fokus utama, yakni kepastian perizinan, kecepatan konstruksi, dan penyelesaian hambatan di lapangan.

“Fokus program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan,” tegas Rosan dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, di Jakarta (14/8/2026).

Lebih lanjut Rosan menyebut, saat ini sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga sudah terintegrasi dengan Sistem OSS dan terus diperkuat. Ini tugas yang berat, namun insya Allah kita terus meng-upgrade sistem OSS (Online Single Submission) kita dengan AI (Artificial Intelligence), big data dan blockchain.

Dalam aspek perizinan, Rosan mengatakan sebanyak 24 kementerian/lembaga (K/L) telah memiliki hak akses ke sistem OSS untuk kebutuhan verifikasi dan pemantauan.

Pemerintah juga disebut tengah menyiapkan OSS versi 2.0 yang berbasis kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan layanan. Saat ini, sebanyak 575 RDTR kabupaten/kota telah terhubung dengan sistem OSS.

Sementara untuk mempercepat realisasi proyek, Rosan menyebut pihaknya telah menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Program ini memungkinkan investor di 62 kawasan industri untuk mulai melakukan pembangunan secara paralel dengan proses perizinan.

Kementerian Investasi/BKPM juga terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam memfasilitasi proyek hilirisasi, Proyek Strategis Nasional, dan program prioritas pemerintah.

Penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga terus diselesaikan.

"Di kesempatan ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media, agar kita selalu menjaga iklim investasi yang kondusif sehingga memberikan dampak yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia," tutup Rosan

Pendapatan Daerah Turun 12,3% Jadi Rp606,8 Triliun hingga Juli 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 16:32 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Yudho Winarto

<https://nasional.kontan.co.id/news/pendapatan-daerah-turun-123-jadi-rp6068-triliun-hingga-juli-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat total realisasi pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencapai Rp606,8 triliun hingga 31 Juli 2026.

Angka tersebut turun sekitar 12,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp691,8 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, di tengah perlambatan pendapatan daerah, realisasi belanja pemerintah daerah justru menunjukkan percepatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realisasi belanja daerah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun atau 42,5% dari pagu anggaran.

Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 41,7%.

Namun, secara nominal realisasi belanja tahun ini masih lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai Rp576,8 triliun.

"Meskipun angkanya (realisasi nilainya) sedikit lebih tinggi 2025, sebesar Rp576,8 triliun," ujar Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (16/8/2026).

TKD Bertambah Jadi Rp725,2 Triliun

Di sisi lain, pemerintah telah menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.

Semula, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun. Anggaran tersebut kemudian bertambah Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera serta Rp2,7 triliun untuk dana otonomi khusus.

Selanjutnya, pada 5 Agustus 2026, pemerintah kembali menambah alokasi TKD sebesar Rp18,9 triliun.

Dengan tambahan tersebut, total alokasi TKD 2026 menjadi Rp725,2 triliun. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp428,9 triliun.

Tito mengatakan, tambahan TKD terakhir terutama ditujukan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan dalam membiayai belanja pegawai, termasuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anggaran tersebut juga diarahkan untuk membantu daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah.

"Terutama yang terakhir, 5 Agustus, dari Bapak Presiden, melalui Usaha Menteri Keuangan sebanyak Rp18,9 triliun. Itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawainya sulit. Terutama untuk bayar PPPK. Dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah," kata Tito.

Menurut Tito, persoalan pembayaran belanja pegawai di sebagian besar daerah kini telah dapat diatasi. Meski demikian, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah yang menghadapi kendala.

"Dan ini sebagian masalahnya sebenarnya. Sekiranya untuk pembayaran belanja pegawai, hampir semuanya bisa diatasi. Ada beberapa yang sedang kita evaluasi, 26 daerah," pungkas Tito.

Hampir 30% Anggaran Pendidikan Tersedot Untuk MBG di 2027: Capai Rp 240 Triliun

Minggu, 16 Agustus 2026 14:17 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/hampir-30-anggaran-pendidikan-tersedot-untuk-mbg-di-2027-capai-rp-240-triliun>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih masuk dalam anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai Rp 820,9 triliun. Dengan demikian, alokasi MBG sekitar Rp 240 triliun setara dengan sekitar 29,2% dari total anggaran pendidikan, sekaligus menjadi salah satu komponen terbesar dalam anggaran pendidikan 2027.

"MBG untuk 60,6 juta penerima. (Anggaran) sekitar Rp 240 triliun untuk MBG," ujar Purbaya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Selain MBG, anggaran pendidikan 2027 mencakup sejumlah program lain. Pemerintah mengalokasikan Rp 15,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan Rp 17 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG) dan kebutuhan bagi 1,3 juta guru dan PNS. Selain itu, terdapat anggaran untuk pembangunan tujuh sekolah unggul Garuda sebesar Rp 2,7 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan Rp 18,2 triliun untuk inovasi sekolah dan madrasah, serta sekitar Rp 32,9 triliun untuk pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan 166 operasional Sekolah Rakyat.

Komponen lainnya dalam anggaran pendidikan mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa, Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) untuk 6,3 juta peserta didik, serta tunjangan bagi guru.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG-ASND) bagi sekitar 1,7 juta guru di sekolah, serta tambahan penghasilan bagi sekitar 20.700 guru di daerah.

Selain itu, terdapat anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk 148 museum dan taman budaya.

Kadin: Bonus Demografi Belum Otomatis Jadi Bonus Ekonomi

Minggu, 16 Agustus 2026 15:54 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/kadin-bonus-demografi-belum-otomatis-jadi-bonus-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia memiliki modal demografi yang besar dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 201,06 juta jiwa atau sekitar 69,30% dari total populasi.

Namun, kondisi tersebut dinilai belum otomatis menjadi bonus ekonomi apabila tidak diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan Indonesia memang tengah berada dalam periode bonus demografi.

Namun, manfaat ekonomi dari kondisi tersebut baru dapat dirasakan apabila penduduk usia produktif memiliki pekerjaan, keterampilan sesuai kebutuhan industri, pendapatan yang meningkat, serta produktivitas yang lebih tinggi.

"Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus ekonomi. Bonus ekonomi baru terjadi kalau penduduk usia produktif tersebut bekerja, memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, memperoleh pendapatan yang meningkat, dan produktivitasnya juga naik," kata Erwin kepada Kontan, Minggu (16/8/2026).

Menurut dia, perkembangan pasar kerja Indonesia sebenarnya masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Februari 2026, angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang atau bertambah sekitar 1,86 juta orang dalam setahun.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang, meningkat sekitar 1,90 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,68%.

"Ini menunjukkan pasar kerja masih mampu menambah pekerjaan secara agregat. Namun tantangannya sekarang bukan hanya berapa banyak pekerjaan yang tercipta, tetapi pekerjaan seperti apa yang tercipta," ujarnya.

Erwin mengatakan, Indonesia masih menghadapi persoalan kualitas pekerjaan. Penciptaan lapangan kerja dinilai masih banyak terkonsentrasi pada aktivitas dengan nilai tambah dan produktivitas relatif rendah. Di sisi lain, pertumbuhan pekerjaan kelas menengah dan pekerjaan dengan produktivitas tinggi belum cukup cepat.

Karena itu, menurut Erwin, Indonesia tidak cukup hanya mengejar jumlah lapangan kerja untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Pemerintah dan dunia usaha perlu memastikan pekerjaan yang tercipta mampu meningkatkan pendapatan dan produktivitas pekerja.

Kadin bilang, terdapat dua jalur yang perlu dijalankan untuk mengoptimalkan bonus demografi. Pertama, memperkuat sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sejumlah sektor yang dianggap potensial antara lain tekstil dan produk tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, agroindustri, konstruksi, pariwisata, serta ekonomi kreatif.

Sektor-sektor tersebut penting untuk menyerap pekerja muda dan lulusan pendidikan menengah. Namun, pada saat bersamaan Indonesia juga perlu memperbesar sektor dengan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Erwin menyebut, industri elektronik, otomotif dan kendaraan listrik, petrokimia, hilirisasi mineral, industri kesehatan dan farmasi, ekonomi digital, pusat data, energi terbarukan, hingga modern business services sebagai sektor yang perlu dikembangkan.

"Bonus demografi tidak cukup hanya menghasilkan pekerjaan. Pekerjaan tersebut juga harus menghasilkan kenaikan pendapatan per pekerja," jelasnya.

Di sisi lain, transformasi sektor pertanian juga menjadi perhatian. Pasalnya, pertanian masih menjadi lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 42,49 juta orang atau 28,78% dari total pekerja Indonesia pada Februari 2026.

Menurut Erwin, peningkatan produktivitas pertanian, agroindustri, serta hilirisasi pangan menjadi bagian penting dari strategi bonus demografi. Pasalnya, peningkatan produktivitas nasional akan sulit dicapai jika puluhan juta pekerja masih berada pada aktivitas dengan produktivitas rendah.

Erwin menjelaskan, investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memanfaatkan bonus demografi. Namun, pemerintah perlu mengubah cara melihat realisasi investasi agar tidak hanya mengejar nilai investasi yang masuk.

Menurutnya, investasi perlu diukur dari kemampuan menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, serta membangun rantai pasok domestik.

"Setiap kebijakan investasi perlu dilihat dari tiga hal: berapa tenaga kerja yang diserap, berapa besar transfer teknologi yang terjadi, dan seberapa jauh investasi tersebut membangun rantai pasok domestik," kata Erwin.

Selain itu, Indonesia perlu mempertahankan industri padat karya sekaligus membantu sektor tersebut naik kelas. Erwin menilai biaya energi, logistik, pembiayaan, perizinan, serta kepastian regulasi perlu dibuat kompetitif dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia.

Hal ini penting agar industri yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tidak berpindah ke negara lain ketika Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi.

Kadin juga mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar masuk lebih dalam ke rantai pasok industri besar. Menurut Erwin, penciptaan lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan besar.

Akses pembiayaan, digitalisasi, standardisasi produk dan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM perlu diperluas untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan, lima hingga 10 tahun ke depan menjadi periode penting bagi Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi. Pasalnya, setelah periode tersebut, proporsi penduduk lansia diperkirakan terus meningkat sehingga ruang untuk memanfaatkan dominasi penduduk usia produktif semakin terbatas.

Karena itu, reformasi pendidikan dan vokasi perlu dipercepat. Kurikulum pendidikan dan pelatihan harus semakin dekat dengan kebutuhan dunia usaha, sementara industri perlu dilibatkan mulai dari penyusunan kurikulum, apprenticeshiping sertifikasi.

"Industri harus dilibatkan sejak penyusunan kurikulum, apprenticeship sampai sertifikasi, sehingga perusahaan tidak harus melatih ulang tenaga kerja dari nol," ujarnya.

Menurut Erwin, peningkatan produktivitas juga perlu menjadi agenda utama. Reformasi struktural di bidang persaingan usaha, perdagangan dan investasi, pendalaman pembiayaan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja diperlukan agar penciptaan lapangan kerja berkualitas dapat dipercepat.

"Bonus demografi itu bukan hadiah otomatis. Kita sudah mempunyai penduduk usia produktif yang besar, tetapi bonus ekonomi baru akan terjadi jika mereka mempunyai pekerjaan yang produktif dan pendapatannya terus meningkat," tegasnya.

Erwin menambahkan, jika investasi, industrialisasi, pendidikan dan penciptaan pekerjaan dapat bergerak lebih cepat dalam lima hingga 10 tahun mendatang, bonus demografi dapat menjadi akselerator Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Sebaliknya, keterlambatan meningkatkan produktivitas berisiko membuat Indonesia memasuki fase penuaan penduduk ketika tingkat pendapatan dan produktivitas nasional belum cukup tinggi.

"Lima sampai sepuluh tahun ke depan adalah periode yang sangat menentukan. Kalau investasi, industrialisasi, pendidikan dan penciptaan pekerjaan berjalan lebih cepat, bonus demografi bisa menjadi akselerator Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi," pungkas Erwin.

Kuota BBM Subsidi 2027 Dipangkas 58%, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Minggu, 16 Agustus 2026 22:52 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Yudho Winarto

<https://nasional.kontan.co.id/news/kuota-bbm-subsidi-2027-dipangkas-58-ini-penjelasan-menkeu-purbaya>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan pada 2027.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, subsidi BBM menjadi bagian dari anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang dialokasikan sebesar Rp 549,9 triliun.

Berdasarkan paparan pemerintah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan, kuota BBM tertentu bersubsidi pada 2027 ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter (KL).

Angka tersebut turun signifikan dibandingkan total kuota BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta KL. Dengan demikian, kuota BBM subsidi pada 2027 berkurang sekitar 28,34 juta KL atau 58,5%.

Namun, Purbaya mengatakan penurunan subsidi BBM tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan rencana pemerintah mengembangkan kendaraan listrik nasional.

Menurutnya, salah satu faktor utama yang memengaruhi besaran subsidi BBM pada 2027 adalah asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang lebih rendah.

Pemerintah menggunakan asumsi ICP sebesar US\$ 75 per barel pada 2027. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga minyak saat ini yang berada di kisaran US\$ 83 per barel.

"Belum, itu kan pasti karena subsidi harga BBM-nya turun. Asumsi BBM-nya turun tahun depan berapa? US\$ 75 per barel. Kan sekarang US\$ 83. Jadi itu otomatis kalau volumenya naik sedikit pun, kalau harganya turun segitu, subsidinya cenderung turun," kata Purbaya kepada awak media usai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Bukan karena Pembatasan Peralite

Purbaya juga menegaskan, penurunan subsidi BBM dalam RAPBN 2027 bukan berarti pemerintah telah menetapkan pembatasan pembelian Peralite pada tahun depan.

Menurutnya, kebijakan pembelian BBM bersubsidi masih akan disesuaikan dengan kondisi yang berlaku saat ini.

"Belum, belum. Itu belum. Itu dengan keadaan yang sekarang," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya membuka peluang pemerintah menerapkan mekanisme subsidi BBM yang lebih tepat sasaran ke depannya.

Menurut dia, kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak lagi menerima subsidi BBM.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu," katanya.

Prabowo Dorong Motor Listrik

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan mengurangi subsidi BBM secara signifikan pada 2027.

Kebijakan tersebut akan berjalan bersamaan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

"Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional," kata Prabowo dalam pidatonya pada penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPR.

Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik yang diproduksi perusahaan dalam negeri.

Prabowo mengatakan penggunaan motor listrik diharapkan memberikan tiga manfaat bagi perekonomian dan masyarakat.

Pertama, menekan biaya transportasi rumah tangga. Kedua, mengurangi impor energi. Ketiga, membuka lapangan kerja serta sumber penghasilan baru bagi generasi muda.

Menurut Prabowo, penggunaan motor listrik berpotensi memangkas pengeluaran harian masyarakat untuk transportasi lebih dari 50%.

Bahkan, biaya penggunaan motor listrik disebut dapat mencapai sekitar 30% dari biaya yang dikeluarkan untuk BBM saat ini.

Dengan demikian, pemerintah melihat pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Namun, dari sisi anggaran, Purbaya menegaskan bahwa penurunan subsidi BBM 2027 terutama dipengaruhi oleh asumsi harga minyak mentah yang lebih rendah.

Pemerintah Jaga Defisit RAPBN 2027 di Bawah 3%, Andalkan Penerimaan Pajak

Minggu, 16 Agustus 2026 23:15 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Yudho Winarto

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-jaga-defisit-rapbn-2027-di-bawah-3-andalkan-penerimaan-pajak>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan strategi pembiayaan secara hati-hati untuk menutup defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencapai Rp 671,2 triliun.

Defisit tersebut setara dengan 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski belanja negara dirancang tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB.

Dalam RAPBN 2027, Kemenkeu menyebut kebijakan pembiayaan akan dilakukan secara prudent melalui kombinasi pembiayaan utang dan nonutang dengan mempertimbangkan biaya, risiko, serta manfaat jangka panjang.

Pemerintah juga akan memperdalam pasar keuangan domestik dan memperluas basis investor. Selain itu, pemerintah akan melakukan diversifikasi penerbitan obligasi global serta meningkatkan fleksibilitas pengelolaan kas negara.

Strategi pembiayaan juga akan diperkuat melalui pengembangan innovative financing, termasuk pembiayaan investasi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta blended finance.

Dengan strategi tersebut, RAPBN 2027 tetap dirancang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

Purbaya Siapkan Efisiensi Belanja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah akan terus memantau kondisi APBN secara berkala. Jika diperlukan, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan efisiensi belanja untuk menjaga keseimbangan fiskal.

"Kalau ada apa-apa, kita selalu monitor kondisi APBN kita dari bulan ke bulan. Kalau kita perlu efisiensi, kita efisiensi. Kalau keadaan memaksa. Tapi rasanya enggak. Kita akan jaga terus defisit di bawah 3% sesuai dengan perintah Bapak Presiden," tegas Purbaya kepada awak media usai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8).

Selain mengendalikan belanja, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesehatan APBN sekaligus mengurangi tekanan terhadap kebutuhan pembiayaan.

Purbaya mengatakan, penerimaan pajak berpotensi tumbuh lebih baik dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2027.

"Nah, ini sekarang kita lihat pajak dengan keadaan sekarang kan sudah tumbuh segitu kan. Bisa diperkirakan 2,4%. Penerimaan pajak kelihatannya sih akan membaik dibanding dengan sekarang saja, bisa lebih bagus daripada yang direncanakan itu," ujar Purbaya.

Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak juga berpotensi mendorong tax ratio pada 2027. Pemerintah bahkan melihat peluang tambahan penerimaan dari aktivitas ekonomi yang selama ini berada di sektor ilegal dan dapat dialihkan ke sektor formal.

"Tax ratio-nya mungkin akan naik, bukan 9% kayak tadi, mungkin lebih. Jadi, dan tadi kalau rokok masuk yang ilegal masuk ke legal, ada tambahan lagi sedikit nanti," katanya.

Di sisi lain, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.

Aktivitas ekonomi yang semakin kuat akan memperluas basis pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan perpajakan.

"Dan nanti kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat juga kita akan dapatin pajak lebih banyak lagi. Jadi kita akan kerjakan itu," ujar Purbaya.

Dengan kombinasi pengendalian belanja, optimalisasi penerimaan pajak, serta strategi pembiayaan yang prudent, pemerintah menargetkan defisit RAPBN 2027 tetap terkendali di bawah batas 3% PDB.

Ekonomi RI Menunjukkan Daya Tahan di Tengah Tekanan Global dan Regional

Minggu, 16 Agu 2026 14:01 WIB

Melchias Maekus Mekeng

<https://news.detik.com/kolom/d-8621082/ekonomi-ri-menunjukkan-daya-tahan-di-tengah-tekanan-global-dan-regional>

Jakarta - Salah satu pesan penting dari pidato Presiden adalah kemampuan perekonomian nasional mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal I-2026, sementara secara Semester I-2026 mencapai sekitar 5,45%. Pemerintah bahkan menyampaikan optimisme bahwa dengan kebijakan yang tepat, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 dapat bergerak menuju kisaran 6%.

Capaian ini penting karena terjadi ketika dunia masih menghadapi ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, perubahan rantai pasok, fluktuasi harga komoditas, serta ketidakpastian kebijakan ekonomi negara-negara besar. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti menjadi angka statistik. Pertanyaan terpenting justru adalah: seberapa jauh pertumbuhan itu masuk ke rumah tangga rakyat?

Pertumbuhan harus dikonversikan menjadi pekerjaan, pendapatan, peningkatan daya beli, kesempatan berusaha, pelayanan publik yang lebih baik, dan penurunan kemiskinan. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Swasembada Pangan: Fondasi Kedaulatan Ekonomi

Salah satu capaian yang paling strategis adalah sektor pangan. Indonesia telah mencapai kondisi swasembada pada sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Cadangan Beras Pemerintah bahkan telah menembus lebih dari 5 juta ton, suatu tingkat yang sangat tinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan pangan nasional.

Ini tidak boleh dipandang hanya sebagai keberhasilan sektor pertanian. Pangan adalah persoalan kedaulatan negara. Negara dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa tidak boleh menggantungkan kebutuhan pangannya sepenuhnya kepada pasar internasional.

Krisis geopolitik, perubahan iklim, pembatasan ekspor negara produsen, ataupun gangguan rantai pasok global dapat setiap saat mengubah pangan menjadi persoalan strategis. Karena itu, swasembada pangan memiliki hubungan langsung dengan stabilitas ekonomi dan politik. Produksi pangan yang kuat membantu menjaga pasokan.

Pasokan yang cukup membantu menjaga harga. Harga pangan yang terkendali membantu menjaga inflasi. Dan inflasi pangan yang terkendali berarti daya beli rakyat lebih terlindungi.

Petani Harus Menjadi Subjek Pembangunan

Peningkatan produksi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan produsen pangan. Karena itu, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang penting untuk terus dijaga.

Filosofinya sederhana: swasembada harus membuat negara kuat sekaligus membuat petani sejahtera. Maka kebijakan pangan harus dilengkapi dengan pupuk yang tersedia dan terjangkau, irigasi, mekanisasi, benih unggul, pembiayaan, kepastian harga, perlindungan terhadap gejolak pasar, penguatan koperasi, akses pasar, serta pembangunan industri pengolahan di daerah produksi. Jika ini dilakukan, swasembada pangan akan menjadi pintu masuk menuju transformasi ekonomi pedesaan.

Investasi Menunjukkan Kepercayaan Terhadap Indonesia Semakin Membaik

Pada Semester I-2026, realisasi investasi mencapai sekitar Rp 1.010,6 triliun, atau hampir separuh dari target investasi nasional 2026 sekitar Rp 2.041,3 triliun.

Lebih penting lagi, investasi tersebut menciptakan sekitar 1,45 juta lapangan kerja langsung. Sepanjang 2025, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp 1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap memiliki daya tarik investasi dan investasi semakin memainkan peranan penting dalam penciptaan pekerjaan. Namun, ke depan kita harus mengubah ukuran keberhasilan investasi. Pertanyaan tidak cukup hanya: 'Berapa triliun investasi yang masuk?'.

Kita juga harus bertanya: berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa besar transfer teknologi, berapa banyak industri nasional yang masuk dalam rantai pasok, berapa banyak UMKM yang berkembang, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia?

Investasi terbaik bukan hanya investasi yang membawa modal, melainkan investasi yang membangun kapasitas ekonomi nasional.

Investasi Mulai Bergerak ke Luar Jawa

Pada Semester I-2026, investasi di luar Jawa mencapai sekitar Rp 507,8 triliun atau 50,2% dari total investasi, sedikit lebih tinggi dibandingkan investasi di Jawa sekitar Rp 502,8 triliun atau 49,8%.

Ini merupakan sinyal penting bagi pemerataan pembangunan. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara harus semakin menjadi bagian dari peta baru industrialisasi Indonesia. Pemerataan investasi bukan sekadar masalah keadilan antarwilayah. Ia merupakan strategi untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Hilirisasi: Jangan Lagi Menjual Tanah Air dalam Bentuk Bahan Mentah

Pada Semester I-2026, investasi hilirisasi telah mencapai sekitar Rp 300,1 triliun, atau hampir 30% dari keseluruhan realisasi investasi nasional. Indonesia tidak boleh puas hanya mengekspor nikel, tetapi harus masuk ke rantai industri baterai dan kendaraan listrik. Tidak cukup mengekspor bauksit, tetapi harus menghasilkan alumina, aluminium dan produk turunannya.

Tidak cukup menghasilkan sawit, tetapi harus memperkuat industri pangan, oleokimia, biodiesel dan berbagai produk turunannya. Tidak cukup menghasilkan tembaga, tetapi harus membangun industri berbasis tembaga. Prinsipnya sederhana: kekayaan alam Indonesia harus menghasilkan nilai tambah sebesar-besarnya di Indonesia.

Hilirisasi Harus Naik Kelas Menjadi Industrialisasi

Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter. Tahap selanjutnya harus lebih besar: industrialisasi nasional. Rantai yang harus dibangun adalah: sumber daya alam, pengolahan, industri antara industri komponen, manufaktur, teknologi, riset dan inovasi untuk produk bernilai tinggi dan asar global.

Indonesia membutuhkan kebangkitan sektor manufaktur. Industrialisasi juga mempunyai multiplier effect yang luas: transportasi, logistik, perumahan, perdagangan, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga berbagai jasa pendukung. Karena itu industrialisasi harus menjadi salah satu mesin penciptaan kelas menengah Indonesia.

Lapangan Kerja Adalah Ukuran Paling Nyata

Pada akhirnya rakyat tidak hidup dari angka PDB. Rakyat hidup dari pekerjaan dan pendapatan. Karena itu, penciptaan lapangan kerja harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.

Investasi Semester I-2026 yang menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun tantangan berikutnya adalah kualitas pekerjaan tersebut.

Indonesia tidak hanya membutuhkan lebih banyak pekerjaan, tetapi juga pekerjaan yang lebih produktif dengan pendapatan yang lebih baik. Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila generasi muda mendapatkan pendidikan, keterampilan, pekerjaan dan kesempatan ekonomi.

Di antara seluruh indikator ekonomi, daya beli merupakan indikator yang paling cepat dirasakan masyarakat. Bagi keluarga Indonesia, pertanyaan ekonomi sangat konkret: apakah harga beras terjangkau, apakah biaya sekolah dapat dibayar, apakah pekerjaan tersedia, apakah pendapatan cukup sampai akhir bulan, dan apakah keluarga masih mampu menabung?

Karena itu, stabilitas pangan, inflasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harus dipandang sebagai satu kesatuan.

Rumus pembangunan pada akhirnya sederhana: pangan tersedia, harga terkendali, pekerjaan tersedia, pendapatan meningkat dan daya beli menguat.

Maka keberhasilan pertumbuhan ekonomi harus semakin diukur dari pertumbuhan pendapatan riil masyarakat. Kita juga perlu memastikan kelas menengah Indonesia kembali tumbuh dan semakin kuat.

Implementasi biodiesel B50 diarahkan untuk mengurangi impor solar yang sebelumnya masih berada pada kisaran jutaan kiloliter setiap tahun

Kebijakan tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan penghematan devisa yang sangat besar.

Namun manfaat strategisnya jauh melampaui penghematan devisa. B50 menghubungkan perkebunan, industri pengolahan, energi, penciptaan lapangan kerja dan kemandirian nasional.

APBN tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah. APBN harus menjadi instrumen transformasi ekonomi.

Belanja negara harus diarahkan pada sektor yang mempunyai multiplier effect besar: pendidikan, kesehatan, pangan, industri, riset, teknologi, perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas.

Efisiensi bukan sekadar memotong anggaran. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Di tengah agenda industrialisasi, hilirisasi dan investasi, satu hal tidak boleh dilupakan: manusia Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan dan revitalisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Hilirisasi sumber daya alam harus berjalan bersama hilirisasi sumber daya manusia. Semua capaian tersebut tidak berarti Indonesia telah menyelesaikan seluruh persoalannya.

Kemiskinan masih harus ditekan. Ketimpangan harus diperkecil. Pekerjaan informal harus semakin bertransformasi menjadi pekerjaan produktif.

Kualitas pendidikan harus diperbaiki. Produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan. Kelas menengah harus diperkuat. Industri nasional harus diperdalam.

Ketergantungan terhadap impor teknologi harus dikurangi. Pembangunan harus semakin merata sampai ke Indonesia Timur.

Optimisme dan kritik tidak perlu dipertentangkan. Bangsa yang sehat membutuhkan keduanya.

Tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 6, 7 atau bahkan 8%. Tantangan sebenarnya adalah mengubah struktur ekonomi Indonesia.

Dari negara konsumen menjadi negara produsen. Dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir produk bernilai tambah. Dari negara yang mengandalkan kekayaan alam menjadi negara yang menguasai industri dan teknologi.

Dari ketergantungan pangan menuju kedaulatan pangan. Dari ketergantungan energi menuju kemandirian energi. Dari investasi yang hanya mengejar modal menuju investasi yang menciptakan pekerjaan dan transfer teknologi.

Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk, pasar domestik yang besar, sumber daya alam, bonus demografi, posisi geografis yang strategis, basis produksi pangan yang besar, serta peluang menjadi pusat industri dan rantai pasok dunia.

Yang diperlukan adalah konsistensi kebijakan, pemerintahan yang efektif, kepastian hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas manusia, persatuan nasional dan keberanian mengambil keputusan strategis. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk melakukan lompatan sejarah.

Optimisme yang Berakar pada Kerja

Pidato Presiden Prabowo memberikan alasan untuk memandang masa depan Indonesia dengan optimisme yang rasional. Pertumbuhan ekonomi Semester I-2026 sekitar 5,45%, investasi sekitar Rp 1.010,6 triliun, penciptaan sekitar 1,45 juta lapangan kerja langsung dari investasi, investasi hilirisasi sekitar Rp 300,1 triliun, penguatan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, cadangan beras pemerintah di atas 5 juta ton, serta semakin besarnya investasi di luar Jawa menunjukkan adanya fondasi yang dapat diperkuat.

Namun angka-angka tersebut harus dipandang sebagai batu pijakan, bukan garis akhir.

Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukanlah berapa banyak statistik yang dapat ditampilkan pemerintah. Ukuran keberhasilannya adalah apakah rakyat benar-benar merasakan pangan semakin terjamin, harga semakin terjangkau, pekerjaan semakin tersedia, pendapatan semakin baik, daya beli semakin kuat, anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas, petani dan nelayan semakin sejahtera, industri nasional semakin kuat, dan daerah-daerah semakin berkembang.

Memasuki usia 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa ini harus semakin percaya bahwa kita mampu menentukan masa depan sendiri. Indonesia tidak ditakdirkan hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Indonesia tidak ditakdirkan hanya menjual kekayaan alamnya dalam bentuk bahan mentah.

Indonesia harus menjadi bangsa produsen, bangsa industri, bangsa inovator dan bangsa yang berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Optimisme bukan berarti mengatakan bahwa semua persoalan telah selesai.

Optimisme adalah keberanian untuk mengakui kemajuan, keteguhan untuk memperbaiki kekurangan, dan keyakinan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan untuk menjadi bangsa yang maju, mandiri, adil, sejahtera dan bermartabat.

Itulah pekerjaan besar kita bersama. Dan itulah optimisme Indonesia menuju masa depan.

Samuel Wattimena Soroti Konsistensi Kebijakan Pemerintah dan Anggaran Ekonomi Kreatif

Minggu, 16 Agustus 2026 19:33 WIB

Bejan S

<https://jatengpos.co.id/semarang/2026/08/16/samuel-wattimena-soroti-konsistensi-kebijakan-pemerintah-dan-anggaran-ekonomi-kreatif/>

JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut Samuel, dukungan anggaran pemerintah menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong perkembangan industri kreatif, khususnya yang banyak digerakkan generasi muda. Sektor teknologi informasi juga dinilai memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Program ini pun dijalankan bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM,” kata Samuel dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8/2026).

Ia menyebut pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif, terutama anak muda yang bergerak di bidang teknologi informasi, menunjukkan perkembangan positif. Namun, potensi tersebut dinilai tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dukungan anggaran yang memadai.

Karena itu, Samuel meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Ekonomi Kreatif.

“Saya meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Sehingga nantinya target menjadikan sektor tersebut sebagai mesin pertumbuhan baru dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan ekonomi nasional tidak semata-mata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, ketahanan pangan, serta kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Presiden menyampaikan hal tersebut saat menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2025. Menurutnya, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK turut menghasilkan penyelamatan keuangan negara hingga Rp112 triliun.

“BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun,” kata Prabowo.

Perbedaan pandangan tersebut menempatkan kebijakan efisiensi anggaran dalam konteks yang lebih luas. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga akuntabilitas dan efisiensi keuangan negara.

Di sisi lain, dukungan fiskal tetap dibutuhkan untuk mengembangkan sektor-sektor potensial, termasuk ekonomi kreatif dan teknologi informasi yang dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. (ucl)

Bank Jateng gelar Gebyar Fest 81, dorong UMKM dan perkuat ekosistem ekonomi daerah

Minggu, 16 Agustus 2026 11:53 WIB

Pewarta: Aris Wasita, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/642027/bank-jateng-gelar-gebyar-fest-81-dorong-umkm-dan-perkuat-ekosistem-ekonomi-daerah>

Semarang (ANTARA) - Bank Jateng menggelar Gebyar Fest 81 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut telah dibuka secara serentak pada tanggal 12 Agustus 2026 di 44 Kantor Cabang Bank Jateng, dengan pusat kegiatan berlangsung di Bank Jateng Cabang Utama, Jalan Pemuda, Semarang.

Pembukaan Gebyar Fest 81 di Kantor Cabang Utama akan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, kepala daerah se-Jawa Tengah, serta jajaran Direksi dan Komisaris Bank Jateng.

Mengusung tema “81 Semangat Berkarya, Bersama Bank Jateng Menggerakkan Ekonomi Daerah”, kegiatan ini dirancang sebagai ajang promosi, edukasi, pemberdayaan UMKM, sekaligus penguatan ekosistem bisnis Bank Jateng.

Gebyar Fest 81 sudah berlangsung secara serentak di 44 Kantor Cabang Bank Jateng pada 12–16 Agustus 2026.

Rangkaian kegiatan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah melalui penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan, peningkatan transaksi digital, serta edukasi keuangan.

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko mengatakan, Gebyar Fest 81 menjadi momentum bagi Bank Jateng untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai Bank Pembangunan Daerah.

“Gebyar Fest 81 menjadi momentum bagi Bank Jateng untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai produk dan layanan Bank Jateng, memberdayakan UMKM, serta mendorong masyarakat untuk semakin memahami dan memanfaatkan layanan keuangan,” kata Bambang.

Salah satu rangkaian utama Gebyar Fest 81 adalah akad kredit massal yang dilakukan secara simbolis dengan lima debitur di Kantor Cabang Utama.

Secara keseluruhan, akad kredit tersebut dilakukan serentak dengan melibatkan sekitar 1.100 debitur dengan penyaluran mencapai Rp279 miliar yang berasal dari berbagai segmen pembiayaan, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Syariah, Kredit Pemilikan Perumahan (KPP), FLPP, dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Menurut Bambang, UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Bank Jateng memberikan ruang bagi UMKM binaan untuk memasarkan produk sekaligus memperluas akses terhadap pembiayaan dan ekosistem layanan perbankan.

“Kami ingin UMKM tidak hanya mendapatkan ruang untuk memasarkan produknya, tetapi juga memperoleh akses terhadap edukasi, pembiayaan, transaksi digital, dan berbagai layanan perbankan yang dapat mendukung pengembangan usaha. Dengan begitu, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Selain akad kredit massal, Gebyar Fest 81 juga diramaikan dengan peresmian Gebyar Fest 81, launching layanan transaksi Finnet, serta launching redesign Bima Mobile yang disaksikan secara serentak oleh 44 Kantor Cabang melalui Zoom.

Rangkaian kegiatan juga mencakup peresmian EV Charging Station dan test drive kendaraan listrik, peninjauan booth expo dan UMKM binaan, serta seluruh tenant UMKM sebanyak 453 booth yang tersebar di seluruh Kantor Bank Jateng.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Jateng dalam memperkuat ekosistem transaksi digital. Seluruh tenant UMKM dalam kegiatan diwajibkan menggunakan QRIS Bank Jateng sehingga masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara nontunai.

Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh edukasi dan layanan terkait Bima Mobile serta berbagai produk dan jasa perbankan Bank Jateng.

Bambang menambahkan, aspek literasi dan inklusi keuangan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Gebyar Fest 81. Masyarakat akan mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, akses pembiayaan, produk perbankan, dana pensiun, hingga pemanfaatan layanan digital.

“Literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui Gebyar Fest 81, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih mudah dan dekat dengan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan layanan perbankan dan digital,” jelasnya.

Selain bazar UMKM, kegiatan juga diisi dengan literasi dan edukasi keuangan, layanan produk perbankan, senam sehat, lomba 17 Agustus, kegiatan charity, Jumat Berkah, serta berbagai aktivitas lainnya.

Di Kantor Cabang Utama, kegiatan charity antara lain berupa simbolis santunan bagi anak yatim piatu dan veteran, sementara di Kantor Cabang juga dilaksanakan kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis.

Rangkaian Gebyar Fest 81 kemudian dilanjutkan dengan expo UMKM, layanan produk dan edukasi yang terbuka bagi masyarakat.

Dari sisi bisnis, Gebyar Fest 81 juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), pembukaan rekening baru, aktivasi Bima Mobile, penambahan merchant QRIS, peningkatan kepesertaan DPLK Setia, hingga penjualan produk syariah.

“Harapannya, Gebyar Fest 81 dapat menjadi ruang kolaborasi antara Bank Jateng, masyarakat, pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan mitra strategis. Dari kegiatan ini, kami ingin membangun ekosistem bisnis yang semakin kuat sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Bambang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan kegiatan akad kredit massal tersebut menjadi salah satu bentuk peran Bank Jateng dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat.

Menurutnya, pembiayaan yang diberikan mencakup rumah layak huni, kendaraan hingga kredit usaha rakyat. “Bank Jateng adalah merupakan kebanggaan daripada masyarakat Jawa Tengah,” kata Luthfi.

Ahmad Luthfi menambahkan bahwa pentingnya peran Bank Jateng dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui penguatan pembiayaan bagi sektor mikro dan UMKM.

Luthfi menyebut jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai lebih dari empat juta pelaku usaha. Karena itu, kemudahan akses permodalan dinilai menjadi salah satu kunci agar usaha mikro dapat berkembang dan naik kelas.

Dorongan tersebut sejalan dengan semangat Gebyar Festival 81. Penyaluran kredit tidak hanya dipandang sebagai aktivitas bisnis perbankan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

"Bagi pelaku usaha kecil, akses pembiayaan dapat menjadi modal untuk menambah kapasitas produksi, memperluas pemasaran, maupun mengembangkan usaha," ujar Ahmad Luthfi.

Ekonomi Jepang Q2-2026 Melambat Efek Konflik Timur Tengah

Senin, 17 Agustus 2026 08:40 WIB

Erica Yokoyama

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118565/ekonomi-jepang-q2-2026-melambat-efek-konflik-timur-tengah/2>

Bloomberg, Pertumbuhan ekonomi Jepang melambat secara tak terduga pada kuartal II 2026, seiring belanja modal yang terus melemah di tengah ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.

Produk domestik bruto (PDB) riil tumbuh 1,1% secara tahunan pada kuartal II, menurut laporan Kantor Kabinet Jepang, Senin (17/8). Pertumbuhan tersebut melambat dari revisi 1,9% pada kuartal sebelumnya dan di bawah proyeksi ekonom sebesar 2%. Meski demikian, perekonomian Jepang masih mencatat ekspansi selama tiga kuartal berturut-turut.

Investasi modal turun 1,2% secara triwulan (non-tahunan), lebih dalam dibandingkan penurunan 1% pada periode sebelumnya setelah direvisi. Angka tersebut juga meleset dari perkiraan yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan 0,5%.

“Konsumsi cukup lemah,” kata Kepala Ekonom Daiwa Institute of Research Keiji Kanda. “Penurunan barang tidak tahan lama lebih besar dari yang diperkirakan, dan mengingat konsumsi tidak sekuat yang diharapkan serta belanja modal juga lemah, penilaian saya adalah hasil keseluruhan tidak terlalu kuat.”

Data tersebut dirilis ketika perekonomian Jepang menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga bahan bakar dan produk berbasis minyak bumi, sekaligus mengganggu sejumlah rantai pasok. Perlambatan yang tak terduga ini dapat mempersulit komunikasi kebijakan Bank of Japan (BOJ) ketika bank sentral mempertimbangkan waktu kenaikan suku bunga berikutnya.

Hingga Senin pagi, pelaku pasar memperkirakan probabilitas BOJ menaikkan suku bunga acuannya mencapai 80% pada keputusan kebijakan berikutnya, yang dijadwalkan pada 18 September, berdasarkan harga di pasar overnight swaps.

Di antara faktor lain yang menekan pertumbuhan, konsumsi swasta tercatat stagnan dan meleset dari konsensus yang memperkirakan kenaikan 0,4%. Pada kuartal sebelumnya, konsumsi swasta tumbuh 0,5% setelah direvisi. Hasil tersebut kemungkinan mencerminkan keengganan masyarakat untuk berbelanja akibat frustrasi terhadap kenaikan biaya hidup.

Indikasi lemahnya permintaan domestik menjadi perhatian bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahannya mulai menurun sekitar enam bulan setelah kemenangan telak dalam pemilu, ketika konsumen masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan. Takaichi telah menyalurkan subsidi untuk membatasi biaya utilitas dan kini berencana memangkas pajak penjualan makanan menjadi 1% selama dua tahun mulai April.

Data PDB tersebut agak bertolak belakang dengan sejumlah rilis data perusahaan yang secara umum positif selama periode tersebut. Survei Tankan BOJ menunjukkan sentimen bisnis di kalangan produsen besar meningkat pada Juni ke level tertinggi sejak 2018, sementara indikator perusahaan non-manufaktur besar bertahan di level terkuat sejak 1991.

Produksi industri meningkat setiap bulan sejak akhir kuartal I, dengan proyeksi menunjukkan kenaikan lebih lanjut pada Juli dan Agustus. Sementara itu, indeks PMI manufaktur tetap berada di level tinggi setelah naik pada April ke posisi tertinggi dalam 12 tahun.

Penurunan investasi perusahaan terjadi meski kinerja laba korporasi relatif kuat. Laba berjalan perusahaan Jepang meningkat lebih besar dari perkiraan secara tahunan dalam tiga bulan hingga Maret.

Meski demikian, perusahaan menghadapi kenaikan biaya operasional. Harga barang korporasi terus meningkat pada laju tinggi pada Juli, naik 7,2% dibandingkan setahun sebelumnya, sehingga menekan perusahaan untuk menaikkan harga bagi konsumen.

Pemerintah berupaya mengatasi ketatnya pasokan energi dengan mendiversifikasi sumber energi ketika Selat Hormuz masih secara efektif tertutup. Data perdagangan Juni menunjukkan AS menyumbang hampir sepertiga impor minyak Jepang, dibandingkan hanya 7% pada Februari.

Ke depan, perekonomian Jepang menghadapi kombinasi faktor pendukung dan tekanan. Meski demikian, kenaikan upah yang solid hasil negosiasi kenaikan gaji tahunan serta subsidi pemerintah diperkirakan akan membantu menopang belanja rumah tangga, menurut para ekonom.

“Konsumsi lebih lemah dari perkiraan, tetapi kompensasi karyawan meningkat dari kuartal sebelumnya dan upah riil terus tumbuh dibandingkan setahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, saya tidak berpikir tren pemulihan ekonomi yang mendasar telah terhenti,” kata Kanda.

Berbagai Sektor Melemah, Ekonomi China Kian Melambat

Senin, 17 Agustus 2026 15:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118596/berbagai-sektor-melemah-ekonomi-china-kian-melambat/2>

Bloomberg, Ekonomi China mengawali paruh kedua tahun ini dengan laju yang lesu, di mana kinerja produksi industri, konsumsi, dan investasi tercatat lebih buruk dari perkiraan.

Produksi industri tumbuh lebih lambat—untuk pertama kali dalam tiga bulan—dengan kenaikan sebesar 4,5% pada Juli dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional pada Senin.

Angka ini berada di bawah perkiraan median ekonom yang disurvei oleh Bloomberg, yakni sebesar 5%. Pertumbuhan penjualan ritel melambat menjadi 0,6%, juga di bawah ekspektasi.

Investasi aset tetap turun lebih dalam dari perkiraan, yakni sebesar 6,7% secara tahunan (yoy) dalam tujuh bulan pertama tahun ini, setelah sebelumnya turun 5,7% pada paruh pertama. Tingkat pengangguran di perkotaan naik menjadi 5,2% dari 5% pada Juni.

Permintaan domestik yang lemah dan gangguan akibat cuaca ekstrem semakin memperlambat perekonomian yang sudah melemah akibat kebijakan pengetatan fiskal selama berbulan-bulan.

Pertumbuhan ekonomi sempat melambat hingga di bawah target tahunan pemerintah sebesar 4,5%–5% pada kuartal kedua—meski ekspor melonjak—dan Bloomberg Economics memperkirakan momentum pertumbuhan kembali melemah pada awal Agustus.

Curah hujan tinggi dan angin kencang melanda sebagian besar wilayah China bulan lalu, menyebabkan penutupan sementara pabrik dan pelabuhan, pemadaman listrik, serta memaksa puluhan ribu orang mengungsi.

Meski gangguan ini mungkin hanya berdampak sementara, para pembuat kebijakan kemungkinan besar memantau data tersebut dengan cermat untuk menilai apakah diperlukan bantuan tambahan bagi perekonomian guna memastikan target pertumbuhan tetap dapat dicapai.

Awalnya dijadwalkan dipublikasikan pada pukul 10 pagi, rilis data tersebut tertunda selama lima jam setelah badan statistik merevisi jadwalnya, yang bertentangan dengan praktik yang berlaku belakangan ini.

Upacara pemerintah yang menandai peringatan 100 tahun kelahiran mendiang mantan Presiden Jiang Zemin sedang berlangsung pada pagi hari itu, yang diisi dengan pidato utama dari pemimpin China Xi Jinping.

Para pemimpin puncak menunjukkan sikap yang lebih mendukung terhadap perekonomian dalam rapat kebijakan penting bulan lalu, tetapi tidak mengumumkan paket stimulus baru. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa pemerintah akan merencanakan dan menerapkan langkah-langkah baru yang "pragmatis dan efektif" pada waktu yang tepat.

Pihak berwenang China kini dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan belanja bisnis dan rumah tangga, yang penurunannya telah membuat perekonomian sangat bergantung pada ekspor untuk mempertahankan pertumbuhan.

Menyoroti ketimpangan yang mencolok dalam permintaan domestik, laju inflasi baik di tingkat konsumen maupun produsen melambat melebihi perkiraan pada Juli seiring meredanya guncangan

harga minyak akibat konflik Iran; hal ini memicu kekhawatiran bahwa tekanan deflasi dapat kembali muncul dalam waktu dekat.

Pembelian kendaraan penumpang turun 21% pada Juli—tanda yang mengkhawatirkan bagi sektor otomotif secara luas, mengingat sektor ini merupakan komponen barang terbesar dalam total penjualan ritel dengan pangsa sekitar 8%.

Sementara itu, produsen mobil China terus mengalami tekanan margin akibat tingginya biaya bahan baku dan praktik pemberian diskon yang terus-menerus di tengah persaingan harga yang sengit dengan para pesaing.

Selain itu, sebagai tanda memburuknya kinerja penjualan di pasar domestik, indikator pesanan baru dalam indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur resmi Juli kembali menunjukkan kontraksi dengan merosot ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun—pertanda buruk bagi aktivitas produksi industri.

Goldman: Pasar Terlalu Hawkish Prediksi Kenaikan Bunga The Fed

Senin, 17 Agustus 2026 16:40 WIB

Ruth Carson

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/118603/goldman-pasar-terlalu-hawkish-prediksi-kenaikan-bunga-the-fed/2>

Bloomberg, Menurut Goldman Sachs Group Inc, spekulasi pasar mengenai kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) masih terlalu agresif (hawkish) mengingat inflasi di ekonomi terbesar dunia ini sedang melandai.

Kenaikan suku bunga pada pertemuan bank sentral September kini menjadi "sangat kecil kemungkinannya" karena data penjualan ritel melemah, angka ketenagakerjaan mengecewakan, dan laju inflasi melambat, tulis kepala ekonom bank investasi tersebut, Jan Hatzius, dalam catatan untuk klien.

“Berdasarkan proyeksi ekonomi dasar kami, kondisi inflasi lebih mungkin membaik lebih lanjut daripada memburuk lagi seiring berjalannya tahun ini,” tulis Hatzius dalam catatannya. “Kami masih berpendapat bahwa penetapan harga pasar untuk suku bunga acuan terlalu hawkish.”

Para pedagang telah menggeser ekspektasi mereka mengenai kenaikan suku bunga The Fed sebesar seperempat poin berikutnya ke Januari, setelah sebelumnya memperhitungkan langkah tersebut akan terjadi pada Desember, menurut data yang dihimpun Bloomberg.

Meskipun ekspektasi pasar menjadi kurang hawkish, menurut Goldman, masih ada ruang bagi penyesuaian posisi pasar tersebut untuk terus berlanjut.

Spekulasi mengenai kebijakan The Fed sangat krusial bagi pasar obligasi pemerintah global, mengingat langkah kebijakan AS cenderung memengaruhi suku bunga di seluruh dunia.

Investor obligasi Treasury kini dihadapkan pada dua kekuatan yang saling bertentangan: inflasi yang melandai kembali meningkatkan daya tarik kepemilikan obligasi, sementara besarnya pinjaman pemerintah dan kekhawatiran fiskal yang terus berlanjut menekan pembeli untuk menuntut imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi memegang utang bertenor panjang.

Kata Ahli Strategi Bloomberg...

“Meski imbal hasil obligasi tenor pendek dapat didukung oleh berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga tahun ini, imbal hasil obligasi tenor panjang tetap rentan”

—Edward Harrison, analis Markets Live

Ketegangan tersebut berisiko membuat imbal hasil obligasi tenor panjang tetap tinggi, meski tekanan harga mereda, sehingga melemahkan reli yang biasanya dipicu oleh melambatnya inflasi.

Imbal hasil obligasi Treasury tenor dua tahun—salah satu yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan AS—tetap di atas 4%, karena investor mempertimbangkan apakah dan kapan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga lagi.

Kurva imbal hasil Treasury AS kemungkinan akan semakin curam didorong oleh membaiknya inflasi, berkurangnya premi risiko kenaikan suku bunga, serta berita anggaran yang mengkhawatirkan, menurut catatan Goldman.

"Setelah dua bulan data ketenagakerjaan dan inflasi yang jauh lebih lemah, sulit membayangkan kubu yang mendukung kebijakan longgar (doves) akan beralih mendukung kenaikan suku bunga," tulis Hatzius, merujuk pada para pejabat The Fed yang memiliki hak suara dalam keputusan suku bunga tahun ini.

Purbaya Pangkas Target Bea Cukai Rp4 Triliun pada 2027

Senin, 17 Agustus 2026 13:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/118590/purbaya-pangkas-target-bea-cukai-rp4-triliun-pada-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurunkan target kepabeanan dan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Hal itu terungkap dalam paparan Purbaya terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2027.

Bendahara Negara tersebut mengungkapkan target penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun depan hanya Rp316,6 triliun atau turun Rp4 triliun atau 1,2% jika dibandingkan revisi target APBN 2026 sebesar Rp 320,6 triliun.

Sementara itu, jika dibandingkan target awal APBN 2026 mengalami penurunan sebesar 5,77%. Akan tetap, Purbaya tidak mengelaborasi secara detail alasan penurunan target tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya memastikan penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT) tetap diberlakukan pada tahun ini setelah pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rampung.

"Kalau untuk cukai rokok, kita akan coba terapkan tahun ini. Setelah saya bicara dengan parlemen. Kita masih belum ketemu, masih belum dapat waktu. Setelah 17 Agustus ini kan baru kita ketemu DPR untuk memastikan CHT," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers dikutip Senin (17/8/2026).

Dia menjelaskan penambahan layer cukai tersebut ditujukan agar pengusaha rokok yang selama ini beroperasi secara ilegal bisa masuk ke sistem legal.

"Tujuannya supaya yang ilegal-ilegal bisa masuk ke legal, sehingga saya bisa menutup semua yang ilegal," imbuhnya.

Sampai dengan semester I-2026, penerimaan cukai keseluruhan tercatat sebesar Rp109,4 triliun. Pertumbuhannya hanya sebesar 0,6% secara tahunan atau year on year/yoy).

Sementara itu, penindakan rokok ilegal naik sangat signifikan. Jumlah rokok ilegal yang sudah ditindak mencapai 904 juta batang atau naik hingga 95,5% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 sebesar 463 juta batang. Hasil penindakan dengan azas ultimum remedium ini berkontribusi ke kas negara sebesar Rp72,9 miliar.

Kondisi Ekonomi Memburuk, Produksi Baja China Anjlok

Senin, 17 Agustus 2026 17:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118599/kondisi-ekonomi-memburuk-produksi-baja-china-anjlok/2>

Bloomberg, Produksi baja China anjlok bulan lalu, sehingga industri ini diperkirakan akan mencatatkan total tahunan terendah dalam satu dekade terakhir seiring upaya pabrik-pabrik menyesuaikan diri dengan permintaan yang jauh lebih lemah.

Pasar baja sedang menghadapi hambatan struktural yang besar. Pemerintah tampaknya bersedia menoleransi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, sementara krisis di pasar properti negara tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Menurut data Biro Statistik Nasional pada Senin, produsen baja memproduksi 76,93 juta metrik ton pada Juli—turun 3,6% secara tahunan (yoy) dan merupakan angka bulanan terendah yang tercatat tahun ini. Total produksi selama tujuh bulan pertama turun 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 577,04 juta metrik ton.

Penurunan konsumsi secara musiman diperparah oleh memburuknya kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kontraksi aktivitas konstruksi semakin dalam menurut indeks manajer pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) terbaru, sementara investasi aset tetap turun drastis, berdasarkan data biro statistik tersebut.

Akibatnya, harga spot baja tulangan—yang digunakan dalam bangunan dan infrastruktur—telah anjlok mendekati level terendah dalam 10 tahun. Harga berjangka acuan bijih besi, bahan baku utama baja, telah turun secara signifikan di bawah US\$100 per ton.

Data produksi komoditas utama lainnya:

Pengolahan minyak mentah anjlok 16% secara tahunan akibat dampak berkelanjutan dari perang di Iran, meski totalnya lebih tinggi daripada level terendah dalam enam tahun yang dicapai pada Juni.

Aluminium, komoditas lain yang terdampak konflik, naik 3,8% hingga mendekati rekor Juni.

Produksi batu bara turun 10% hingga mendekati level terendah dalam lima tahun. Inspeksi keselamatan telah membatasi aktivitas penambangan di pusat utama Shanxi menyusul kecelakaan fatal pada Mei.

Produksi gas alam sedikit menurun, sementara produksi minyak mentah naik tipis.

Produksi listrik dari pembangkit skala besar turun secara tahunan untuk pertama kalinya sejak 2022. Peningkatan kinerja turbin angin membantu energi bersih memenuhi seluruh permintaan tambahan, sehingga menyebabkan pembangkit termal turun 3,5%.

Pertumbuhan Ekonomi Thailand Kuartal II-2026 Lampaui Perkiraan, Target 2026 Dinaikkan

Senin, 17 Agustus 2026 12:40 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-thailand-kuartal-ii-2026-lampaui-perkiraan-target-2026-dinaikkan>

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Ekonomi Thailand melambat pada kuartal kedua tahun 2026 namun tetap melampaui perkiraan; investasi swasta yang lebih kuat mengimbangi konsumsi yang melemah dan penurunan investasi publik. Sementara pemerintah menaikkan prospek pertumbuhan untuk tahun tersebut.

Reuters pada Senin (17/8/2026) melaporkan, Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC) mengatakan, ekonomi Thailand didukung oleh peningkatan investasi swasta, belanja pemerintah, dan ekspor.

Ekonomi Thailand tumbuh 1,9% pada kuartal April-Juni dibandingkan tahun sebelumnya, melampaui perkiraan median sebesar 1,7% dalam jajak pendapat Reuters.

Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC) kini memprediksi pertumbuhan sebesar 2,0% hingga 2,5% untuk keseluruhan tahun, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 1,5% hingga 2,5%.

Secara kuartalan dengan penyesuaian musiman, ekonomi berkontraksi 0,2% pada kuartal April-Juni; kontraksi yang lebih kecil dibandingkan perkiraan jajak pendapat sebesar 0,6%.

Pada kuartal Januari-Maret, pertumbuhan tercatat sebesar 2,8% secara tahunan dan 0,6% secara kuartalan (angka revisi). Pada semester pertama tahun ini, ekonomi tumbuh 2,4% secara tahunan. "Ekonomi diperkirakan akan tumbuh lebih kuat pada kuartal ketiga dibandingkan kuartal kedua, yang sempat terpukul cukup keras oleh konflik di Timur Tengah," ujar kepala badan tersebut, Danucha Pichayanon, dalam sebuah taklimat.

Nilai tukar baht menguat setelah data PDB dirilis, sementara indeks acuan naik 1%.

"Dengan melambatnya momentum inflasi dan pertumbuhan di bawah 2% secara tahunan, kebijakan moneter kemungkinan besar akan tetap tidak berubah, dengan suku bunga kebijakan di angka 1% selama 12 bulan ke depan," kata Kobsidhi Silpachai, kepala Riset Pasar Modal di Kasikornbank. Pada bulan Juni, bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya tetap di level 1,00%.

Tinjauan kebijakan moneter berikutnya dijadwalkan pada 26 Agustus, dan Gubernur Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn, menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga untuk saat ini. Ekonomi tumbuh 2,4% tahun lalu dan tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan sejak pandemi Covid-19, di mana tingginya utang rumah tangga terus menghambat konsumsi.

Badan tersebut memperkirakan ekspor—salah satu penggerak utama ekonomi—akan meningkat 15,1% tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 9,6%.

Sektor pariwisata, yang merupakan sumber pertumbuhan utama lainnya, diperkirakan akan mencatat kedatangan 32 juta wisatawan asing tahun ini—angka yang sama dengan perkiraan sebelumnya, menurut badan tersebut. Thailand pernah mencatat rekor hampir 40 juta pengunjung asing pada tahun 2019, sebelum pandemi terjadi.

Tingkat pengangguran tercatat sebesar 0,96% pada kuartal kedua, dibandingkan dengan angka revisi 0,94% pada kuartal sebelumnya, ungkap badan tersebut.

Pada kuartal April-Juni, ekonomi terbebani oleh lemahnya konsumsi akibat tingginya utang rumah tangga dan biaya hidup.

Pemerintah meluncurkan skema subsidi konsumen senilai 176 miliar baht (5,33 miliar dolar AS) pada bulan Juni, sebagai bagian dari rencana pinjaman yang lebih luas sebesar 400 miliar baht untuk mengatasi dampak kenaikan harga minyak dan meringankan beban biaya hidup.

Bulan lalu, Kementerian Keuangan menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 menjadi 2,5% dari sebelumnya 1,6%, dengan alasan peningkatan ekspor dan permintaan domestik serta langkah-langkah dukungan pemerintah.

Tingkat inflasi umum melambat menjadi 1,95% pada bulan Juli, masih berada dalam kisaran target bank sentral sebesar 1% hingga 3%. Badan perencanaan memproyeksikan inflasi umum berada di kisaran 1,5% hingga 2,0% pada tahun ini. (\$1 = 33,05 baht)

Yuan China Mendekati Level Tertinggi 3,5 Tahun Jelang Rilis Data Ekonomi

Senin, 17 Agustus 2026 11:00 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yuan-china-mendekati-level-tertinggi-35-tahun-jelang-rilis-data-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yuan China menguat tipis dan bergerak mendekati level tertinggi dalam sekitar 3,5 tahun terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (17/8/2026).

Pergerakan yuan terjadi di tengah pelemahan dolar AS dan menjelang rilis sejumlah data ekonomi China.

Mengutip Reuters, yuan di pasar spot tercatat naik tipis ke 6,7411 per dolar AS, mendekati level terkuat sejak Februari 2023 di 6,74 yang dicapai pada pekan lalu.

Sementara itu, yuan offshore menguat sekitar 0,04% menjadi 6,7415 per dolar AS dalam perdagangan Asia.

Indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama turun 0,07% menjadi 99,52, mendekati level terlemahnya sepanjang bulan ini.

Pelemahan dolar AS terjadi setelah penjualan ritel AS secara tak terduga turun pada Juli.

Data tersebut memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga pada September.

Sepanjang Agustus 2026, yuan telah menguat sekitar 0,7% terhadap dolar AS. Sementara sejak awal tahun, yuan telah menguat sekitar 3,8%.

"Kami meyakini kondisi untuk pelemahan dolar AS lebih lanjut mulai terbentuk, meskipun masih diperlukan konfirmasi kebijakan untuk memberikan sinyal yang jelas," tulis analis CICC dalam sebuah catatan.

Menurut mereka, kondisi pasar secara umum telah bergerak ke arah yang menguntungkan yuan sehingga menciptakan kecenderungan penguatan yang cukup kuat.

PBOC Jaga Laju Penguatan Yuan

Meski demikian, Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBOC) diperkirakan tetap berupaya mengendalikan laju penguatan yuan agar tidak terlalu cepat.

Sebelum perdagangan dibuka, PBOC menetapkan nilai tengah yuan di level 6,7873 per dolar AS, yang merupakan level terkuat sejak 8 Februari 2023.

Nilai tersebut juga 491 pips lebih lemah dibandingkan estimasi Reuters. Yuan spot diperbolehkan bergerak maksimal 2% di atas atau di bawah nilai tengah yang ditetapkan bank sentral setiap hari.

Trader dan analis mengatakan, PBOC secara bertahap memperkuat panduan nilai tukar yuan harian, tetapi tetap menetapkannya pada level yang lebih lemah dibandingkan ekspektasi pasar.

"Premi fixing yang cukup besar menunjukkan resistensi terhadap penguatan yang terlalu cepat dan memungkinkan yuan terapresiasi secara terukur," tulis analis OCBC.

Kebijakan tersebut menunjukkan PBOC berupaya menjaga stabilitas ekspektasi pasar sekaligus memberikan ruang bagi yuan untuk menguat secara bertahap.

Pasar Menanti Data Ekonomi China

Pelaku pasar kini menunggu serangkaian data ekonomi China yang akan dirilis pada Senin.

Data tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

Sebelumnya, data penyaluran kredit perbankan China pada Juli mencatat kontraksi terbesar sepanjang sejarah, mencerminkan melemahnya permintaan kredit.

Untuk Juli, produksi industri China diperkirakan tumbuh 4,8% secara tahunan, melambat dari pertumbuhan 5,3% pada Juni.

Sementara itu, penjualan ritel diperkirakan tumbuh 1,5%, membaik dibandingkan pertumbuhan 1% pada periode sebelumnya.

Data tersebut akan menjadi perhatian investor untuk melihat apakah perlambatan ekonomi China semakin dalam atau mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi.

Ekspor Singapura Melonjak 24,2% pada Juli 2026, Didorong Permintaan AI

Senin, 17 Agustus 2026 09:09 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-singapura-melonjak-242-pada-juli-2026-didorong-permintaan-ai>

KONTAN.CO.ID - Ekspor domestik nonmigas Singapura kembali mencatat pertumbuhan kuat pada Juli 2026. Kinerja ekspor ditopang tingginya permintaan terkait kecerdasan buatan (AI), khususnya terhadap produk elektronik.

Mengutip Reuters, Senin (17/8/2026), data pemerintah menunjukkan ekspor domestik nonmigas Singapura pada Juli 2026 meningkat 24,2% secara tahunan (year on year/YoY).

Pertumbuhan tersebut menjadi yang keempat secara beruntun dengan kenaikan di atas 20%. Capaian ini juga mendekati perkiraan median ekonom dalam jajak pendapat Reuters sebesar 25%.

Kenaikan ekspor terutama didorong oleh permintaan yang kuat terhadap produk elektronik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi AI. Sementara itu, pengiriman produk non-elektronik justru mengalami penurunan.

Enterprise Singapore menyebut ekspor Singapura meningkat ke sembilan dari 10 pasar utama negara tersebut.

Pertumbuhan ekspor terutama didorong oleh peningkatan pengiriman ke Amerika Serikat, China dan Taiwan.

Proyeksi Ekspor Singapura Naik

Kinerja ekspor yang tetap kuat membuat pemerintah Singapura semakin optimistis terhadap prospek perdagangan sepanjang tahun ini.

Pekan lalu, Enterprise Singapore menaikkan proyeksi pertumbuhan ekspor domestik nonmigas Singapura pada 2026 menjadi 14%-16%.

Proyeksi tersebut meningkat signifikan dibandingkan perkiraan sebelumnya yang berada di kisaran 3%-5%.

Penguatan ekspor menjadi salah satu indikator penting bagi perekonomian Singapura, mengingat negara tersebut sangat bergantung pada perdagangan internasional dan sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Ekonomi Jepang Tumbuh 1,1% di Kuartal II, di Bawah Perkiraan

Senin, 17 Agustus 2026 09:02 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-jepang-tumbuh-11-di-kuartal-ii-di-bawah-perkiraan>

KONTAN.CO.ID - Ekonomi Jepang tumbuh lebih lambat dari perkiraan pada kuartal II-2026. Pertumbuhan ekonomi tertekan oleh lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis, meski ekspor masih menunjukkan kinerja positif.

Mengutip Reuters, Senin (17/8/2026), produk domestik bruto (PDB) Jepang tumbuh 1,1% secara tahunan (annualised) pada periode April-Juni 2026.

Angka tersebut jauh di bawah perkiraan median ekonom dalam jajak pendapat Reuters sebesar 2%, serta melambat dari pertumbuhan kuartal sebelumnya yang telah direvisi naik menjadi 1,9%.

Secara kuartalan, ekonomi Jepang tumbuh 0,3%, juga di bawah perkiraan pasar sebesar 0,5%.

"Pertumbuhan memang positif, tetapi rinciannya sedikit lebih lemah dari perkiraan," kata Kazutaka Maeda, Senior Economist Meiji Yasuda Research Institute.

Meski demikian, Maeda menilai pelemahan tersebut kemungkinan dipengaruhi faktor sementara.

Karena itu, data terbaru belum tentu menunjukkan pelemahan ekonomi yang berkelanjutan atau mengubah waktu kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ), yang secara luas diperkirakan dapat dilakukan paling cepat pada September.

Konsumsi dan Investasi Melemah

Konsumsi swasta yang menyumbang lebih dari separuh output ekonomi Jepang tercatat stagnan pada kuartal II. Capaian tersebut jauh di bawah perkiraan pasar yang memproyeksikan pertumbuhan 0,5%.

Konsumsi rumah tangga dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kebijakan pendidikan gratis dan kenaikan harga tembakau.

Tren konsumsi dan upah menjadi perhatian utama BOJ dalam menilai kekuatan ekonomi Jepang serta menentukan kebutuhan untuk kembali menaikkan suku bunga.

Sementara itu, belanja modal yang menjadi salah satu pendorong utama permintaan domestik swasta turun 1,2% pada kuartal II.

Angka tersebut berbanding terbalik dengan perkiraan pasar yang memproyeksikan pertumbuhan 0,4%.

Ekonomi Masih Dinilai Tangguh

Yoshiki Shinke, Senior Executive Economist Dai-ichi Life Research Institute, mengatakan pelemahan konsumsi sebagian disebabkan faktor satu kali, termasuk pergeseran pengeluaran ke konsumsi pemerintah melalui kebijakan seperti program makan siang sekolah gratis.

Penurunan belanja modal juga kemungkinan dipengaruhi gangguan dan ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah. Namun, faktor tersebut mulai mereda dan rencana investasi perusahaan masih relatif kuat.

"Secara keseluruhan, saya pikir kita dapat mengatakan bahwa ekonomi tetap tangguh meskipun pertumbuhan lebih lambat dari perkiraan," ujar Shinke.

Permintaan eksternal bersih, yang merupakan selisih antara ekspor dan impor, memberikan kontribusi 0,5 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang.

Ekspor tetap kuat berkat permintaan dari Amerika Serikat (AS) terhadap kendaraan hybrid Jepang serta berlanjutnya investasi global di sektor kecerdasan buatan (AI).

Kondisi tersebut menopang pengiriman peralatan dan komponen yang berkaitan dengan semikonduktor.

Risiko Inflasi dan Pelemahan Konsumsi

Ke depan, para ekonom memperingatkan kenaikan biaya impor dan tekanan harga dari sisi hulu berpotensi diteruskan kepada konsumen. Kondisi tersebut dapat menekan konsumsi pada akhir tahun.

Konsumsi swasta juga berpotensi melemah pada kuartal III-2026 setelah perubahan kebijakan dan regulasi sebelumnya mendorong peningkatan sementara permintaan terhadap barang tahan lama seperti mobil dan pendingin udara pada kuartal II.

Survei Japan Center for Economic Research pada bulan ini menunjukkan 37 ekonom memperkirakan pertumbuhan PDB Jepang pada kuartal III hanya sekitar 0,05% secara tahunan.

Data tersebut menjadi perhatian bagi BOJ dalam menentukan arah kebijakan moneter berikutnya, terutama di tengah ekspektasi pasar terhadap potensi kenaikan suku bunga pada September.

Yen Menguat Tipis Senin (17/8), Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga The Fed Mulai Surut

Senin, 17 Agustus 2026 08:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-menguat-tipis-senin-178-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga-the-fed-mulai-surut>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yen Jepang menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (17/8/2026).

Penguatan yen terjadi meski data pertumbuhan ekonomi Jepang kuartal II-2026 lebih lemah dari perkiraan.

Mengutip Reuters, yen menguat 0,2% menjadi 159,055 yen per dolar AS, melanjutkan kenaikan tipis untuk hari kedua berturut-turut. Meski demikian, yen masih berada dalam kisaran perdagangan selama sepekan terakhir.

Data yang dirilis Senin menunjukkan produk domestik bruto (PDB) Jepang pada kuartal II-2026 tumbuh 1,1% secara tahunan (annualised).

Analisis Capital Economics menilai rincian data tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Pertumbuhan ekonomi Jepang dinilai masih cukup baik, sementara kebijakan pemerintah dalam membatasi dampak kenaikan harga energi turut menopang ekonomi.

Konsumsi pemerintah yang meningkat juga mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal ekspansif Perdana Menteri Takaichi mulai memberikan dampak terhadap perekonomian.

Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga The Fed Menurun

Pergerakan yen juga dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

Sejumlah data ekonomi AS yang lebih lemah, termasuk data nonfarm payrolls serta indikator inflasi konsumen dan produsen, telah menekan ekspektasi investor terhadap kenaikan suku bunga The Fed tahun ini.

Pasar kini memperkirakan peluang The Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan yang berakhir 16 September mencapai 66,9%, berdasarkan CME FedWatch Tool. Angka tersebut meningkat dari 47,6% sebulan sebelumnya.

Analisis BNY mengatakan data ekonomi AS yang lebih lunak dalam beberapa pekan terakhir telah menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga. Pasar bahkan kini memperkirakan kurang dari satu kali kenaikan suku bunga hingga Desember.

Perhatian investor selanjutnya tertuju pada simposium Jackson Hole yang akan berlangsung pada 27-29 Agustus.

Pasar mengharapkan adanya petunjuk lebih jelas mengenai arah kebijakan moneter AS dari forum tersebut.

Dolar AS Melemah

Indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama turun 0,1% menjadi 99,519, mendekati level terendah bulan ini.

Sementara itu, euro bergerak datar di US\$ 1,1573, sedangkan poundsterling Inggris naik 0,1% menjadi US\$ 1,3546.

Dolar Australia dan dolar Selandia Baru masing-masing berada di sekitar US\$ 0,7085 dan US\$ 0,5891.

Di pasar komoditas, harga minyak bergerak fluktuatif di tengah kebuntuan pembicaraan AS-Iran terkait konflik di Timur Tengah.

Harga Brent turun tipis 0,1% menjadi US\$ 88,48 per barel setelah Presiden AS Donald Trump meminta masyarakat bersiap menghadapi harga bahan bakar yang tetap tinggi akibat perang.

Sementara itu, Iran meminta AS menerima kekalahan. Aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz juga masih sangat terbatas.

Di pasar valuta asing China, dolar AS bergerak datar di 6,7428 yuan dalam perdagangan offshore menjelang rilis data aktivitas ekonomi China pada Senin.

Adapun di pasar kripto, harga Bitcoin turun 0,3% menjadi US\$ 62.854,48, sedangkan Ethereum juga melemah 0,3% menjadi US\$ 1.874,80.

Pertumbuhan Ekonomi Jepang Periode April-Juni Lebih Lambat dari Perkiraan

Senin, 17 Agustus 2026 07:57 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-jepang-periode-april-juni-lebih-lambat-dari-perkiraan>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Ekonomi Jepang tumbuh lebih lambat dari perkiraan pada periode April-Juni, menurut data pemerintah yang dirilis hari Senin (17/8/2026), seiring melemahnya konsumsi swasta akibat tekanan dari kenaikan biaya bahan baku dan gangguan pasokan yang terkait dengan konflik di Timur Tengah.

Mengutip Reuters, Senin (17/8/2026) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1,1% secara tahunan tersebut berada di bawah estimasi median pasar sebesar 2,0% dalam jajak pendapat Reuters.

Angka ini juga menyusul pertumbuhan sebesar 1,9% (setelah revisi naik) pada kuartal sebelumnya, yang menandai berlanjutnya tren pertumbuhan ekonomi selama tiga kuartal berturut-turut.

Angka tersebut mencerminkan kenaikan kuartalan sebesar 0,3%, dibandingkan dengan estimasi median kenaikan sebesar 0,5%.

Konsumsi swasta, yang menyumbang lebih dari separuh output ekonomi, tercatat stagnan dan tidak mencapai estimasi pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 0,5%.

Tren konsumsi dan upah merupakan faktor utama yang dipantau oleh Bank of Japan (BOJ) untuk mengukur kekuatan ekonomi dan menentukan perlunya kenaikan suku bunga tambahan.

Belanja modal, yang menjadi penggerak utama permintaan swasta, turun 1,2% pada kuartal kedua, berlawanan dengan perkiraan pasar yang memprediksi kenaikan sebesar 0,4%.

Permintaan eksternal neto (ekspor dikurangi impor) memberikan kontribusi sebesar 0,5 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekspor tetap tangguh berkat kuatnya permintaan AS terhadap kendaraan hibrida Jepang serta investasi global yang berkelanjutan di bidang kecerdasan buatan (AI), yang mendukung pengiriman peralatan dan komponen terkait semikonduktor.

Ke depan, para analis memperingatkan bahwa kenaikan biaya impor dan tekanan harga di sektor hulu yang terus meningkat pada akhirnya dapat berdampak pada konsumen, sehingga menimbulkan risiko terhadap tingkat belanja di akhir tahun ini.

Konsumsi swasta juga berpotensi melambat pada kuartal Juli-September, setelah perubahan kebijakan dan regulasi sempat mendorong permintaan barang tahan lama—seperti mobil dan AC—pada periode April-Juni.

Sebuah survei yang dilakukan bulan ini oleh Japan Center for Economic Research menunjukkan bahwa 37 ekonom memproyeksikan pertumbuhan PDB tahunan akan melambat hingga rata-rata 0,05% pada kuartal Juli-September.

Dolar AS Jatuh ke Level Terendah dalam Dua Bulan, Ini Penyebabnya

Senin, 17 Agustus 2026 19:01 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-jatuh-ke-level-terendah-dalam-dua-bulan-ini-penyebabnya>

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dolar Amerika Serikat (AS) jatuh ke level terendah dalam lebih dari dua bulan pada Senin (17/8/2026), setelah para trader mengurangi spekulasi mengenai kenaikan suku bunga The Fed di tengah serangkaian data ekonomi AS yang lebih lemah.

Melemahnya dolar AS mendorong euro menguat ke level tertinggi dua bulan dan membuat yen—yang sebelumnya terpuruk—berada pada posisi yang lebih kuat untuk saat ini.

Yen menguat 0,13% menjadi sekitar 159,15 per dolar, mengabaikan data pertumbuhan ekonomi Jepang yang lebih lemah dari perkiraan. Otoritas Jepang dan AS telah melakukan intervensi di pasar mata uang pada akhir Juli untuk menahan pelemahan yen.

Indeks dolar, yang mengukur nilai dolar terhadap sekering mata uang utama lainnya, memangkas sebagian kerugiannya setelah sempat jatuh ke level terendah sejak awal Juni 2026. Euro mencapai level tertinggi dua bulan di sekitar US\$ 1,1614, dengan kenaikan terakhir sebesar 0,18% pada hari itu.

Simposium Jackson Hole

Penyesuaian ekspektasi pasar ini terjadi saat pasar bersiap menghadapi simposium Jackson Hole Federal Reserve minggu depan. Dalam forum tersebut, para investor akan mencari petunjuk mengenai bagaimana para pembuat kebijakan menafsirkan data ekonomi terkini.

Upaya bersama AS dan Jepang untuk menahan penurunan yen juga menciptakan situasi yang sensitif bagi pasar mata uang, dan fokus kini beralih pada apakah Bank of Japan akan segera menaikkan suku bunga.

"Intervensi mengubah arah pergerakan. Hal itu tidak menghilangkan insentif suku bunga yang mendukung carry trade," kata Matthew Tuttle, CEO Tuttle Capital Management seperti dikutip Reuters.

Carry trade mengacu pada praktik meminjam dana dengan biaya rendah dalam mata uang bersuku bunga rendah—seperti yen—untuk mengejar imbal hasil yang lebih tinggi di tempat lain.

Pertumbuhan ekonomi Jepang pada periode April hingga Juni tercatat lebih lambat dari perkiraan, akibat lesunya belanja rumah tangga dan investasi bisnis—kondisi yang menurut para analis terutama disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat sementara (sekali waktu).

Nasib mata uang yen juga sangat bergantung pada prospek suku bunga AS.

Data pekan lalu yang menunjukkan penurunan tak terduga dalam penjualan ritel serta tingkat inflasi yang moderat telah membuat pasar menyimpulkan bahwa urgensi untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut telah berkurang.

Berdasarkan perangkat CME FedWatch, para trader memperkirakan hanya ada peluang sebesar 30,6% untuk kenaikan suku bunga pada pertemuan The Fed bulan September, turun dari 52,2% pada pekan sebelumnya.

"Meski demikian, terdapat cukup banyak kejanggalan dalam data tersebut yang membuat pasar tetap waspada terhadap potensi kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun," ujar Thomas Simons, kepala ekonom AS di Jefferies.

Pasar kemungkinan akan tetap sensitif terhadap data terbaru, komentar dari pertemuan Jackson Hole, serta perkembangan situasi di Timur Tengah. Minimnya arahan baru dari The Fed juga membuat investor harus bergerak di tengah ketidakpastian arah suku bunga yang semakin pekat.

"Jika Anda bertanya kepada 10 orang mengenai pandangan mereka terhadap suku bunga kebijakan The Fed, Anda mungkin akan mendapatkan 20 jawaban berbeda," tambah Simons.

Percepat Izin, Target Investasi 2027 Naik 13,8% jadi Rp2.322 T

Senin, 17 Agustus 2026 14:48 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118597/percepat-izin-target-investasi-2027-naik-13-8-jadi-rp2-322-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2027 mencapai Rp2.322 triliun. Target tersebut meningkat 13,8% dibandingkan target investasi 2026.

Untuk mengejar target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengandalkan pembenahan iklim investasi, khususnya melalui percepatan dan pemberian kepastian dalam proses perizinan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan terdapat tiga fokus utama yang akan diperkuat pemerintah, yakni kepastian perizinan, kecepatan konstruksi, serta penyelesaian berbagai hambatan yang muncul di lapangan.

"Fokus program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan," kata Rosan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (17/8/2026).

Rosan mengungkapkan sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah juga memperkuat sistem tersebut untuk mendukung proses perizinan investasi.

Selain itu, sebanyak 24 kementerian/lembaga telah memiliki hak akses ke OSS untuk kebutuhan verifikasi dan pemantauan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan OSS versi 2.0 yang akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain.

Pengembangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan layanan perizinan. Hingga saat ini, sebanyak 575 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota juga telah terhubung dengan sistem OSS.

Di sisi percepatan realisasi proyek, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Melalui program ini, investor di 62 kawasan industri dapat memulai pembangunan secara paralel dengan proses perizinan.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi proyek hilirisasi, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta berbagai program prioritas pemerintah.

Selain itu, penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masih terus diselesaikan.

Ekonom:Biaya Penarikan Utang Baru 2027 Mahal, Bayar Bunga Utang Pemerintah Rp 650,3 T

Senin, 17 Agustus 2026 19:34 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonombiaya-penarikan-utang-baru-2027-mahal-bayar-bunga-utang-pemerintah-rp-6503-t>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pemerintah perlu mewaspadai biaya utang pada 2027 yang diproyeksikan masih tinggi. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman memperkirakan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun tahun depan berada di kisaran 7%-7,4%, lebih tinggi dari asumsi pemerintah sebesar 6,9% dalam RAPBN 2027.

"Untuk yield obligasi sendiri, sekarang kan yang 10 tahun kan berada sekitar 7%-an, dan ada potensi kenaikan suku bunga sekitar 2-6 bulan lagi. Jadi tahun depan itu, untuk 10 tahun itu akan bergerak di level sekitar 7% sampai 7,4%," ujar Juniman kepada Kontan, Senin (17/8).

Menurutnya, asumsi yield 6,9% masih mungkin tercapai apabila US Treasury Yield terus turun. Hal ini dapat terjadi jika The Fed mulai menurunkan suku bunga, inflasi AS mereda, dan pertumbuhan ekonomi AS melambat.

Namun, risiko kenaikan yield tetap terbuka jika harga minyak terus meningkat dan kembali mendorong inflasi AS.

"Jadi itu yang harus di-manage oleh pemerintah, ada potensi upside, ada potensi downside-nya," katanya.

Pembayaran Beban Bunga Utang Mencapai Rp 650,3 Triliun pada 2027

Juniman menilai, proyeksi yield tersebut menjadi penting karena pemerintah juga memiliki beban yakni harus menanggung pembayaran beban bunga utang yang cukup besar pada 2027, yakni sebesar Rp 650,3 triliun untuk pembayaran bunga utang, naik 11,7% dari outlook 2026.

Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp 589,68 triliun, sedangkan bunga utang luar negeri sebesar Rp 60,63 triliun.

Pada saat yang sama, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2027 sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan, termasuk pembiayaan utang.

Juniman memperkirakan kebutuhan penerbitan utang pemerintah pada 2027 mencapai sekitar Rp 876,3 triliun, termasuk sekitar Rp 779,9 triliun melalui penerbitan surat utang dan Rp 90,3 triliun melalui pinjaman.

Jangan Terburu-buru Terbitkan Utang

Dengan prospek suku bunga yang masih tinggi, Juniman menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menerbitkan utang dalam jumlah besar pada awal 2027.

Pasalnya, terdapat peluang suku bunga mulai turun pada semester II 2027. Jika pemerintah melakukan front loading atau menerbitkan utang besar-besaran sejak awal tahun, biaya yang ditanggung berpotensi lebih mahal.

"Jangan langsung melakukan front loading. Karena kalau langsung front loading, pemerintah akan membayar lebih mahal," ujar Juniman.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya menyesuaikan penerbitan utang dengan kebutuhan pada semester I. Sementara itu, penerbitan dapat ditingkatkan pada semester II apabila penurunan suku bunga benar-benar terjadi.

"Kalau potensi penurunan di semester kedua, untuk semester satu, pemerintah harus mengoptimalkan penerbitan sesuai dengan kebutuhannya saja," jelasnya.

Pilih SBN atau Pinjaman?

Juniman juga menyarankan pemerintah fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan, apakah melalui SBN atau pinjaman.

Jika biaya pinjaman lebih murah dibandingkan penerbitan SBN, pemerintah dapat meningkatkan porsi pinjaman. Sebaliknya, jika pasar SBN lebih menarik, pemerintah dapat mengoptimalkan penerbitan surat utang.

"Kalau suku bunga daripada pinjaman lebih mahal secara relatif terhadap penerbitan SBN untuk dalam rupiah, pemerintah bisa memilih di penerbitan SBN. Tapi kalau pinjaman lebih murah, bisa dilakukan switching," katanya.

Selain itu, kondisi yield tenor pendek dan panjang yang saat ini relatif berdekatan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menerbitkan utang dengan tenor lebih panjang.

Juniman menilai pemerintah dapat mengoptimalkan penerbitan SBN tenor 10, 15, hingga 20 tahun apabila biayanya tidak jauh berbeda dengan tenor pendek.

"Kalau lihat selisihnya tidak berbeda jauh. Di sini flattering semua. Jadi jangka panjang lebih baik karena itu akan menghemat cost, dan pemerintah bisa punya waktu untuk bayaran lebih panjang," pungkasnya.

BI Rate 5,75% Diprediksi Bertahan hingga November, Ekonom Ungkap Kapan Bunga Naik

Senin, 17 Agustus 2026 18:33 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-rate-575-diprediksi-bertahan-hingga-november-ekonom-ungkap-kapan-bunga-naik>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) masih menahan BI rate di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2026. Kondisi rupiah dan inflasi yang mulai mereda menurutnya menjadi alasan BI belum perlu menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

"Kalau kita lihat proyeksi kita di bulan Agustus itu akan stay di 5,75%. Alasannya yang pertama tentu terkait dengan nilai tukar rupiah," ujar Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman memproyeksikan kepada Kontan, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, rupiah dalam beberapa pekan terakhir relatif stabil dan cenderung menguat. Pergerakan tersebut didukung pelemahan indeks dolar AS dan meredanya tekanan inflasi di AS.

Inflasi AS tercatat 3,4%, turun dari 3,5%. Kondisi tersebut membuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed bergeser dari sebelumnya diperkirakan terjadi bulan depan menjadi Desember 2026.

"Yang awalnya diproyeksikan bulan depan, sekarang market punya ekspektasi baru, ada kenaikan di Desember. Dengan kondisi seperti itu, tidak ada alasan untuk menaikkan suku bunga lagi dalam waktu dekat," kata Juniman.

Dari sisi domestik, tekanan inflasi dinilai juga semakin terkendali. Inflasi nasional turun menjadi 2,88% pada Juli 2026 dari 3,34% pada bulan sebelumnya.

"Dengan kondisi ini, apalagi dengan inflasi juga, kelihatannya tekanannya juga tidak besar lagi, dimana kita lihat inflasi secara nasional turun 2,88% dari 3,34% di bulan sebelumnya," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Juniman memperkirakan BI masih akan menahan BI Rate hingga November. BI baru akan kembali mempertimbangkan kebijakan suku bunga pada Desember dengan melihat perkembangan ekonomi dan langkah The Fed.

"Saya berpikir sampai bulan November, baru Desember BI akan melihat data yang ada, melihat daripada langkah policy daripada Fed," jelasnya.

Jika The Fed kembali menaikkan suku bunga pada akhir tahun, BI berpotensi mengikuti langkah tersebut. "Kalau Fed melakukan kenaikan, BI bisa follow kenaikannya Desember. Jadi ada potensi kenaikan lagi, seiring dengan kenaikan bunga Fed di akhir tahun 2026," katanya.

Untuk nilai tukar, Juniman memperkirakan rupiah belum akan mengalami penguatan maupun pelemahan yang signifikan. Rupiah diperkirakan bergerak sideways pada kisaran Rp 17.700-Rp 18.000 per dolar AS sepanjang kuartal III 2026. "Di kuartal ketiga masih berada di sekitar Rp 17.700 sampai Rp 18.000," ujar Juniman.

Menurutnya, pola pergerakan yang relatif sama juga masih berpotensi berlanjut hingga kuartal IV 2026.

Bank Indonesia Diprediksi Masih Tahan BI Rate di Level 5,75% pada RDG Pekan Ini

Senin, 17 Agustus 2026 15:47 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-diprediksi-masih-tahan-bi-rate-di-level-575-pada-rdg-pekan-ini>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) masih akan mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dijadwalkan 18-19 pada Agustus 2026.

"Untuk RDG pekan depan, base case kami BI masih akan menahan BI Rate di 5,75%," ujar Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz kepada Kontan, Senin (17/8/2026). Menurut Irman, penguatan rupiah dalam beberapa waktu terakhir serta membaiknya kondisi makroekonomi global membuat BI belum perlu terburu-buru menaikkan suku bunganya.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah di pasar spot pada Senin (17/8/2026) ditutup menguat di level Rp 17.798 per dolar Amerika Serikat (AS). Dibandingkan dengan penutupan Jumat (14/8/2026) yang di level Rp 17.827 per dolar AS, rupiah juga menguat 0,16%.

Selain itu, inflasi Amerika Serikat (AS) dan data tenaga kerja yang melemah membuat penguatan dolar AS tertahan. Menurut Irman, kondisi tersebut memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan suku bunga selama tekanan terhadap rupiah masih dapat dikelola melalui intervensi dan instrumen stabilisasi lainnya.

Namun, Irman melihat bias kebijakan BI masih cenderung hawkish. Sehingga Ia memperkirakan BI masih membuka kemungkinan kenaikan suku bunga pada paruh kedua 2026 apabila tekanan terhadap rupiah kembali meningkat.

"Kami masih melihat ruang kenaikan suku bunga di paruh dua 2026 ini apabila tekanan rupiah kembali meningkat, dengan terminal rate kami di 6,25% pada akhir tahun," katanya.

BI Andalkan Kebijakan Non-Suku Bunga

Irman menilai pertimbangan BI dalam mengambil kebijakan pada RDG Agustus ini juga akan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan likuiditas domestik. Karena itu, BI diperkirakan lebih mengutamakan kebijakan non suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah.

"Dari sisi domestik, inflasi masih relatif manageable dan pertumbuhan serta konsumsi mulai menunjukkan moderasi, sehingga belum ada urgensi menaikkan suku bunga dari sisi demand pressure," jelasnya.

Menurutnya, risiko terbesar justru berasal dari eksternal, seperti arah suku bunga AS dan imbal hasil US Treasury, pergerakan dolar AS, harga minyak, serta keberlanjutan arus modal asing.

Selama tekanan terhadap rupiah masih dapat diredam tanpa menaikkan suku bunga, BI dinilai masih memiliki alasan untuk mempertahankan BI Rate.

"Rate hike akan menjadi opsi ketika tekanan FX mulai lebih persisten dan berpotensi mengganggu ekspektasi inflasi maupun stabilitas pasar," ujar Irman.

Lebih lanjut Irman menilai, BI perlu mengombinasikan kebijakan suku bunga dengan intervensi yang terukur serta pendalaman pasar valuta asing (valas).

Menurutnya intervensi melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) dinilai tetap penting untuk meredam volatilitas rupiah.

Namun, langkah tersebut perlu dibarengi dengan penguatan underlying transaksi valas, instrumen lindung nilai (hedging) yang lebih kompetitif, serta menjaga daya tarik aset rupiah bagi investor asing.

"Stabilitas rupiah tidak bisa hanya mengandalkan intervensi saja, konsistensi bauran kebijakan dan kredibilitas BI tetap menjadi jangkar utama," katanya.

Untuk prospek ke depan, Irman masih melihat rupiah berpotensi menghadapi tekanan dan volatilitas pada kuartal III-2026 akibat ketidakpastian geopolitik dan arah kebijakan The Fed.

"Base case kami nilai tukar rupiah bergerak (kuartal III) di rata-rata Rp 18.130 per dolar AS sebelum menguat pada kuartal IV ke arah Rp 17.900-an," ujar Irman.

Pihaknya melihat pada kuartal IV tensi geopolitik akan mereda, sehingga memberi dorongan positif untuk EM currencies termasuk rupiah.

HUT ke-81 RI, Gubernur Luthfi Klaim Kemiskinan Jateng Turun Jadi 9,21 Persen

Senin, 17 Agustus 2026 19:40 WIB

<https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/20971/hut-ke-81-ri-gubernur-luthfi-klaim-kemiskinan-jateng-turun-jadi-921-persen>

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyebut pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,80 persen pada semester I 2026. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,45 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jateng. Luthfi mengatakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, program pembangunan infrastruktur serta pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus mampu berbuat hal yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat," kata Luthfi se usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Lapangan Pancasila, Simpangl Lma, Kota Semarang, Senin (17/8).

Pada semester I 2026, realisasi investasi di Jateng mencapai Rp 59,94 triliun. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja sekitar 213 ribu orang.

Sejalan dengan capaian tersebut, angka kemiskinan di Jateng pada Maret 2026 turun dari 9,48 persen menjadi 9,21 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat 4,24 persen. Angka tersebut turun 0,09 persen dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 4,33 persen.

Luthfi mengatakan berbagai capaian tersebut pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jateng.

Menurut Luthfi, berbagai permasalahan masyarakat harus diselesaikan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hal itu termasuk pada sektor kesehatan yang menjadi salah satu layanan dasar masyarakat.

Di Jateng, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan dokter spesialis keliling (Speling) disebut telah mencapai capaian tertinggi secara nasional. Program tersebut terus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga menyentuh ribuan desa.

Selain kesehatan, sektor pendidikan di Jateng juga terus diakselerasi melalui berbagai program. Salah satunya melalui program sekolah kemitraan yang setiap tahun memberikan kuota sekolah gratis kepada 5.004 anak dari keluarga miskin dan kurang mampu di sekolah swasta.

Pada sektor perumahan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan perbaikan ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) setiap tahun di Jateng.

Luthfi menegaskan makna kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui seremoni. Menurut dia, kemerdekaan harus diwujudkan melalui layanan dasar yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus punya suatu semangat kolaborasi dengan dasar semangat kemerdekaan, seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah perlu bersatu bahu-membahu, sehingga masyarakat bisa sejahtera,” katanya. (ink/jpnn)

Gebrakan Kemerdekaan! Gubernur Luthfi Pacu Ekonomi Jateng Tembus 5,80 Persen Demi Sejahteraan Rakyat

Senin, 17 Agustus 2026 13:40 WIB

Joko Longkeyang

<https://emsatunews.co.id/2026/08/gebrakan-kemerdekaan-gubernur-luthfi-pacu-ekonomi-jateng-tembus-580-persen-demi-sejahteraan-rakyat.html>

SEMARANG, Emsatunews.co.id — Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Jawa Tengah membara! Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui layanan dasar yang mudah, fasilitas kesehatan gratis, hingga roda ekonomi yang berputar kencang.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara di Lapangan Pancasila, Kota Semarang, Senin (17/8/2026), Luthfi memompa semangat seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global. Di tengah tekanan fiskal dan dinamika geopolitik, Pemprov Jateng membuktikan taringnya dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi gemilang sebesar 5,80 persen pada semester I-2026, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,45 persen.

Tak hanya itu, gelontoran investasi bernilai fantastis hingga Rp 59,94 triliun sukses diserap dan membuka lapangan pekerjaan bagi 213 ribu tenaga kerja. Dampaknya nyata: angka kemiskinan turun ke level 9,21 persen, sementara tingkat pengangguran susut menjadi 4,24 persen.

Kendati demikian, Luthfi mengingatkan agar capaian tersebut tidak sekadar berhenti pada deretan angka statistik di atas kertas. Semangat kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang menyentuh urat nadi kehidupan warga.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang menjangkau ribuan desa, penyediaan sekolah gratis bagi ribuan anak dari keluarga kurang mampu, hingga masifnya pembangunan rumah layak huni dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Momentum HUT ke-81 RI ini menjadi pengingat kuat bahwa kemerdekaan adalah hak setiap warga untuk hidup makmur, tenteram, dan berdaya di tanah sendiri. *(Joko Longkeyang).

Imbal Hasil Obligasi AS, Jepang dan Eropa Tembus Level Tertinggi

Selasa, 18 Agustus 2026 21:12 WIB

Reporter: Handoyo, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/imbal-hasil-obligasi-as-jepang-dan-eropa-tembus-level-tertinggi>

KONTAN.CO.ID – LONDON. Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang di sejumlah negara ekonomi utama dunia melonjak ke level tertinggi dalam beberapa dekade pada Selasa (18/8/2026). Kenaikan tersebut dipicu kembali menguatnya kekhawatiran inflasi, di tengah tekanan fiskal yang membayangi sejumlah negara dengan utang pemerintah yang tinggi.

Di Amerika Serikat (AS), imbal hasil obligasi Treasury tenor 30 tahun menyentuh level tertinggi sejak 2007. Kenaikan tersebut terjadi ketika harga minyak kembali menembus US\$90 per barel.

Harga minyak yang telah meningkat sekitar 50% sepanjang tahun ini kembali memicu kekhawatiran terhadap inflasi, terutama setelah harapan tercapainya perdamaian antara AS dan Iran mulai memudar.

Di Jepang, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun mendekati 3%, atau mencapai level tertinggi dalam tiga dekade. Kekhawatiran inflasi serta ekspektasi bahwa Bank of Japan (BOJ) dapat menaikkan suku bunga paling cepat pada September turut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi.

Sementara itu, di Eropa, imbal hasil obligasi pemerintah Jerman tenor 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak 2011. Imbal hasil obligasi Prancis mencapai level tertinggi sejak 2009, sedangkan biaya pinjaman pemerintah Inggris tenor 30 tahun mendekati level tertinggi yang dicapai pada Mei lalu, sekaligus menjadi level tertinggi sejak 1998.

Perlu diketahui, ketika imbal hasil obligasi meningkat, harga obligasi bergerak turun.

Inflasi dan Utang Jadi Perhatian

Kjersti Haugland, Chief Economist DNB Carnegie, mengatakan pasar obligasi memasuki era baru dengan prospek inflasi dan suku bunga yang lebih sulit diprediksi. Menurut dia, risiko kenaikan inflasi kini lebih besar dibandingkan periode pascakrisis keuangan global yang ditandai suku bunga rendah dan inflasi yang relatif terkendali.

"Hal ini terjadi bersamaan dengan tingkat utang pemerintah yang sangat tinggi di banyak negara, terutama Jepang, AS, Prancis, dan Inggris," kata Haugland.

Tekanan terhadap pasar obligasi juga diperburuk oleh meningkatnya kebutuhan modal dari perusahaan teknologi besar atau AI hyperscalers yang tengah membangun pusat data berkapasitas besar.

Selain itu, meningkatnya defisit anggaran dan kekhawatiran mengenai komunikasi kebijakan Federal Reserve (The Fed) di bawah Ketua baru Kevin Warsh turut meningkatkan aksi jual di pasar obligasi pemerintah.

Pergerakan di pasar obligasi pemerintah memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Obligasi pemerintah menjadi acuan bagi biaya pendanaan perusahaan maupun pinjaman lainnya, termasuk kredit pemilikan rumah atau KPR.

Kenaikan biaya pinjaman juga memperketat kondisi keuangan secara umum. Kondisi tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi yang selama ini turut menopang penguatan pasar saham hingga mencapai rekor tertinggi.

Imbal Hasil Treasury AS Mendekati Level 5%

Imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun berada di sekitar 4,74%. Level tersebut menjadi perhatian karena secara historis imbal hasil 5% dapat memengaruhi sentimen pasar secara signifikan.

Guy Miller, Chief Market Strategist Zurich Insurance Group, mengatakan level 5% akan menjadi titik penting bagi pasar obligasi maupun aset keuangan lainnya.

"Hal ini akan sangat penting, bukan hanya bagi pasar obligasi, tetapi juga aset keuangan lainnya karena kenaikan lebih lanjut kemungkinan akan menggerus kepercayaan," kata Miller.

Dia memperkirakan level tersebut berpotensi mendapat perhatian dari pemerintah AS.

"Mengingat pentingnya level ini, kami kemungkinan akan melihat level tersebut dipertahankan oleh Departemen Keuangan AS," ujarnya.

Sejumlah analis juga menyoroti keputusan tidak biasa Departemen Keuangan AS yang menjual euro, bukan dolar AS, dalam intervensi bersama Jepang untuk menopang yen yang melemah.

Langkah tersebut dinilai dapat menunjukkan kekhawatiran pemerintah AS terhadap potensi tekanan tambahan di pasar obligasi apabila bank sentral asing harus menjual Treasury AS untuk mendapatkan dana guna mendukung mata uang masing-masing.

Data Departemen Keuangan AS yang dirilis Senin menunjukkan kepemilikan asing atas Treasury AS turun pada Juni. Penurunan terutama berasal dari Jepang sebagai pemegang terbesar obligasi AS, disusul Inggris dan China.

Kekhawatiran pasar juga terlihat dalam dua lelang Treasury AS terbaru. Surat utang tenor 10 tahun terjual dengan imbal hasil 4,683%, menjadi level tertinggi dalam 19 tahun. Sementara itu, lelang obligasi tenor 30 tahun mencatat imbal hasil 5,216%, atau tertinggi dalam 25 tahun.

Kondisi fiskal AS juga menghadapi tekanan tambahan setelah pengembalian dana terkait tarif impor meningkat. Hal tersebut terjadi setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif darurat yang diberlakukan Presiden Donald Trump pada tahun lalu.

Obligasi Jepang Mulai Menarik Investor Domestik

Kenaikan imbal hasil obligasi Jepang juga berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap pasar Treasury AS. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 30 tahun telah berada sedikit di atas 4%.

Level imbal hasil tersebut mulai membuat obligasi Jepang lebih menarik bagi investor domestik. Padahal, investor Jepang selama ini merupakan salah satu pembeli besar surat utang pemerintah AS.

Charu Chanana, Chief Investment Strategist Saxo Bank di Singapura, mengatakan imbal hasil obligasi Jepang kini berada pada tingkat yang jauh lebih kompetitif. Ia juga menyoroti penurunan kepemilikan Treasury AS oleh Jepang pada Juni.

"Hal itu bukan berarti Jepang meninggalkan Treasury, tetapi menunjukkan bahwa Washington tidak bisa lagi berasumsi bahwa permintaan asing akan menyerap tambahan pasokan pada tingkat imbal hasil seperti sebelumnya," kata Chanana.

Meski demikian, kenaikan imbal hasil juga mulai membuat obligasi kembali menarik bagi sebagian investor.

Christopher Dembik, Senior Investment Adviser Pictet, mengatakan pihaknya masih mempertahankan posisi pada obligasi dengan durasi panjang dan memperkirakan aksi jual saat ini tidak akan berlangsung lama.

"Kami memiliki posisi pada obligasi berdurasi panjang. Saya tidak memperkirakan aksi jual obligasi saat ini akan berlangsung lama," kata Dembik.

Tekanan Fiskal Eropa

Di Eropa, kenaikan imbal hasil obligasi juga dipengaruhi tingginya belanja pemerintah dan beban utang, terutama di Prancis dan Inggris.

Kekhawatiran bahwa perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah turut menjadi faktor yang diperhatikan investor. Selain itu, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan juga membuat pasar mempertahankan ekspektasi suku bunga yang relatif tinggi.

Benjamin Schroeder, Senior Rates Strategist ING, mengatakan tekanan inflasi tidak hanya berasal dari kenaikan harga minyak.

"Bukan hanya minyak yang menjadi perhatian, tetapi ada gambaran inflasi yang lebih luas yang membuat ECB (Bank Sentral Eropa) tetap bersikap hawkish," kata Schroeder.

Dia juga menyoroti gangguan rantai pasok di Jerman akibat gelombang panas yang menyebabkan level air Sungai Rhine turun secara ekstrem.

"Selain itu, ada gangguan rantai pasok di Jerman akibat gelombang panas yang menyebabkan level air Sungai Rhine turun ke tingkat yang sangat rendah," ujarnya.

Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah di AS, Jepang, dan Eropa menunjukkan bahwa pasar global kini menghadapi kombinasi risiko inflasi, suku bunga tinggi, kebutuhan pembiayaan pemerintah yang meningkat, serta persaingan memperoleh modal dari sektor teknologi.

Jika tren tersebut berlanjut, kenaikan biaya pendanaan dapat menjadi tantangan bagi pemerintah, korporasi, hingga rumah tangga melalui meningkatnya biaya kredit. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dan valuasi berbagai aset keuangan global.

Fiskal Terjepit, Malaysia Siapkan Reformasi Pajak Konsumsi

Selasa, 18 Agustus 2026 19:12 WIB

Reporter: Tendi Mahadi, Editor: Tendi Mahadi

<https://internasional.kontan.co.id/news/fiskal-terjepit-malaysia-siapkan-reformasi-pajak-konsumsi>

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan untuk mereformasi sistem pajak konsumsi agar lebih progresif dan efisien.

Langkah ini akan kemungkinan pemerintah untuk menerapkan kembali aspek-aspek pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) yang lebih luas.

Malaysia sebelumnya menghapus GST sebesar 6% pada tahun 2018, di tengah keluhan masyarakat mengenai kenaikan biaya hidup.

Sebagai gantinya, Kuala Lumpur menggantinya dengan sistem pajak penjualan dan jasa (sales and services tax/SST) yang cakupannya lebih terbatas.

Sejumlah analis telah menyerukan agar GST diberlakukan kembali supaya pemerintah dapat mencapai target fiskalnya.

Anwar menganggap GST sebagai sistem pemungutan pajak yang paling transparan dan efisien. Namun ia juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap lapisan masyarakat termiskin.

"Kita perlu melihat bagaimana kita bisa menggabungkan kedua sistem ini untuk menemukan cara baru dalam menentukan sistem perpajakan yang lebih progresif dan efisien," kata Anwar seperti dikutip dari Reuters.

"Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi. Namun, hal ini tidaklah sederhana mengingat meningkatnya angka kemiskinan dan biaya hidup," lanjut Anwar.

Kementerian Keuangan Malaysia juga menyebutkan bahwa subsidi tepat sasaran telah menghasilkan penghematan sekitar 15,5 miliar ringgit per tahun. Sehingga membantu anggaran negara untuk menanggung beban subsidi yang membengkak akibat kenaikan biaya energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Ekonomi Iran Tertekan, Ancaman Sanksi Baru Trump Picu Kekhawatiran Kerusuhan

Selasa, 18 Agustus 2026 15:35 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-iran-tertekan-ancaman-sanksi-baru-trump-picu-kekhawatiran-kerusuhan>

KONTAN.CO.ID - DUBAI. Perekonomian Iran menghadapi tekanan yang semakin berat di tengah perang dengan Amerika Serikat.

Di balik pernyataan para pemimpin Iran yang berupaya menunjukkan ketahanan, muncul kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi tambahan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat memperburuk kondisi masyarakat, memicu kembali kerusuhan dan semakin mengikis legitimasi pemerintahan Republik Islam Iran.

Trump pada Jumat (14/8/2026) berjanji akan memberikan tekanan ekonomi yang berat terhadap Iran. Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington akan memberlakukan langkah-langkah terhadap Teheran yang "belum pernah terlihat sebelumnya" paling cepat pada pekan depan.

Namun, pemerintah AS belum menjelaskan secara rinci bentuk sanksi atau tindakan ekonomi yang akan diberlakukan.

Di tengah konflik yang telah berlangsung hampir enam bulan, Iran memang masih berupaya menunjukkan ketahanan. Iran juga secara efektif menutup Selat Hormuz, salah satu jalur penting bagi pasokan minyak dunia.

Meski demikian, tekanan terhadap perekonomian domestik semakin meningkat. Tiga pejabat Iran mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu kembali kerusuhan secara nasional.

Reuters berbicara dengan tiga pejabat Iran, dua di antaranya merupakan tokoh yang mengetahui kondisi politik, seorang mantan pejabat Iran, serta 12 warga Iran. Mereka meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir mendapat tekanan atau tidak memiliki kewenangan untuk berbicara kepada media.

Iran memasuki perang dalam kondisi ekonomi yang sudah rapuh. Negara tersebut menghadapi inflasi tinggi, pelemahan mata uang, kekurangan energi, sanksi ekonomi serta berbagai persoalan struktural.

Kini, Iran harus menghadapi kerusakan infrastruktur, gangguan perdagangan, hilangnya produksi dan biaya besar untuk melakukan pembangunan kembali.

Ekonomi Iran Terpukul Perang

Arshia, seorang insinyur sipil yang selama satu dekade bekerja di sektor konstruksi Iran, mengatakan aktivitas proyek konstruksi hampir terhenti sejak perang yang dimulai dengan serangan AS dan Israel pada 28 Februari.

Kini, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan karena banyak proyek ditunda atau dibatalkan, sementara biaya terus meningkat dan peluang pemulihan cepat semakin kecil.

"Saya khawatir. Jika Trump memberlakukan lebih banyak sanksi, bagaimana masyarakat biasa bisa bertahan? Saya tidak ingin negara saya dihukum secara militer maupun ekonomi. Kami sudah kesulitan," ujar ayah dua anak tersebut dari Isfahan, Iran tengah.

Kondisi Arshia mencerminkan tekanan yang dialami masyarakat Iran secara lebih luas. Serangan AS merusak pabrik, pembangkit listrik, jaringan transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga menambah beban terhadap perekonomian yang sebelumnya sudah mengalami tekanan.

Mohsen, 53 tahun, bahkan terpaksa menutup usaha kecil ekspor-impor yang dijalankannya dengan negara-negara Teluk setelah Iran melakukan serangan balasan terhadap pangkalan dan aset AS di kawasan tersebut.

"Saya terpaksa memberhentikan 10 karyawan. Itu sangat menyakitkan, tetapi saya tidak punya pilihan. Saya tidak lagi mampu membayar gaji mereka, dan sekarang saya mengandalkan tabungan untuk menghidupi keluarga," katanya dari Bandar Abbas, kota pelabuhan di Iran selatan.

Inflasi Iran Capai 66%

Tekanan ekonomi juga semakin terasa di tingkat rumah tangga.

Menurut Pusat Statistik Iran, tingkat inflasi tahunan mencapai 66% pada Juli. Sementara itu, harga konsumen tercatat 87,9% lebih tinggi dibandingkan setahun sebelumnya. Inflasi pangan bahkan mencapai 128% secara tahunan.

Bagi para penguasa Iran, persoalan yang lebih mengkhawatirkan bukan semata-mata memburuknya kondisi ekonomi, melainkan potensi tekanan tersebut kembali memicu demonstrasi massal.

Seorang mantan pejabat reformis mengatakan penunjukan Hossein Taeb pada pekan lalu untuk memimpin milisi Basij menjadi salah satu indikasi paling jelas mengenai meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap kemungkinan munculnya kembali kerusuhan.

Basij merupakan kelompok paramiliter sukarelawan yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Kedua kelompok tersebut sebelumnya digunakan oleh pemerintah Iran untuk meredam aksi demonstrasi.

Keluhan akibat tekanan ekonomi berulang kali berkembang menjadi demonstrasi berskala nasional di Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Januari, demonstrasi nasional yang dipicu kesulitan ekonomi berhasil ditekan oleh IRGC dan pasukan Basij. Ribuan orang dilaporkan tewas.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Iran juga meningkatkan tindakan berupa eksekusi, penangkapan, pemanggilan dan hukuman penjara panjang terhadap jurnalis, pengacara, aktivis, pembela hak asasi manusia dan mahasiswa, menurut kelompok hak asasi manusia.

Pemerintah Iran menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas selama perang. Namun, para pengkritik menilai tindakan tersebut justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintahan ulama dan masyarakat yang semakin terbebani tekanan ekonomi.

Daya Beli Masyarakat Iran Merosot

Tekanan inflasi membuat keluarga di Iran mulai mengurangi konsumsi daging dan kebutuhan pokok lainnya serta beralih ke produk yang lebih murah.

"Saya merasa malu di depan anak-anak saya. Gaji saya habis dalam beberapa hari. Daging dan ayam sudah tidak ada lagi di meja makan kami. Saya tidak tahu bagaimana kami akan bertahan," kata Hossein, seorang pegawai pemerintah di Yazd, Iran tengah.

Harga sewa rumah juga meningkat. Menurut Pusat Statistik Iran, harga sewa naik 31% secara tahunan pada Maret. Sementara itu, media pemerintah melaporkan harga rumah di Teheran sekitar 50% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Iran menaikkan upah minimum sekitar 60% tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rial terus menggerus daya beli masyarakat.

Nilai upah minimum dalam denominasi dolar bahkan turun dari sekitar US\$105 menjadi US\$86 sejak akhir Maret.

Bijan, 40 tahun, pernah memperoleh penghasilan sekitar US\$1.000 per bulan sebagai insinyur ketika memasuki dunia kerja 15 tahun lalu. Kini, ia beralih menjadi tutor daring untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pendapatannya bersama sang istri kini hanya sekitar US\$400 per bulan. Keduanya bahkan meninggalkan Teheran dan pindah ke provinsi dengan biaya hidup yang lebih murah.

"Dulu saya mungkin bekerja lima atau enam jam sehari. Sekarang, semuanya adalah bekerja atau mencari pekerjaan, atau merasa cemas karena tidak memiliki cukup pekerjaan," ujar Bijan.

Bagi banyak masyarakat Iran, ancaman konflik yang kembali berkobar juga membuat mereka semakin sulit merencanakan masa depan.

Blokade AS Dorong Biaya Logistik Iran

Iran berusaha mempertahankan distribusi barang-barang kebutuhan melalui jalur alternatif, termasuk koridor darat dan Laut Kaspia. Namun, jalur tersebut juga menghadapi tekanan.

Serangan terhadap sejumlah jembatan mengganggu transportasi darat sehingga meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang ke Iran.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada pekan lalu mengakui tekanan tersebut.

"Masalah kami telah berlipat ganda, sementara pendapatan kami juga menurun," ujar Pezeshkian.

Ia mengatakan barang-barang yang sebelumnya dapat dikirim melalui jalur laut kini harus menempuh rute yang lebih panjang menuju Iran. Kondisi itu mendorong kenaikan harga.

Di sisi lain, Iran juga menghadapi penurunan penjualan minyak dan penerimaan pajak dari perusahaan yang mengalami kerusakan maupun kesulitan beroperasi.

Blokade tersebut juga secara efektif menghentikan impor bensin Iran, menurut anggota parlemen Reza Sepahvand kepada kantor berita ILNA pada Sabtu (15/8).

Sepahvand mengatakan produksi bensin harian Iran telah mencapai batas sekitar 130 juta liter. Angka tersebut masih berada di bawah konsumsi harian yang mencapai sekitar 137 juta liter.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan perang terhadap Iran tidak hanya berdampak pada perdagangan dan pendapatan negara, tetapi juga semakin merembet ke sektor energi dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jika tekanan ekonomi AS kembali diperketat, pemerintah Iran menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencegah memburuknya ketidakpuasan publik.

Won dan Ringgit Unggul, Mata Uang Asia Bergerak Beragam terhadap Dolar AS

Selasa, 18 Agustus 2026 09:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-dan-ringgit-unggul-mata-uang-asia-bergerak-beragam-terhadap-dolar-as>

KONTAN.CO.ID - Mata uang Asia bergerak beragam terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (18/8/2026).

Won Korea Selatan dan ringgit Malaysia menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di kawasan, seiring dolar AS yang masih berada di bawah tekanan.

Data Reuters pada pukul 02.02 GMT menunjukkan won Korea Selatan menguat 0,33% menjadi 1.411 won per dolar AS. Ringgit Malaysia juga naik 0,35% menjadi 4,046 ringgit per dolar AS.

Penguatan mata uang Asia berlangsung di tengah pelemahan dolar AS. Investor memangkas ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dalam waktu dekat setelah sejumlah data ekonomi AS menunjukkan pelemahan.

Di sisi lain, tidak semua mata uang Asia menguat. Dolar Taiwan melemah 0,23% menjadi 31,780 per dolar AS.

Yen Jepang turun 0,06% menjadi 159,520 per dolar AS, sedangkan baht Thailand melemah 0,08% menjadi 33,040 per dolar AS.

Peso Filipina turun 0,20% menjadi 61,593 per dolar AS. Yuan China juga melemah tipis 0,03% menjadi 6,744 per dolar AS.

Dolar Singapura menguat 0,05% menjadi 1,278 per dolar AS, sementara rupee India relatif stabil di 95,603 per dolar AS.

Rupiah Masih Tertekan

Rupiah menjadi salah satu mata uang yang melemah pada perdagangan Selasa. Rupiah turun 0,08% menjadi Rp17.835 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.820 per dolar AS.

Secara kumulatif sepanjang 2026, rupiah tercatat melemah 6,53% dibandingkan posisi akhir 2025 di level Rp16.670 per dolar AS.

Pelemahan rupiah tersebut menjadi salah satu yang terdalam di antara mata uang Asia dalam tabel Reuters.

Rupee India juga telah melemah 6% sepanjang tahun, sedangkan baht Thailand turun 4,81% dan peso Filipina melemah 4,53%.

Sebaliknya, won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik sepanjang tahun. Won menguat 2,02% dibandingkan akhir 2025.

Ringgit Malaysia juga masih mencatat penguatan tipis 0,25% sepanjang 2026. Kinerja ringgit turut didukung aliran modal asing dan prospek ekonomi Malaysia yang relatif kuat.

Berikut pergerakan mata uang Asia terhadap dolar AS pada Selasa (18/8):

Mata Uang	Terakhir	Perubahan Harian	Perubahan 2026
Yen Jepang	159,520	-0,06%	-1,80%
Dolar singapura	1,278	+0,05%	+0,59%
Dolar Taiwan	31,780	-0,23%	-1,08%
Won Korea Selatan	1.411,000	+0,33%	+2,02%
Baht Thailand	33,040	-0,08%	-4,81%
Peso Filipina	61,593	-0,20%	-4,53%
Rupiah	17.835,000	-0,08%	-6,53%
Rupee India	95,603	0,00%	-6,00%
Ringgit Malaysia	4,046	+0,35%	+0,25%
Yuan China	6,744	-0,003%	+3,62%

Ekonomi Jepang Tumbuh di Bawah Ekspektasi

Selasa, 18 Agustus 2026 / 07:02 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-jepang-tumbuh-di-bawah-ekspektasi>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Ekonomi Jepang tumbuh lebih lambat dari perkiraan pada kuartal II-2026. Kenaikan biaya bahan baku dan gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah mulai menekan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Mengutip laporan Reuters, Senin (17/8), data awal menunjukkan produk domestik bruto (PDB) Jepang tumbuh 1,1% secara tahunan di April-Juni 2026, jauh di bawah perkiraan 2%. Secara kuartalan, ekonomi hanya tumbuh 0,3%, dibanding ekspektasi 0,5%.

Meski melambat, pertumbuhan tersebut memperpanjang ekspansi ekonomi Jepang menjadi tiga kuartal berturut-turut. Pada kuartal sebelumnya, PDB tumbuh 1,9% secara tahunan setelah direvisi naik.

Dari sisi domestik, konsumsi swasta yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian Jepang nyaris stagnan. Kondisi ini mencerminkan tekanan kenaikan harga yang menggerus daya beli rumah tangga.

Belanja modal perusahaan juga menjadi penekan pertumbuhan. Investasi turun 1,2% pada kuartal kedua, berbanding terbalik dengan perkiraan pasar yang memprediksi investasi naik 0,4%.

Sebaliknya, sektor eksternal masih memberikan dukungan. Permintaan Amerika Serikat (AS) terhadap kendaraan hibrida Jepang tetap kuat, sementara investasi global di sektor akal imitasi (AI) menopang ekspor peralatan dan komponen semikonduktor. Permintaan eksternal bersih menyumbang 0,5 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB.

Ke depan, kenaikan biaya impor dan tekanan harga di tingkat hulu menjadi risiko bagi konsumsi. Pemerintah Jepang juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun fiskal 2026 menjadi 0,9% dari sebelumnya sebesar 1,3%, seiring kenaikan biaya energi.

Pelembahan konsumsi menjadi perhatian Bank of Japan (BOJ) dalam menentukan suku bunga. Survei Japan Center for Economic Research menunjukkan 37 ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang hanya sekitar 0,05% secara tahunan pada kuartal III-2026, menandakan momentum ekonomi berpotensi semakin tipis.

Panas Ekstrem Gerus Ekonomi Eropa

Selasa, 18 Agustus 2026 07:00 WIB

umber: Reuters, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/panas-ekstrem-gerus-ekonomi-eropa>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Gelombang panas kelima yang melanda Eropa tahun ini mulai menekan aktivitas ekonomi. Suhu ekstrem menurunkan produktivitas pekerja, menekan konsumsi dan meningkatkan biaya operasional perusahaan.

Dampaknya terlihat di Padua, Italia. Tradisi aperitivo, yakni tradisi makan camilan dan minuman ringan pada pukul 18.00-19.00 di tempat terbuka, kini bergeser. Sebab, masyarakat memilih ruangan berpendingin udara. Alhasil, area makan luar ruangan banyak ditinggalkan.

Melansir Reuters, Senin (17/8), survei terhadap sekitar 600 bisnis perhotelan di Padua dan sekitarnya menunjukkan lebih dari 80% usaha mengalami penurunan omzet sekitar 20% selama gelombang panas terbaru. Penurunan tersebut dinilai cukup untuk menggerus margin usaha.

Secara ekonomi, Moodys memperkirakan gelombang panas Eropa pada tahun lalu menyebabkan kehilangan output hingga 43 miliar. Namun, pembayaran asuransi hanya sekitar 500 juta, menciptakan kesenjangan perlindungan yang besar.

Risiko ini tidak hanya berasal dari penjualan yang turun. Panas ekstrem juga mengganggu transportasi, menekan hasil pertanian, meningkatkan biaya pendinginan pabrik dan menurunkan produktivitas tenaga kerja. Data CDP menunjukkan 35% perusahaan yang dipantau mengidentifikasi gelombang panas sebagai faktor risiko bisnis.

Minim asuransi

Perlindungan asuransi pun terbatas. Survei terhadap 9.000 usaha kecil dan menengah di Eropa di 2023 mendapati hanya 28% memiliki perlindungan gangguan usaha dalam asuransi properti, sedang 17% memiliki perlindungan gangguan usaha tanpa kerusakan fisik.

Tekanan ekonomi berpotensi semakin besar. Bank Triodos memperkirakan, gangguan panas dan kekeringan dapat memangkas sekitar 1% PDB Uni Eropa pada 2026, setara sekitar 180 miliar, terutama akibat turunnya produktivitas tenaga kerja.

Untuk menutup celah perlindungan, industri asuransi mulai mengembangkan asuransi parametrik yang membayar otomatis ketika suhu melewati ambang tertentu. Pasar asuransi parametrik Eropa diperkirakan mencapai US\$ 7,93 miliar pada 2031, dengan pertumbuhan rata-rata 9,5% pada 2025-2032.

Belanja Perpajakan 2027 Hanya Tumbuh 9,6%, Pengamat Ungkap Alasannya

Selasa, 18 Agustus 2026 19:28 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-perpajakan-2027-hanya-tumbuh-96-pengamat-ungkap-alasannya>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan pada 2027 mencapai Rp 632 triliun.

Meski secara nominal tetap meningkat, pertumbuhannya diperkirakan melambat menjadi 9,6% atau menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan, perlambatan tersebut tidak serta-merta menunjukkan pemerintah memangkas insentif perpajakan.

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang membuat pertumbuhan belanja perpajakan terlihat melambat. Pertama, tingginya basis pembanding pada 2025.

Lonjakan belanja perpajakan pada 2025 antara lain dipengaruhi PMK 131/2024 yang mengatur penggunaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak sehingga tarif efektif PPN tetap 11%. Kebijakan tersebut menimbulkan belanja perpajakan sekitar Rp 69,45 triliun pada 2025.

Tanpa memasukkan pos tersebut, Ariawan memperkirakan, belanja perpajakan 2025 hanya sekitar Rp 452 triliun atau tumbuh sekitar 13,5%, masih sejalan dengan tren 2023-2024.

Kedua, perlambatan pertumbuhan tidak berarti tambahan nominal belanja perpajakan menyusut. Pada 2026, tambahan belanja perpajakan mencapai Rp 54,9 triliun, sedangkan pada 2027 mencapai Rp 55,6 triliun.

"Nominalnya naik, yang turun hanya persentasenya, karena dihitung dari basis yang lebih besar," jelasnya.

Ketiga, sebagian insentif perpajakan kini berada di luar cakupan laporan belanja perpajakan. Sejak berlakunya PMK 122/2024, insentif pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak lagi dikategorikan sebagai belanja perpajakan.

Ariawan mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya meminta pemerintah membuat kebijakan pengendalian agar pelaporan belanja perpajakan tetap memenuhi kriteria IMF Fiscal Transparency Code 2019.

Keempat, arah kebijakan pemerintah disebut lebih menekankan penajaman insentif, bukan pengurangan secara langsung.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 menyebut penajaman insentif perpajakan yang lebih terarah dan terukur untuk mendorong investasi, sektor prioritas, dan peningkatan nilai tambah perekonomian.

Sementara itu, KEM-PPKF mengarahkan agar insentif diberikan secara semakin terarah, terukur, dan berjangka.

"Kebijakan ini memang akan menjaga penerimaan, tetapi bentuknya menahan laju penambahan insentif, bukan mencabut insentif yang ada," katanya.

Menurut Ariawan, perlambatan pertumbuhan belanja perpajakan juga perlu dilihat bersamaan dengan target penerimaan negara dalam RAPBN 2027.

Defisit RAPBN 2027 dipatok Rp 671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan outlook 2026 sebesar 2,85% PDB. Sementara itu, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 2.591,4 triliun atau tumbuh 12,1%.

Dengan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 12,1% dan belanja perpajakan hanya tumbuh 9,6%, terdapat selisih 2,5 poin persentase.

"Selisih inilah bentuk konkret pengendaliannya," ujarnya.

Meski demikian, Ariawan menilai tidak terdapat indikasi kenaikan beban dunia usaha dari sisi tarif pajak pada 2027.

Ia mencontohkan kebijakan penundaan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyelenggara marketplace yang diatur dalam PMK 37/2025. Kebijakan tersebut disebut ditunda dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli.

Namun, dari sisi kepatuhan wajib pajak, tekanannya diperkirakan meningkat. Pasalnya, terdapat tambahan penerimaan pajak yang harus dikumpulkan pada 2027 sebesar Rp 280,6 triliun dibandingkan outlook 2026.

Karena tidak ditempuh melalui kenaikan tarif, Ariawan memperkirakan pemerintah akan mengandalkan jalur administrasi perpajakan.

RKP 2027, lanjut dia, mengarahkan ekstensifikasi dan intensifikasi terutama melalui reformasi administrasi, termasuk perluasan basis pajak melalui formalisasi aktivitas ekonomi, penguatan Coretax berbasis data analytics, serta pengawasan berbasis teknologi informasi dan program bersama antarinstansi untuk mengurangi underreporting.

"Konsekuensi bagi pelaku usaha adalah kenaikan frekuensi permintaan data, pemeriksaan, dan potensi sengketa, yaitu kenaikan biaya kepatuhan, bukan kenaikan tarif," pungkasnya.

Ekonom: Target Ekonomi 6% pada 2027 Cukup Ambisius di Tengah Konsolidasi Fiskal

Selasa, 18 Agustus 2026 18:02 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-target-ekonomi-6-pada-2027-cukup-ambisius-di-tengah-konsolidasi-fiskal>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dinilai cukup ambisius di tengah kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah yang menahan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 di level 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebagaimana diketahui, target defisit APBN tersebut lebih rendah dari 2026 sebesar 2,68% dari PDB.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, RAPBN 2027 menunjukkan konsolidasi fiskal yang cukup kuat.

Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.426 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun. Dengan demikian, defisit APBN ditargetkan Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB.

Di sisi lain, keseimbangan primer masih diproyeksikan negatif Rp 20,9 triliun. Sementara pembayaran bunga utang mencapai Rp 650,3 triliun atau hampir 19% dari total pendapatan negara.

Menurut Yusuf, tantangan muncul karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6%, sementara belanja negara hanya tumbuh sekitar 3,9%. Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi berpotensi relatif menurun.

“Artinya, kontribusi fiskal terhadap pertumbuhan justru relatif menurun. Pemerintah berharap mesin pertumbuhan lebih banyak datang dari investasi, kredit, BUMN, Danantara, dan program di luar belanja langsung pemerintah,” tutur Yusuf kepada Kontan, Selasa (18/8/2026).

Meski demikian, Yusuf menilai target defisit 2,40% masih berada dalam level yang relatif aman. Dengan asumsi pertumbuhan PDB nominal sekitar 9% dan biaya bunga efektif sekitar 6,5%, rasio utang pemerintah masih dapat terkendali meskipun keseimbangan primer berada di level negatif.

“Jadi pemerintah sebenarnya masih punya ruang fiskal, tetapi memilih tidak menggunakannya,” katanya.

Yusuf menyebut, persoalan yang lebih krusial justru berada pada sisi penerimaan negara. Dalam RAPBN 2027, penerimaan pajak ditargetkan tumbuh 12,1%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nominal yang diperkirakan sekitar 9%.

Artinya, pemerintah mengandalkan peningkatan tax buoyancy yang cukup tinggi untuk menopang target penerimaan.

Jika penerimaan pajak tidak mencapai target, ruang kebijakan pemerintah akan semakin terbatas. Pemerintah hanya memiliki pilihan untuk membiarkan defisit melebar atau melakukan penyesuaian terhadap belanja negara.

Yusuf mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan pemotongan belanja secara berlebihan ketika kondisi ekonomi sedang melemah. Kebijakan tersebut berisiko menjadi prosiklikal dan justru menekan pertumbuhan ekonomi.

“Yang perlu dihindari adalah pemotongan belanja ketika ekonomi sedang melemah. Itu bisa menjadi kebijakan prosiklikal dan justru menekan pertumbuhan lebih jauh,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Yusuf menilai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 cukup ambisius. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih realistis berada di kisaran 5,3%-5,6%, sementara pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% melalui penyesuaian belanja.

Menurut dia, apabila masih terdapat ruang fiskal, pemerintah sebaiknya mengalokasikannya secara selektif untuk belanja yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian.

“Kalau ada ruang fiskal yang masih tersedia, menurut saya lebih baik digunakan secara selektif untuk belanja yang punya efek pengganda tinggi, seperti irigasi, konektivitas, dan kesehatan primer,” tutur Yusuf.

Ia menambahkan, keseimbangan primer yang mendekati nol memang menunjukkan disiplin fiskal yang lebih baik. Namun, kondisi tersebut belum tentu menjadi titik optimal ketika perekonomian masih membutuhkan dorongan dari pemerintah.

Utang Luar Negeri Swasta Susut Jadi US\$ 194,6 Miliar, Ini Sektor Penyumbang Terbesar

Selasa, 18 Agustus 2026 14:25 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-luar-negeri-swasta-susut-jadi-us-1946-miliar-ini-sektor-penyumbang-terbesar>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi utang luar negeri (ULN) swasta pada kuartal II 2026 tercatat sebesar US\$ 194,6 miliar, atau mengalami kontraksi 0,6% year on year (yoy), meski lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3% yoy pada kuartal I 2026.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso membeberkan, perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,4% yoy,

“Ini lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 6,3% yoy pada kuartal I 2026,” tutur Denny dalam keterangannya, Senin (18/8/2026).

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4% dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total ULN swasta.

Rupiah Berpotensi Meleset dari Asumsi RAPBN 2027 Rp 17.500, Ini Penyebabnya

Selasa, 18 Agustus 2026 13:50 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-berpotensi-meleset-dari-asumsi-rapbn-2027-rp-17500-ini-penyebabnya>.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tukar rupiah pada 2027 berpotensi bergerak lebih lemah dibandingkan asumsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Meski demikian, pelemahan tersebut diperkirakan tidak akan sebesar yang terjadi pada 2026.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai asumsi rupiah Rp 17.500 per dolar AS dalam RAPBN 2027 masih cukup realistis. Menurutnya, angka tersebut merupakan asumsi rata-rata nilai tukar sepanjang tahun, bukan level yang harus dipertahankan setiap hari.

Josua menjelaskan, dalam Nota Keuangan menempatkan asumsi rupiah 2027 pada kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, dengan titik asumsi Rp 17.500 per dolar AS.

Sementara itu, dibandingkan dengan asumsi rupiah dalam APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS, proyeksi rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun ini berada di sekitar Rp 17.743 per dolar AS atau sekitar 7,5% lebih lemah dari asumsi awal pemerintah.

Untuk 2027, Josua memperkirakan rata-rata rupiah berada di level Rp 17.599 per dolar AS, dengan posisi akhir tahun sekitar Rp 17.469 per dolar AS. Dengan demikian, selisih proyeksi terhadap asumsi RAPBN 2027 hanya sekitar Rp 99 atau 0,6%. "

Jadi saya cenderung melihat kemungkinan penyimpangan kecil ke arah rupiah yang lebih lemah, tetapi bukan penyimpangan besar seperti 2026. Dengan kata lain, Rp17.500 masih cukup masuk akal sebagai dasar penyusunan anggaran, walaupun sedikit optimistis dibandingkan proyeksi kami," ujar Josua kepada Kontan, Selasa (18/8/2026).

Josua mengatakan, pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rupiah yang melemah dapat meningkatkan nilai rupiah dari sejumlah penerimaan negara yang berkaitan dengan ekspor, impor, pajak penghasilan migas, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas.

Namun, di sisi lain, pelemahan rupiah juga meningkatkan belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang valuta asing serta subsidi dan kompensasi energi.

Dalam Nota Keuangan, setiap pelemahan rata-rata rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS diperkirakan dapat menambah pendapatan negara sekitar Rp 5 triliun. Namun, belanja negara juga meningkat sekitar Rp 8 triliun sehingga secara bersih defisit APBN berpotensi melebar sekitar Rp 3 triliun.

Dengan asumsi rata-rata rupiah 2027 berada di sekitar Rp 17.600 per dolar AS, dampak langsung terhadap defisit secara mekanis dinilai masih relatif kecil, yakni sekitar Rp 3 triliun sebelum memperhitungkan respons kebijakan pemerintah.

Menurut Josua, risiko terhadap APBN akan jauh lebih besar apabila pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak mentah.

"Ini penting karena Indonesia merupakan pengimpor bersih minyak," katanya.

Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US\$ 75 per barel dalam RAPBN 2027, dengan rentang risiko US\$ 70-US\$ 95 per barel.

Setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US\$ 1 per barel berpotensi memperlebar defisit sekitar Rp 8,5 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dampak pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS yang sekitar Rp 3 triliun.

"Jadi skenario paling tidak nyaman bagi APBN bukan sekadar rupiah Rp18.000, tetapi rupiah melemah bersamaan dengan harga minyak tinggi," jelas Josua.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan subsidi energi, kompensasi, biaya impor energi, inflasi, pembayaran bunga, hingga kebutuhan pembiayaan pemerintah secara bersamaan.

Adapun anggaran subsidi energi 2027 telah direncanakan sebesar Rp 272,9 triliun, meningkat dari outlook 2026 sekitar Rp 227,3 triliun. Perhitungan subsidi tersebut sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dan harga minyak.

Dari sisi fundamental eksternal, Josua melihat rupiah masih menghadapi tekanan pada 2027. Namun, tekanan tersebut belum mengarah pada kondisi yang tidak terkendali.

Ia memperkirakan surplus perdagangan barang Indonesia tetap berada di sekitar US\$ 10 miliar pada 2027. Namun, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi sekitar US\$ 39,77 miliar atau 2,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Cadangan devisa diperkirakan berada di sekitar US\$ 143,47 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sekitar US\$ 145,26 miliar pada akhir 2026.

Menurut Josua, kondisi tersebut menunjukkan tantangan rupiah lebih berpotensi berasal dari peningkatan permintaan devisa dibandingkan kekurangan devisa secara mendadak. Permintaan dolar dapat meningkat seiring percepatan investasi dan impor ketika pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pertumbuhan impor riil 2027 diperkirakan mencapai 9,13%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor sebesar 7,31%.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,9%. Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih konservatif, yakni sekitar 5,22%.

Ia menilai pertumbuhan yang terlalu banyak didorong permintaan domestik dan investasi dengan kandungan impor tinggi berpotensi meningkatkan kebutuhan dolar dan menekan rupiah.

Karena itu, tambahan investasi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi domestik, industri substitusi impor, hilirisasi yang mampu menghasilkan ekspor, serta investasi asing langsung yang membawa devisa dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Josua menilai terdapat sejumlah faktor yang perlu diwaspadai terhadap pergerakan rupiah pada 2027.

Pertama, arah kebijakan bank sentral AS atau Federal Reserve dan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Meski inflasi AS mulai mereda, imbal hasil surat utang jangka panjang masih berpotensi bertahan tinggi akibat defisit fiskal AS dan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar.

Kedua, risiko geopolitik dan harga minyak. Ketegangan di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan harga energi sekaligus memicu perpindahan dana investor global ke aset yang dianggap lebih aman.

Ketiga, kualitas arus modal. Josua mencatat arus modal asing hingga Agustus 2026 masih belum tersebar secara merata. Secara kumulatif, arus masuk bersih sekitar US\$ 5,90 miliar, dengan sekitar

US\$ 9,41 miliar berasal dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara pasar saham mengalami arus keluar sekitar US\$ 4,12 miliar.

Keempat, kredibilitas fiskal domestik. Pasar akan mencermati kemampuan pemerintah menurunkan defisit dari outlook 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB menjadi 2,40% terhadap PDB pada 2027, di tengah peningkatan belanja dan program prioritas pemerintah.

Josua menilai risiko terbesar APBN 2027 bukan semata-mata berasal dari asumsi rupiah. Kerentanan justru muncul apabila sejumlah asumsi meleset secara bersamaan, seperti pertumbuhan ekonomi lebih rendah, rupiah lebih lemah, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) lebih tinggi, dan harga minyak lebih mahal.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,9% dan imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Sementara itu, Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,22%, imbal hasil SBN 10 tahun sekitar 7,29%, serta defisit APBN sekitar 2,90% terhadap PDB.

Meski demikian, terdapat sejumlah faktor yang dapat menopang rupiah, antara lain potensi pelanggaran kebijakan moneter global, ketahanan ekspor nonmigas hasil hilirisasi, optimalisasi devisa hasil ekspor, perluasan kerja sama perdagangan, serta perbaikan iklim investasi.

"Jika tekanan geopolitik mereda, harga minyak turun, arus investasi menguat, dan kepercayaan terhadap fiskal terjaga, rupiah justru berpeluang menguat secara bertahap pada paruh kedua 2027," kata Josua.

Dengan demikian, Josua menilai asumsi rupiah Rp 17.500 per dolar AS dalam RAPBN 2027 jauh lebih realistis dibandingkan asumsi Rp 16.500 per dolar AS pada APBN 2026. Risiko rupiah berada sedikit di atas asumsi tetap ada, dengan proyeksi rata-rata sekitar Rp 17.600 per dolar AS, tetapi belum menunjukkan potensi penyimpangan besar.

Pemerintah, menurutnya, perlu menjaga volatilitas rupiah, memperbesar pasokan devisa, memperkuat ekspor dan investasi langsung, mempercepat kewajiban penempatan devisa hasil ekspor, mengurangi impor energi, memperluas transaksi mata uang lokal, serta menjaga kredibilitas APBN.

Dari sisi fiskal, bantalan risiko juga perlu disiapkan untuk menghadapi kombinasi rupiah melemah, harga minyak tinggi, dan biaya penerbitan SBN meningkat karena kombinasi ketiganya akan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap APBN dibandingkan pelemahan rupiah secara terpisah.

Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Jadi US\$ 216,3 Miliar Pada Kuartal II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 11:16 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-perpajakan-2027-tembus-rp-632-triliun-naik-96>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah pada kuartal II 2026 tercatat sebesar US\$ 216,3 miliar, atau tumbuh 2,9% year on year (yoy), meski lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I 2026 sebesar 3,8% yoy.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga.

Ia menyebut, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6%) Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,5%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

Ia membeberkan, posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

Belanja Perpajakan 2027 Tembus Rp 632 Triliun, Naik 9,6%

Selasa, 18 Agustus 2026 10:07 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-perpajakan-2027-tembus-rp-632-triliun-naik-96>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan pada 2027 mencapai Rp 632 triliun. Angka tersebut meningkat 9,6% dibandingkan proyeksi belanja perpajakan pada 2026 yang sebesar Rp 576,4 triliun.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, belanja perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kebijakan ini dirancang secara terukur dengan mempertimbangkan berbagai dinamika perekonomian, baik global maupun domestik, serta kebutuhan masing-masing sektor dalam perekonomian," dikutip dari laporan tersebut, Selasa (18/8/2026).

Secara historis, belanja perpajakan terus meningkat. Pada 2022, nilainya tercatat Rp 318,4 triliun, kemudian naik menjadi Rp 352,4 triliun pada 2023 dan Rp 398,4 triliun pada 2024.

Nilainya kemudian melonjak menjadi Rp 521,5 triliun pada 2025. Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan mencapai Rp 576,4 triliun sebelum kembali meningkat menjadi Rp 632 triliun pada 2027.

Meski nominalnya terus bertambah, laju pertumbuhan belanja perpajakan pada 2027 diproyeksikan melambat. Pertumbuhannya sebesar 9,6% menjadi yang terendah dalam periode 2022–2027.

Pada 2022, belanja perpajakan tumbuh 14,4%, kemudian melambat menjadi 10,7% pada 2023 dan 13% pada 2024. Pertumbuhan selanjutnya melonjak hingga 30,9% pada 2025 sebelum kembali melambat menjadi 10,5% pada 2026 dan 9,6% pada 2027.

Jika dibandingkan dengan 2022, proyeksi belanja perpajakan 2027 hampir dua kali lipat. Dalam lima tahun, nilainya meningkat sekitar Rp 313,6 triliun.

Berdasarkan jenis pajak, belanja perpajakan terbesar pada 2027 berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yakni sebesar Rp 413 triliun. Nilai tersebut naik dari Rp 372,7 triliun pada 2026.

Selanjutnya, belanja perpajakan dari Pajak Penghasilan (PPh) diproyeksikan mencapai Rp 184,6 triliun pada 2027, meningkat dari Rp 172 triliun pada tahun sebelumnya.

Belanja perpajakan dari Bea Masuk dan Cukai juga diproyeksikan naik dari Rp 30,7 triliun pada 2026 menjadi Rp 33,4 triliun pada 2027.

Sementara itu, belanja perpajakan dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P5L) diproyeksikan tetap sebesar Rp 600 miliar. Adapun belanja perpajakan dari Bea Meterai mencapai Rp 400 miliar.

Dengan demikian, PPN dan PPnBM menjadi komponen terbesar dalam belanja perpajakan 2027 dengan nilai Rp 413 triliun atau sekitar 65,3% dari total belanja perpajakan.

Pertumbuhan Belanja Perpajakan di Tahun 2027 Jadi yang Terendah dalam Lima Tahun

Selasa, 18 Agustus 2026 14:41 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-belanja-perpajakan-di-tahun-2027-jadi-yang-terendah-dalam-lima-tahun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tampaknya mulai mengerem pemberian insentif perpajakan atau belanja perpajakan pada tahun depan.

Pasalnya, dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan pada 2027 mencapai Rp 632 triliun.

Meski nilainya tetap meningkat, pertumbuhan belanja perpajakan pada tahun depan diproyeksikan hanya 9,6%, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengungkapkan dua alasan utama yang membuat pertumbuhan belanja perpajakan melambat pada tahun depan.

Pertama, pemerintah membutuhkan ruang penerimaan yang lebih kuat. Menurutnya, RAPBN 2027 memasang target penerimaan yang cukup ambisius, sementara kebutuhan belanja juga besar.

Oleh karena itu, pemerintah tentu harus lebih hati-hati memberikan tax expenditure. "Setiap insentif pajak pada dasarnya adalah opportunity cost bagi negara, alias pajak yang tidak dipungut karena diberikan sebagai stimulus. Maka, insentif harus menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding penerimaan yang dikorbankan," ujar Ronny kepada Kontan, Selasa (18/8/2026).

Kedua, pemerintah tampaknya mulai bergeser dari pendekatan "semakin banyak insentif semakin baik" menuju pendekatan "quality of tax expenditure".

Artinya, bukan hanya soal berapa besar insentif yang diberikan, tetapi apakah insentif tersebut benar-benar menghasilkan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, hilirisasi, produktivitas, dan penguatan daya saing.

"Ini penting karena belanja perpajakan secara historis terus meningkat dan pada 2027 tetap mencapai angka yang sangat besar," katanya.

Ia justru melihat perlambatan tersebut sebagai sinyal positif jika benar-benar merupakan hasil evaluasi efektivitas insentif, bukan hanya upaya menaikkan penerimaan dengan cara mempersempit fasilitas pajak.

Pemerintah harus berani mengevaluasi insentif yang tidak memberikan additionality, misalnya kegiatan ekonomi tersebut sebenarnya tetap akan terjadi meskipun tanpa insentif.

"Kalau begitu, negara hanya kehilangan penerimaan tanpa mendapatkan tambahan aktivitas ekonomi yang berarti," tegas Ronny.

Di sisi lain, Ronny menegaskan bahwa perlambatan belanja perpajakan pada tahun depan tidak otomatis membuat beban dunia usaha meningkat.

Pasalnya, beban pajak dunia usaha tidak bisa dinilai hanya dari angka belanja perpajakan. Kalau pemerintah mengurangi insentif tertentu, memang biaya efektif sebagian perusahaan bisa meningkat.

Tetapi di sisi lain, pemerintah juga bisa memberikan insentif yang lebih terarah kepada sektor yang dianggap strategis.

"Bahkan target penerimaan pajak yang meningkat tidak selalu berarti tarif pajak dinaikkan, peningkatan penerimaan bisa berasal dari perluasan basis pajak, kepatuhan, digitalisasi administrasi, dan membaiknya aktivitas ekonomi," jelasnya.

Menurutnya, yang justru perlu dihindari adalah situasi ketika pemerintah mengurangi insentif tetapi tidak memberikan kepastian kebijakan dan tidak memperbaiki iklim investasi.

Jika hal tersebut terjadi, maka dunia usaha bisa menghadapi kombinasi yang kurang ideal, yakni insentif berkurang, biaya kepatuhan meningkat, tetapi produktivitas dan permintaan belum cukup kuat.

Oleh karena itu, Ronny melihat kebijakan 2027 seharusnya bukan mengurangi insentif pajak untuk mengejar penerimaan, tetapi menata ulang insentif agar setiap rupiah penerimaan yang dikorbankan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Apalagi struktur belanja perpajakan 2027 masih cukup besar pada PPN dan PPnBM, sekitar Rp 413 triliun, sementara PPh sekitar Rp 184,6 triliun. Artinya, ruang untuk melakukan reprioritization sebenarnya cukup besar.

Ia menambahkan, insentif harus diberikan bukan karena dunia usaha meminta, tetapi karena negara bisa membuktikan bahwa insentif tersebut menghasilkan investasi, pekerjaan, produktivitas, dan pertumbuhan yang lebih besar.

Sementara itu, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata, Faisal Rachman menilai bahwa perlambatan belanja perpajakan tersebut menandakan bahwa pemerintah melihat perekonomian Indonesia di tahun depan semakin membaik.

"Jika belanja perpajakan menurun, artinya pemerintah melihat kondisi ekonomi sedang baik. Ini juga sejalan dengan asumsi makro pertumbuhan PDB 2027 yang cukup optimis," kata Faisal.

Ia menyarankan bahwa sebaiknya belanja perpajakan di tahun depan lebih diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti belanja perpajakan PPh dan PPn.

"Secara sektor, yang bisa memberikan insentif bagi sektor manufaktur yang labor intensive dan juga UMKM," pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, belanja perpajakan pada 2022 tercatat Rp 318,4 triliun dengan pertumbuhan 14,4%.

Pada 2023, nilainya meningkat menjadi Rp352,4 triliun dengan pertumbuhan 10,7%. Selanjutnya pada 2024, belanja perpajakan mencapai Rp 398,4 triliun atau tumbuh 13%. Pertumbuhan kemudian melonjak signifikan pada 2025 menjadi 30,9%, dengan nilai belanja perpajakan mencapai Rp 521,5 triliun.

Pada 2026, belanja perpajakan diproyeksikan mencapai Rp576,4 triliun atau tumbuh 10,5%. Sementara pada 2027, nilainya kembali meningkat menjadi Rp632 triliun, tetapi pertumbuhannya melambat menjadi 9,6%.

Dengan demikian, pertumbuhan 9,6% pada 2027 menjadi yang terendah dibandingkan periode 2022–2026. Bahkan, pertumbuhan tersebut berada di bawah capaian 2023 yang sebesar 10,7%.

Meski pertumbuhannya melambat, secara nominal belanja perpajakan 2027 meningkat Rp 55,6 triliun dibandingkan proyeksi 2026. Jika dibandingkan dengan 2022, nilai belanja perpajakan 2027 hampir dua kali lipat.

HUT ke-81 RI, Ahmad Luthfi Dorong Kerja Nyata untuk Kemakmuran Rakyat Jateng

Anggraini S

Selasa, 18 Agustus 2026 17:00 WIB

<https://www.rmoljawatengah.id/hut-ke-81-ri-ahmad-luthfi-dorong-kerja-nyata-untuk-kemakmuran-rakyat-jateng>

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang dan pendiri bangsa.

Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin 17 Agustus 2026.

Luthfi mengatakan Indonesia merupakan negara besar sehingga kemerdekaan harus diisi dengan upaya mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Indonesia ini negara besar, maka pada HUT ke-81 ini kita harus berdaulat, adil, dan makmur. Dengan pengertian harus mengedepankan kerja nyata sebagaimana para pendahulu kita,” kata Luthfi.

Menurutnya, kerja nyata tersebut harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Pemerintah bersama masyarakat dan berbagai pihak perlu berkolaborasi menghadapi berbagai persoalan yang masih dihadapi Jawa Tengah.

Luthfi menyebut kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal itu mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, hingga kesehatan.

“Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan menjadi prioritas utama kita. Itulah yang menjadi alas dasar kemerdekaan harus kita raih,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng berupaya memperluas akses pendidikan agar semakin merata. Pemerintah juga mendorong anak-anak yang putus sekolah agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan.

Sementara di sektor kesehatan, Jawa Tengah mencatat capaian positif melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan layanan dokter spesialis keliling atau Speling. Jateng disebut menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam pelayanan CKG tersebut.

Luthfi juga memaparkan sejumlah indikator perekonomian Jawa Tengah. Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi Jateng pada semester I-2026 mencapai 5,80 persen.

Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,45 persen.

Dari sisi investasi, realisasi pada semester I-2026 mencapai Rp59,94 triliun. Investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp25,92 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp22,62 triliun, dan investasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK) Rp11,40 triliun.

Realisasi investasi tersebut juga disebut telah menyerap tenaga kerja sekitar 213 ribu orang.

Pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pemerintah juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Mengacu data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan Jateng turun dari 9,48 persen menjadi 9,21 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 tercatat sebesar 4,24 persen. Angka tersebut turun 0,09 persen dibandingkan Februari 2025 yang berada di angka 4,33 persen.

Luthfi menilai capaian tersebut merupakan hasil dari semangat kebersamaan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak.

“Ini adalah hasil dari semangat kebersamaan yang dibangun melalui collaborative government (pemerintahan kolaboratif) dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat,” ujar Luthfi.

Jateng Jadi Primadona Investasi, Kemudahan Perizinan hingga Biaya Hidup Jadi Daya Tarik

Selasa, 18 Agustus 2026 13:00 WIB

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11580

SEMARANG — Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu primadona investasi di Indonesia. Sebab, dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi, infrastruktur yang memadai, kemudahan perizinan, kondusivitas wilayah, dan living cost atau biaya hidup menjadi daya tarik bagi para investor dari luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Saribua Siahaan, saat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di Kota Semarang pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Kunjungan itu menjadi bagian dari rangkaian penilaian lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jawa Tengah.

"Jawa Tengah ini primadona, selain infrastruktur yang bagus, terus sistem pemerintahan daerah dan perizinan bagus, living cost-nya kompetitif, sehingga menjadi daya tarik investor untuk memilih Jawa Tengah sebagai tujuan investasi," ucap Saribua.

Menurutnya, mempromosikan potensi investasi di Jawa Tengah kepada para calon investor juga cukup mudah dengan semua indikator tersebut. Berdasarkan pengalamannya dalam mempromosikan potensi investasi dan meyakinkan investor, persoalan lahan dan perizinan menjadi indikator utama.

Kemudahan itu, tidak lepas dari kolaborasi kuat antara Pemprov Jateng melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Karakteristik Jawa Tengah juga sangat menarik bagi investasi sektor manufaktur atau bersifat padat karya.

"Pengalaman saya sendiri (ketika menawarkan potensi investasi), investor yang memilih Jawa Tengah itu tidak hanya 1 atau 2. Yang jelas, Jawa Tengah itu primadona yang dilirik banyak investor," jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, selama ini Jawa Tengah terus berupaya menjaga kondusivitas wilayah serta menciptakan iklim investasi yang sehat. Kemudahan perizinan dan jaminan keamanan kepada calon investor pun terus didorong. Tentu saja didukung dengan regulasi, peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), serta aspek lainnya.

"Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif memang menjadi tanggung jawab kita semua. Investasi ini penting untuk perkembangan wilayah, mereduksi angka kemiskinan dan pengangguran," katanya.

Dari berbagai upaya tersebut, realisasi investasi di Jateng terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, realisasi investasi Jateng pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun. Pada tahun ini, tepatnya sepanjang semester I-2026, realisasi investasinya sudah mencapai Rp59,94 triliun, meliputi penanaman modal asing (PMA) Rp25,92 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp22,62 triliun, serta usaha mikro dan kecil (UMK) Rp11,40 triliun. Selain itu, serapan tenaga kerja semester I-2026 sudah mencapai sekitar 213 ribu orang.

Capaian itu juga diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, tercatat pada semester I-2026 pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,80%. Sementara angka kemiskinan di Jawa Tengah per Maret 2026 turun dari 9,48% menjadi 9,21%. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2026 sebesar 4,24% atau turun 0,09% dibandingkan dengan Februari 2025 sebesar 4,33%.

"Dalam membangun wilayah, kita tidak bisa mengandalkan APBD saja, maka investasi menjadi salah satu sumber daya. Untuk itu, kami terus tawarkan potensi investasi di Jawa Tengah kepada banyak calon investor," ucap Gubernur.

Redam Konflik Dagang, Trump Tunda Tarif 50% Kanada

Rabu, 19 Agustus 2026 12:50 WIB

Alicia Diaz dan Josh Wingrove

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118825/redam-konflik-dagang-trump-tunda-tarif-50-kanada/2>

Bloomberg, Pemerintahan Trump menunda penerapan tarif 50% terhadap produk-produk Kanada senilai miliaran dolar selama tiga hari. Langkah ini diambil dengan alasan bahwa kedua belah pihak

telah mencapai kesepakatan sementara untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan yang lebih luas yang sempat menyeret hubungan kedua negara ke titik terendah baru.

Donald Trump mengumumkan keputusan tersebut kurang dari dua jam sebelum tarif tersebut dijadwalkan mulai berlaku. Dalam unggahannya di media sosial, ia menyatakan menunda penerapan tarif tersebut "berdasarkan fakta bahwa Kanada dan AS, dengan catatan finalisasi dokumen, telah mencapai KESEPAKATAN!"

Proklamasi Gedung Putih yang dikeluarkan kemudian menyebutkan bahwa tarif tersebut ditangguhkan setelah Kanada "menyampaikan komitmen untuk menghapus bentuk-bentuk diskriminasi" terhadap produk otomotif, produk olahan susu, dan minuman beralkohol asal AS. Sementara itu, kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyatakan bahwa kesepakatan tersebut mencakup "akses pasar secara komprehensif untuk seluruh barang Amerika, komitmen keamanan ekonomi, penyelarasan perdagangan digital," serta faktor-faktor lainnya, tanpa merinci informasi lebih lanjut.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney tidak memberikan pernyataan yang sejelas itu dan menahan diri untuk tidak mengklaim bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan resmi. Kedua belah pihak juga tidak menjelaskan apakah poin-poin krusial yang menggantung sebelumnya, seperti tarif otomotif dan kayu olahan, bakal terselesaikan.

"Kemajuan substansial telah dicapai, meski masih ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan," ujar Carney dalam sebuah pernyataan resmi. "Selagi kita melanjutkan upaya ini, Kanada tetap berfokus untuk membangun perekonomian dalam negeri yang lebih kuat, mandiri, dan kompetitif."

Mata uang dolar Kanada langsung melonjak menyusul pengumuman tersebut, menyentuh level tertinggi hingga 1,3872 per dolar AS.

Di tengah ketidakpastian yang ada, pengumuman ini menandai adanya kemajuan dalam hubungan tegang antara dua sekutu lama yang mencatatkan nilai perdagangan hingga hampir US\$900 miliar pada tahun lalu. Langkah ini juga mengindikasikan potensi kemajuan dalam peninjauan ulang perjanjian perdagangan Amerika Utara yang sedang berlangsung, yang turut melibatkan Meksiko.

Trump mengumumkan rencana tarif tersebut pada akhir Juli lalu, dengan dasar pembenaran aksi balasan Kanada terhadap rentetan tarif AS pada tahun lalu. Belum jelas konsesi apa yang berhasil ia dapatkan dari gertakan terbarunya ini. Ia memang kerap kali melunakkan ancaman tarif terbesarnya ketika proses negosiasi membuahkan hasil yang sering kali hanya berupa konsesi terbatas.

Gedung Putih sebelumnya menyatakan akan menjatuhkan bea masuk terhadap berbagai barang dari Kanada—termasuk perlengkapan hoki, bir, susu, dan kayu lapis (plywood)—di bawah Pasal 338 Undang-Undang Tarif 1930 (Tariff Act of 1930), yang memberi wewenang kepada presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 50% pada negara-negara yang dinilai mendiskriminasi perdagangan AS.

Sebagian besar provinsi di Kanada, termasuk Ontario dan Quebec, telah melarang penjualan minuman beralkohol asal AS di toko-toko ritel, yang memutus pasar ekspor krusial bagi para produsen anggur dan minuman keras Amerika.

Kanada juga merespons tarif Trump terhadap produk otomotif dengan menerapkan tarif balasan serupa pada mobil dan truk buatan AS—meski mereka membuat mekanisme pengembalian dana bagi perusahaan-perusahaan seperti Honda Motor Co yang juga memproduksi kendaraan di Kanada.

Tarif tersebut semula dijadwalkan berlaku pada hari Rabu (19/8), yang membuka jendela waktu 30 hari untuk pembicaraan yang dirancang demi menekan Kanada agar mau memberikan konsesi. Janice Charette, kepala negosiator perdagangan Kanada, bersama menteri kabinet Dominic LeBlanc, tetap bertahan di ibu kota AS sepanjang akhir pekan untuk mencoba merampungkan kesepakatan.

Penerapan tarif Pasal 338 yang diusulkan tersebut tidak akan berlaku untuk komoditas sumber daya paling vital yang dibeli AS dari Kanada, seperti minyak, kalium (potash), dan mineral.

Carney sebelumnya menyatakan bahwa target Kanada dalam perundingan dagang adalah mengurangi bea masuk sektoral pada industri-industri seperti baja, aluminium, dan otomotif, yang telah menciptakan ketidakpastian besar bagi basis manufaktur negara tersebut hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam unggahannya di Truth Social saat mengumumkan penundaan tarif, Trump juga menyebutkan bahwa Proyek Pipa Minyak Keystone XL bakal dihidupkan kembali.

Trump telah menandatangani izin kepresidenan yang mengotorisasi proyek perluasan Pipa Bridger yang dirancang untuk mengangkut minyak Kanada ke Wyoming—sebuah proyek yang menjadi bagian dari kebangkitan Pipa Keystone XL, yang sangat diinginkan Trump pada masa jabatan pertamanya. Mantan Presiden Joe Biden secara efektif mematikan proyek tersebut dengan mencabut otorisasi pada tahun 2021.

AS mengimpor lebih dari 4 juta barel minyak mentah dan produk minyak bumi per hari dari Kanada, angka yang terus tumbuh secara stabil selama beberapa dekade. Sektor energi merupakan komoditas impor terbesar AS dari Kanada.

Dongkrak Ekonomi, China Cairkan Dana Perumahan Rp28.800 T

Rabu, 19 Agustus 2026 11:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118813/dongkrak-ekonomi-china-cairkan-dana-perumahan-rp28-800-t/2>

Bloomberg, China mengerahkan dana tersembunyi senilai 10,9 triliun yuan (sekitar Rp28.873 triliun) guna mendongkrak berbagai sektor konsumsi terkait perumahan. Ini menjadi respons kebijakan pertama negara tersebut setelah perlambatan ekonominya kian mendalam pada Juli lalu.

Mulai bulan depan, berdasarkan regulasi yang telah direvisi, para warga dapat menarik tabungan mereka di dana simpanan perumahan—sebuah program pemerintah yang sebelumnya digunakan khusus untuk membantu pembelian rumah—guna membiayai pengeluaran bernilai besar seperti renovasi. Regulator juga akan melonggarkan syarat dan ketentuan bagi warga yang ingin menggunakan dana tabungan tersebut untuk pembayaran sewa rumah.

Selain itu, China untuk pertama kalinya akan mengizinkan pusat pengelolaan dana simpanan perumahan tersebut untuk membeli obligasi bank kebijakan sebagai langkah untuk meningkatkan imbal hasilnya.

Revisi aturan ini dilakukan setelah perekonomian China menunjukkan pelemahan secara menyeluruh pada Juli, di mana tingkat konsumsi melesu lebih dalam dari yang diperkirakan dan harga rumah terus merosot. Banyak ekonom memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi meluncur semakin jauh di bawah target tahunan pemerintah, yang memicu imbauan dari Perdana Menteri Li Qiang untuk segera meningkatkan langkah-langkah dukungan.

Sistem dana simpanan perumahan China, yang mengadopsi model dari Singapura sekitar tiga dekade lalu, mewajibkan pekerja dan pemberi kerja untuk menyetor iuran bulanan ke dalam satu wadah dana bersama, yang kemudian dapat menyalurkan pinjaman KPR, sering kali dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada bank. Dengan iuran dari hampir 180 juta pemberi kerja dan pekerja di

seluruh negeri, dana tersebut mengelola 10,9 triliun yuan per 2024—jumlah yang melebihi total saldo pinjaman KPR yang beredar saat ini, menurut data resmi terbaru.

Revisi terbaru ini juga memberi wewenang penuh kepada Dewan Negara, atau kabinet China, untuk memutuskan secara mandiri tingkat suku bunga pinjaman KPR yang disalurkan oleh dana simpanan perumahan. Sebelumnya, bank sentral ditunjuk untuk mengusulkan setiap pemotongan suku bunga untuk pinjaman tersebut dengan persetujuan dari Dewan Negara.

Langkah ini "membuka jalan bagi penyesuaian suku bunga yang lebih fleksibel" pada dana tersebut, dan berdampak "positif secara moderat" bagi pasar perumahan, ungkap para analis China Index Holdings dalam sebuah catatan resmi pada Selasa malam.

Suku bunga KPR berbasis dana simpanan perumahan saat ini sudah 0,9 poin persentase lebih murah dibandingkan suku bunga KPR acuan perbankan. Pemotongan suku bunga pada dana tersebut akan membantu pembeli rumah mengurangi beban KPR secara keseluruhan, karena mereka diizinkan menarik tabungan dari dana tersebut untuk mencicil KPR bank.

Dana simpanan perumahan telah menjadi sarana pembiayaan yang kian krusial bagi para pembeli rumah sejak tahun lalu, seiring perbankan yang makin berhati-hati di tengah tantangan profitabilitas. Menurut China Index Holdings, lebih dari 80 pemerintah daerah tahun ini telah menaikkan kuota pinjaman yang didukung oleh dana tersebut.

Sentimen pasar obligasi China pun semakin membaik berkat langkah perluasan cakupan investasi dana simpanan perumahan yang kini mencakup obligasi bank kebijakan. Imbal hasil (yield) obligasi China Development Bank bertenor 10 tahun mencatatkan penurunan terbesarnya dalam dua bulan pada Selasa (18/8).

Yuan China Menguat Rabu (19/8), Pasar Nantikan Sinyal Kebijakan The Fed

Rabu, 19 Agustus 2026 11:25 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yuan-china-menguat-rabu-198-pasar-nantikan-sinyal-kebijakan-the-fed>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yuan China menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (19/8/2026), ditopang pelemahan dolar dan penguatan kurs tengah yang ditetapkan bank sentral China.

Mengutip Reuters, yuan spot naik 0,07% menjadi 6,7408 per dolar AS pada pukul 03.51 GMT. Pergerakan yuan berada di kisaran 6,7400 hingga 6,7439 per dolar.

Level tersebut masih berada tidak jauh dari posisi terkuat yuan sejak Februari 2023, yakni 6,7370 per dolar yang tercapai pada Senin (17/8).

Penguatan yuan terjadi ketika dolar AS masih berada di bawah tekanan.

Indeks dolar yang mengukur kinerja greenback terhadap enam mata uang utama berada di level 99,58, mendekati posisi terendah dalam beberapa bulan terakhir.

Kurs Tengah Yuan Menguat

Sebelum perdagangan dibuka, People's Bank of China (PBOC) menetapkan kurs tengah yuan di 6,7854 per dolar AS.

Level tersebut menjadi kurs tengah terkuat sejak 8 Februari 2023. Penetapan tersebut juga sekitar 433 pip lebih lemah dibandingkan estimasi Reuters.

Dalam sistem nilai tukar China, yuan spot diperbolehkan bergerak maksimal 2% di atas atau di bawah kurs tengah yang ditetapkan PBOC setiap hari.

Ekonom Julius Baer David A. Meier mengatakan, China masih memberikan ruang bagi apresiasi yuan secara bertahap.

"China terus mengizinkan apresiasi renminbi yang undervalued secara bertahap. Dengan preferensi untuk tidak melemahkan ekspor, kami tetap memperkirakan penguatan secara perlahan," ujar Meier dalam catatannya.

Yuan telah menguat sekitar 0,7% terhadap dolar sepanjang Agustus dan menguat 3,8% sejak awal tahun 2026. Penguatan tersebut didukung pelemahan dolar AS dan kinerja ekspor China yang solid.

BofA Naikkan Proyeksi Yuan

Prospek penguatan yuan juga tercermin dari perubahan proyeksi Bank of America (BofA) Securities.

Pekan ini, BofA menaikkan proyeksi nilai tukar USD/CNY pada akhir tahun menjadi 6,6 yuan per dolar, dari perkiraan sebelumnya 6,7 yuan.

Analisis BofA menyebut konversi penerimaan ekspor dan posisi yuan yang masih undervalued menjadi faktor utama yang mendukung proyeksi tersebut.

Selain itu, tekanan dari negara-negara G7 untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan juga menjadi pertimbangan.

Di sisi lain, tekanan terhadap dolar AS semakin kuat setelah imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun mencapai level tertinggi sejak 2007.

Kenaikan imbal hasil tersebut dipicu kekhawatiran mengenai geopolitik dan tingginya utang pemerintah.

Pasar kini juga menantikan risalah rapat kebijakan terbaru Federal Reserve (The Fed) yang akan dirilis pada Rabu.

Investor akan mencermati risalah tersebut untuk mencari petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga AS selanjutnya.

Perubahan ekspektasi terhadap suku bunga The Fed dapat kembali memengaruhi pergerakan dolar dan yuan.

Sementara itu, yuan offshore juga menguat sekitar 0,07% menjadi 6,7423 per dolar AS dalam perdagangan Asia.

Won Korea Selatan Pimpin Penguatan Mata Uang Asia Rabu (19/8) Pagi, Rupiah Melemah

Rabu, 19 Agustus 2026 09:38 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-korea-selatan-pimpin-penguatan-mata-uang-asia-rabu-198-pagi-rupiah-melemah>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar sejumlah mata uang Asia bergerak bervariasi terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (19/8/2026).

Won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar, sementara rupiah masih berada di zona pelemahan.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.02 GMT, won Korea Selatan menguat 0,44% ke level 1.406,30 per dolar AS. Penguatan tersebut menjadikan won sebagai mata uang Asia dengan kinerja terbaik pada perdagangan tersebut.

Won juga mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun berjalan. Hingga 19 Agustus 2026, won telah menguat 2,36% terhadap dolar AS dibandingkan posisi akhir 2025.

Selain won, yen Jepang menguat 0,12% menjadi 159,43 per dolar AS, dolar Taiwan naik 0,10% menjadi 31,912, dolar Singapura menguat tipis 0,01% ke 1,278, sedangkan yuan China naik 0,03% menjadi 6,743 per dolar AS.

Sebaliknya, sejumlah mata uang Asia melemah. Baht Thailand turun 0,14% menjadi 33,128 per dolar AS, ringgit Malaysia melemah 0,14% ke 4,062, sementara peso Filipina turun 0,13% menjadi 61,834.

Rupiah Masih Tertekan

Rupiah juga tercatat melemah tipis 0,03% ke level Rp17.855 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.850 per dolar AS.

Pergerakan rupiah tersebut melanjutkan tekanan yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Berdasarkan data Reuters, rupiah telah melemah sekitar 6,64% terhadap dolar AS sejak akhir 2025.

Pelemahan rupiah menjadi salah satu yang terdalam di antara mata uang Asia dalam periode tersebut.

Hanya baht Thailand yang melemah lebih dalam, yakni 5,06%, sementara rupee India turun 6,07% dan peso Filipina melemah 4,91%.

Di kawasan Asia, ringgit Malaysia relatif stabil secara tahunan dengan perubahan sekitar 0,14%, sedangkan dolar Singapura menguat 0,58%.

Tekanan Dolar dan Geopolitik Jadi Perhatian

Pergerakan mata uang Asia berlangsung di tengah perhatian investor terhadap arah kebijakan Federal Reserve dan kenaikan imbal hasil obligasi global.

Sebelumnya, kenaikan yield obligasi jangka panjang Amerika Serikat, Jepang dan Jerman turut memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan daya tarik aset berbasis dolar sekaligus memperbesar risiko arus modal keluar dari pasar negara berkembang.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga menjadi perhatian karena berpotensi mendorong kenaikan harga minyak.

Negara-negara seperti Indonesia dan India yang memiliki kebutuhan impor energi cukup besar cenderung lebih sensitif terhadap lonjakan harga minyak.

Dengan demikian, pergerakan rupiah dan mata uang Asia ke depan masih akan dipengaruhi kombinasi arah kebijakan The Fed, pergerakan yield Treasury AS, harga komoditas energi serta perkembangan geopolitik global.

Imbal Hasil Obligasi Jepang Mendekati 3%, Kekhawatiran Inflasi dan Fiskal Meningkat

Rabu, 19 Agustus 2026 09:16 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/imbal-hasil-obligasi-jepang-mendekati-3-kekhawatiran-inflasi-dan-fiskal-meningkat>

KONTAN.CO.ID - Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang atau Japanese Government Bonds (JGB) tenor 10 tahun semakin mendekati level 3%, level yang terakhir kali terlihat pada pertengahan 1990-an.

Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran inflasi, kondisi fiskal serta ekspektasi perubahan kebijakan moneter Bank of Japan (BOJ).

Melansir Reuters, imbal hasil JGB tenor 10 tahun naik untuk sesi ketujuh berturut-turut pada Selasa (18/8/2026), menyentuh 2,945%. Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak September 1996.

Kenaikan imbal hasil juga terjadi di tenor pendek. Imbal hasil JGB tenor lima tahun mencetak rekor tertinggi, sementara tenor dua tahun mencapai level tertinggi dalam 31 tahun.

Pergerakan tersebut menunjukkan perubahan besar pada pasar obligasi Jepang yang selama lebih dari satu dekade terbiasa dengan tingkat suku bunga sangat rendah akibat pembelian obligasi secara masif oleh BOJ.

Kini, meningkatnya tekanan inflasi global akibat konflik di Timur Tengah serta ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ membuat investor mulai menuntut imbal hasil yang lebih tinggi.

Risiko Fiskal Jepang Jadi Perhatian

Kenaikan imbal hasil JGB juga memunculkan pertanyaan apakah lonjakan tersebut merupakan bagian normal dari pemulihan inflasi dan ekonomi Jepang atau mulai mencerminkan meningkatnya risiko fiskal pemerintah.

Strategis fixed income Deutsche Bank untuk Jepang, Shoki Omori, mengatakan kenaikan imbal hasil JGB saat ini mencerminkan kombinasi kenaikan upah, inflasi, serta kekhawatiran terhadap besarnya penerbitan obligasi dan belanja pemerintah.

"Premi risiko fiskal yang tercermin dalam imbal hasil merupakan bentuk disiplin pasar terhadap belanja pemerintah di masa depan," ujar Omori.

Menurutnya, kenaikan imbal hasil saat ini lebih mencerminkan normalisasi dengan peringatan, bukan sebuah krisis.

Kekhawatiran fiskal menjadi semakin besar karena utang Jepang telah mencapai lebih dari 200% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Perdana Menteri Sanae Takaichi sejak menjabat pada Oktober mendorong strategi pertumbuhan berbasis investasi dengan fokus pada industri strategis.

Rencana belanja tersebut, ditambah kebijakan pemotongan pajak, memicu kekhawatiran bahwa kondisi fiskal Jepang dapat semakin terbebani.

BOJ Dibayangi Tekanan Kenaikan Suku Bunga

Di sisi lain, inflasi dan pelemahan yen yang berada di dekat level terendah dalam hampir empat dekade meningkatkan tekanan terhadap BOJ untuk mempercepat kenaikan suku bunga.

Pasar kini semakin memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga pada bulan depan. Ekspektasi tersebut turut mendorong kenaikan imbal hasil JGB.

Ekonom NLI Research Institute Tsuyoshi Ueno mengatakan hubungan antara pelemahan yen dan kenaikan imbal hasil obligasi perlu menjadi perhatian.

"Menembus 3% merupakan level simbolis. Jika perhatian pasar beralih pada inflasi yang mendasari dan kekhawatiran fiskal, tekanan untuk menjual yen dapat meningkat," ujarnya.

Kenaikan imbal hasil juga berpotensi memengaruhi aliran dana global. Jika imbal hasil JGB menjadi semakin menarik, investor Jepang dapat menarik kembali dana yang selama ini ditempatkan pada obligasi Amerika Serikat dan Eropa.

Level 3% Bisa Jadi Bukan Batas Atas

Naoya Hasegawa, kepala strategi obligasi Okasan Securities menilai, ketidakpastian kebijakan fiskal dan moneter Jepang masih tinggi sehingga pemulihan permintaan investor terhadap JGB kemungkinan belum akan terjadi dalam waktu dekat.

Menurutnya, terdapat kemungkinan cukup besar bahwa level 3% hanya menjadi pijakan berikutnya, bukan batas atas imbal hasil obligasi Jepang.

Kenaikan imbal hasil JGB juga terjadi di tengah tekanan pada pasar obligasi global. Imbal hasil obligasi AS, Jerman dan Prancis turut melonjak ke level tertinggi dalam beberapa tahun akibat kekhawatiran inflasi serta ekspektasi pengetatan kebijakan moneter.

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai Jepang masih memiliki ruang untuk menghadapi kenaikan biaya pembiayaan karena selama bertahun-tahun menikmati suku bunga yang sangat rendah.

Takuji Okubo, Managing Director sekaligus Chief Economist Japan Macro Advisor mengatakan, suku bunga efektif pemerintah Jepang saat ini masih sekitar 1,07% dan diperkirakan naik menjadi 1,32% apabila BOJ menaikkan suku bunga menjadi 1,5% pada tahun fiskal 2027. "

Jepang masih memiliki waktu untuk menata kondisi fiskalnya. Ada negara lain yang berada dalam kondisi jauh lebih buruk dibandingkan Jepang," kata Okubo.

Upah Australia Naik 0,8% di Kuartal II 2026, Pertumbuhan Swasta Melambat

Rabu, 19 Agustus 2026 09:08 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/upah-australia-naik-08-di-kuartal-ii-2026-pertumbuhan-swasta-melambat>

KONTAN.CO.ID - Pertumbuhan upah di Australia tetap moderat pada kuartal II 2026, sementara kenaikan upah sektor swasta melambat ke level terendah dalam empat tahun.

Melansir Reuters Rabu (19/8/2026), berdasarkan data Australian Bureau of Statistics (ABS), indeks harga upah Australia naik 0,8% secara kuartalan pada periode April-Juni 2026.

Pertumbuhan tersebut sama dengan empat kuartal sebelumnya dan sesuai dengan ekspektasi analis.

Secara tahunan, pertumbuhan upah bertahan di level 3,2%, turun jauh dari puncak pascapandemi sebesar 4,3% yang tercatat pada akhir 2023.

Perlambatan terutama terjadi di sektor swasta. Pertumbuhan upah tahunan sektor swasta turun menjadi 3,1%, level terendah sejak pertengahan 2022.

Sementara itu, pertumbuhan upah sektor publik relatif stabil di level 3,4%.

Data tersebut menunjukkan tekanan upah di Australia mulai mereda setelah sebelumnya meningkat tajam akibat pemulihan ekonomi dan ketatnya pasar tenaga kerja pascapandemi.

Dari sisi sektor, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan upah berasal dari pekerjaan di bidang administrasi publik dan keselamatan, layanan kesehatan, serta bantuan sosial.

Perlambatan pertumbuhan upah menjadi perhatian bagi kebijakan moneter Australia karena perkembangan upah berpengaruh terhadap tekanan inflasi sekaligus daya beli rumah tangga.

Dengan pertumbuhan upah yang semakin moderat, tekanan biaya tenaga kerja terhadap dunia usaha berpotensi mereda.

Namun, perlambatan tersebut juga dapat membatasi pertumbuhan konsumsi masyarakat jika pertumbuhan pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.

BI: Aliran Modal Asing Masuk US\$1,8 Miliar Hingga 14 Agustus 2026

Rabu, 19 Agustus 2026 19:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118889/bi-aliran-modal-asing-masuk-us-1-8-miliar-hingga-14-agustus-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan transaksi modal dan finansial Indonesia mencatatkan aliran investasi portofolio asing masuk dalam perhitungan bersih (net inflows) sebesar US\$1,8 miliar atau setara 32,11 triliun pada kuartal III 2026 hingga 14 agustus 2027.

"Aliran modal asing masuk ini ditopang oleh penerbitan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond pemerintah serta aliran modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas

Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," kata Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Periode Agustus 2026, Rabu (19/8/2026).

Sementara itu, lanjutnya, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 berada di level US\$145,3 miliar, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan ketahanan eksternal tetap kuat ditopang sinergi kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam menghadapi gejolak global," tuturnya.

Berdasarkan data BI, neraca perdagangan periode Januari hingga Juni 2026 secara kumulatif mencatat surplus US\$3,58 miliar, dengan perkembangan Juni 2026 mencatat defisit US\$450 juta.

"Secara keseluruhan, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk mendukung ketahanan eksternal," tandasnya.

BI Lapor Uang Primer Tumbuh 18,3% per Juli 2026, Ini Detailnya

Rabu, 19 Agustus 2026 18:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118876/bi-lapor-uang-primer-tumbuh-18-3-per-juli-2026-ini-detailnya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja uang primer (M0) pada Juli 2026 tumbuh tinggi mencapai 18,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibanding pertumbuhan uang primer pada bulan sebelumnya yang sebesar 14,1%.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan pertumbuhan uang primer ini didukung oleh berbagai langkah yang ditempuh bank sentral dalam menjaga kecukupan likuiditas.

"Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh giro bank umum di BI yang tumbuh sebesar 22,4% (yoy) dan uang kartal yang tumbuh sebesar 15,1% (yoy)," ujar Destry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Periode Agustus 2026, Rabu (19/6/2026).

Dari faktor yang memengaruhi, menurut dia, pertumbuhan uang primer pada Juli 2026 dipengaruhi oleh operasi moneter BI dan ekspansi operasi keuangan pemerintah.

Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Juni 2026 tumbuh sebesar 8,7% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat.

"BI terus memperkuat kebijakan untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian, yang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi," paparnya.

Ke depan, berbagai upaya penguatan untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian akan terus ditempuh sehingga dapat menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Insentif Likuiditas BI Tembus Rp446 T, Terbesar untuk Pembiayaan

Rabu, 19 Agustus 2026 17:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118883/insentif-likuiditas-bi-tembus-rp446-t-terbesar-untuk-pembiayaan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mencapai Rp446,5 triliun hingga minggu pertama Agustus 2026. Angka tersebut tumbuh apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp431,9 triliun.

“Dengan alokasi pada financing channel sebesar Rp368,4 triliun, interest rate channel sebesar Rp73,2 triliun, serta financing to funding channel sebesar Rp4,9 triliun,” kata Destry Damayanti, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI dalam konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (19/8/2026).

Destry menyebut bahwa hal tersebut turut mendorong intermediasi perbankan nasional yang tercermin melalui pertumbuhan kredit perbankan. Pada Juli 2026 kredit perbankan tumbuh 13,58% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada Juni 2026 sebesar 12,67% (yoy).

Sementara itu, dalam perkembangan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, BI menyebut bahwa KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) diwacanakan untuk menjadi salah satu inisiatif yang akan dijalankan bank sentral.

BI menyebut, KLM PPU digunakan untuk menjaga kecukupan dan mendorong redistribusi likuiditas dengan tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang akan berlaku efektif pada 1 September 2026.

Dalam hal ini, BI memutuskan untuk meningkatkan total besaran insentif KLM yang dapat diterima oleh bank menjadi paling tinggi 6% dari dana pihak ketiga (DPK). Sebelumnya, sebesar insentif KLM tercatat maksimal 5,5% dari DPK perbankan.

Hal ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan KLM untuk ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas, dengan tetap mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas.

Di sisi lain, bank sentral menurunkan alokasi KLM untuk financing channel bagi penyaluran kredit bank kepada sektor-sektor prioritas, dari sebelumnya paling tinggi 4,5% dari DPK menjadi paling tinggi 4% dari DPK.

Selanjutnya, terdapat pula KLM pendalaman pasar uang paling tinggi 2% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga dalam tingkat optimal yang ditetapkan BI.

BI Sebut Pertumbuhan Kredit Perbankan Naik 13,58%

Rabu, 19 Agustus 2026 17:20 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118875/bi-sebut-pertumbuhan-kredit-perbankan-naik-13-58/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa kredit perbankan pada Juli 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,58% secara year-on-year (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada Juni 2026 sebesar 12,67% (yoy).

“Perkembangan positif tersebut didukung oleh kebijakan makroprudensial longgar yang terus ditempuh melalui optimalisasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas,” kata sebut Destry Damayanti, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI dalam konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (19/8/2026).

Destry menambahkan, hingga minggu pertama Agustus 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp446,5 triliun dengan alokasi pada financing channel sebesar Rp368,4 triliun, interest rate channel sebesar Rp73,2 triliun, serta financing to funding channel sebesar Rp4,9 triliun.

Sementara itu, BI juga menyebut bahwa ketahanan perbankan juga tetap kuat dan mendukung pertumbuhan kredit, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Juni 2026 tercatat tinggi sebesar 23,70%.

Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah di level 2,09% (bruto) dan 0,82% (neto) pada Juni 2026.

Sementara itu, Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat stabil 23,10% pada Juli 2026.

BI Rate Ditahan 5,75%, Rupiah Ditutup Menguat di Rp17.833/US\$

Rabu, 19 Agustus 2026 16:11 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118885/bi-rate-ditahan-5-75-rupiah-ditutup-menguat-di-rp17-833-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan pasar spot dengan penguatan 0,33% di Rp17.833/US\$ pada Rabu (19/8/2026). Penguatan ini tertopang oleh keputusan bank sentral yang kembali menahan suku bunga acuan BI Rate 5,75%, sesuai ekspektasi pelaku pasar.

Tak hanya di pasar spot, rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) juga menguat 0,25% ke Rp17.875/US\$ sore ini.

Meski harga minyak Brent masih melambung di US\$91,54/barel, tetapi indeks dolar Amerika Serikat (AS) kembali terpankas 0,23% ke 99,43. Kombinasi ini membawa sentimen positif bagi sebagian besar mata uang Asia. Pelemahan dolar AS hari ini memberi ruang penguatan bagi mata uang kawasan.

Won Korea Selatan menguat paling tajam 1,19%, disusul yen Jepang 0,35%, dolar Singapura 0,18%, rupiah 0,13%, yuan China 0,12%, baht Thailand 0,06%, dolar Hong Kong 0,04%, dan ringgit Malaysia

0,03%. Sebaliknya peso Filipina melemah terbatas bersama rupee India, masing-masing 0,08% dan 0,07%.

Dari sisi eksternal, memudarnya prospek perdamaian antara AS dan Iran membuat lalu lintas kapal di Selat Hormuz masih terbatas, akibat serangan baru dan tingginya biaya asuransi. Hal ini membuat sebagian besar kapal mengubah rute dan menyebabkan keterlambatan pengiriman kargo, termasuk pengiriman minyak mentah.

Meski pengiriman terhambat, pelaku pasar mendapat angin segar dari kabar bahwa produksi minyak OPEC+ meningkat pada Juli, dan menandai kenaikan dalam dua bulan beruntun. Artinya, kendala saat ini lebih banyak disebabkan jalur distribusi daripada pasokan. Sehingga, jalur distribusi alternatif dapat menjadi pilihan, seperti upaya membuka jalur terbatas melalui rute Iran-Oman sempat meningkatkan harapan terhadap kelancaran pengiriman.

Bagi rupiah, sentimen eksternal dari pelemahan dolar AS, diperkuat dengan keputusan BI yang mempertahankan BI Rate 5,75%. Keputusan yang sesuai ekspektasi pasar setidaknya menghilangkan ketidakpastian mengenai potensi pengetatan tambahan.

Paling tidak, keputusan BI menahan BI Rate di 5,75% juga memberi sinyal bahwa bank sentral RI cukup percaya diri terhadap kondisi rupiah saat ini. Meski rupiah sepanjang tahun melemah 6,4% terhadap dolar AS, tetapi volatilitasnya pada Agustus relatif terjaga di kisaran Rp17.800-17.900/US\$.

Pergerakan ini sejalan dengan proyeksi yang dihimpun Bloomberg. Pada kuartal III-2026, rupiah diperkirakan relatif lebih jinak dengan median estimasi di level Rp17.850/US\$ sebelum akhirnya akan sedikit menguat pada kuartal IV-2026 ke Rp17.800/US\$.

BI: Kinerja Konsumsi & Ekspor Perlu Didorong Demi Ekonomi RI

Rabu, 19 Agustus 2026 14:45 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118871/bi-kinerja-konsumsi-ekspor-perlu-didorong-demi-ekonomi-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai kinerja konsumsi dan ekspor nasional perlu terus didorong agar dapat memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

"Ke depan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap baik ditopang implementasi program stimulus pemerintah dan keyakinan pelaku ekonomi yang terjaga," kata Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti dalam RDG BI, Rabu (19/8/2026).

Destry menyebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri BI akan memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Kebijakan tersebut akan terus disinergikan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada dikisaran 4,9%-5,7%."

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan (year on year/yoy), melanjutkan pertumbuhan 5,61% yoy pada kuartal sebelumnya. BI menilai pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut banyak ditopang oleh stimulus fiskal pemerintah yang berdampak terhadap konsumsi pemerintah dan investasi.

Utang RI dalam Mata Uang China Meroket 53,6%

Rabu, 19 Agustus 2026 11:28 WIB

Dian Sari Pertiwi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118807/utang-ri-dalam-mata-uang-china-meroket-53-6/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dari data utang luar negeri pemerintah yang tercatat naik, ada pertumbuhan porsi mata uang yuan China terlihat makin besar. Hal ini menggambarkan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia sedang mengalami perubahan.

Meski dolar Amerika Serikat (AS) masih menjadi mata uang utama dalam pembiayaan eksternal Indonesia, tetapi ternyata pertumbuhan utang dalam yuan China dan euro jauh lebih cepat daripada dolar AS.

Melansir data Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) Bank Indonesia (BI) edisi Agustus, posisi utang Indonesia pada Juni 2026 mencapai US\$453,36 miliar. Dari jumlah tersebut, kewajiban dalam rupiah mencapai US\$93,52 miliar, dan sebesar US\$359,84 miliar atau sekitar 79,4% dari total utang berasal dari mata uang lain.

Komposisi Utang Luar Negeri

Pada Juni, utang luar negeri dalam dolar AS mencapai US\$271,11 miliar, sekitar 59,8% dari total utang. Jauh di bawahnya, porsi mata uang euro sebesar US\$41,29 miliar, atau sekitar 9,1%, sementara yuan China US\$17,84 miliar, atau 3,9%, dan yen Jepang US\$17,75 miliar, atau 3,9%.

Meski porsi utang dalam bentuk mata uang yuan masih mini, tetapi kenaikannya mencapai 53,6%, dari posisi tahun lalu di US\$11,61 miliar. Secara nominal, naik US\$6,23 miliar secara tahunan dan menjadikan yuan sebagai kontributor terbesar terhadap kenaikan utang luar negeri Indonesia dalam setahun.

Selain yuan, mata uang euro juga tumbuh signifikan, menjadi US\$41,29 miliar dari posisi tahun lalu US\$35,43 miliar, naik 16,5% setara dengan US\$5,85 miliar.

Sebaliknya, porsi yen Jepang justru menyusut dari US\$20,98 miliar menjadi US\$17,75 miliar, berkurang US\$3,24 miliar, atau 15,4%. Begitu juga dengan dolar AS, meski masih tumbuh, tetapi hanya 1,1% dengan kenaikan US\$3,06 miliar, menjadi US\$271,11 miliar dari posisi tahun lalu US\$268,04 miliar.

Diversifikasi Mata Uang

Depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang terjadi sepanjang kuartal kedua mendorong pemerintah mengatur ulang strategi pembiayaan dengan melakukan diversifikasi mata uang.

Dengan yuan, pemerintah menambah porsi utang lewat penerbitan surat utang berdenominasi yuan bernama Panda Bond. Bukan tanpa sebab pemerintah memilih berutang dalam bentuk yuan.

China merupakan salah satu pasar obligasi terbesar di dunia dengan basis investor domestik yang luas. Artinya, masuk ke pasar obligasi China dapat membuka akses terhadap sumber likuiditas yang belum tergarap secara optimal.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tujuan utama penerbitan global bond di pasar China tersebut bukan hanya untuk mencari sumber pembiayaan baru, melainkan juga melakukan diversifikasi basis investor dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar dolar AS.

"Ini diversifikasi sumber pendanaan kita. Sebelumnya kan lebih banyak global bond, dolar. Sekarang kita diversifikasi ke Jepang, Australia, dan China," terang Purbaya.

Beberapa waktu lalu, pemerintah sukses menggelar penerbitan surat utang Panda Bond. Pada akhir Juli lalu, pemerintah melakukan penerbitan Panda Bond dalam mata uang yuan China (CNY) senilai CNY7 miliar atau sekitar Rp18,47 triliun (dengan asumsi 1 CNY sama dengan Rp2.638) atau sekitar US\$1,03 miliar. Angka ini sedikit lebih besar dibanding dengan target pemerintah sebesar US\$1 miliar.

Memperbanyak mata uang dalam pembiayaan dapat mengurangi konsentrasi risiko pada satu mata uang. Akan tetapi, diversifikasi mata uang bukan berarti risiko juga terdiversifikasi. Sebab, masalah utamanya terletak pada pelemahan rupiah, dan hampir 80% utang luar negeri Indonesia berada dalam denominasi mata uang asing.

Selain itu, semakin besar pembiayaan dalam yuan, semakin besar juga eksposur Indonesia terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap yuan, dan kondisi ekonomi juga kebijakan moneter China.

Kurs Rupiah Terhadap Yuan Lebih Jinak?

Sepanjang kuartal II-2026, sebenarnya rupiah tak cuma melemah terhadap dolar AS tetapi juga mata uang lainnya, termasuk yuan. Melansir data Bloomberg, rupiah melemah 6,44% terhadap yuan China (CNY) dan tergerus 6,3% terhadap yuan offshore (CNH).

Apabila melihat pada periode yang sama, depresiasi rupiah terhadap dolar AS justru lebih terbatas, yakni 4,96%.

Jika ditarik lebih jauh sejak awal tahun ini, maka pelemahan rupiah terhadap yuan China lebih dalam. Data Bloomberg menunjukkan depresiasi rupiah terhadap yuan tercatat 9,76%, dan terhadap dolar AS 'hanya' 6,44%.

Meski rupiah lebih tertekan terhadap yuan, namun secara kurs atau nilai tukar antara IDR/USD memang jauh lebih mahal daripada IDR/CNY.

Sehingga, meski secara tekanan kurs rupiah jauh lebih lemah terhadap yuan, namun secara nilai angkanya relatif lebih murah ketimbang harus membayar dengan acuan dolar AS.

Sebagai catatan, pada perdagangan Rabu (19/8/2026) nilai tukar rupiah terhadap yuan tercatat Rp2.645/CNY, sedangkan terhadap dolar AS jauh lebih mahal yakni Rp17.834/US\$. Sementara, US\$1 setara dengan CNY6,74.

Untuk ilustrasi, setiap utang rupiah terhadap yuan senilai US\$1 miliar jika dibayarkan menggunakan kurs rupiah dengan yuan, maka nilai yang harus dibayarkan Rp17,72 triliun, masih lebih rendah daripada dengan nilai tukar dolar AS senilai Rp17,83 triliun.

Setidaknya, ada selisih sekitar Rp112,5 miliar dengan posisi kurs saat ini. Apalagi, jika diversifikasi mata uang ini dibarengi dengan upaya pemerintah dalam melakukan natural hedge, misalnya dalam bentuk penerimaan ekspor, investasi, maupun perdagangan bilateral atau transaksi ekonomi lainnya yang menghasilkan yuan.

Dalam konteks ini, pemerintah berupaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui pemanfaatan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT).

Purbaya menjelaskan, melalui mekanisme tersebut pembayaran dapat dilakukan menggunakan yuan dan rupiah, sehingga setidaknya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Arah Bauran Kebijakan BI: Intervensi Rupiah-Diskon Premi Swap

Rabu, 19 Agustus 2026 18:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118890/arrah-bauran-kebijakan-bi-intervensi-rupiah-diskon-premi-swap>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memaparkan arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan yang menarik perhatian yakni bank sentral memperluas transaksi underlying pendanaan luar negeri yang dapat memperoleh insentif diskon premi swap jual lindung nilai sebesar 12,5%. Semula underlying hanya mencakup transaksi portfolio inflows, kini menjadi termasuk pinjaman luar negeri oleh bank dan investasi langsung asing.

"Hal ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas rupiah," ujar Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Periode Agustus 2026, Rabu (19/8/2026).

Transaksi swap lindung nilai tersebut berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan masa kontrak paling lama 3 tahun dan transaksi swap lindung nilai dapat diperpanjang atau roll over sesuai sisa jangka waktu kontrak lindung nilai.

Perluasan transaksi instrumen swap lindung nilai berlaku efektif pada minggu kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan foreign direct investment yang masuk sejak 1 Juli 2026.

Berikut arah bauran kebijakan Bank Indonesia:

1. Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan:
 - mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
 - mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market.
 - menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% sesuai dengan ekspansi moneter.
2. Memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas Rupiah dengan melakukan perluasan transaksi underlying pendanaan luar negeri yang dapat memperoleh insentif pengurangan premi bagi Swap Jual Lindung Nilai (Swap Beli Lindung Nilai kepada BI) sebesar 12,5%, dari semula hanya mencakup transaksi portfolio inflows, menjadi juga termasuk pinjaman luar negeri oleh bank dan foreign direct investment. Transaksi swap lindung nilai tersebut berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan masa kontrak paling lama 3 tahun dan transaksi swap lindung nilai dapat diperpanjang (rollover) sesuai sisa jangka waktu kontrak lindung nilai. Perluasan transaksi instrumen swap lindung nilai berlaku efektif pada minggu kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan foreign direct investment yang masuk sejak tanggal 1 Juli 2026.
3. Memperkuat persiapan implementasi Kebijakan Makroprudensial terkait:
 - Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Pendalaman Pasar Uang untuk menjaga kecukupan dan mendorong redistribusi likuiditas dengan tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang akan berlaku efektif pada 1 September 2026.

- Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan yang akan berlaku efektif pada 1 Oktober 2026.
4. Memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi digital serta keuangan inklusif dengan:
 - Mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang telah diluncurkan pada 17 Agustus 2026 dan memperkuat kesiapan industri untuk perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 yang berlaku pada 1 Oktober 2026.
 - Menyenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI dan IFSE) 2026 pada 24-26 September 2026, serta bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, dan industri keuangan.
 5. Memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BI juga terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

Pemerintah Akan Tarik Utang Baru Rp876,3 Triliun di 2027

Rabu, 19 Agustus 2026 11:40 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/118802/pemerintah-akan-tarik-utang-baru-rp876-3-triliun-di-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah berencana untuk kembali menarik utang sebesar Rp876,3 triliun di tahun 2027 mendatang. Hal ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa porsi Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sumber pendanaan tertinggi dengan total sebesar Rp779,9 triliun, naik 5,9% dibandingkan dengan outlook 2026 sebesar Rp736,6 triliun.

“Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan SUN dan SBSN/Sukuk Negara. Sementara itu, pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/program prioritas Pemerintah,” kata dokumen tersebut, dikutip, Rabu (19/8/2026).

Sementara itu, pinjaman dalam negeri pada 2027 tercatat minus Rp11,5 triliun, turun dari posisi minus Rp5,9 triliun pada outlook 2026. Angka negatif tersebut menunjukkan bahwa pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru dalam periode tersebut.

Adapun pinjaman luar negeri pada 2027 mencapai Rp107,8 triliun, turun 21,6% dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp137,5 triliun.

Secara keseluruhan, pembiayaan utang pada RAPBN 2027 sebesar Rp876,3 triliun, meningkat 0,9% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp868,1 triliun.

Pembiayaan Utang	2025	Outlook 2026	RAPBN 2027
Surat Berharga Negara (Neto)	Rp 639,3 T	Rp 736,6 T	Rp 779,9 T
Pinjaman Dalam Negeri (neto)	Rp 10,2 T	-Rp 5,9 T	-Rp 11,5 T
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	Rp 85,9 T	Rp 135,5 T	Rp 876,3 T
Total Pembiayaan Utang	Rp 735,4 T	Rp 868,1 T	Rp 876,3 T

Dengan demikian, SBN netto menyumbang sekitar 89% dari total pembiayaan utang 2027, sementara pinjaman luar negeri menyumbang sekitar 12,3%. Adapun pinjaman dalam negeri tercatat negatif 1,3% karena nilai pembayaran cicilan pokok lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru.

Prioritaskan Penerbitan di Pasar Domestik

Terkait dengan pembiayaan tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah risiko termasuk risiko gejolak global, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko pembiayaan ulang (refinancing), serta risiko kekurangan (shortage) pembiayaan.

“Dalam jangka menengah, Pemerintah tetap memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik dengan tingkat bunga tetap dan tenor menengah-panjang,” sebut dokumen tersebut.

Sementara, pengadaan utang baru dalam valuta asing tetap dilakukan secara selektif dalam rangka diversifikasi instrumen dan perluasan basis investor dengan tetap menjaga risiko nilai tukar agar sejalan dengan indikator dalam strategi pembiayaan utang.

Pengembangan basis investor domestik antara lain dilakukan melalui penerbitan SBN Ritel dengan tingkat bunga dan tenor yang beragam namun tetap sejalan dengan strategi pembiayaan utang Pemerintah.

“Selain itu juga dilakukan penerbitan instrumen utang jangka pendek, yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) sebagai salah satu instrumen pasar uang domestik,” tulis dokumen itu.

Pemerintah juga disebut akan terus mengelola portofolio secara aktif guna menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhatikan kemampuan pembayaran kembali.

Keseimbangan Primer Defisit, Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Dianggap Tak Realistis

Rabu, 19 Agustus 2026 20:33 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/keseimbangan-primer-defisit-target-pertumbuhan-ekonomi-6-dianggap-tak-realistis>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 dianggap tidak realistis jika masih mengandalkan belanja pemerintah, di tengah kondisi keseimbangan primer yang masih defisit.

Pasalnya, ruang fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui belanja negara tidak lagi sebesar ketika Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 6% pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Namun, pada saat yang sama, keseimbangan primer masih dipatok defisit Rp 20,9 triliun. Kondisi ini menunjukkan penerimaan negara belum mampu menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang.

Kondisi tersebut berbeda dengan periode SBY ketika Indonesia beberapa kali mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%. Pertumbuhan ekonomi tercatat 6,3% pada 2007, 6% pada 2008, 6,2% pada 2010, 2011 6,5%, serta 6,23% pada 2012.

Sementara itu keseimbangan primer mencatatkan surplus pada tahun yang sama, yakni Rp 30 triliun di 2007, 41,5 triliun di 2010, Rp 8,8 triliun di 2011, dan 52,8 triliun di 2012.

Ekonom Bright Institute Andri Perdana mengatakan, saat ini keseimbangan primer kita ini sebenarnya sudah sangat tidak sustainable.

“Untuk membuat keseimbangan primer ini kembali surplus, sudah terbukti kita tidak bisa mengharapkan dari penerimaan, karena meningkatkan penerimaan itu memerlukan proses lama dan inkremental, dan sebagaimana kita lihat realisasinya oleh pemerintahan sekarang kan mereka tidak mampu melakukan hal itu,” tutur Andri kepada Kontan, Rabu (19/8/2026).

Sebagai informasi, keseimbangan primer (primary balance) dalam APBN adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Ketika keseimbangan primer surplus, penerimaan negara mampu menutup belanja pemerintah bahkan sebelum pembayaran bunga utang dilakukan.

Sebaliknya, ketika defisit, penerimaan belum cukup untuk menutup belanja tersebut sehingga kebutuhan pembiayaan menjadi lebih besar.

Andri mengatakan, pemerintah tidak bisa berharap keseimbangan primer kembali surplus hanya dengan meningkatkan penerimaan negara. Sebab, peningkatan penerimaan membutuhkan proses yang panjang dan bertahap.

Karena itu, jika ingin memperbaiki keseimbangan primer, pemerintah harus melakukan efisiensi belanja pemerintah pusat secara signifikan. Namun, efisiensi tersebut harus benar-benar berupa pengurangan belanja, bukan sekadar realokasi anggaran.

Persoalannya, menurut Andri, langkah tersebut justru akan semakin sulit dilakukan karena pertumbuhan ekonomi dalam setahun terakhir banyak ditopang oleh pengeluaran pemerintah.

Dukungan tersebut terlihat dari konsumsi pemerintah maupun pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Bahkan, konsumsi rumah tangga juga dinilai mendapat dorongan dari belanja pemerintah.

"Karena secara metadata, pengeluaran rumah tangga itu tidak hanya jumlah barang yang masyarakat beli sendiri tapi juga termasuk pemberian, seperti bansos maupun MBG," jelasnya.

Dengan target pertumbuhan yang semakin tinggi, Andri melihat pemerintah akan menghadapi dilema. Di satu sisi, pemerintah perlu melakukan efisiensi untuk memperbaiki keseimbangan primer. Namun di sisi lain, pengurangan belanja berisiko menekan komponen pertumbuhan ekonomi yang selama ini mendapat dorongan dari pengeluaran pemerintah.

Akibatnya, terdapat risiko pemerintah justru kembali mengandalkan belanja untuk mengejar target pertumbuhan 6%. Jika pola tersebut berlanjut, perbaikan keseimbangan primer menjadi semakin sulit dan keberlanjutan fiskal dapat semakin tertekan.

"Jadi menurut saya bukan realistis atau tidak target pertumbuhan 6%, tapi akan sejauh mana kita akan semakin mengikis keberlanjutan fiskal dan kesehatan ekonomi kita di jangka panjang karena kita mau mencapai target angka pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Andri menjelaskan, pemerintah seharusnya tidak memaksakan target pertumbuhan ekonomi apabila pencapaiannya harus mengorbankan kesehatan fiskal. Menurutnya, pertumbuhan yang lebih rendah tetapi berasal dari aktivitas ekonomi yang lebih natural dan berkualitas justru lebih baik dalam jangka panjang.

"Lebih baik pertumbuhan ekonomi kita tumbuh natural namun berkualitas daripada terus defisit di keseimbangan primer," pungkas Andri.

Kemenkeu Ungkap Strategi Belanja Rp 4.097,2 Triliun dalam RAPBN 2027

Rabu, 19 Agustus 2026 19:50 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/keseimbangan-primer-defisit-target-pertumbuhan-ekonomi-6-dianggap-tak-realistis>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap ekspansif dengan belanja yang dipatok sebesar Rp 4.097,2 triliun, akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mempercepat transformasi ekonomi.

Perlu diketahui, anggaran belanja dalam RAPBN 2027 tersebut meningkat 3,9% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026 yang sebesar Rp 3.942,4 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, strategi ekonomi dan fiskal 2027 akan mengedepankan sinergi antara kebijakan fiskal dan ekonomi.

"APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur dan terarah untuk mendorong ekonomi yang lebih tinggi dan akselerasi yang lebih cepat," ujar Ferry dalam konferensi pers bersama Badan Komunikasi (Bakom) pemerintah RI, Rabu (19/8/2026).

Menurut Ferry, kebijakan tersebut akan dilakukan melalui sejumlah strategi, terutama transformasi ekonomi dan pembangunan yang efektif.

Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Sekolah Rakyat. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan program perlindungan sosial (Perlinsos), sekaligus memperkuat pemberdayaan UMKM.

"Program perlindungan sosial juga ditingkatkan agar semakin andal. Terkait dengan pemberdayaan, baik UMKM juga terus dibangkitkan. UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi," katanya.

Pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada petani, nelayan, buruh, dan pekerja. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga akan diperkuat, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan.

Belanja Difokuskan pada Program Prioritas Nasional

Ferry menjelaskan, strategi belanja pemerintah pada 2027 terutama akan diprioritaskan untuk membiayai delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).

Dengan arah tersebut, belanja pemerintah diharapkan tidak hanya menopang aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah memastikan ekspansi belanja tetap dilakukan dengan menjaga kesehatan APBN. Ferry mengatakan, pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap prudent dan berkelanjutan.

"Beberapa hal terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas dan pembiayaan yang kreatif adalah diarahkan untuk APBN yang prudent dan sustainable. Jadi kita ingin APBN itu sehat, kredibel dan berkelanjutan," jelasnya.

Untuk menjaga kesehatan fiskal tersebut, pemerintah akan melanjutkan reformasi fiskal guna mengoptimalkan pendapatan negara, namun tetap memperhatikan iklim investasi dan kualitas lingkungan.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga belanja negara semakin produktif.

"Untuk belanja melalui efisiensi dan reformasi, belanja yang semakin produktif dan pengelolaan pembiayaan secara inovatif, prudent dan sustainable," katanya.

Utamakan Belanja yang Berdampak ke Masyarakat

Ferry menambahkan, peningkatan kualitas belanja menjadi salah satu fokus pemerintah dalam APBN 2027. Belanja negara akan difokuskan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah juga akan memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah. Menurut Ferry, sinergi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan layanan publik, terutama dalam pemerataan pembangunan daerah dan pemenuhan pelayanan dasar.

"Kami juga melakukan penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program, kemudian juga penguatan proses penyelesaian aspek penganggaran dan pengelolaan berbasis output," ujarnya.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap program-program nasional dapat berjalan lebih efektif hingga tingkat daerah, sekaligus memastikan belanja APBN memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan perekonomian.

Dana Desa Naik Rp21,7 T, Beban Cicilan Kopdes Merah Putih Bisa Tekan Program Desa

Rabu, 19 Agustus 2026 18:00 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/dana-des-naik-rp217-t-beban-cicilan-kopdes-merah-putih-bisa-tekan-program-des>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana kenaikan Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai belum tentu sepenuhnya memperluas ruang fiskal pemerintah desa. Pasalnya, sebagian tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban cicilan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, Dana Desa dalam RAPBN 2027 memang meningkat cukup signifikan menjadi sekitar Rp77 triliun dari outlook tahun ini yang berada di kisaran Rp55 triliun.

Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp21,7 triliun atau hampir 40%. Namun, menurut Yusuf, kenaikan tersebut perlu dilihat secara lebih hati-hati karena sebagian besar tambahan Dana Desa akan digunakan untuk memenuhi kewajiban cicilan fasilitas kredit perbankan yang membiayai pembangunan gerai, gudang, serta kelengkapan KDKMP.

“Sebagian besar tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban cicilan fasilitas kredit Himbara yang membiayai pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (19/8).

Yusuf menyebut, dengan nilai fasilitas kredit yang diperkirakan mencapai Rp240 triliun, terdapat pokok pinjaman sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun. Dalam skema tersebut, Dana Desa pada akhirnya ikut menjadi salah satu sumber pembayaran kewajiban bersama dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang gerak anggaran di tingkat desa. Sebab, anggaran yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan prioritas masyarakat harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban cicilan.

“Risikonya akan lebih besar bagi desa yang kapasitas kelembagaannya masih terbatas atau koperasinya belum mampu menghasilkan arus kas yang cukup. Desa tetap harus membayar cicilan meskipun manfaat ekonominya belum tentu langsung dirasakan,” jelas Yusuf.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sejumlah program desa, mulai dari penanganan kemiskinan, kesehatan dasar, ketahanan pangan hingga pembangunan infrastruktur. Artinya, kenaikan Dana Desa secara nominal belum tentu berbanding lurus dengan bertambahnya anggaran yang benar-benar dapat digunakan pemerintah desa.

Pandangan senada disampaikan Pengamat Koperasi Rully Indrawan. Menurut Rully, potensi tergerusnya anggaran desa akibat kewajiban pembayaran cicilan KDKMP sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak awal. Ia mengatakan kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap program-program desa yang sebelumnya telah direncanakan.

Meski demikian, Rully menilai kewajiban pembayaran pinjaman KDKMP tidak otomatis menjadi persoalan apabila dana dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha koperasi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai beban usaha KDKMP.

“Utang yang harus dibayar sebenarnya tidak terlalu masalah bila dana pinjaman dari Himbara itu benar-benar dimanfaatkan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai beban usaha Kopdes,” kata Rully.

Menurutnya, keberadaan KDKMP pada dasarnya juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat. Namun, persoalan menjadi lebih serius apabila terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana pinjaman tersebut. Kondisi itu dinilai dapat merugikan masyarakat sekaligus mengganggu pembangunan desa.

“Apabila terindikasi terdapat penyimpangan penggunaan sebagaimana disinyalir banyak pihak, maka sungguh tidak elok bahkan merugikan masyarakat dan pembangunan desa,” ujarnya.

Rully juga menyoroti keputusan menjadikan Dana Desa sebagai dana talangan untuk pembayaran kredit KDKMP. Menurut dia, skema tersebut patut disesalkan karena dapat membuat anggaran yang semestinya digunakan untuk pembangunan desa ikut terbebani oleh kewajiban pembiayaan koperasi.

Sementara itu, Yusuf menilai pembiayaan KDKMP seharusnya dipisahkan secara lebih tegas dari Dana Desa. Menurutnya, program nasional dengan skala pembiayaan besar idealnya memiliki pos anggaran tersendiri melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer khusus.

Dengan pemisahan tersebut, kenaikan Dana Desa dapat benar-benar meningkatkan kapasitas pembangunan di tingkat desa, bukan sekadar digunakan untuk menutup kewajiban pembiayaan yang sudah terbentuk.

“Kalau tidak dipisahkan, kenaikan nominal Dana Desa yang terlihat besar justru berisiko menjadi ilusi karena ruang fiskal yang benar-benar bisa digunakan desa tetap terbatas,” pungkas Yusuf.

Bank Indonesia Terus Perkuat Bauran Kebijakan Moneter untuk Jaga Inflasi

Rabu, 19 Agustus 2026 15:32 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/dana-desa-naik-rp217-t-beban-cicilan-kopdes-merah-putih-bisa-tekan-program-desa>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran.

Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan (yoy), turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,34% yoy.

Perkembangan inflasi tersebut didukung inflasi inti yang tetap terjaga sebesar 2,76% yoy, sejalan dengan konsistensi kebijakan BI.

Sementara itu, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices (AP) tercatat 3,58% yoy. Perkembangan tersebut seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamina.

Adapun inflasi kelompok volatile food (VF) melambat menjadi 2,52% yoy. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh periode panen komoditas hortikultura, khususnya aneka cabai dan bawang merah.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027," ujar Destry dalam konferensi pers, Rabu (19/8/2026).

Selain itu, BI akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak rambatan global berupa imported inflation.

BI juga memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga inflasi pangan, termasuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca seperti El Nino yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan.

81 Tahun Jateng, Investasi Ubah Hidup Ikmal dan Sella

Rabu, 19 Augustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/81-tahun-jateng-investasi-ubah-hidup-ikmal-dan-sella/>

BATANG – Capaian investasi di Jawa Tengah bukan sekadar mengejar angka di atas kertas. Di usia provinsi yang genap 81 tahun, Pemprov Jawa Tengah mendorong agar penanaman modal memberikan dampak nyata bagi perekonomian, terutama dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Muhammad Ikmal merasakan betul dampak positif pembukaan kawasan industri di Batang. Pemuda 20 tahun asal Desa Binangun, Kecamatan Bandar, itu kini bekerja sebagai operator printing di PT Yih Quan Footwear di KEK Industropolis Batang.

Saat ditemui di rumahnya, Ikmal berkisah, sebelum bekerja di perusahaan alas kaki tersebut, dia sempat bekerja serabutan sebagai kuli setelah lulus SMA. Kemudian, Ikmal mengikuti pelatihan di Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK) milik Disperindag Provinsi Jawa Tengah. Selama 20 hari, dia dan ratusan calon pekerja lainnya mendapat pelatihan, makan, dan penginapan secara gratis.

Setelah mengikuti pelatihan, Ikmal ditempatkan di PT Yih Quan Footwear sebagai operator. Kini, dia telah bekerja selama 10 bulan dan berstatus sebagai karyawan tetap, dengan total gaji melebihi UMK Batang, dan bisa membantu perekonomian keluarganya.

“Dulu menjadi beban keluarga. Sekarang bisa bantu-bantu membeli keperluan rumah tangga. Dengan gaji pertama saya, alhamdulillah saya bisa membelikan ibu saya cincin, yang mana perhiasan itu pernah dijual untuk keperluan saya sekolah,” ungkapnya, Minggu (16/8/2026).

Supriyati, ibu Ikmal, mengaku bangga atas capaian anaknya. Dengan kondisi suaminya yang bekerja sebagai kuli, kini harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga tersemat di pundak putra sulungnya.

“Saya kaget dan terharu, saat Ikmal memberi kejutan di hari pertama gajian, memberi saya cincin. Emak, tak paringi cincin,” kenangnya.

Hal serupa dirasakan Sella Sefira, warga Desa Pesalakan, Kecamatan Bandar. Lulusan BIPTAK itu kini bekerja sebagai input printing di PT Yih Quan Footwear, produsen alas kaki untuk sejumlah merek internasional, seperti HOKA dan Converse.

“Kini bisa bantu-bantu kebutuhan, seperti beli token listrik dan bantu sekolahkan adik juga. Kalau gaji pertama saya serahkan bapak dan ibu serta memperbaiki handphone,” urainya.

Baik Ikmal maupun Sella, berharap lapangan kerja di Jawa Tengah terus diperluas seiring dengan masuknya investasi. Mereka juga berharap akses pelatihan gratis semakin banyak, seiring Provinsi Jawa Tengah memasuki usia ke-81 tahun.

Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp48,54 triliun. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 213.217 orang dari 55.989 proyek.

Di sisi ketenagakerjaan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah pada Mei 2026 mencapai 21,40 juta orang. Angka tersebut meningkat 16,36 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat 3,29 juta orang atau 9,21 persen. Jumlah tersebut turun 59.390 orang dibandingkan September 2025, dan berkurang 81.250 orang dibandingkan Maret 2025.

Selain itu, perekonomian Jateng tumbuh 5,71 persen pada triwulan II 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dia menjelaskan, pelatihan di BIPTAK merupakan salah satu ikhtiar Pemprov Jateng, untuk membantu warga keluar dari kemiskinan sekaligus menurunkan angka pengangguran.

Sejalan dengan itu, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong pengembangan kawasan industri di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan infrastruktur sekaligus memberikan kemudahan bagi investor.

Menurutnya, investasi tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Pd/UL, Diskomdigi Jateng)

Jateng Uji Model Baru Pengentasan Kemiskinan, Pemuda Jadi Ujung Tombak

Rabu, 19 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-uji-model-baru-pengentasan-kemiskinan-pemuda-jadi-ujung-tombak/>

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji model baru pengentasan kemiskinan, dengan menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai sasaran utama pemberdayaan. Bukan sekadar diberi bantuan, mereka dipersiapkan agar memiliki keterampilan, usaha, dan penghasilan, yang bisa mengangkat kesejahteraan keluarganya.

Model tersebut diterapkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda, yang diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, pada rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, Rabu (19/8/2026).

Taj Yasin mengatakan, pilot project itu dirancang untuk menguji, bagaimana pemberdayaan pemuda dapat menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan. Program tersebut menyasar warga berusia 16-30 tahun, yang berasal dari keluarga desil 1 hingga 4.

Ditambahkan, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Januari 2026, terdapat 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk kelompok tersebut.

Taj Yasin mengatakan, pemuda dipilih sebagai bagian penting dari pilot project, karena memiliki kemampuan untuk memperluas pasar usaha, termasuk melalui teknologi digital.

Pilot project tersebut dilaksanakan di delapan desa dan kelurahan, yakni Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo (Kota Surakarta), Desa Winduaji (Kabupaten Brebes), Desa Belik dan Mendelem (Pemalang), Desa Rejosari (Demak), serta Desa Ngawen (Blora).

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan, program tersebut tidak menggunakan pendekatan bantuan yang diberikan begitu saja. Setiap kelompok terlebih dahulu akan melalui asesmen untuk melihat kebutuhan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki. Setelah itu, mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum menerima dukungan usaha.

“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, kata Taj Yasin, penting agar bantuan yang diberikan tidak habis setelah diterima. Sebaliknya, bantuan harus berkembang menjadi kegiatan produktif, yang mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat.

“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” ungkap wagub.

Gus Yasin, sapaannya, meminta seluruh daerah yang menjadi pilot project, memastikan program tersebut tidak berhenti setelah bantuan disalurkan. Setiap bantuan yang diberikan harus terus dipantau dan dikawal.

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menyambut baik model pemberdayaan tersebut. Menurut dia, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan bantuan, tetapi harus membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat.

“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” beber Astrid.

Dia berharap, pilot project tersebut tidak berhenti pada peluncuran, tetapi menjadi awal pendampingan dan kerja bersama yang berkelanjutan, sehingga dapat menjadi model yang dikembangkan di daerah lainnya.

Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan beragam intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah pilot project. Dukungan ekonomi antara lain diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta. Bank Jateng juga memberikan dukungan Kube sekaligus pelatihan dasar pemuda dengan nilai Rp600 juta.

Pemberdayaan pemuda diperkuat melalui pelatihan keterampilan dengan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta, dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta. Pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial, yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jateng.

Dukungan tidak hanya menasar sektor ekonomi. Pemerintah juga memberikan jaminan sosial melalui Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta, Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Rp436,8 juta, serta bantuan pendidikan BSM jenjang SMA, SMK, dan SLB Rp73 juta.

Sementara, untuk memperbaiki kondisi dasar keluarga penerima manfaat, disalurkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp260 juta, jamban Rp675,22 juta, dan instalasi sambungan listrik

Rp49,5 juta. Ada pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta, sebagai bagian dari pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. (Humas Jateng)*ul

Omzet Meningkat, Galeri UKM Jateng Perlu Sesuaikan Produk dengan Kebutuhan Masyarakat

Rabu, 19 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/omzet-meningkat-galeri-ukm-jateng-perlu-sesuaikan-produk-dengan-kebutuhan-masyarakat/>

SEMARANG – Galeri UKM Jawa Tengah di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang mencatatkan peningkatan omzet dalam dua tahun terakhir. Seiring capaian tersebut, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah mendorong produk yang ditampilkan di galeri agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengunjung.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Jateng, omzet Galeri UKM Jateng pada 2024 tercatat sebesar Rp449.192.000, dengan jumlah pengunjung sebanyak 4.599 orang. Angka tersebut meningkat pada 2025 menjadi Rp657.589.000 dengan jumlah pengunjung mencapai 7.086 orang.

Sementara itu, sepanjang Januari hingga Juni 2026, omzet Galeri UKM Jateng telah mencapai Rp439.073.000 dengan jumlah pengunjung sebanyak 4.503 orang. Capaian tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga akhir 2026.

“Saya mengapresiasi capaian ini. Omzet setengah tahun 2026 saja hampir sama dengan satu tahun 2024,” kata Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, saat audiensi dengan Dinas Koperasi dan UKM di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jateng, Selasa (18/8/2026).

Meski mencatatkan pertumbuhan omzet, Nawal memberikan catatan agar pengelolaan Galeri UKM Jateng tidak hanya berorientasi pada peningkatan penjualan. Menurutnya, produk yang ditampilkan juga harus mengikuti perkembangan pasar dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Koperasi dan UKM Jateng melakukan asesmen, terhadap setiap jenis usaha yang akan mengisi galeri. Asesmen mencakup produk makanan, fesyen, aksesoris, hingga berbagai produk kerajinan lainnya.

“Makanan yang paling laris apa, kebutuhan masyarakat apa, fesyen yang murah bagaimana. Baru menentukan UMKM-nya ini. Kita harus tahu karakteristik toko yang bisa memenuhi kebutuhan pengunjung,” ucap istri Wagub Jateng tersebut.

Menurut Nawal, pemetaan itu penting, agar produk yang ditawarkan tidak hanya memiliki kualitas yang baik, tetapi juga memiliki pasar yang jelas. Dengan demikian, keberadaan Galeri UKM Jateng dapat memberikan ruang pemasaran yang lebih efektif bagi pelaku UMKM.

Hal tersebut, katanya, relevan dengan upaya Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, yang mengembalikan status Bandara Ahmad Yani sebagai bandara internasional. Sehingga, peluang untuk semakin mengenalkan produk lokal semakin terbuka lebar.

Nawal berharap, peluang tersebut dapat ditangkap dengan menghadirkan produk yang merepresentasikan potensi lokal dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Rebranding galeri UKM Jateng bisa juga dengan menampilkan kearifan lokal di Jawa Tengah. Misal kopi Temanggung bisa dibuat jadi inovasi menu untuk coffee shop di area sana,” beber Ketua TP PKK Jateng tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Daya Saing UKM Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Jani Sugijarti mengatakan, sejumlah produk yang banyak diminati pengunjung ialah oleh-oleh khas Semarang, seperti bandeng presto, wingko, moaci, lunpia, dan tahu bakso.

Selain produk makanan, pengunjung juga banyak membeli produk merchandise, seperti gantungan kunci, magnet kulkas, dan kaos. Produk ready to wear batik dengan kisaran harga Rp200.000 hingga Rp500.000 juga menjadi salah satu produk yang diminati.

Jani mengatakan, audiensi tersebut sekaligus membahas progres desain ulang dan hasil evaluasi terhadap produk UMKM yang mengisi galeri. Ke depan, Galeri UKM Jateng akan di-rebranding menjadi UKM Jateng Corner.

Sejak 21 Juli hingga 15 Agustus 2026, Galeri UKM Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang ditutup karena pengerjaan redesain menjadi UKM Jateng Corner. Penataan produk dilakukan pada minggu ketiga Agustus, sedangkan peresmian UKM Jateng Corner direncanakan pada September 2026. (At/UI, Diskomdigi Jateng)

Tak Sekadar Bantuan, Jateng Dorong Pemuda Jadi Penggerak Ekonomi

Rabu, 19 Agustus 2026 10:00 WIB

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=11588

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji model baru penuntasan kemiskinan dengan menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai sasaran utama pemberdayaan. Bukan sekadar diberi bantuan, mereka dipersiapkan agar memiliki keterampilan, usaha, dan penghasilan yang bisa mengangkat kesejahteraan keluarganya.

Model tersebut diterapkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda yang diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Wagub mengatakan, pilot project ini dirancang untuk menguji bagaimana pemberdayaan pemuda dapat menjadi bagian dari strategi penuntasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan.

Program ini menyasar warga berusia 16-30 tahun yang berasal dari keluarga desil 1-4. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Januari 2026, ada sebanyak 3.493.309 pemuda di Jateng yang masuk dalam kelompok tersebut.

Ia mengatakan, pemuda dipilih sebagai bagian penting dari pilot project, karena memiliki kemampuan untuk memperluas pasar usaha, termasuk melalui teknologi digital.

Pilot project tersebut dilaksanakan di 8 desa dan kelurahan, yakni Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.

Wagub menegaskan, program tersebut tidak menggunakan pendekatan bantuan yang diberikan begitu saja. Setiap kelompok terlebih dahulu akan melalui asesmen/penilaian untuk melihat kebutuhan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki. Setelah itu, mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum menerima dukungan usaha.

“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.

Pendekatan ini menjadi langkah penting agar bantuan yang diberikan tidak habis setelah diterima. Sebaliknya, bantuan bisa berkembang menjadi kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan para penerima manfaat.

“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” katanya.

Wagub meminta seluruh daerah yang menjadi pilot project memastikan program tersebut tidak berhenti setelah bantuan disalurkan. Setiap bantuan yang diberikan harus terus dipantau dan dikawal.

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menyambut baik model pemberdayaan tersebut. Menurutnya, penuntasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan pemberian bantuan, tetapi harus ada upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ucapnya.

Ia berharap, pilot project tersebut tidak berhenti pada acara peluncuran, tetapi menjadi awal pendampingan dan kerja bersama yang berkelanjutan, sehingga bisa menjadi model yang dapat dikembangkan di daerah lainnya.

Guna mendukung proses tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah pilot project. Dukungan ekonomi diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta. Bank Jateng juga memberikan dukungan Kube sekaligus pelatihan dasar pemuda dengan nilai Rp600 juta.

Pemberdayaan pemuda diperkuat melalui pelatihan keterampilan dengan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta. Para pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan dari Pemprov Jateng.

Dukungan tidak hanya menasar sektor ekonomi. Pemerintah juga memberikan jaminan sosial melalui Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta; Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Rp436,8 juta; serta bantuan pendidikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) jenjang SMA, SMK, dan SLB Rp73 juta.

Sementara untuk memperbaiki kondisi dasar keluarga penerima manfaat, disalurkan bantuan perbaikan Ruah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp260 juta; jamban Rp675,22 juta; dan instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta. Ada pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta sebagai bagian dari pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Pemkab Purbalingga memfokuskan Perubahan APBD 2026 untuk infrastruktur

Rabu, 19 Agustus 2026 12:53 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/642371/pemkab-purbalingga-memfokuskan-perubahan-apbd-2026-untuk-infrastruktur>

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif berbicara dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (19/8/2026). ANTARA/HO-Pemkab Purbalingga

Purbalingga, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, memfokuskan belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

"Rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, dan mendorong kebutuhan ekonomi," kata Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Purbalingga, Jateng, Rabu.

Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 dan dua raperda lainnya.

Menurut Bupati, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung gerakan membangun desa, rehabilitasi dan perlindungan sosial, serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui program Purbalingga Gotong Royong.

"Pembangunan jalan akan memperhatikan kesiapan menghadapi musim penghujan, termasuk dukungan drainase dan penerangan jalan," katanya.

Ia mengatakan penetapan pajak dan retribusi daerah akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Selain itu, kata dia, kebijakan tersebut akan disertai peningkatan pelayanan umum, antara lain di bidang kesehatan.

Menurut dia, Pemkab Purbalingga juga terus bekerja sama dengan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Purbalingga melalui program Sengkuyung untuk menertibkan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Di samping itu, lanjut dia., Pemkab Purbalingga telah mengalokasikan lebih dari Rp7 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di 184 desa.

Terkait pembangunan kawasan perdesaan, dia mengatakan pemerintah daerah mendorong kerja sama antardesa agar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Menurut dia, strategi tersebut meliputi pengembangan klaster ekonomi dengan konsep satu kecamatan satu komoditas, peningkatan akses pasar dan permodalan, pembangunan infrastruktur penghubung, serta penguatan sumber daya manusia dan inovasi.

"Terkait permintaan agar pemda (pemerintah daerah) ketersediaan alokasi dana desa dalam APBD, saat ini pemda telah menetapkan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sesuai peraturan yang berlaku," kata Bupati Fahmi

3,49 Juta Pemuda Miskin Jateng Jadi Sasaran Program Baru

Rabu, 19 Agustus 2026 19:31 WIB

Damarjati

<https://www.rmoljawatengah.id/349-juta-pemuda-miskin-jateng-jadi-sasaran-program-baru>

Sebanyak 3,49 juta pemuda dari keluarga miskin di Jawa Tengah menjadi sasaran program baru pengentasan kemiskinan. Pemprov Jateng menyiapkan model pemberdayaan agar mereka memiliki keterampilan, usaha, dan penghasilan.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026 mencatat terdapat 3.493.309 pemuda berusia 16–30 tahun di Jawa Tengah yang berasal dari keluarga desil 1 hingga 4.

Data tersebut menjadi salah satu dasar Pemprov Jateng mengembangkan Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda.

Program itu diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Rabu (19/8/2026).

Taj Yasin mengatakan, pemuda dipilih sebagai sasaran penting karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Selain keterampilan, pemuda juga dinilai lebih mudah memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar usaha.

“Pemuda mempunyai kemampuan untuk memperluas pasar usaha, termasuk melalui teknologi digital,” kata Taj Yasin.

Beri Bantuan

Taj Yasin menegaskan, program tersebut tidak menggunakan pola pemberian bantuan secara langsung tanpa melihat kebutuhan penerima.

Setiap kelompok pemuda akan terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki. Setelah itu, mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum memperoleh dukungan usaha.

“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.

Menurut dia, pola tersebut diperlukan agar bantuan tidak habis setelah diterima. Bantuan diharapkan berkembang menjadi kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat.

“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” katanya.

8 Daerah Jadi Lokasi Pilot Project

Pilot project pemberdayaan pemuda tersebut dilaksanakan di delapan desa dan kelurahan.

Lokasinya meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang mendorong masyarakat menjadi mandiri.

“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah intervensi ekonomi, antara lain Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta.

Bank Jateng juga memberikan dukungan Kube dan pelatihan dasar pemuda senilai Rp600 juta.

Pemberdayaan diperkuat melalui pelatihan keterampilan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta. Pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jateng.

Selain sektor ekonomi, program mencakup jaminan sosial, pendidikan, perbaikan rumah, sanitasi, listrik, hingga pengembangan usaha produktif.

Pemprov Jateng menyalurkan Kartu Jateng Ngopeni Rp105,6 juta, BLT DBHCHT Rp436,8 juta, bantuan pendidikan BSM jenjang SMA, SMK, dan SLB Rp73 juta, serta bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) Rp260 juta.

Ada pula bantuan jamban Rp675,22 juta, instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta, dan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta.

Melalui pilot project tersebut, Pemprov Jateng ingin menguji model pengentasan kemiskinan yang menempatkan pemuda bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai penggerak ekonomi keluarga.

Jateng di Usia 81 Tahun: Ekonomi 5,80 Persen, Kemiskinan Turun

Rabu, 19 Agustus 2026 19:52 WIB

Damarjati

<https://www.rmoljawatengah.id/jateng-di-usia-81-tahun-ekonomi-580-persen-kemiskinan-turun>

Jawa Tengah mencatat sejumlah capaian pembangunan saat memasuki usia ke-81 tahun. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,80 persen, sementara angka kemiskinan turun menjadi 9,21 persen.

Senpi Rakitan Ditemukan di Rumah Tersangka Perampokan SPBU Selokromo, Polisi Masih Dalam

Capaian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Alun-alun Kidul, Kabupaten Boyolali, Rabu (19/8/2026).

Ekonomi Tumbuh, Investasi Rp59,94 Triliun

Ahmad Luthfi mengatakan pembangunan Jawa Tengah terus diarahkan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,80 persen. Di sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,33 persen menjadi 4,24 persen.

Penurunan tersebut diikuti tambahan sekitar 460 ribu orang yang bekerja.

Dari sisi investasi, Jawa Tengah mencatat realisasi sebesar Rp59,94 triliun hingga semester pertama 2026.

Luthfi menilai kerja masyarakat di berbagai sektor ikut menggerakkan perekonomian sekaligus membuka lapangan kerja.

Di sektor pangan, produksi padi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar 9,39 juta ton. Sementara hingga Juli 2026, produksi gabah kering giling telah mencapai 6,74 juta ton.

"Kalau petani kita bekerja keras, maka kita yang diberi amanah memimpin Jawa Tengah juga harus bekerja keras sampai di tingkat desa," tegas Luthfi.

Kemiskinan dan Kebutuhan Dasar Jadi Perhatian

Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mencatat penurunan persentase penduduk miskin menjadi 9,21 persen.

Pemprov Jateng kemudian mengarahkan sejumlah program untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Di sektor pendidikan, pemerintah menggratiskan biaya pendidikan bagi 231.724 siswa sekolah negeri dan sekitar 5.004 siswa sekolah swasta.

Selain itu, sebanyak 10.000 siswa dari keluarga miskin mendapatkan beasiswa. Pemerintah juga telah merehabilitasi 282 sekolah dan membangun sembilan sekolah baru.

Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

21 Juta Warga Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Capaian pembangunan juga tercatat di sektor kesehatan. Program pemeriksaan kesehatan gratis disebut telah menjangkau sekitar 21 juta masyarakat di Jawa Tengah.

Sementara pada sektor perumahan, pemerintah telah menuntaskan sekitar 339.963 unit backlog perumahan.

Pemprov Jateng juga memperkuat dukungan terhadap program pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar sembilan juta penerima manfaat melalui 4.382 SPPG.

Selain itu, 14 Sekolah Rakyat telah direalisasikan dengan 1.275 siswa.

Untuk penguatan ekonomi masyarakat desa, Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk sebanyak 8.523 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.271 koperasi telah beroperasi.

Gumregut Nyawiji Jadi Semangat Pembangunan

Luthfi mengatakan berbagai capaian tersebut diraih di tengah kondisi global yang tidak menentu dan tekanan fiskal.

Karena itu, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah. Tema Hari Jadi ke-81 Jateng, Gumregut Nyawiji, juga membawa pesan persatuan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Luthfi menegaskan capaian pembangunan bukan semata hasil kerja pemerintah. Menurutnya, berbagai penghargaan dan kemajuan Jawa Tengah merupakan buah kontribusi seluruh elemen masyarakat.

Momentum usia ke-81 Jawa Tengah menjadi refleksi atas capaian sekaligus pijakan untuk melanjutkan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, perluasan akses pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari rapor pembangunan yang masih harus terus diperkuat.

Trump Deklarasikan Perang Ekonomi 'Paling Dahsyat' Lawan Iran

Kamis, 20 Agustus 2026 06:41 WIB

Derek Wallbank

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118922/trump-deklarasikan-perang-ekonomi-paling-dahsyat-lawan-iran/2>

Bloomberg, Amerika Serikat (AS) akan memulai apa yang disebut Donald Trump sebagai operasi perang ekonomi skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran. Langkah ini diambil setelah Washington menyalahkan Teheran karena dinilai gagal memanfaatkan kesempatan untuk mencapai kesepakatan dengannya.

"Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan OPERASI EKONOMI PALING DAHSYAT YANG PERNAH DILAKUKAN TERHADAP NEGARA MANAPUN! Ini akan menjadi Perang dan Isolasi Ekonomi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya," ujar Trump dalam sebuah unggahan di media sosial.

Trump menegaskan bahwa kampanye tekanan ekonomi tersebut juga akan menyasar mitra-mitra dagang Iran. Ia memperingatkan bahwa "NEGARA MANAPUN yang mengizinkan lembaga keuangannya, bisnis, bandara, atau entitas pemerintahnya untuk memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada Iran, akan menghadapi Konsekuensi Ekonomi yang Sangat Besar."

Utang AS Tembus US\$40 Triliun untuk Pertama Kalinya, Risiko Krisis Fiskal Menguat

Kamis, 20 Agustus 2026 11:19 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/utang-as-tembus-us40-triliun-untuk-pertama-kalinya-risiko-krisis-fiskal-menguat>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Utang pemerintah Amerika Serikat (AS) menembus angka US\$40 triliun untuk pertama kalinya. Lonjakan tersebut kembali memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, di tengah meningkatnya biaya program jaminan sosial dan pembayaran bunga utang.

Departemen Keuangan AS mencatat total utang publik pemerintah mencapai US\$40,047 triliun pada Selasa (18/8/2026). Angka tersebut terdiri atas surat utang pemerintah yang dipegang publik sebesar US\$32,266 triliun dan utang antarlembaga pemerintah sebesar US\$7,782 triliun.

Dengan pencapaian tersebut, utang pemerintah AS kini telah lebih dari dua kali lipat dalam waktu kurang dari satu dekade. Pada Januari 2017, ketika Donald Trump pertama kali dilantik sebagai presiden, posisi utang pemerintah AS tercatat sekitar US\$19,95 triliun.

Sekitar sepertiga dari kenaikan tersebut terjadi selama dua tahun ketika pemerintah AS meningkatkan pembiayaan secara besar-besaran untuk menangani pandemi Covid-19 di bawah pemerintahan Trump dan mantan Presiden Joe Biden.

Sementara itu, kebijakan fiskal kedua pemerintahan serta ketidakseimbangan antara penerimaan pajak dan belanja pemerintah dalam jangka panjang turut mendorong peningkatan utang.

Kelompok pemantau anggaran AS sebelumnya telah memperkirakan ambang US\$40 triliun akan tercapai dalam beberapa pekan terakhir. Mereka memperingatkan bahwa krisis utang yang lebih serius dapat terjadi apabila Kongres tidak segera mengatasi prospek fiskal yang dinilai tidak berkelanjutan.

Langkah yang dapat ditempuh, antara lain menaikkan pajak, memangkas belanja pemerintah, atau menerapkan kombinasi keduanya.

Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, Maya MacGuineas, mengatakan besarnya utang pemerintah tidak hanya menjadi persoalan di neraca pemerintah, tetapi juga berpotensi berdampak langsung terhadap perekonomian dan masyarakat.

"Utang sebesar US\$40 triliun tidak hanya ada di pembukuan pemerintah; dampaknya terasa di seluruh perekonomian dan pada akhirnya memengaruhi kantong masyarakat dengan satu cara atau lainnya," kata MacGuineas.

Menurut dia, peningkatan utang juga dapat memperbesar tekanan inflasi, mengurangi ruang pemerintah untuk membiayai prioritas lain, serta membuat AS lebih rentan menghadapi kondisi darurat di dalam negeri maupun gejolak di luar negeri.

"Semakin banyak kita berutang, semakin kita memperburuk inflasi, mengesampingkan prioritas lain dalam anggaran, dan membuat diri kita rentan terhadap keadaan darurat di dalam negeri serta gejolak di luar negeri," ujar MacGuineas dalam sebuah pernyataan setelah data Departemen Keuangan AS dirilis.

MacGuineas juga menyoroti cepatnya peningkatan utang AS. Angka US\$40 triliun tercapai kurang dari lima bulan setelah utang pemerintah menembus US\$39 triliun.

Dalam waktu kurang dari 20 tahun, total utang tersebut telah meningkat empat kali lipat. Sebagai perbandingan, pemerintah AS membutuhkan waktu hingga 1981 untuk pertama kali mencapai utang US\$1 triliun.

"Sungguh mencengangkan betapa mudah diprediksinya kemerosotan fiskal sebuah kekuatan global," kata MacGuineas.

Investor Asing Mulai Waspada

Lonjakan utang AS juga menjadi perhatian investor global. Investor asing yang saat ini memegang hampir sepertiga surat utang pemerintah AS disebut mulai menunjukkan penurunan permintaan dalam setahun terakhir.

Kondisi tersebut terjadi ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor panjang meningkat. Beberapa hari setelah lelang obligasi Treasury 30 tahun senilai US\$25 miliar menghasilkan imbal hasil tertinggi sejak 2021, imbal hasil obligasi jangka panjang pada Selasa mencapai level tertinggi dalam hampir dua dekade.

Investor menuntut kompensasi lebih besar karena pemerintah AS terus menerbitkan surat utang dalam jumlah besar. Perlu diketahui, imbal hasil obligasi bergerak berlawanan arah dengan harga obligasi.

Pada Rabu (19/8), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan kembali imbal hasil obligasi jangka panjang. Pemerintah AS mengumumkan peningkatan dua kali lipat ukuran pembelian kembali Treasury dengan tenor 10 hingga 30 tahun menjadi sedikitnya US\$4 miliar per operasi.

Kenaikan imbal hasil Treasury dalam jangka panjang biasanya turut mendorong kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah, pinjaman kendaraan, hingga kredit komersial.

Dengan utang pemerintah AS yang terus meningkat, Donald Trump kembali menyerukan penurunan suku bunga.

Ketika ditanya di Gedung Putih apakah masyarakat AS perlu mengkhawatirkan volatilitas pasar obligasi, Trump mengatakan:

"Saya sama sekali tidak berpikir demikian. Saya pikir kita adalah negara yang sangat kuat, dan kita mampu melewati suku bunga yang konyol ini—suku bunga tersebut memang konyol. Lihat, ketika negara kita kuat, suku bunga seharusnya turun."

Defisit AS Membengkak

Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal AS semakin kuat setelah Departemen Keuangan pada pekan sebelumnya melaporkan defisit bulanan terbesar keempat dalam sejarah AS.

Defisit anggaran pada Juli mencapai US\$432 miliar. Salah satu penyebabnya adalah pengembalian tarif yang membuat penerimaan bea masuk menjadi negatif untuk bulan ketiga berturut-turut.

Pada saat yang sama, belanja untuk program Social Security dan Medicare bagi kelompok lanjut usia terus meningkat.

Defisit selama 10 bulan pertama tahun fiskal 2026 bahkan telah melampaui total defisit sepanjang tahun fiskal 2025, sementara tahun fiskal berjalan masih menyisakan dua bulan.

Selama masa jabatan pertama Trump, utang publik AS meningkat sekitar US\$7,8 triliun. Lebih dari separuh kenaikan tersebut terjadi selama respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19 dalam sembilan bulan terakhir masa jabatannya.

Sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025, utang AS telah bertambah sekitar US\$3,8 triliun. Dengan demikian, total kenaikan utang selama dua masa kepemimpinan Trump sejauh ini mencapai sekitar US\$11,6 triliun.

Sementara itu, utang publik meningkat sekitar US\$8,4 triliun selama pemerintahan Joe Biden. Selain belanja pemulihan ekonomi akibat pandemi, peningkatan tersebut juga didorong oleh belanja besar untuk pembangunan infrastruktur, subsidi energi bersih, serta berbagai program prioritas Partai Demokrat.

Committee for a Responsible Federal Budget menilai kebijakan pemerintahan Trump dan Biden telah mendorong jalur utang federal AS lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang seharusnya terjadi berdasarkan aturan belanja yang telah berlaku ketika masing-masing presiden mulai menjabat.

Salah satu contohnya adalah paket legislasi utama Trump pada periode keduanya, One Big Beautiful Bill Act. Berdasarkan perkiraan Congressional Budget Office, kebijakan tersebut akan menambah utang pemerintah AS sebesar US\$4,7 triliun.

Beban Bunga Utang Semakin Besar

Di sisi lain, upaya Trump memangkas pengeluaran pemerintah sebagian besar menyasar program yang masuk kategori discretionary spending. Pos belanja tersebut merupakan bagian terkecil dari keseluruhan anggaran federal AS.

Pemerintah AS menghabiskan sekitar US\$7 triliun setiap tahun. Sekitar 60% di antaranya dialokasikan untuk program wajib atau mandatory spending, termasuk Social Security, Medicare, Medicaid, serta perawatan bagi para veteran.

Belanja tersebut cenderung meningkat seiring dengan kenaikan biaya hidup.

Selain itu, sekitar US\$1,1 triliun digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah AS. Beban tersebut semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah utang dan kenaikan suku bunga.

Anggaran tahun fiskal 2025 menjadi yang pertama ketika biaya pembayaran bunga utang melampaui anggaran Pentagon.

Dalam 10 bulan pertama tahun fiskal 2026, pembayaran bunga utang bahkan telah melampaui pengeluaran untuk program kesehatan Medicare dan menjadi pos belanja terbesar kedua dalam anggaran federal AS setelah Social Security.

Pemerintah AS juga menghadapi peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk pensiun dan layanan kesehatan generasi baby boomers. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap dana perwalian Social Security dan Medicare, sementara penerimaan dari pajak penghasilan dan pajak penggajian masih belum cukup untuk menutup keseluruhan biaya pemerintah federal.

Lonjakan utang hingga menembus US\$40 triliun pada akhirnya memperlihatkan semakin besarnya tantangan fiskal AS. Tanpa langkah untuk menyeimbangkan penerimaan dan belanja, peningkatan beban bunga serta program jaminan sosial berpotensi terus mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi maupun krisis baru di masa mendatang.

Ekspor Malaysia Melonjak 38% pada Juli, Lampauai Perkiraan

Kamis, 20 Agustus 2026 11:23 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-malaysia-melonjak-38-pada-juli-lampau-perkiraan>

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Ekspor Malaysia melonjak 38% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Juli 2026, melampaui ekspektasi pasar, berdasarkan data pemerintah yang dirilis Kamis (20/8).

Pertumbuhan ekspor tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi ekonom yang disurvei Reuters. Sebanyak 14 ekonom sebelumnya memperkirakan ekspor Malaysia pada Juli tumbuh 34,3% YoY.

Sementara itu, impor Malaysia juga meningkat 36,4% YoY pada Juli. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan ekonom yang memprediksi pertumbuhan impor sebesar 32,4%.

Dengan pertumbuhan ekspor yang lebih kuat dibandingkan impor, Malaysia mencatatkan surplus perdagangan sebesar 22,5 miliar ringgit atau sekitar US\$5,57 miliar pada Juli.

Surplus tersebut juga melampaui perkiraan pasar sebesar 17,5 miliar ringgit.

Kinerja perdagangan Malaysia menunjukkan aktivitas ekspor tetap solid di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dari perkiraan juga berpotensi memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kuartal ketiga 2026.

China Pertahankan Suku Bunga Acuan, LPR Tak Berubah 15 Bulan

Kamis, 20 Agustus 2026 10:58 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-pertahankan-suku-bunga-acuan-lpr-tak-berubah-15-bulan>

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. China mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau loan prime rate (LPR) pada Agustus 2026. Keputusan tersebut memperpanjang periode LPR tidak berubah menjadi 15 bulan berturut-turut, sejalan dengan ekspektasi pasar.

Bank sentral China mempertahankan LPR tenor satu tahun di level 3,00%, sedangkan LPR tenor lima tahun tetap sebesar 3,50%.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pembuat kebijakan China kemungkinan lebih mengandalkan percepatan implementasi kebijakan fiskal dibandingkan pelonggaran moneter baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Analisis menilai ruang pelonggaran moneter semakin terbatas karena bank-bank China masih menghadapi margin keuntungan yang berada di dekat level terendah sepanjang sejarah.

Mengapa penting?

Stabilnya suku bunga acuan pinjaman menunjukkan bahwa pemerintah China tampaknya memilih mempercepat pengeluaran fiskal, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk dalam anggaran, daripada meluncurkan stimulus moneter baru.

Langkah tersebut dilakukan ketika ekonomi China masih menghadapi lemahnya permintaan domestik.

Sejumlah data ekonomi China yang dirilis pada Juli 2026, mulai dari produksi industri, penjualan ritel hingga penyaluran kredit, menunjukkan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut masih kesulitan mendorong konsumsi dan permintaan dalam negeri.

Penyaluran kredit baru dalam yuan bahkan mengalami kontraksi pada Juli dan mencatat penurunan terbesar yang pernah terjadi. Realisasi tersebut juga berada di bawah ekspektasi pasar karena faktor musiman serta lemahnya permintaan kredit dari rumah tangga.

LPR China tetap 3,00% dan 3,50%

Dalam survei Reuters terhadap 25 pelaku pasar yang dilakukan pekan ini, seluruh responden memperkirakan tidak akan ada perubahan pada kedua suku bunga LPR.

LPR tenor satu tahun, yang umumnya menjadi acuan bagi sebagian besar pinjaman rumah tangga dan korporasi, dipertahankan pada 3,00%.

Sementara itu, LPR tenor lima tahun yang banyak digunakan sebagai referensi pembiayaan jangka panjang, termasuk kredit properti, tetap berada di 3,50%.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa bank sentral China masih berhati-hati dalam memberikan stimulus moneter tambahan.

China pilih percepatan belanja fiskal

Pada pertemuan Politbiro Juli lalu, para pemimpin China berkomitmen mendukung perekonomian yang melambat dengan mempercepat belanja fiskal untuk proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk anggaran.

Pemerintah China tidak mengindikasikan rencana untuk meluncurkan stimulus besar-besaran baru.

Strategi tersebut mengindikasikan bahwa Beijing lebih memilih mengoptimalkan kebijakan fiskal yang sudah tersedia untuk menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

Bank sentral China pada pekan lalu juga menyatakan akan mempertahankan kebijakan moneter yang cukup longgar dan meluncurkan langkah-langkah yang praktis serta efektif jika diperlukan.

Namun, bank sentral belum memberikan sinyal yang jelas mengenai kemungkinan pemangkasan suku bunga kebijakan maupun rasio giro wajib minimum atau reserve requirement ratio (RRR) perbankan.

Margin bank batasi ruang pemangkasan suku bunga

Barclays menilai bank sentral China belum terburu-buru memangkas suku bunga kebijakan maupun RRR.

"Meski mempertahankan sikap akomodatif, kami menilai Laporan Kebijakan Moneter Kuartal II Bank Sentral China menunjukkan bahwa bank sentral masih belum terburu-buru memangkas suku bunga kebijakan atau rasio giro wajib minimum (RRR). Oleh karena itu, kami tetap memperkirakan suku bunga kebijakan akan bertahan pada level saat ini sepanjang 2026," ujar Barclays.

Menurut Barclays, penguatan yuan dalam beberapa waktu terakhir telah mengurangi sebagian kendala terhadap pelonggaran moneter. Namun, rendahnya margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan membuat ruang untuk pemangkasan suku bunga semakin terbatas.

"Meski penguatan yuan baru-baru ini telah mengurangi sebagian kendala terhadap pelonggaran moneter, kami menilai rendahnya margin bunga bersih perbankan membatasi ruang untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Secara historis, NIM perbankan cenderung bergerak sejalan dengan suku bunga kebijakan, karena suku bunga pinjaman yang terkait dengan LPR biasanya akan disesuaikan lebih rendah segera setelah suku bunga kebijakan dipangkas," kata Barclays.

Dengan demikian, arah kebijakan China ke depan diperkirakan masih akan lebih banyak bertumpu pada implementasi fiskal dan dukungan terhadap sektor riil, sementara kebijakan moneter tetap longgar tetapi tidak agresif.

Kondisi tersebut menjadi penting bagi perekonomian China yang masih menghadapi tantangan berupa lemahnya permintaan domestik, perlambatan kredit dan tekanan terhadap profitabilitas sektor perbankan.

India Siapkan Reformasi Pasar, Bidik Dana Asing

Kamis, 20 Agustus 2026 10:18 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/india-siapkan-reformasi-pasar-bidik-dana-asing>

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. India tengah menyiapkan reformasi besar di pasar modal untuk membendung derasnya arus keluar dana asing sekaligus meningkatkan daya tarik bursa domestik bagi investor global. Regulator pasar modal India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), berencana merombak sejumlah aturan yang telah berlaku selama puluhan tahun.

Melansir Reuters (20/8), langkah tersebut dilakukan di tengah kepemilikan asing atas saham India yang telah mencapai level terendah dalam 17 tahun. Di saat yang sama, rupee telah melemah sekitar 6% sepanjang tahun ini dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia, tertekan kekhawatiran terhadap tingginya biaya impor serta lemahnya arus modal asing.

Sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan reformasi SEBI antara lain mencakup penurunan persyaratan agunan untuk transaksi saham tunai serta mendorong penggunaan kontrak derivatif dengan tenor lebih panjang. SEBI menargetkan perubahan tersebut dapat diterapkan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah melalui konsultasi dengan pelaku industri.

Reformasi ini juga akan melengkapi langkah SEBI untuk memperdalam pasar saham tunai. Regulator berencana mempermudah aksi short selling serta hampir menggandakan jumlah saham yang dapat digunakan dalam mekanisme peminjaman dan peminjaman kembali saham.

Tekanan terhadap pasar India terlihat dari penurunan bobot negara tersebut dalam indeks pasar negara berkembang MSCI. Bobot India kini berada di bawah 12%, jauh turun dari puncaknya sebesar 21% pada September 2024. Sementara itu, penjualan saham India oleh investor asing mencapai lebih dari US\$ 50 miliar pada periode Oktober 2024 hingga Juni 2026.

Investor asing telah lama meminta reformasi agar pasar modal India lebih sejalan dengan bursa utama Asia seperti China, Korea Selatan dan Taiwan. Pasar-pasar tersebut dinilai telah memiliki mekanisme securities lending and borrowing serta lelang penutupan yang lebih matang.

Penyedia indeks global MSCI juga akan memantau efektivitas reformasi tersebut. MSCI menilai pembentukan harga penutupan, efisiensi margin dan agunan, peminjaman saham, short selling serta instrumen lindung nilai menjadi faktor penting dalam menilai aksesibilitas pasar India bagi investor institusi global.

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah pemangkasan kebutuhan agunan untuk transaksi saham yang sangat likuid. Kebijakan ini berpotensi menurunkan kebutuhan modal awal sekitar 15% hingga 20%. SEBI juga mempertimbangkan pengurangan agunan awal untuk kontrak derivatif dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasar India terhadap perdagangan derivatif berjangka pendek. Saat ini, kontrak derivatif dengan tenor panjang di India memiliki likuiditas yang sangat rendah, sehingga menyulitkan investor yang membutuhkan strategi lindung nilai jangka panjang.

Upaya menarik kembali investor institusi juga menjadi penting karena investor ritel masih mendominasi aktivitas perdagangan derivatif India. Data bursa menunjukkan investor ritel menyumbang lebih dari 35% aktivitas perdagangan di India, dibandingkan sekitar 20% di Amerika Serikat.

Meski demikian, reformasi tersebut bukan tanpa risiko. Penerapan mekanisme baru dalam menentukan harga penutupan saham pada awal Agustus sempat memicu volatilitas tajam pada indeks Nifty 50 dan Sensex. SEBI bahkan baru-baru ini mengambil tindakan terhadap dua perusahaan yang dituding memanipulasi perdagangan dalam mekanisme lelang penutupan tersebut.

Kendati berpotensi menimbulkan gejolak dalam jangka pendek, reformasi pasar dinilai dapat mengurangi hambatan transaksi dan membuat pasar India lebih mudah diakses investor global. Namun, sejumlah pelaku pasar menilai perubahan aturan saja belum cukup untuk mendorong lonjakan signifikan investasi pasif asing ke India.

Impor Jepang Cetak Rekor, Harga Minyak Dorong Tekanan Inflasi

Kamis, 20 Agustus 2026 10:15 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/impor-jepang-cetak-rekor-harga-minyak-dorong-tekanan-inflasi>

KONTAN.CO.ID – TOKYO. Impor Jepang mencetak rekor bulanan baru pada Juli 2026, didorong kenaikan harga minyak yang meningkatkan biaya energi dan tekanan inflasi. Di sisi lain, ekspor Jepang juga mencapai level tertinggi sepanjang masa berkat pelemahan yen dan kuatnya permintaan produk terkait semikonduktor.

Berdasarkan data pemerintah Jepang yang dirilis Kamis (20/8/2026), nilai total impor Jepang pada Juli 2026 meningkat 27,8% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 12,1 triliun yen atau sekitar US\$76,39 miliar.

Realisasi tersebut mencatat rekor baru untuk bulan kedua berturut-turut sekaligus melampaui perkiraan pasar yang memperkirakan kenaikan impor sebesar 26,5%.

Kenaikan impor Jepang terutama dipengaruhi oleh biaya energi. Volume impor minyak mentah Jepang meningkat 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menjadi kenaikan pertama dalam empat bulan terakhir.

Namun, secara nilai, impor minyak mentah melonjak jauh lebih tinggi, yakni 87,8%. Kondisi tersebut mencerminkan kombinasi antara peningkatan volume, harga minyak yang masih tinggi, serta meningkatnya pengiriman minyak mentah asal Amerika Serikat (AS) yang memiliki harga lebih mahal.

"Pemulihan volume minyak mentah, ditambah harga minyak yang terus tinggi dan meningkatnya pengiriman minyak mentah AS yang lebih mahal, telah mendorong naik nilai impor," kata ekonom Daiwa Institute of Research, Koki Akimoto.

Pasokan Minyak Jepang Beralih ke AS

Kenaikan volume impor minyak mentah Jepang terjadi ketika negara tersebut mulai mengandalkan sumber pasokan alternatif, terutama dari AS, untuk menggantikan sebagian pengiriman dari Timur Tengah yang terganggu akibat konflik di kawasan tersebut.

Perang di Timur Tengah sebelumnya mengganggu jalur pelayaran melalui Selat Hormuz dan memicu lonjakan harga minyak mentah, petrokimia, serta berbagai komoditas lainnya.

Sebagai negara yang sangat bergantung pada pasokan energi dari luar negeri, kenaikan harga komoditas tersebut meningkatkan nilai impor Jepang dan memberikan tekanan tambahan terhadap perekonomian.

Meskipun harga minyak mulai turun pada Juni setelah sebagian jalur pelayaran kembali pulih, dampak terhadap nilai impor biasanya baru terlihat beberapa waktu kemudian. Pasalnya, harga impor yang tercatat berdasarkan data bea cukai mencerminkan kontrak yang telah disepakati beberapa pekan sebelumnya.

Kenaikan biaya komoditas dan energi juga merambat ke berbagai rantai pasok. Kondisi tersebut turut meningkatkan tekanan inflasi Jepang.

Harga produsen Jepang pada Juli 2026 tercatat meningkat 7,2% secara tahunan.

Ekspor Jepang Juga Cetak Rekor

Di tengah lonjakan impor, kinerja ekspor Jepang justru menunjukkan penguatan signifikan.

Ekspor Jepang pada Juli 2026 melonjak 23,2% yoy menjadi 11,5 triliun yen. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi dan jauh melampaui median perkiraan pasar yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 19,9%.

Pertumbuhan ekspor Juli juga melanjutkan tren positif setelah ekspor Jepang naik 19,3% pada Juni.

Permintaan yang berkaitan dengan pusat data dan kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu pendorong utama ekspor Jepang. Pelemahan tajam nilai tukar yen juga membuat produk Jepang relatif lebih kompetitif bagi pembeli di pasar internasional.

Ekspor ke AS pada Juli meningkat 22% yoy, sedangkan pengiriman ke China tumbuh 25,8%.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa permintaan global terhadap produk Jepang masih cukup kuat. Kondisi ini menjadi penting bagi perekonomian Jepang yang semakin mengandalkan ekspor untuk mengimbangi lemahnya permintaan domestik.

Defisit Perdagangan Jepang

Meski ekspor mencatat rekor, Jepang tetap membukukan defisit perdagangan pada Juli 2026 karena nilai impor meningkat lebih cepat.

Jepang mencatat defisit perdagangan sebesar 634,5 miliar yen pada Juli. Namun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan perkiraan pasar sebesar 680 miliar yen.

Data perdagangan tersebut juga mengikuti laporan ekonomi Jepang yang dirilis sebelumnya pada pekan ini. Ekonomi Jepang tercatat tumbuh untuk kuartal ketiga berturut-turut pada periode April-Juni 2026.

Kuatnya ekspor membantu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis.

BoJ Berpeluang Lanjutkan Normalisasi Kebijakan

Tekanan inflasi yang masih bertahan, ditambah kinerja ekspor yang relatif kuat, berpotensi memperkuat alasan bagi Bank of Japan (BoJ) untuk melanjutkan normalisasi kebijakan moneter.

Bank sentral Jepang bahkan diperkirakan dapat menaikkan suku bunga paling cepat pada September 2026. Kenaikan harga energi dan biaya produksi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan BoJ karena dapat menjaga tekanan inflasi tetap tinggi. Pada saat yang sama, ketahanan ekspor menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Jepang masih memiliki penopang meskipun permintaan domestik belum sepenuhnya pulih. Dengan demikian, data perdagangan Juli memberikan gambaran yang cukup beragam bagi perekonomian Jepang. Rekor impor mencerminkan tingginya biaya energi dan tekanan harga, sementara rekor ekspor menunjukkan masih kuatnya permintaan global terhadap produk Jepang.

Ringgit Perkasa Kamis (20/8), Mayoritas Mata Uang Asia Menguat terhadap Dolar AS

Kamis, 20 Agustus 2026 09:32 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ringgit-perkasa-kamis-208-mayoritas-mata-uang-asia-menguat-terhadap-dolar-as>

KONTAN.CO.ID - Mata Uang Asia Menguat, Ringgit Malaysia Jadi Penguat Terbesar

Mayoritas mata uang Asia menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (20/8/2026).

Ringgit Malaysia mencatat penguatan paling besar, sementara won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang yang melemah.

Mengutip Reuters pada pukul 02.02 GMT, ringgit menguat 0,45% terhadap dolar AS menjadi 4,035 ringgit per dolar, dari sebelumnya 4,053 ringgit.

Penguatan juga terjadi pada sejumlah mata uang Asia lainnya. Peso Filipina naik 0,30% menjadi 61,595 per dolar, sedangkan rupiah Indonesia menguat 0,25% menjadi 17.780 per dolar.

Yuan China naik 0,14% menjadi 6,721 per dolar, sementara baht Thailand menguat 0,11% menjadi 32,828 per dolar. Dolar Taiwan naik 0,15% menjadi 31,889 per dolar.

Sementara itu, dolar Singapura relatif stabil dengan penguatan tipis 0,02% menjadi 1,271 per dolar.

Di sisi lain, won Korea Selatan melemah 0,38% menjadi 1.394,4 per dolar. Yen Jepang juga turun 0,20% menjadi 158,47 per dolar.

Rupiah Masih Tertekan Sepanjang 2026

Meski menguat dalam perdagangan harian, rupiah masih menjadi salah satu mata uang Asia dengan kinerja terlemah sepanjang tahun ini.

Sejak akhir 2025, rupiah telah melemah sekitar 6,24% terhadap dolar AS. Posisi tersebut berada di bawah kinerja rupee India yang turun 6,14% dan peso Filipina yang melemah 4,54%.

Baht Thailand juga tertekan dengan penurunan sekitar 4,20% sepanjang 2026.

Sebaliknya, yuan China menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik. Yuan telah menguat sekitar 3,97% terhadap dolar AS sejak akhir 2025, disusul won Korea Selatan yang menguat 3,23%.

Dolar Singapura menguat 1,11% sepanjang tahun, sedangkan ringgit Malaysia naik tipis 0,52%.

Yen Jepang masih melemah 1,15% sepanjang 2026, sementara dolar Taiwan turun 1,41%.

Pergerakan mata uang Asia terjadi di tengah tekanan terhadap dolar AS setelah imbal hasil obligasi pemerintah AS turun menyusul langkah Departemen Keuangan AS menggandakan nilai buyback surat utang jangka panjang.

Kondisi tersebut turut memberikan ruang bagi sejumlah mata uang regional untuk menguat terhadap greenback.

Tingkat Pengangguran Australia Naik ke 4,5%, Tertinggi Hampir 5 Tahun

Kamis, 20 Agustus 2026 09:22 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/tingkat-pengangguran-australia-naik-ke-45-tertinggi-hampir-5-tahun>

KONTAN.CO.ID - Tingkat pengangguran Australia meningkat ke level tertinggi sejak akhir 2021 pada Juli 2026.

Kondisi ini terjadi setelah jumlah tenaga kerja secara tak terduga menurun, sehingga mengurangi tekanan bagi Reserve Bank of Australia (RBA) untuk kembali menaikkan suku bunga.

Mengutip Reuters pada Kamis (20/8/2026), data Australian Bureau of Statistics (ABS) menunjukkan jumlah tenaga kerja bersih turun 15.800 orang pada Juli dibandingkan Juni.

Padaahal, ekonom memperkirakan jumlah pekerja bertambah sekitar 15.000 orang.

Pada Juni, jumlah tenaga kerja sebelumnya melonjak 80.300 orang berdasarkan data yang telah direvisi.

Meski demikian, jumlah pekerja penuh waktu masih meningkat 16.300 orang pada Juli.

Tingkat pengangguran Australia naik menjadi 4,5% dari 4,4% pada bulan sebelumnya. Angka tersebut juga lebih tinggi dari perkiraan ekonom yang memperkirakan tingkat pengangguran bertahan di 4,4%.

Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja turun menjadi 66,9%. Jumlah jam kerja juga berkurang 0,6%, sedangkan tingkat setengah menganggur atau underemployment bertahan di 6,4%.

Tekanan Kenaikan Suku Bunga Berkurang

Data ketenagakerjaan yang melemah membuat tekanan terhadap RBA untuk menaikkan suku bunga kembali berkurang.

RBA menilai kondisi pasar tenaga kerja telah sedikit melonggar. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan bank sentral mempertahankan suku bunga di 4,35% pada pekan lalu setelah melakukan tiga kali kenaikan suku bunga sepanjang tahun ini.

Data terpisah yang dirilis pada Rabu menunjukkan pertumbuhan upah Australia tetap moderat untuk kuartal kelima berturut-turut.

Meski demikian, para pembuat kebijakan RBA masih membuka kemungkinan pengetatan lebih lanjut apabila risiko inflasi kembali meningkat.

Sejumlah risiko yang menjadi perhatian antara lain konflik di Timur Tengah, lonjakan investasi global di sektor kecerdasan buatan (AI), serta produktivitas yang lemah dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi Australia.

Wakil Gubernur RBA Andrew Hauser mengatakan, bank sentral masih membutuhkan bukti perlambatan lebih lanjut di pasar tenaga kerja.

RBA sebelumnya memperkirakan tingkat pengangguran akan meningkat menjadi 4,5% pada akhir 2026, sebelum mencapai puncak sekitar 4,8% pada 2028.

Dolar Australia Tertekan

Pasar keuangan masih terbelah mengenai kemungkinan RBA melakukan kenaikan suku bunga keempat tahun ini.

Perkembangan inflasi selanjutnya akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan moneter.

Setelah data ketenagakerjaan dirilis, dolar Australia melemah 0,2% menjadi US\$0,7111.

Dengan pasar tenaga kerja yang mulai kehilangan momentum, ruang bagi RBA untuk mempertahankan suku bunga tanpa kenaikan tambahan menjadi lebih besar, meski keputusan akhir tetap bergantung pada perkembangan inflasi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Rupiah Ditutup Menguat, Jadi Runner-Up Asia

Kamis, 20 Agustus 2026 15:18 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/119029/rupiah-ditutup-menguat-jadi-runner-up-asia/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Kamis (20/8/2026) dengan penguatan 0,49% ke Rp17.746/US\$, sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang menghijau.

Penguatan rupiah dan mata uang kawasan tertopang oleh depresiasi dolar Amerika Serikat (AS), yang mulai kehilangan pamornya. Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama kembali terpangkas ke 98,78.

Baht Thailand menguat paling tajam disusul rupiah, ringgit Malaysia, peso Filipina, rupee India, dan yuan offshore. Sebaliknya, won Korea Selatan melemah paling dalam bersama yen Jepang.

Rupiah dan mata uang Asia hari ini menguat, tertopang oleh risalah FOMC dan langkah Menteri Keuangan AS yang akan membeli obligasi AS. (Bloomberg)

Namun begitu, harga minyak Brent masih bertahan tinggi di US\$93,18/barel masih menyisakan kekhawatiran akan berlanjutnya inflasi.

Sementara dari sisi eksternal, rebound obligasi US Treasury tenor panjang mulai kehilangan tenaga. Pelaku pasar mencermati perkembangan setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent secara mengejutkan mengumumkan pembelian kembali obligasi jangka panjang untuk menahan kenaikan yield yang sebelumnya telah mencapai level tertinggi dalam hampir dua dekade.

Dari dalam negeri, aksi jual di pasar US Treasury membawa 'berkah'. Dalam dua hari beruntun, yield di pasar obligasi domestik menguat dan terpangkas pada semua tenor.

Pergerakan yield di pasar Surat Utang Negara (SUN) pada Kamis (20/8/2026). (Bloomberg)

Tenor 4-5 tahun dan tenor 9-10 tahun, turun cukup dalam. Yield tenor 4 tahun turun 14,9 basis poin (bps), dan tenor 10 tahun turun 8,2 bps.

Ada indikasi bahwa premi risiko Indonesia sedang terpangkas, didukung oleh keputusan BI untuk mempertahankan BI Rate di 5,75%, serta berlanjutnya stabilitas rupiah.

Dengan durasi dan yield yang menarik, tenor-tenor tersebut digemari investor. Selain itu, spread antara US Treasury dan Surat Utang Negara (SUN) makin menarik.

Yield SUN tenor 10 tahun berada di 7,02%, obligasi Indonesia berdenominasi dolar AS berada di 5,62%, sedangkan US Treasury 4,65%. Spread yang masih cukup lebar ini memberi daya tarik bagi investor asing, terutama saat ini risiko rupiah relatif lebih terkendali.

Jurus BI Jaga Rupiah: Dorong Inflow Asing-Insentif Lindung Nilai

Kamis, 20 Agustus 2026 11:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118962/jurus-bi-jaga-rupiah-dorong-inflow-asing-insentif-lindung-nilai/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) membeberkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui optimalisasi strategi intervensi valuta asing, baik di pasar luar negeri maupun domestik.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan moneter BI untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah sekaligus menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5% plus-minus 1%.

“Pertama, mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah baik melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non-deliverable forward atau DNDF di pasar domestik,” kata Destry Damayanti, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (19/8/2026).

Selain intervensi valuta asing, BI akan mengelola struktur suku bunga di pasar uang agar tetap sejalan dengan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market. Strategi operasi moneter pro-market juga akan terus diperkuat.

BI juga akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer tetap di atas 10% atau double digit, sesuai dengan ekspansi moneter.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Agustus 2026 memutuskan mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, Deposit Facility 4,75%, dan Lending Facility 6,50%.

Perluasan Swap Lindung Nilai

BI juga akan memperluas transaksi underlying pendanaan luar negeri yang dapat memperoleh insentif pengurangan premi untuk swap lindung nilai kepada BI.

Perluasan tersebut membuat transaksi yang sebelumnya hanya mencakup portfolio inflows kini juga dapat mencakup pinjaman luar negeri oleh bank dan foreign direct investment (FDI).

“Ada perluasan dari kebijakan kami terkait dengan lindung nilai untuk swap beli lindung nilai kepada Bank Indonesia yang sebesar 12,5% yang tadinya hanya menggunakan underlyingnya untuk portfolio inflow jadi kami perluas,” kata Destry Damayanti, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (19/8/2026).

“Yang kita perluas yaitu bisa dalam bentuk pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh bank ataupun oleh foreign direct investment dengan masa kontrak pinjaman itu 3 tahun.”

Transaksi swap lindung nilai tersebut memiliki jangka waktu paling lama 12 bulan, dengan masa kontrak paling lama tiga tahun. Transaksi tersebut juga dapat diperpanjang (rollover) sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai.

Perluasan transaksi instrumen swap lindung nilai tersebut akan berlaku efektif pada minggu kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan FDI yang masuk sejak 1 Juli 2026.

Menurut Destry insentif yang dikeluarkan dalam rangka menstabilkan nilai tukar tersebut khususnya untuk mendukung dana asing masuk ke Indonesia. Terutama, menjaga supaya yield SRBI tak mengalami kenaikan.

“Jadi kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, yield SRBI mengalami penurunan, namun demikian inflow tetap masuk. Inflow di bulan Agustus saja sudah masuk US\$1,8 miliar, yaitu untuk SRBI dan SBN. Dan di situ juga apa yang kami lakukan? Kita memberikan insentif untuk hedging cost, ya, cost untuk hedging buat dana asing yang masuk ke sini sehingga bisa mempertahankan spread yang menarik dan mereka akan masuk ke instrumen kita.” kata Destry.

BI Rate Ditahan, BI Tempuh Jalur Non-Suku Bunga Demi Pertumbuhan

Kamis, 20 Agustus 2026 11:05 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/118957/bi-rate-ditahan-bi-tempuh-jalur-non-suku-bunga-demi-pertumbuhan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga BI Rate di level 5,75%, sambil terus menebar perluasan insentif lindung nilai untuk menarik aliran modal asing ke Indonesia.

Kebijakan yang ditempuh BI dengan menjaga stabilitas mata uang tanpa menaikkan BI Rate didorong oleh iklim perekonomian domestik yang membutuhkan dukungan untuk tumbuh lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi tercatat melambat menjadi 5,29% pada kuartal II-2026, dari 5,61% pada kuartal I-2026. Dengan menahan BI Rate, sejatinya BI sedang memberi ruang tumbuh bagi perekonomian Indonesia yang sempat disebut kehilangan momentum pada kuartal II-2026 ini.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate menjadi sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility menjadi sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility menjadi sebesar 6,5%," papar Destry Damayanti, Pejabat Gubernur Sementara BI, dalam Konferensi Pers usai RDG.

Destry menambahkan, keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya dampak gejolak global dan mencapai sasaran inflasi pada tahun 2026-2027 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keputusan suku bunga ini merupakan kebijakan pertama sejak Destry Damayanti didapuk menjadi Pejabat Sementara Gubernur BI, setelah mantan Gubernur Perry Warjiyo mengundurkan diri bulan lalu.

Meski BI mempertahankan BI Rate dalam dua kali pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) secara beruntun, pelaku pasar menilai ini bukan akhir dari siklus pengetatan kebijakan. Sebaliknya, BI Rate yang ditahan ini lebih merupakan jeda.

Ekonom Bloomberg Economics, Tamara Henderson menilai, keputusan ini juga didukung oleh situasi yang memungkinkan BI memiliki ruang untuk mempertahankan BI Rate.

"Rupiah masih berada dalam kisaran perdagangan yang terbentuk sejak Juni, inflasi tetap berada dalam sasaran, sementara rencana anggaran 2027 yang baru diumumkan Presiden Prabowo Subianto telah menenangkan sentimen pasar," kata Henderson.

Ia menambahkan, jika kondisi tersebut bertahan, BI mungkin dapat menghindari pengetatan lebih lanjut dalam siklus ini. Namun, kenaikan imbal hasil US Treasury serta tekanan harga akibat perang Iran dan El Niño mengarah pada kemungkinan BI akan kembali mengerek BI Rate.

Senada, Samuel Sekuritas menyebut, stabilitas eksternal dan internal tetap menjadi risiko utama terhadap prospek ekonomi. Meski rupiah menguat pada akhir Juni ke level Rp17.850-an/US\$, dan investasi portofolio asing mencatat arus masuk bersih senilai US\$1,8 miliar pada awal kuartal III-2026, perbaikan tersebut masih rapuh.

"Meningkatnya risiko geopolitik, harga komoditas yang lebih tinggi, serta kemungkinan kebijakan moneter AS yang lebih ketat pada kuartal IV-2026 dapat dengan cepat membalikkan arus modal dan kembali memicu depresiasi rupiah," sebut Samuel Sekuritas dalam catatannya.

Di tengah kondisi ini, BI mencoba peruntungan untuk tetap menjaga stabilitas sambil terus menopang aktivitas ekonomi dengan menempuh jalur non-suku bunga.

Jalur Non-Suku Bunga

Ada banyak jalan menuju Roma, begitu juga jalan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Agaknya BI menempuh jalan yang lebih akomodatif bagi ruang tumbuh perekonomian dengan memprioritaskan jalur non-suku bunga, BI Rate.

BI disebut akan terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian, meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan serta mempercepat pendalaman di pasar uang dan pasar valas.

Salah satunya, BI memperluas fasilitas insentif berupa pengurangan premi bagi Swap Jual Lindung Nilai (Swap Beli Lindung Nilai kepada BI) sebesar 12,5%. Insentif ini diberikan untuk durasi satu tahun, dan dapat diperpanjang sesuai sisa jangka waktu kontrak. Kebijakan ini akan berlaku efektif pada pekan kedua September 2026 untuk swap lindung nilai pinjaman luar negeri, sedangkan untuk investasi asing sudah berlaku sejak 1 Juli 2026.

Demi menopang perekonomian, BI juga menempuh jalan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). BI melaporkan insentif KLM telah mencapai Rp446,5 triliun hingga minggu pertama Agustus 2026.

Destry menyebut bahwa hal tersebut ikut menopang intermediasi perbankan nasional. Efeknya telah tercermin melalui pertumbuhan kredit perbankan. Pada Juli 2026 kredit perbankan tumbuh 13,58% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada Juni 2026 sebesar 12,67% (yoy).

Menjaga Cadangan Devisa

Di tengah rezim ekonomi yang penuh ketidakpastian, upaya menjaga stabilitas nilai tukar ditempuh dengan cara berbeda oleh sebagian besar bank sentral Asia, dan negara berkembang.

Bank sentral di negara berkembang mulai mencari cara untuk menopang mata uangnya tanpa harus menguras cadangan devisa. Bukan tanpa sebab, ketegangan di Timur Tengah yang tak kunjung usai dan terus berulang, serta adanya prospek suku bunga AS yang lebih tinggi dalam waktu lama, membuat cadangan devisa menjadi benteng yang harus diperkuat.

Bukan cuma Indonesia. India, Korea Selatan, dan Taiwan menarik aliran modal asing demi menjaga mata uang dengan menawarkan yield yang atraktif dalam aset-asetnya. Bahkan Korea Selatan mendorong repatriasi dolar korporasi demi mendapat pasokan valuta asing dan membuat volatilitas won lebih jinak. India juga menarik hampir US\$40 miliar dari diaspora melalui deposito dolar yang berbunga tinggi.

Sementara Indonesia, menarik aliran dana ke pasar obligasi sebesar US\$71,9 juta sejak awal kuartal ketiga. Selain itu, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga menawarkan yield yang atraktif untuk mempertahankan aliran modal asing.

Untuk diketahui, perang AS dan Iran membuat cadangan devisa negara-negara berkembang terpengkas cukup dalam.

Indonesia, misalnya, posisi devisa sempat berada di US\$156,03 miliar pada Desember 2025, lalu terpengkas sepanjang tahun 2026 dan menyisakan US\$145,3 miliar. Begitu juga dengan devisa Thailand, dari posisi US\$292 miliar, sempat turun ke US\$272 miliar pada Juli, lalu kembali naik ke US\$280 miliar pada Agustus.

BI Sebut Transaksi Digital Melesat, QRIS Tumbuh 82,4%

Kamis, 20 Agustus 2026 10:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118952/bi-sebut-transaksi-digital-melesat-qr-is-tumbuh-82-4/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia menyebut bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2026 terus mencatatkan pertumbuhan.

“Volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,5 miliar transaksi atau tumbuh 8,69% year-on-year pada Juli 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital,” sebut Destry Damayanti, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (19/8/2026).

Secara rinci volume transaksi melalui internet dan aplikasi mobile masing-masing tumbuh 9,39% (yoy) dan 24,25% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 82,42% (yoy), didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 546 juta transaksi atau tumbuh 31,62% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp1.355 triliun.

Sementara itu, volume transaksi nilai besar melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 0,99 juta transaksi atau tumbuh 3,12% (yoy), dengan nominal transaksi BI-RTGS tumbuh 1,54% (yoy) mencapai Rp20.097 triliun.

Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 15,10% (yoy) menjadi Rp1.314 triliun.

“Selain itu, Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T),” sebut Destry.

Poin-poin Keputusan BI yang Kembali Tahan Suku Bunga 5,75%

Kamis, 20 Agustus 2026 09:20 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/118944/poin-poin-keputusan-bi-yang-kembali-tahan-suku-bunga-5-75/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Agustus 2026. Hal tersebut sekaligus menandai dua bulan berturut bank sentral RI masih menahan suku bunga acuannya.

Tak hanya itu, BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan Lending Facility sebesar 6,5%.

"Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya kejut global akibat perang di Timur Tengah; menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti dalam konferensi pers Hasil RDG BI, Rabu (19/8/2026)

Di tengah keputusan menahan suku bunga, BI tetap melonggarkan sisi likuiditas dan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

BI mencatat kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58% secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dari pertumbuhan Juni 2026 sebesar 12,67% yoy.

Pertumbuhan kredit tersebut didukung kebijakan makroprudensial longgar melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga minggu pertama Agustus 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan tercatat Rp446,5 triliun.

Di sisi likuiditas, uang primer (M0) pada Juli 2026 tumbuh 18,3% yoy, sedangkan uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 8,7% yoy.

BI juga akan mulai menerapkan sejumlah kebijakan baru untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kredit. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Pendalaman Pasar Uang (KLM-PPU) akan berlaku mulai 1 September 2026, sedangkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mulai berlaku 1 Oktober 2026.

Langkah tersebut dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pada kuartal II 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% yoy, meski melambat dari 5,61% yoy pada kuartal sebelumnya.

BI menilai pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang stimulus fiskal yang mendorong konsumsi pemerintah dan investasi. Konsumsi rumah tangga juga tetap baik, meski perlu terus diperkuat, sementara ekspor perlu didorong untuk memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi.

BI mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 4,9%-5,7%.

Di sisi lain, tekanan eksternal masih menjadi perhatian. BI mencatat pertumbuhan ekonomi global 2026 diperkirakan hanya sekitar 3%, sementara inflasi global diperkirakan mencapai 4,5%. Ketidakpastian pasar keuangan global juga masih tinggi seiring meningkatnya tensi geopolitik dan ekspektasi kebijakan moneter Amerika Serikat.

Dalam kondisi tersebut, BI akan terus mengoptimalkan intervensi valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah. Pada 18 Agustus 2026, rupiah tercatat Rp17.855 per dolar AS, menguat 0,78% dibandingkan level akhir Juli 2026.

"Bank Indonesia akan terus menempuh berbagai strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedepan nilai tukar rupiah diperkirakan akan tetap stabil didukung dengan penguatan respon kebijakan stabilisasi Bank Indonesia," jelas Destry.

BI juga memperluas instrumen swap lindung nilai. Kebijakan tersebut nantinya mencakup transaksi terkait pinjaman luar negeri oleh bank dan investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI), selain transaksi portofolio.

Perluasan instrumen swap lindung nilai tersebut akan berlaku mulai minggu kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan FDI yang masuk sejak 1 Juli 2026.

"Insentif bagi Swap Jual Lindung Nilai dinaikkan menjadi sebesar 12,5% dan insentif bagi DNDF Jual Lindung Nilai diberikan sebesar 15%," paparnya.

Insentif juga diberikan untuk meningkatkan Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra berupa premi Swap Beli Lindung Nilai sebesar 10% dan pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10%

Anggaran Subsidi Energi 2027 Naik 20%, Pertanda Baik atau Bahaya?

Kamis, 20 Agustus 2026 09:00 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118940/anggaran-subsidi-energi-2027-naik-20-pertanda-baik-atau-bahaya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta – Ekonom menilai kebijakan reformasi subsidi energi yang dirancang pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 masih berjalan di tempat dari upaya serupa yang digaungkan pada tahun-tahun sebelumnya, kendati pagunya naik sebesar 20,1%.

Dalam kaitan itu, pakar kebijakan publik sekaligus ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun depan masih mengulang pola lama.

"Jika kita bedah komposisi subsidi energi berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2027, struktur penganggarannya secara substansial belum berubah dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Wijayanto saat dihubungi, Kamis (20/8/2026).

Wijayanto mengatakan porsi terbesar belanja subsidi energi dalam RAPBN 2027 masih berfokus pada komoditas yang sama, yaitu; bahan bakar minyak (BBM) Solar dan kerosene, gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram alias Gas Melon, serta listrik.

Pertamina Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga LPG 3 Kg, Beli di Pangkalan Resmi untuk Harga Sesuai HET (Pertamina)

Dominasi ketiga komoditas tersebut berisiko kembali memicu ketidaktepatan sasaran penyaluran pada 2027, sehingga kelompok masyarakat mampu turut menikmati fasilitas tersebut karena masalah penyaluran yang belum terselesaikan oleh pemerintah.

"Masalah utamanya adalah skema penyaluran yang kurang presisi. Ketika sebagian besar anggaran dialokasikan pada komoditas seperti BBM dan LPG, maka risiko kebocoran kuota ke kelompok ekonomi menengah ke atas tetap sangat tinggi. Ini membuat efisiensi APBN menjadi sulit tercapai dan reformasi berjalan lambat di tempat," jelasnya.

Petakan Tantangan

Di sisi lain, pemerintah diminta mendata tantangan utama dalam pengelolaan subsidi energi pada RAPBN 2027; yang meliputi tingginya harga komoditas, penyaluran BBM dan LPG 3 kg secara terbuka, serta akurasi data penerima yang belum optimal.

Wijayanto juga menilai pemerintah perlu mengoptimalkan transformasi penyaluran tepat sasaran sekaligus memenuhi kebutuhan anggaran subsidi untuk mendukung energi baru terbarukan (EBT).

Dalam kaitan itu, dia menyebut belum optimalnya reformasi anggaran subsidi energi turut menghambat transisi menuju energi bersih.

Lebih lanjut, dia juga memandang komposisi RAPBN 2027 belum memberikan insentif yang memadai bagi pengembangan EBT. Pemerintah lantas diimbau untuk mulai berani mengalihkan porsi anggaran dari sektor fosil.

"Pemerintah seharusnya mulai berani menggeser porsi subsidi fosil secara bertahap untuk mendukung insentif energi hijau dan pengembangan EBT," ungkapnya.

Keberanian Politik

Wijayanto menegaskan kunci keberhasilan reformasi subsidi terletak pada keberanian politik pemerintah serta pembenahan data terpadu penerima bantuan.

Tanpa integrasi data yang akurat, pembatasan maupun pengalihan subsidi diprediksi terus memicu polemik di tengah masyarakat.

Dia pun mendorong penyusunan peta jalan yang tegas untuk mengganti subsidi produk menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau by name by address.

"Harus ada roadmap yang jelas mengenai kapan subsidi berbasis produk ini benar-benar dihentikan total dan digantikan dengan BLT terintegrasi agar perlindungan sosial jauh lebih efektif dan tepat sasaran," tegas Wijayanto.

Ketidakberubahan pola penganggaran subsidi energi ini terlihat dari total alokasi dalam RAPBN 2027 yang dipagu sebesar Rp272,9 triliun, atau membengkak 20,1% dari outlook APBN 2026 senilai Rp227,3 triliun.

Kenaikan anggaran subsidi energi tersebut dipengaruhi oleh perubahan asumsi makro seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), penyesuaian volume konsumsi, hingga biaya pokok penyediaan (BPP).

Secara terperinci, alokasi anggaran BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg melonjak menjadi Rp142,8 triliun dari outlook APBN 2026 sejumlah Rp116,8 triliun.

Lonjakan ini dipicu oleh peningkatan kuota penyaluran BBM (Solar dan minyak tanah) hingga 19,34—19,56 juta kiloliter serta tingginya volume konsumsi LPG 3 kg.

Guna menekan kebocoran, pemerintah berencana menata ulang skema penyaluran berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp130,1 triliun dalam RAPBN 2027 atau naik 17,8% dibandingkan dengan outlook APBN 2026.

Kenaikan subsidi listrik tersebut dipicu oleh peningkatan BPP akibat dinamika nilai tukar terhadap Dolar AS, kenaikan harga bahan bakar pembangkit termal dan gas, serta perluasan akses dan insentif transisi energi nasional..

Belanja Modal Dipangkas Hampir 20%, Target Pertumbuhan 6% di 2027 Semakin Sulit

Kamis, 20 Agustus 2026 19:01 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-modal-dipangkas-hampir-20-target-pertumbuhan-6-di-2027-semakin-sulit>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada 2027 menghadapi tantangan dari sisi komposisi anggaran pemerintah pusat.

Pasalnya, belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebagai belanja produktif justru dipangkas hampir 20% dibandingkan outlook 2026.

Berdasarkan RAPBN 2027, belanja modal ditetapkan sebesar Rp 295,2 triliun, turun dari sekitar Rp 367,4 triliun pada outlook 2026. Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 6%.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan, penurunan belanja modal menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam melihat kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Menurutnya, komposisi RAPBN 2027 menunjukkan adanya pergeseran dari belanja yang secara langsung menambah kapasitas produksi menuju belanja rutin, kewajiban, dan stabilisasi.

"Komposisi RAPBN 2027 menunjukkan perbaikan pada beberapa sisi, tetapi secara keseluruhan juga memperlihatkan pergeseran yang cukup jelas dari belanja yang langsung menambah kapasitas produksi menuju belanja rutin, kewajiban, dan stabilisasi," ujar Josua kepada Kontan, Kamis (20/8).

Josua menilai, penurunan belanja modal tidak otomatis menunjukkan kualitas belanja pemerintah memburuk.

Sebab, belanja produktif tidak hanya berasal dari belanja modal, tetapi juga dapat berasal dari belanja pendidikan, kesehatan, makanan bergizi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit usaha, hingga perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Namun demikian, penurunan belanja modal hampir 20% tetap menjadi sinyal yang perlu diperhatikan.

Pasalnya, belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang secara langsung dapat menambah kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas, sarana pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas produksi.

"Nota Keuangan sendiri menyatakan belanja modal diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan dan energi, konektivitas, penguatan industri, serta pengembangan teknologi, tetapi alokasinya pada 2027 hanya Rp 295,2 triliun," jelas Josua.

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketegangan dalam desain anggaran. Di satu sisi pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tetapi di sisi lain salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas ekonomi justru mengalami penurunan anggaran.

"Jadi terdapat semacam ketegangan dalam desain anggaran: pemerintah ingin pertumbuhan lebih tinggi, tetapi salah satu instrumen paling langsung untuk menambah kapasitas ekonomi justru berkurang," katanya.

Josua mengatakan, tantangan tersebut semakin besar karena ruang fiskal pemerintah juga semakin terbatas. Total belanja negara dalam RAPBN 2027 memang meningkat menjadi Rp 4.097,2 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp 3.942,4 triliun.

Namun, kenaikan tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya sejumlah belanja yang relatif sulit dikurangi.

Belanja pegawai misalnya, naik dari sekitar Rp 579,7 triliun menjadi Rp 625,2 triliun, atau hampir 8%. Sementara pembayaran bunga utang meningkat sekitar 11,7% dari Rp 582,2 triliun menjadi Rp 650,3 triliun.

Dengan demikian, belanja pegawai dan bunga utang saja mencapai sekitar Rp1.275 triliun, atau hampir sepertiga dari total belanja negara.

"Ini menunjukkan bahwa bagian anggaran yang sudah terikat sebelum pemerintah menentukan prioritas pembangunan semakin besar," ujarnya.

Josua menambahkan, pembayaran bunga utang pada 2027 bahkan sudah lebih dari dua kali lipat dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan semakin besar bagian anggaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban masa lalu, semakin terbatas ruang pemerintah untuk membiayai pertumbuhan masa depan.

Menurut Josua, komposisi anggaran tersebut masih dapat menopang pertumbuhan dalam jangka pendek. Belanja pemerintah dapat meningkatkan permintaan dan konsumsi sehingga memberikan dorongan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa dalam jangka menengah, diperlukan investasi produktif, mesin, teknologi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.

Ia mencontohkan kinerja ekonomi pada kuartal II-2026. Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 15,97% dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%.

Namun, di sisi investasi, meskipun tumbuh 6,87%, investasi mesin dan peralatan hanya tumbuh 1,32%, turun tajam dari 10,78% pada kuartal sebelumnya.

"Artinya, belanja pemerintah dapat menaikkan permintaan dan PDB hari ini, tetapi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi menghasilkan lebih banyak barang dan jasa esok hari dibutuhkan investasi produktif, mesin, teknologi, infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja," katanya.

Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya sekitar 5,22%, dengan konsumsi rumah tangga sebesar 5,09% dan investasi 6,03%.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan target pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 6%.

"Artinya, mencapai pertumbuhan mendekati 6% dengan defisit yang justru dipersempit membutuhkan kualitas setiap rupiah belanja yang jauh lebih tinggi," jelasnya.

Ia menilai, jika sebagian besar tambahan pendapatan negara habis untuk kenaikan gaji, pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja rutin, kemampuan APBN untuk menghasilkan tambahan pertumbuhan akan semakin kecil.

Josua menyarankan agar pemerintah sebaiknya menjadikan pembahasan RAPBN 2027 dengan DPR sebagai kesempatan untuk melindungi belanja yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian.

"Penurunan belanja modal perlu ditinjau kembali berdasarkan proyek per proyek, terutama untuk infrastruktur dasar, irigasi, logistik, pendidikan, kesehatan, teknologi dan peningkatan keterampilan sebaiknya tidak menjadi korban penyesuaian," ujar Josua.

Menurut Josua tantangan utama 2027 bukan lagi memperbesar APBN, melainkan memastikan semakin besar bagian dari setiap rupiah belanja benar-benar menciptakan kapasitas ekonomi baru, pekerjaan berkualitas dan peningkatan daya beli.

Belanja Rutin Pemerintah Pusat Membengkak di 2027, Ruang APBN Dorong Ekonomi Terbatas

Kamis, 20 Agustus 2026 18:31 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-rutin-pemerintah-pusat-membengkak-di-2027-ruang-apbn-dorong-ekonomi-terbatas>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun. Dari total tersebut, sekitar 82% dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp 3.362,2 triliun.

Secara tahunan, nilai belanja pemerintah pusat tersebut meningkat 3,63% year on year (yoy) dari belanja berdasarkan outlook Lapsem 2026 yang sebesar Rp 3.245,5 triliun.

Namun, kenaikan belanja pemerintah pusat tersebut diikuti perubahan komposisi belanja. Sejumlah belanja rutin dan kewajiban pemerintah mengalami kenaikan, sementara belanja yang dapat mendorong penambahan kapasitas ekonomi justru menurun.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, rincian jenis belanja pemerintah pusat di antaranya terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 625,24 triliun, naik 7,85% dari outlook Lapsem 2026. Sementara belanja barang tercatat sebesar Rp 681,13 triliun, turun 6,8% yoy dari outlook Lapsem 2026.

Belanja modal tercatat Rp 295,22 triliun, turun 19,65% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026. Di sisi lain, pembayaran bunga utang tercatat sebesar Rp650,31 triliun, naik 12% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026. Belanja subsidi tercatat sebesar Rp 387,88 triliun, naik dibandingkan outlook Lapsem 2026.

Belanja hibah tercatat sebesar Rp 528,5 miliar, naik 45,2% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026. Kemudian belanja sosial tercatat sebesar Rp 156,48 triliun, turun 6% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026. Sementara belanja lain-lain tercatat sebesar Rp 565,38 triliun, naik 17,4% yoy dibandingkan outlook Lapsem 2026.

Jika dilihat berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, sejumlah rincian jenis belanja rutin pemerintah pusat mengalami kenaikan, seperti belanja pegawai dan pembayaran bunga utang.

Sementara itu, belanja produktif yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, seperti belanja modal, justru menurun. Begitu juga dengan belanja bantuan sosial yang turut menurun.

Di sisi lain, belanja subsidi masih mengalami kenaikan dari sisi anggaran. Hanya saja, pada BBM subsidi jenis tertentu diketahui pemerintah akan memangkas sekitar 58% kuotanya pada tahun depan.

Pemerintah menegaskan akan mengarahkan belanja APBN 2027 ke belanja yang berkualitas, terutama tetap fokus untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih

(KDMP), Sekolah Rakyat hingga meningkatkan program perlindungan sosial (Perlinsos), sekaligus memperkuat pemberdayaan UMKM.

"APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur dan terarah untuk mendorong ekonomi yang lebih tinggi dan akselerasi yang lebih cepat," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Ferry Ardiyanto, Rabu (19/8/2026).

Ruang Fiskal Semakin Rigid

Sementara itu, Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, RAPBN 2027 menunjukkan adanya trade off yang semakin jelas antara menjaga kesinambungan program pemerintah dan memperbesar ruang untuk belanja yang benar-benar menciptakan kapasitas ekonomi baru.

"Jadi saya tidak melihat bahwa kualitas belanjanya memburuk, tetapi memang terlihat bahwa ruang fiskal menjadi semakin rigid," kata Irman kepada Kontan, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya besaran belanja 2027 yang meningkat namun tetap menjaga defisit tetap 2,40% PDB merupakan hal yang positif dari perspektif kredibilitas fiskal.

Namun, di sisi lain, sebagian ruang belanja semakin terserap oleh pengeluaran yang relatif sulit dikurangi. Salah satu yang paling terlihat adalah pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 650 triliun pada 2027, naik hampir 12% dari outlook 2026.

Baca Juga: Transaksi Digital Tumbuh 28,69%, BI Tegaskan Tak Gantikan Uang Kartal "Artinya, sekitar 16% dari total belanja negara sudah digunakan hanya untuk pembayaran bunga," jelasnya.

Karena itu, menurut Irman, isu utamanya bukan lagi seberapa besar APBN, tetapi seberapa besar fiscal multiplier dari setiap rupiah tambahan belanja.

"Kalau peningkatan belanja lebih banyak masuk ke belanja rutin dan kewajiban, sementara ruang untuk belanja modal menyempit, kemampuan APBN untuk secara langsung menambah productive capacity melalui infrastruktur, konektivitas maupun investasi publik menjadi lebih terbatas," katanya.

Pertumbuhan Tak Cukup Ditopang Konsumsi

Dampaknya terhadap pertumbuhan juga perlu dibedakan antara jangka pendek dan jangka menengah. Belanja pegawai, subsidi dan perlindungan sosial tetap memiliki multiplier terhadap konsumsi dan dapat berfungsi sebagai shock absorber, terutama ketika daya beli menghadapi tekanan.

"Bahkan secara keseluruhan pemerintah masih mengalokasikan sekitar Rp 550 triliun untuk perlindungan sosial pada 2027. Jadi saya tidak melihat dukungan terhadap konsumsi hilang sepenuhnya," ujar Irman.

Namun, untuk mencapai target pertumbuhan 6% pada 2027, tantangannya lebih besar. Pertumbuhan tidak cukup hanya ditopang konsumsi dan government spending, tetapi harus ada peningkatan investasi dan produktivitas.

Pemerintah sendiri menargetkan realisasi investasi sekitar Rp 2.322 triliun pada 2027, naik hampir 14% dari target 2026.

Dengan ruang belanja modal pemerintah yang lebih terbatas, konsekuensinya beban untuk menjadi mesin pertumbuhan semakin bergeser ke investasi swasta, BUMN/Danantara, dan foreign direct investment (FDI).

"Jadi pemerintah menurut saya masih memiliki ruang fiskal, tetapi discretionary fiscal space-nya semakin mahal dan semakin terbatas," kata Irman.

Menurutnya menambah defisit bukan solusi utama karena akan menambah kebutuhan penerbitan utang dan pada akhirnya kembali meningkatkan beban bunga.

"Yang lebih penting adalah memperbaiki komposisi dengan memastikan subsidi dan bansos semakin tepat sasaran, menekan belanja dengan multiplier rendah, dan menjaga sebanyak mungkin ruang untuk infrastruktur, human capital, serta belanja yang dapat meng-crowd in investasi swasta," ujarnya.

Utang Luar Negeri BI Melonjak karena Asing Masuk SRBI, Cadev Tergerus Intervensi

Kamis, 20 Agustus 2026 15:34 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-luar-negeri-bi-melonjak-karena-asing-masuk-srbi-cadev-tergerus-intervensi>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Bank Indonesia (BI) melonjak cukup tajam hingga Juni 2026, tetapi di saat yang sama cadangan devisa (cadev) Indonesia justru terus menurun.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, posisi ULN BI meningkat dari US\$ 27,26 miliar pada Maret menjadi US\$ 30,11 miliar pada April, US\$ 31,15 miliar pada Mei, kemudian melonjak menjadi US\$ 42,46 miliar pada Juni 2026.

Artinya, dalam satu bulan saja ULN BI bertambah sekitar US\$ 11,31 miliar atau 36,3%. Jika dibandingkan dengan Juni 2025, posisi ULN BI tersebut meningkat sekitar 50%.

Menurut Josua, kenaikan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kewajiban BI kepada pihak bukan penduduk, khususnya seiring dengan bertambahnya kepemilikan investor asing pada instrumen BI seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dengan kata lain, kenaikan ULN BI tidak bisa disamakan dengan BI mendapatkan pinjaman tunai sebesar US\$ 42,46 miliar dari luar negeri.

"Ketika pihak asing membeli surat berharga yang diterbitkan BI, kewajiban BI kepada pemegang asing tersebut secara statistik masuk sebagai ULN," ujar Josua kepada Kontan, Kamis (20/8/2026).

Adapun dari total ULN BI sebesar US\$ 42,46 miliar pada Juni, sekitar US\$ 16,38 miliar berupa surat utang, US\$ 17,35 miliar berupa kas dan simpanan milik bukan penduduk, serta sekitar US\$ 8,73 miliar merupakan alokasi Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights/SDR) International Monetary Fund (IMF).

Struktur tersebut menunjukkan bahwa lonjakan ULN BI lebih banyak berkaitan dengan operasi moneter dan arus dana asing ke instrumen BI, bukan pinjaman konvensional untuk membiayai belanja pemerintah.

Di sisi lain, cadangan devisa justru bergerak turun. Cadangan devisa turun dari US\$ 156,47 miliar pada akhir 2025 menjadi US\$ 148,15 miliar pada akhir kuartal I-2026 dan sekitar US\$ 145,6 miliar pada akhir Juni. Pada Juli 2026, cadangan devisa kembali turun tipis menjadi US\$ 145,3 miliar.

Josua menjelaskan, masuknya dana asing ke SRBI memang memberikan tambahan likuiditas dan membantu meredam tekanan terhadap rupiah. Namun, arus tersebut bukan satu-satunya faktor yang menentukan naik turunnya cadangan devisa.

Pada saat yang sama, BI harus menyediakan valuta asing untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembayaran ULN pemerintah, transaksi eksternal, serta intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah.

"Arus masuk asing ke SRBI memang membantu menahan tekanan, tetapi sebagian manfaat tersebut pada periode yang sama dapat tertutup oleh kebutuhan intervensi, pembayaran kewajiban luar negeri, maupun tekanan neraca pembayaran," jelas Josua.

Dengan demikian, kenaikan ULN BI tidak otomatis membuat cadangan devisa naik dengan nilai yang sama. Sebagian dana asing yang masuk melalui instrumen BI dapat berfungsi sebagai penyangga, tetapi pada periode yang sama cadangan devisa dapat berkurang karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan valuta asing lainnya.

Lebih lanjut, Josua mengatakan, kondisi tersebut akan lebih terlihat jika melihat aktiva luar negeri bersih BI, bukan hanya posisi cadangan devisa.

Tagihan BI kepada pihak bukan penduduk meningkat dari Rp 2.841,7 triliun pada Mei menjadi Rp 2.993 triliun pada Juni. Namun, kewajiban BI kepada pihak bukan penduduk melonjak lebih cepat, dari Rp 803,6 triliun menjadi Rp 1.142,6 triliun.

Akibatnya, aktiva luar negeri bersih BI turun dari sekitar Rp 2.038 triliun menjadi Rp 1.850,4 triliun hanya dalam satu bulan.

"Cadangan devisa keseluruhan masih besar, tetapi penyangga eksternal bersih melemah karena kewajiban luar negeri naik lebih cepat daripada aset luar negeri," kata Josua.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah struktur ULN BI. Dari US\$ 42,46 miliar ULN BI pada Juni, sekitar US\$ 33,73 miliar atau 79,4% merupakan kewajiban jangka pendek.

Menurut Josua, tingginya porsi jangka pendek tersebut berkaitan dengan karakter kepemilikan asing pada SRBI serta kas dan simpanan pihak bukan penduduk yang relatif mudah bergerak.

Dalam kondisi normal, arus dana tersebut membantu stabilitas rupiah. Namun, apabila sentimen global berubah dan investor asing menarik dananya secara bersamaan, tekanan dapat muncul dari dua sisi, yakni pelemahan rupiah dan meningkatnya kebutuhan terhadap cadangan devisa.

Meski demikian, Josua menilai kondisi tersebut belum menunjukkan persoalan serius dari sisi kecukupan cadangan devisa. Posisi cadev US\$145,3 miliar pada Juli masih setara sekitar 5,5 bulan impor dan 5,3 bulan impor sekaligus pembayaran ULN pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Karena itu, menurutnya yang perlu dicermati bukan semata-mata besarnya ULN BI, melainkan mengapa ULN tersebut meningkat, bagaimana komposisinya, serta apakah kenaikan kewajiban luar negeri berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan aset luar negeri.

Dalam jangka panjang, Josua menilai Indonesia tetap perlu memperkuat sumber devisa yang lebih berkelanjutan melalui devisa hasil ekspor, investasi langsung, penguatan ekspor manufaktur dan hilirisasi, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, serta perbaikan neraca transaksi berjalan.

"Sumber devisa yang lebih sehat harus datang dari peningkatan devisa hasil ekspor yang bertahan di dalam negeri, investasi langsung yang berjangka panjang, penguatan ekspor manufaktur dan hilirisasi, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, serta perbaikan neraca transaksi berjalan," jelasnya.

BI Tahan Suku Bunga 5,75%, Risiko Kenaikan BI Rate Masih Mengintai

Kamis, 20 Agustus 2026 14:35 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tahan-bunga-575-risiko-kenaikan-suku-bunga-masih-mengintai>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) kemarin mempertahankan suku bunga acuan BI rate di level 5,75% pada Agustus 2026. Meski rupiah menguat dan inflasi melandai, ruang pengetatan kebijakan moneter masih terbuka jika tekanan eksternal dan risiko inflasi kembali meningkat.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Agustus 2026. BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan lending facility 6,50%.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan, keputusan mempertahankan suku bunga sejalan dengan upaya menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi nilai tukar, rupiah menunjukkan penguatan. BI mencatat rupiah berada di level Rp17.855 per dolar AS pada 18 Agustus 2026, atau menguat 0,78% dibandingkan posisi akhir Juli.

BI memperkirakan rupiah tetap stabil ke depan seiring penguatan respons kebijakan stabilisasi yang dilakukan bank sentral.

Di sisi lain, tekanan inflasi juga mulai mereda. Inflasi Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan, turun dari 3,34% pada Juni.

Namun, BI tetap mewaspadaai potensi tekanan inflasi ke depan. Deputy Gubernur BI Ricky P Gozali mengatakan risiko El Nino perlu diantisipasi karena diperkirakan menguat hingga Oktober 2026, khususnya di kawasan timur Indonesia. Tekanan biaya produksi juga menjadi perhatian.

"Risiko El Nino dan tekanan biaya produksi perlu diwaspadai," ujar Ricky.

Untuk mengantisipasinya, BI akan memperkuat pengendalian inflasi melalui ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Sejumlah komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah menjadi perhatian utama.

Meski demikian, arah suku bunga hingga akhir tahun masih menjadi perdebatan. Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan BI akan mempertahankan BI rate di 5,75% hingga akhir 2026.

Josua menilai pengetatan tambahan masih mungkin dilakukan jika kondisi global maupun domestik memburuk secara signifikan.

Sementara itu, Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz melihat ruang pengetatan masih terbuka lebih lebar. Ia memproyeksikan BI rate dapat mencapai 6,25% pada akhir tahun, atau naik 50 basis poin dari level saat ini.

Namun, proyeksi tersebut sangat bergantung pada perkembangan tekanan eksternal. Jika tekanan terhadap rupiah dan inflasi meningkat, BI berpotensi kembali mengetatkan kebijakan moneter.

Dengan demikian, meski kondisi saat ini memberi ruang bagi BI untuk menahan bunga, risiko kenaikan suku bunga belum sepenuhnya hilang.

Pergerakan rupiah, kondisi global, serta dampak El Nino akan menjadi faktor penting yang menentukan arah kebijakan BI dalam beberapa bulan ke depan.

Utang Luar Negeri BI Melonjak, Namun Cadangan Devisa Menyusut, Ini Penyebabnya

Kamis, 20 Agustus 2026 14:27 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-luar-negeri-bi-melonjak-namun-cadangan-devisa-menyusut-ini-penyebabnya>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peningkatan utang luar negeri (ULN) Bank Indonesia (BI) yang cukup signifikan sepanjang semester I-2026 perlu dicermati, terutama karena terjadi bersamaan dengan penurunan cadangan devisa (cadev).

ULN BI meningkat sekitar US\$17 miliar dari Januari hingga Juni 2026, yakni dari US\$ 25,5 miliar menjadi US\$ 42,5 miliar. Pada periode yang sama, cadangan devisa turun hampir US\$ 9 miliar, dari US\$ 154,6 miliar menjadi US\$ 145,6 miliar.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai, peningkatan ULN BI sejauh ini lebih berperan sebagai shock absorber yang membantu menahan tekanan terhadap rupiah sekaligus membatasi penurunan cadangan devisa. Meski demikian, kenaikan kewajiban tersebut belum cukup untuk membangun kembali penyangga cadangan.

"Tanpa kenaikan tersebut, tekanan terhadap rupiah ataupun cadangan devisa kemungkinan lebih besar," ujar Faiz kepada Kontan, Kamis (20/8/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan ULN BI juga tidak berarti bank sentral meminjam US\$ 17 miliar dan seluruh dana tersebut kemudian digunakan untuk intervensi pasar valuta asing.

Pasalnya, komposisi ULN bank sentral perlu diperhatikan. Kewajiban BI kepada nonresiden juga mencakup kepemilikan asing pada instrumen rupiah, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dengan demikian, sebagian kenaikan ULN BI merupakan konsekuensi dari masuknya arus modal portofolio asing ke instrumen BI, bukan semata-mata pinjaman valuta asing konvensional.

Menurut Faiz, kondisi yang lebih menarik justru terlihat dari belum optimalnya inflow tersebut dalam mendorong akumulasi cadangan devisa untuk menutup kebutuhan valas domestik.

Pada kuartal II-2026, investasi portofolio mencatat net inflow sekitar US\$8,5 miliar, terutama ke Surat Berharga Negara (SBN) dan SRBI. Namun, cadangan devisa dari akhir Maret hingga Juni 2026 justru turun sekitar US\$2,6 miliar.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pasokan valuta asing yang berasal dari arus modal portofolio tengah berhadapan dengan kebutuhan valas yang juga besar. Kebutuhan tersebut antara lain berasal dari pembayaran ULN pemerintah, kebutuhan valas domestik, serta operasi stabilisasi rupiah oleh BI.

"Jadi tidak serta merta untuk intervensi stabilisasi rupiah saja," jelasnya.

Meski demikian, Faiz menilai kondisi cadangan devisa saat ini belum mengkhawatirkan dari sisi kecukupan. Pada Juli 2026, posisi cadangan devisa sebesar US\$ 145,3 miliar masih setara dengan sekitar 5,5 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan internasional.

Namun, arah perubahannya tetap perlu diperhatikan. Jika cadangan devisa terus menurun sementara kewajiban BI kepada nonresiden, khususnya yang berjangka pendek, terus meningkat, struktur external buffer Indonesia akan menjadi lebih sensitif terhadap risiko pembalikan arus modal (sudden reversal).

Karena itu, ia menilai tantangan Indonesia ke depan bukan sekadar menarik lebih banyak dana portofolio asing melalui imbal hasil yang tinggi.

Menurutnya, Indonesia perlu memperbesar sumber devisa yang lebih berkelanjutan melalui investasi langsung asing (FDI), ekspor, devisa hasil ekspor (DHE), serta perbaikan transaksi berjalan (current account).

"Portofolio inflows dapat membeli waktu dan membantu stabilisasi, tetapi tidak bisa terus menjadi substitusi bagi penguatan fundamental pasokan devisa," pungkasnya.

Atasi Kemiskinan Lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Terapkan Metode PBL di Desa Kepyar

Kamis, 20 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/atasi-kemiskinan-lewat-pendidikan-pemprov-jateng-terapkan-metode-pbl-di-desa-kepyar/>

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan Desa Kepyar, Kabupaten Wonogiri, sebagai proyek percontohan Project Based Learning (PBL) dalam pengentasan kemiskinan.

Program yang dijalankan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jateng itu mengandalkan kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan potensi desa.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, program tersebut melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha milik daerah (BUMD), perangkat daerah, dan masyarakat.

“Harapannya, desa-desa itu bisa naik kelas, tidak miskin lagi, dan mampu bersaing dengan desa lain,” kata Luthfi, di Semarang, Kamis (20/8/2026).

Menurut dia, pendidikan dasar memunyai peran penting dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pengentasan kemiskinan itu basisnya adalah layanan dasar, yaitu pendidikan. Saya berharap terobosan kreatif ini bisa mereduksi jumlah desa termiskin di tempat kita,” ujarnya.

Sebagai informasi, Desa Kepyar merupakan salah satu lokus Program Desa Dampingan Pemerintah Provinsi Jateng. Desa tersebut memiliki jumlah penduduk sekitar 4.400 orang. Sebagian masyarakat setempat masih menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian, dan bekerja sebagai buruh tani.

Selain penguatan ekonomi, program tersebut menyasar persoalan pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, rumah tidak layak huni, dan sanitasi. Literasi serta inklusi keuangan masyarakat, juga menjadi bagian dari pendampingan.

Desa Kepyar memiliki sekitar 596 hektare lahan pertanian, delapan kelompok tani, 12 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta 15 pedagang mikro. Berbagai potensi tersebut akan dikembangkan untuk memperluas sumber penghasilan masyarakat.

Potensi wisata di desa itu juga cukup beragam, mulai dari agrowisata semangka dan melon, river tubing, Air Terjun Sanginan, hingga Watu Lumbung. Pengembangannya diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, sekaligus memperkuat usaha warga.

Melalui PBL, sektor pertanian akan diperkuat, UMKM didampingi, dan potensi wisata dibantu agar berkembang. Penanganan kemiskinan dengan demikian tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga peningkatan kapasitas dan akses usaha masyarakat.

“Tentu perlu kebersamaan antara universitas, masyarakat, BUMD, dan dinas terkait untuk ikut turun, sehingga masyarakat lebih berdaya dan tidak kembali miskin,” kata Luthfi.

Pihaknya berharap, pola pendampingan tersebut memberikan hasil nyata dan berkelanjutan. Apabila berhasil diterapkan di Desa Kepyar, program itu dapat dikembangkan sebagai model pengentasan kemiskinan di desa-desa lain di Jawa Tengah. (Humas Jateng)*ul

Terbuka bagi Penyandang Disabilitas, “Job Fair” Hari Jadi Jateng Sediakan 4.817 Lowongan Pekerjaan

Kamis, 20 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/terbuka-bagi-penyandang-disabilitas-job-fair-hari-jadi-jateng-sediakan-4-817-lowongan-pekerjaan/>

SEMARANG — Sebanyak 4.817 lowongan kerja tersedia dalam gelaran bursa kerja (Job Fair) dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 20-21 Agustus 2026 itu nampak dipadati pelamar kerja sejak Kamis (20/8/2026). Sebagian membawa berkas lamaran, sementara yang lain mencari informasi perusahaan dan lowongan melalui telepon seluler. Setidaknya, 5.800 pencari kerja telah mendaftar melalui aplikasi milik Disnakertrans Jawa Tengah.

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan, job fair secara tatap muka tetap diminati meskipun informasi lowongan dapat diakses secara daring melalui platform Ayo Kerjo selama 24 jam.

“Berdasarkan pengalaman selama ini, job fair yang konvensional atau offline seperti ini masih banyak diminati. Mereka bisa bertemu langsung dengan pihak perusahaan, mendalami kondisi kerjanya seperti apa, jabatannya seperti apa, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sebanyak 40 perusahaan menempati stan yang tersedia dalam kegiatan tersebut. PT Kawasan Industri Kendal juga hadir dengan membawa delapan perusahaan, sehingga total perusahaan yang membuka kesempatan kerja mencapai 48.

Lowongan yang ditawarkan berasal dari berbagai sektor, mulai dari manufaktur, agrikultur dan alat berat, industri makanan dan jamu, kesehatan dan farmasi, keuangan, pariwisata dan perhotelan, hingga ritel.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, job fair menjadi jembatan antara kebutuhan perusahaan dan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Menurut dia, kegiatan tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja sesuai kebutuhan, sedangkan pencari kerja mempunyai akses lebih luas terhadap lowongan yang tersedia.

“Di satu sisi, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja profesional. Di sisi lain, masyarakat bisa tertampung dari mana pun asalnya. Namun, yang terpenting adalah profesional,” ujarnya.

Luthfi menilai, peluang kerja di Jawa Tengah masih terbuka lebar. Namun, kompetensi pencari kerja harus terus ditingkatkan, agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Job fair tersebut juga semakin inklusif, karena membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas. Sejumlah lowongan telah dikurasi, dan secara khusus dapat dilamar oleh pencari kerja disabilitas.

Salah seorang penyandang tuna rungu, Sifa mengaku, datang dari Jawa Barat setelah mengetahui informasi job fair melalui Instagram. Dalam kegiatan itu, dia telah menyerahkan berkas lamaran kepada tiga perusahaan.

“Saya merasa bahagia. Acara seperti ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman disabilitas,” kata Sifa.

Dia menilai, pelayanan yang diberikan kepada peserta disabilitas sudah baik. Sifa berharap semakin banyak perusahaan membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Saya berharap acara ini bisa mendukung teman-teman disabilitas, serta memberikan lapangan pekerjaan dan kesempatan bagi mereka,” ujarnya.

Peserta lainnya, Vivi, mengaku baru kali pertama mengikuti job fair. Warga Semarang itu sempat mengalami kendala saat check-in, tetapi kemudian mendapat pendampingan dari petugas hingga dapat memasuki area pameran.

“Acara ini membantu saya mencari kerja. Kalau mencari sendiri agak susah. Karena lowongannya banyak, saya jadi lebih semangat untuk mendaftar. Walaupun nanti belum tentu lolos, tetap semangat,” kata Vivi.

Sementara itu, perwakilan PT JS Corp, Ika menjelaskan, perusahaannya yang bergerak di bidang manufaktur di Boyolali ini, membuka sekitar 300 lowongan untuk operator sewing. Perusahaan tersebut juga mencari pekerja untuk sejumlah posisi staf, mekanik, foreman, quality control, dan assembly.

“Ini pertama kali kami ikut dan ternyata ramai. Kalau posisi staf yang mensyaratkan pendidikan S1, peminatnya lumayan banyak,” kata Ika.

Pihak PT JS Corp juga membuka sejumlah posisi bagi penyandang disabilitas. Selain melalui job fair, pelamar dapat mengikuti walk-in interview di pabrik setiap hari pada pukul 07.00-09.00 WIB.

Pemprov Jawa Tengah berharap pembukaan kesempatan kerja dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah mencapai 22,33 juta orang, atau bertambah sekitar 455 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi investasi Jawa Tengah pada semester pertama 2026 mencapai Rp59,94 triliun, dan menyerap 213.217 tenaga kerja. Investasi yang masuk diharapkan terus memberikan dampak terhadap pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Humas Jateng)*ul

Produksi Garam Melimpah, Harga di Rembang Anjlok hingga Rp650 per Kilogram

Kamis, 20 Agustus 2026 21:27 WIB

Rubadi

<https://www.rmjawatengah.id/produksi-garam-melimpah-harga-di-rembang-anjlok-hingga-rp650-per-kilogram>

Produksi garam di Rembang meningkat di tengah kemarau panjang. Namun, harga di tingkat petani justru anjlok hingga Rp650 per kilogram.

Cuaca terik yang melanda Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sejak Juni 2026 mempercepat proses kristalisasi garam. Kondisi ini membuat petani dapat memproduksi garam lebih cepat dengan hasil yang dinilai lebih bagus.

Sami Teguh, petani garam asal Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, mengatakan kekeringan membuat air laut lebih cepat tua saat dipanaskan. Proses kristalisasi pun berlangsung lebih cepat dibandingkan kondisi cuaca normal.

"Selain itu, hasil produksi lebih bagus karena air cepat tua saat dipanaskan, proses kristalisasi juga lebih cepat," kata Sami, Kamis sore, 20 Agustus 2026.

Namun, peningkatan produksi justru membuat harga garam di tingkat petani merosot. Saat ini harga garam berada di sekitar Rp700 per kilogram dan sempat menyentuh Rp650 per kilogram.

Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan musim sebelumnya yang berada di kisaran Rp1.700 per kilogram. Bahkan, harga terendah pada musim sebelumnya masih sekitar Rp1.100 per kilogram.

Sami mengatakan, satu petak lahan garam miliknya dapat menghasilkan sekitar setengah ton atau 500 kilogram dalam sekali panen sehari. Dengan harga Rp700 per kilogram, pendapatan kotor petani hanya sekitar Rp350 ribu sekali panen.

Pendapatan tersebut belum dikurangi biaya operasional dan potongan untuk tengkulak atau makelar. Kondisi ini membuat petani harus menghadapi tekanan meski produksi garam sedang meningkat.

Persoalan lain yang dihadapi petani adalah tingginya kebutuhan modal kerja. Salah satunya untuk membeli terpal geomembran berukuran 4 x 50 meter yang harganya mencapai Rp2,8 juta per gulung dan hanya cukup untuk satu petak meja garam atau mejanan.

Sami juga menyoroti penyaluran bantuan sarana dan prasarana dari dinas terkait, seperti terpal, alat angkut atau angkong, hingga bibit ikan. Menurut dia, bantuan tersebut belum seluruhnya dirasakan petani garam di Desa Gedongmulyo.

"Bantuan dari Dinas Perikanan itu sebenarnya ada, tapi saya pribadi tidak pernah dapat. Cara survei di lapangannya seperti apa kita tidak tahu. Biasanya yang dapat hanya orang-orang yang dekat dengan lingkaran serikat. Sementara petani asli yang posisinya jauh justru sering terlewat," ujar Sami.

Angka Kemiskinan Diklaim Turun dan Ekonomi Jateng Tumbuh, Potret Desa Kepyar Masih Bergantung Bansos

Kamis, 20 Agustus 2026 16:52 WIB

Penulis: Budi Susanto, Editor: Raka F Pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1263804/angka-kemiskinan-diklaim-turun-dan-ekonomi-jateng-tumbuh-potret-desa-kepyar-masih-bergantung-bansos>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Angka kemiskinan Jawa Tengah terus bergerak turun.

Ekonomi juga tumbuh.

Namun, di tingkat desa, cerita tentang kemiskinan belum selalu mengikuti grafik statistik.

Desa Kepyar, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, menjadi salah satu potret persoalan tersebut.

Desa yang sebelumnya masuk kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonogiri itu masih menghadapi persoalan besarnya jumlah penerima bantuan sosial.

Di sisi lain, Kepyar justru memiliki potensi wisata alam, pertanian dan UMKM yang belum sepenuhnya mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Kepala Desa Kepyar, Meirina Tripurnawarti, mengatakan kondisi kemiskinan ekstrem tersebut membuat jumlah penerima bantuan di desanya cukup besar.

“Dulu Desa Kepyar itu masuk salah satu kategori desa kemiskinan ekstrem se-Kabupaten Wonogiri. Jadi penerima bantuan paling banyak,” kata Meirina saat ditemui Tribun Jateng di Pemprov Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026).

Saat ini, kata dia, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kepyar masih berada di kisaran 600 keluarga.

Selain PKH, masih terdapat penerima bantuan pangan dan berbagai program bantuan lainnya.

“Untuk saat ini penerima bantuan kita di angka PKH di angka 600-an. Kemudian BPNT dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Angka tersebut menjadi persoalan yang tidak sederhana. Sebab, banyaknya penerima bantuan tidak otomatis berarti program pengentasan kemiskinan gagal.

Bantuan sosial memang dibutuhkan untuk menjaga keluarga rentan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Masalah muncul ketika bantuan belum diikuti dengan kemampuan ekonomi yang membuat keluarga penerima mampu bertahan secara mandiri.

Di sinilah Kepyar menghadapi pekerjaan rumah yang lebih besar yaitu bagaimana mengubah masyarakat yang selama ini menjadi penerima bantuan menjadi masyarakat yang memiliki sumber penghasilan berkelanjutan.

Potensi besar, tapi belum menjadi uang. Ironisnya, Kepyar bukan desa tanpa potensi.

Meirina menyebut wilayahnya memiliki sejumlah potensi wisata alam yang belum dikelola secara optimal.

Setidaknya terdapat empat lokasi yang dinilai memiliki peluang dikembangkan, yakni Watu Lumbang, Kayu Terjeranginan, pendakian Gunung Jumbri dan kawasan agrowisata.

“Potensi alamnya juga banyak. Hanya saja kami Desa Kepyar belum punya kemampuan untuk mengelola potensi yang ada di Desa Kepyar,” katanya.

Salah satu yang sedang disiapkan adalah agrowisata. Lokasinya dinilai strategis karena berada dekat sekolah dasar, masjid, KDMP, lapangan sepak bola dan kawasan persawahan.

Kawasan tersebut diharapkan bukan sekadar menjadi destinasi wisata, tetapi juga membuka aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat.

Persoalan serupa terjadi pada UMKM. Menurut Meirina, pelaku UMKM di Kepyar cukup banyak. Namun, produk yang sudah dibuat belum didukung kemampuan pemasaran yang memadai.

“UMKM banyak. Cuma kami hanya di pemasarannya saja. Potensinya banyak tapi tidak bisa memasarkan,” ujarnya.

Ia berujar persoalan klasik pengentasan kemiskinan di tingkat desa juga terjadi di mana potensi ekonomi tersedia, tetapi belum memiliki rantai nilai yang kuat.

Produk ada, tetapi pasar terbatas. Lahan ada, tetapi nilai tambah belum maksimal. Potensi wisata ada, tetapi belum dikelola menjadi sumber pendapatan.

Dengan kondisi seperti itu, bantuan sosial akhirnya masih menjadi salah satu penopang ekonomi rumah tangga.

Meirina mengatakan pemerintah desa berharap intervensi berbagai organisasi perangkat daerah dapat mengubah kondisi tersebut.

Pelatihan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan usaha yang benar-benar menghasilkan pendapatan.

“Harapannya nanti penerima bansos itu mandiri, punya usaha dan ekonominya meningkat sehingga bisa menyelesaikan masalah ekonomi dan berhenti menjadi penerima bantuan sosial,” kata Meirina.

Namun, tantangan tersebut tidak sesederhana memberikan pelatihan. Ketika ditanya mengapa masih ada warga yang tetap menjadi penerima bantuan meski berbagai program telah berjalan, Meirina menyinggung persoalan kesiapan masyarakat untuk berubah.

“Kalau dari identifikasi mungkin mentalnya. Tidak mau bagaimana, maunya masih menerima. Jadi tidak punya kemampuan untuk usaha juga,” ujarnya.

Kondisi Kepyar menjadi semakin menarik ketika diletakkan dalam konteks ekonomi Jawa Tengah.

BPS mencatat ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan. Nilai PDRB mencapai Rp511,99 triliun berdasarkan harga berlaku.

Pertumbuhan tersebut antara lain didorong sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 14,14 persen, sementara sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi 32,69 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kabar positif. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis membuat setiap keluarga memiliki peningkatan kesejahteraan yang sama.

Data kemiskinan terbaru yang dirilis BPS pada 2026 menunjukkan bahwa pada September 2025, persentase penduduk miskin Jawa Tengah berada di angka 9,39 persen. Jumlahnya sekitar 3,34 juta orang.

Kemiskinan perdesaan mencapai 9,87 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 8,99 persen.

Artinya, wilayah perdesaan masih menghadapi tantangan yang relatif lebih berat. Ketimpangan juga menjadi bagian dari persoalan.

BPS mencatat Gini Ratio Jawa Tengah pada September 2025 sebesar 0,350, turun dari 0,359 pada Maret 2025. Namun, angka ketimpangan di perdesaan tercatat 0,381, sementara perkotaan 0,296.

Penurunan kemiskinan dan ketimpangan secara agregat memang terjadi, tetapi kondisi masyarakat di setiap desa tidak otomatis berubah dalam kecepatan yang sama.

Bahkan, BPS mencatat porsi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah di Jawa Tengah pada September 2025 mencapai 20,02 persen. Di wilayah perdesaan angkanya 22,30 persen.

persoalan yang dihadapi Kepyar bukan anomali yang berdiri sendiri. Desa tersebut merupakan bagian dari tantangan lebih besar dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah benar-benar menghasilkan mobilitas ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah.

Wonogiri juga menunjukkan dinamika ekonomi yang positif. Namun, tekanan biaya hidup tetap perlu diperhatikan. BPS mencatat inflasi tahunan Kabupaten Wonogiri pada Juli 2026 sebesar 2,68 persen.

Sebelumnya, pada Maret 2026, inflasi tahunan Wonogiri mencapai 3,95 persen. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran, termasuk makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, perumahan, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Bagi keluarga dengan pendapatan rendah, kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok dapat memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga berpendapatan tinggi.

Inilah mengapa penurunan angka kemiskinan harus dibaca bersama indikator lain seperti inflasi, ketimpangan, kesempatan kerja dan kemampuan masyarakat meningkatkan pendapatan.

- Jadi Laboratorium Pengentasan Kemiskinan

Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan pemerintah tidak ingin pendekatan penanganan kemiskinan hanya berorientasi pada pemberian bantuan.

Menurut dia, Desa Kepyar dipilih sebagai lokasi intervensi melalui kolaborasi antara Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Wonogiri, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi dan sejumlah pihak lainnya.

“Tidak ada Superman tapi ini super tim,” kata Uswatun.

Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, bukan hanya bantuan logistik.

Menurut Uswatun, selama ini intervensi kemiskinan sering dilakukan melalui bantuan logistik hingga kondisi masyarakat membaik. Namun, persoalannya muncul ketika intervensi berhenti.

“Apa yang terjadi setelah itu? Kembali lagi miskin ekstrem dan itu yang terjadi di Desa Kepyar,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut bahkan telah berlangsung bertahun-tahun. Kepyar disebut mengalami kondisi tersebut sejak 2012.

Karena itu, Pemprov Jawa Tengah mencoba menggunakan pendekatan berbeda dengan membangun jejaring dan kolaborasi.

Satu organisasi perangkat daerah diarahkan memiliki desa dampingan. Perguruan tinggi dilibatkan melalui pengabdian masyarakat dan penguatan keilmuan, sementara BPSDMD berfokus pada pengembangan sumber daya manusia.

“Kami memilih locus yang selalu sulit untuk diintervensi dan kita enggak bisa sendiri, maka kita membangun yang namanya jejaring, membangun yang namanya kolaborasi,” kata Uswatun.

Kepyar kemudian diarahkan menjadi pilot project yang diharapkan dapat menunjukkan bahwa desa dengan riwayat kemiskinan ekstrem dapat naik kelas.

Adapun Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Muhammad Taufiq, mengapresiasi pendekatan kolaboratif yang dilakukan di Kepyar.

Ia melihat program tersebut sebagai contoh bagaimana persoalan pembangunan dapat diatasi dengan melibatkan berbagai unsur.

“Desa Kepyar ini sebagai sebuah contoh konkret bagaimana budaya Jawa Tengah bisa memecahkan masalah pembangunan, yaitu dengan cara bergotong-royong, dengan cara melibatkan semua stakeholder,” kata Muhammad Taufiq.

Menurutnya, unsur yang dilibatkan tidak hanya pemerintah. Perguruan tinggi, badan usaha, Baznas, NGO dan lembaga lainnya juga dapat mengambil peran. (bud)

Dana Desa Dipangkas, Pemdes Lirik Sumber Pendapatan Lain

Kamis, 20 Agustus 2026 05:38 WIB

Penulis: Achiar M Permana, Editor: M Syofri Kurniawan

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1263743/dana-desa-dipangkas-pemdes-lirik-sumber-pendapatan-lain>

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemangkasan Dana Desa pada 2026 membuat banyak pemerintah desa harus kembali menghitung kemampuan anggaran mereka.

Desa-desa yang biasanya menerima dana Rp 1 miliar lebih, kini hanya mendapatkan sekitar Rp 300 jutaan.

Desa Patakbanteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, juga merasakan dampak pemangkasan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Desa Patakbanteng, Mashud menyampaikan, berkurangnya Dana Desa tetap membuat ruang gerak pemerintah desa menjadi terbatas, terutama untuk pembangunan.

"Jangan bermimpi untuk membangun kalau cuma uang segitu (Rp 300 jutaan—Red)," kata Mashud kepada Tribun Jateng, Selasa (18/8).

Oleh karena itu, pengembangan sumber pendapatan desa menjadi pilihan yang terus dikejar.

Mashud juga mengaitkan perkembangan ekonomi desa dengan penurunan angka kemiskinan.

"Kemiskinan yang dulu 25 persen, sekarang kita kelola dengan baik menjadi di bawah 2 persen, bahkan sudah nol koma," kata Mashud.

Bagi pemerintah desa, pengembangan pariwisata tidak semata bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades).

Lebih jauh, sektor tersebut diharapkan membuka lapangan pekerjaan dan memperbesar pendapatan masyarakat.

Bagi Patakanteng, pemangkasan Dana Desa menjadi momentum untuk memperkuat sumber pendapatan sendiri.

Mashud mengatakan, desa tidak boleh selamanya mengandalkan transfer dari pemerintah.

"Jadi kita hidup ini belajar mandiri," katanya.

Mashud menyebut dana yang tersedia untuk desa saat ini sekitar Rp 300 juta.

Namun, Patakanteng merasa memiliki modal ekonomi lain karena sudah mempunyai sumber pendapatan dari aktivitas wisata.

"Kalau lusa tidak keluar, kami sudah siap, karena Pades kami sudah mencukupi," ujarnya.

Desa Patakanteng yang menjadi salah satu pintu favorit pendakian Gunung Prau itu tengah berupaya mengurangi ketergantungan pada Dana Desa dengan memperkuat pendapatan dari sektor pariwisata.

Menurut Mashud, sejak pandemi Covid-19, sektor pariwisata dan UMKM menjadi bidang yang terus didorong.

Patakanteng memiliki sekitar 3.000 penduduk.

Sebelumnya sebagian besar masyarakat Patakanteng bergantung pada sektor pertanian.

Pemerintah Desa kemudian mendorong sebagian aktivitas ekonomi masuk ke sektor pariwisata.

Warga tidak hanya terlibat sebagai pengelola destinasi, tetapi juga mendapatkan penghasilan dari berbagai aktivitas yang mengikuti geliat kunjungan wisatawan, mulai dari jasa parkir, ojek, porter pendakian hingga jeep adventure.

Ada pula warga yang membuka homestay maupun menyediakan jasa untuk kebutuhan wisatawan.

Salah satu indikator yang kini menjadi andalan Patakanteng adalah pendapatan dari sektor wisata yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Mashud menyebut, pendapatan dari aktivitas pendakian Gunung Prau yang masuk pada 2024 sekitar Rp 245 juta.

Angka tersebut kemudian meningkat pada 2025 menjadi sekitar Rp 371 juta.

Kenaikan itu berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan.

Berdasarkan data Basecamp Patakanteng jumlah pengunjung pada 2024 berada di kisaran 60.000 orang.

Kemudian di 2025, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 120.000 pengunjung.

Sementara sepanjang 2026, kunjungan masih berlangsung dengan rata-rata sekitar 20.000 orang per bulan.

Pada momentum libur panjang, jumlah pendaki yang melewati jalur Patakanteng bahkan disebut dapat mencapai lebih dari 800 orang dalam satu hari.

Ia menilai, sektor pariwisata masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.

Selain Gunung Prau, desa ingin mendorong potensi wisata lain, termasuk wisata kebun carica, sehingga wisatawan memiliki lebih banyak pilihan ketika datang ke Patakanteng.

Dengan jumlah wisatawan yang terus bertumbuh, pemerintah desa berharap, Pades dapat semakin besar.

Pemangkasan Dana Desa juga terasa bagi Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.

Alokasi dana kelurahan di Salatiga disebut mengalami efisiensi pascapandemi Covid-19.

Lurah Noborejo, Megadharma Nurani Aditirta mengatakan, dana kelurahan bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan.

"Sejak pasca-Covid, alokasi dana kelurahan mengalami efisiensi," kata Arma, Rabu (19/8/2026).

Menurut Arma, perencanaan dana kelurahan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan yang sebelumnya diadakan rembug warga tingkat RW.

Dalam proses tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan perkiraan besaran dana yang akan dialokasikan dengan mempertimbangkan sejumlah variabel.

Ia menambahkan, keterbatasan dana kelurahan membuat pembangunan di Noborejo tidak hanya mengandalkan satu sumber anggaran.

Sejumlah pembangunan juga mendapatkan intervensi dari DPA organisasi perangkat daerah (OPD) serta pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Salatiga.

Selain itu, pada tahun ini, terdapat dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari PT Djarum yang diarahkan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).

"Untuk pembangunan di Noborejo selain dana kelurahan juga ada intervensi dari DPA OPD, pokok-pokok pikiran anggota DPRD kota Salatiga selain itu tahun ini ada CSR dari PT Djarum yang khususnya menangani rumah tidak layak huni," katanya.

Di tengah efisiensi anggaran tersebut, pemerintah kelurahan juga terus berkomunikasi dengan warga dan pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan.

Keterbatasan anggaran justru mendorong munculnya partisipasi masyarakat.

Sejumlah RW turut mendukung pembangunan melalui swadaya dan gotong royong. (Imah Masitoh/Eka Yulianti Fajlin)